



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	xii
Bab I Pendahuluan	11
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	18
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target	
Kinerja APBD	21
2.1 Ekonomi Makro	21
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
2.1.3 Inflasi.....	23
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	24
2.1.5 Kemiskinan.....	26
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM).....	27
2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan.....	28
2.2 Kebijakan Keuangan.....	32
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	32
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	34
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	37
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	38
2.3.1 Urusan Wajib.....	39
2.3.2 Urusan Pilihan.....	39
2.3.3 Urusan Penunjang.....	39
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	40
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	40
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan.....	42
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah.....	50
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang	
Telah Ditetapkan	55
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan.....	55
3.2.2 Pengelolaan Belanja.....	56
Bab IV Kebijakan Akutansi	59
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah....	59
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	59
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan...	60
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang	
Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	61
4.5 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	71
Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan	72
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan	
Keuangan...	72
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	72
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
(LPSAL)	128
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	133



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

5.1.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)..... ..	221
5.1.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.... ..	263
5.1.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	267
5.2	Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas	272
5.2.1	Penerapana Basis Akrua! dan Basis Kas Pada Pendapatan.... ..	272
5.2.2	Penerapana Basis Akrua! dan Basis Kas Pada Neraca dan Kas Pada Penerimaan Pembiayaan	280
5.2.3	Penerapan Basis Akrua! Pada Beban dan Bais Kas Pada Belanja dan Transfer	280
5.2.4	Penerapan Basis Akrua! Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan	294
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah..	295
6.1	Kondisi Umum Daerah	295
6.1.1	Kondisi Geografis Dan Demografis	297
6.1.2	Penggunaan Lahan	297
6.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah.....	298
6.1.4	Kondisi Demografis.....	302
6.2	Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok	305
6.3	Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan..	308
6.3.1	Non Litigasi	308
6.3.2	Peradilan Tata Usaha Negara.....	308
6.4	Catatan Penting Lainnya Terkait Pandemi Covid-19.....	309
Bab VII	Penutup	316



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
Lampiran I	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah ,Organisasi,Program dan Kegiatan
Lampiran II	Konversi Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Barang Diserahkan Masyarakat/Fihak Ketiga ke Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)
Lampiran III	Rincian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga
Lampiran IV	Rincian Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 Per Obyek Pajak
Lampiran V	Rincian Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Lampiran VI	Rincian Penggunaan Rekening Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2020
Lampiran VII	Laporan Penyaluran Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Lampiran VIII	Rekapitulasi Sisa Kas di Bendahara Dana BOS
Lampiran IX	Daftar Mutasi Aset Extracomtable Tahun Anggaran 2020
Lampiran X	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Aset Extracomtable Tahun Anggaran 2020
Lampiran XI	Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
Lampiran XII	Laporan Aset Tetap Renovasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
Lampiran XIII	Laporan Kinerja Bidang Kesehatan dan/atau Ekonomi Sosial untuk Pencegahan Covid-19



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019.....	22
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019.....	22
Tabel 3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019	22
Tabel 4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pacitan 2016-2019.....	25
Tabel 5	Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2019	27
Tabel 6	Tabel Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016 s/d 2019	28
Tabel 7	Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.....	33
Tabel 8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	37
Tabel 9	Realisasi /Proyekai /Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020	38
Tabel 10	Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 dan 2020	45
Tabel 11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	46
Tabel 12	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020	47
Tabel 13	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020	47
Tabel 14	Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	48
Tabel 15	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020	48
Tabel 16	Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020.....	54
Tabel 17	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.....	54
Tabel 18	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	72
Tabel 19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	73
Tabel 20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	74
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	79
Tabel 22	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2020 dan Tahun 2019	79
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 dan Tahun 2019	80
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	81



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	81
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	83
Tabel 27	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	83
Tabel 28	Anggaran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	84
Tabel 29	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	84
Tabel 30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	85
Tabel 31	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.....	85
Tabel 32	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	86
Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	87
Tabel 34	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	87
Tabel 35	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	90
Tabel 36	Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	93
Tabel 37	Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	95
Tabel 38	Bagi Transfer Pemerintah Propinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	99
Tabel 39	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2020	100
Tabel 40	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	100
Tabel 41	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	102
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	103
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan Tahun 2019	103
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019	104
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	104
Tabel 46	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	106
Tabel 47	Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020	106
Tabel 48	Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020.....	108



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 49	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019	109
Tabel 50	Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020.....	110
Tabel 51	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019	111
Tabel 52	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan Tahun 2019	112
Tabel 53	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019	112
Tabel 54	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan Tahun 2019	113
Tabel 55	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019	115
Tabel 56	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019	116
Tabel 57	Rincian Belanja Tidak Terduga.....	116
Tabel 58	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019	121
Tabel 59	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019	121
Tabel 60	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 dan Tahun 2019....	122
Tabel 61	Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2019	123
Tabel 62	Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2020 dan Tahun 2019 ...	125
Tabel 63	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	125
Tabel 64	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2019	125
Tabel 65	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2019	126
Tabel 66	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	127
Tabel 67	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 dan Tahun 2019	127
Tabel 68	Laporan Realisasi dan Sisa Kas Dana JKN FKTP 24 UPT Puskesmas	136
Tabel 69	Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Tahun 2020 Bantuan Operasional Sekolah.....	138
Tabel 70	Piutang Daerah Tahun 2020	141
Tabel 71	Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2020	141
Tabel 72	Piutang Pajak Daerah	141
Tabel 73	Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.....	143
Tabel 74	Piutang Retribusi	144
Tabel 75	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah.....	145



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 76	Piutang Pokok- dan Bunga - Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian).....	148
Tabel 77	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....	149
Tabel 78	Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019.....	151
Tabel 79	Rekapitulasi Penyisihan Piutang	151
Tabel 80	Rincian Per Obyek Penyisihan Piutang.....	152
Tabel 81	Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2020.....	158
Tabel 82	Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2020.....	159
Tabel 83	Daftar Obat Expired Date 2020.....	162
Tabel 84	Daftar Obat Expired Date 2020 (Alat Kontrasepsi)	162
Tabel 85	Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	163
Tabel 86	NRV Investasi Dana Bergulir.....	165
Tabel 87	Investasi Permanen.....	165
Tabel 88	Rincian Investasi Bank Jatim	166
Tabel 89	Investasi Permanen pada BPR Jatim	167
Tabel 90	Investasi Permanen pada PDAM.....	168
Tabel 91	Rincian Investasi PDAM.....	168
Tabel 92	Rincian Aset Tetap/Inventaris PDAU	169
Tabel 93	Mutasi Aset Tetap	170
Tabel 94	Mutasi Tanah.....	172
Tabel 95	Mutasi Tanah Per SKPD	172
Tabel 96	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	175
Tabel 97	Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD.....	175
Tabel 98	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	188
Tabel 99	Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD.....	188
Tabel 100	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	194
Tabel 101	Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Per SKPD.....	194
Tabel 102	Aset Tetap Lainnya	199
Tabel 103	Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD.....	199
Tabel 104	Konstruksi dalam Pengerjaan	203
Tabel 105	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020.....	203
Tabel 106	Akumulasi Penyusutan	205
Tabel 107	Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan.....	206
Tabel 108	Aset Lainnya.....	207
Tabel 109	Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga	209



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 110	Bangunan Guna Serah/Build OperatenTransfer (BOT)	211
Tabel 111	Aset Tidak Berwujud - Software.....	211
Tabel 112	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	214
Tabel 113	Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan.....	214
Tabel 114	Mutasi Aset Lain-lain 2020.....	215
Tabel 115	Kewajiban Jangka Pendek 2020.....	216
Tabel 116	Pendapatan Diterima Dimuka	216
Tabel 117	Utang Belanja	219
Tabel 118	Utang Belanja Jasa	219
Tabel 119	Utang Jangka Pendek Lainnya	220
Tabel 120	Rincian Pendapatan-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019	221
Tabel 121	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	222
Tabel 122	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	222
Tabel 123	Rincian Pajak Hotel Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	223
Tabel 124	Rincian Pajak Restoran Tahun 2020 dan Tahun 2019	223
Tabel 125	Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	223
Tabel 126	Pajak Reklame - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019	224
Tabel 127	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019	226
Tabel 128	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	227
Tabel 129	Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019	228
Tabel 130	Rincian Pendapatan Bunga - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	228
Tabel 131	Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	229
Tabel 132	Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 ...	229
Tabel 133	Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	230
Tabel 134	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019	230
Tabel 135	Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	231
Tabel 136	Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019	233
Tabel 137	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	233
Tabel 138	Rincian Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	234
Tabel 139	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	234
Tabel 140	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	235



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 141	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	236
Tabel 142	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019	236
Tabel 143	Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019	237
Tabel 144	Beban Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	240
Tabel 145	Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019	241
Tabel 146	Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	241
Tabel 147	Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019	242
Tabel 148	Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	243
Tabel 149	Rincian Uang Lembur Tahun 2020 dan Tahun 2019	243
Tabel 150	Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019	244
Tabel 151	Rincian Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	245
Tabel 152	Rincian Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2020 dan Tahun 2019	246
Tabel 153	Rincian Beban Makanan dan Minuman Tahun 2020 dan Tahun 2019	247
Tabel 154	Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020 dan Tahun 2019	247
Tabel 155	Rincian Belanja Pakaian Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	248
Tabel 156	Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	248
Tabel 157	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	248
Tabel 158	Beban Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019	249
Tabel 159	Beban Jasa Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019	250
Tabel 160	Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	251
Tabel 161	Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019	251
Tabel 162	Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	252
Tabel 163	Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	252
Tabel 164	Rincian Beban Jasa Konsultasi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	253
Tabel 165	Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	253
Tabel 166	Rincian Honorarium PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	254
Tabel 167	Rincian Honorarium Non PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	254
Tabel 168	Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019	255
Tabel 169	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	256



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 170	Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	256
Tabel 171	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	258
Tabel 172	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	259
Tabel 173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	259
Tabel 174	Beban Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019	260
Tabel 175	Beban Lain - Lain Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	261
Tabel 176	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	262
Tabel 177	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	263
Tabel 178	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	267
Tabel 179	Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO	272
Tabel 180	Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO.....	273
Tabel 181	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO.....	181
Tabel 182	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO	274
Tabel 183	Penjelasan Selisih Saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO.....	275
Tabel 184	Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO.....	276
Tabel 185	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO.....	276
Tabel 186	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LRA dan pada LO.....	277
Tabel 187	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan pad.....	278
Tabel 188	Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO	278
Tabel 189	Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO Tahun 2020	280
Tabel 190	Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2020.....	281
Tabel 191	Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban Bahan Pakai Habis pada LO Tahun 2020.....	281
Tabel 192	Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban Bahan/Material pada LO Tahun 2020	284
Tabel 193	Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa Tahun 2020.....	287
Tabel 194	Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor pada LRA dan Beban Jasa Kantor pada LO Tahun 2020.....	288



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 195 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada LO Tahun 2020	292
Tabel 196 pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan	295
Tabel 197 Luas Kawasan Pertanian.....	300
Tabel 198 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin 2014-2017	305
Tabel 199 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017	306
Tabel 200 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	307
Tabel 201 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018	308



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

GAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2019.....	21
Gambar 2	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019.....	24
Gambar 3	Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019.....	25
Gambar 4	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2019 Kabupaten Pacitan Atas.....	26
Gambar 5	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2019 ..	27
Gambar 6	Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2019.....	28
Gambar 7	Peta Administratif Kabupaten Pacitan	296
Gambar 8	Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017.....	306



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunaannya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 9);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
59. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2);
60. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 PP Nomor 18);
62. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 1);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
73. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
74. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
75. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pembayaran Tera/Tera Ulang;
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);
77. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
79. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 11);



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

80. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 39);
81. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
82. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 75);
83. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2020;
84. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 91);
85. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020;
86. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
88. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - 2.1.3 Inflasi
 - 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 2.1.5 Kemiskinan
- 2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- 2.1.7 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1 Urusan Wajib
 - 2.3.2 Urusan Pilihan
 - 2.3.3 Urusan Penunjang
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
 - 3.1.2 Pengelolaan Belanja
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
 - 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
 - 3.2.2 Pengelolaan Belanja
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaL atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
 - 5.2.1 Penerapan Basis AkruaL dan Basis Kas pada Pendapatan
 - 5.2.2 Penerapan Basis AkruaL dan Basis Kas pada Neraca dan Kas pada Penerimaan Pembiayaan
 - 5.2.3 Penerapan Basis AkruaL pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer
 - 5.2.4 Penerapan Basis AkruaL pada Neraca dan Basis Kas pada Pengeluaran Pembiayaan.
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 6.1 Kondisi Umum Daerah
 - 6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis
 - 6.1.2 Pengguna Lahan
 - 6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
 - 6.1.4 Kondisi Demografi
 - 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
 - 6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
 - 6.3.1 Peradilan Perdana
 - 6.3.2 Peradilan Tata usaha Negara
- Bab VII Penutup



III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

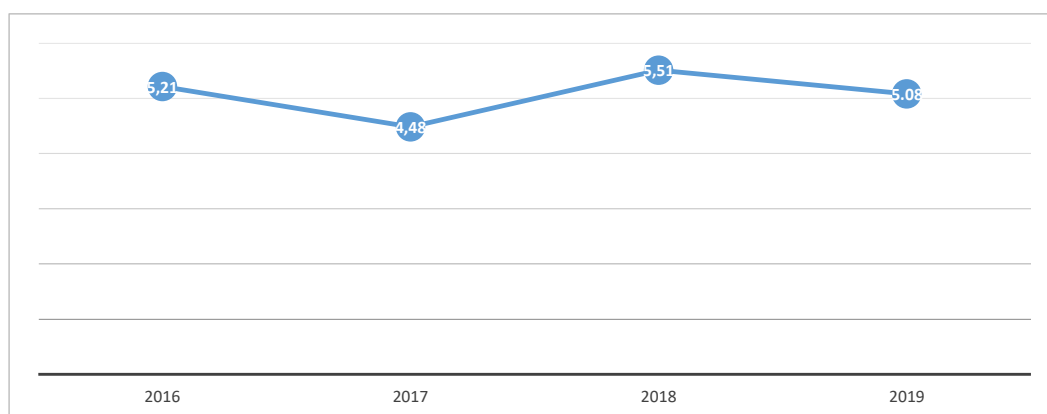
2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan Pola Pertumbuhan yang melambat mulai tahun 2016, dan mengalami perkembangan positif pada tahun 2018 mencapai angka 5,51% berlanjut pada tahun 2019 turun 0,43 digit pada posisi 5,08% hal ini sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik.Gambar.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2016 s/d 2019



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan perdagangan, yaitu sebesar 8,72 %. Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,10 %. Sementara tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami kenaikan yang dominan dapat digambarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,25	1,17	1,9	-0,1
B	Pertambangan dan Penggalian	4,03	5,63	4,34	2,36
C	Industri Pengolahan	5,23	5,7	7,87	5,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,21	4,39	4,84	6,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,5	6,44	5,4	5,79
F	Konstruksi	5,64	7,83	7,93	8,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,45	7,55	7	7,65
H	Transportasi dan Pergudangan	8,41	8,72	8,87	8,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	7,92	8,23	8,13
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	6,92	6,97	7,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,25	5,28	4,48	3,83
L	Real Estat	5,34	3,91	4,23	5,01
M,N	Jasa Perusahaan	6,18	5,53	6,34	6,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,32	2,22	4,16	3,39
P	Jasa Pendidikan	6,38	3,99	5,24	7,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	5,39	6,84	7,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,58	4,46	8,43	6,83
	Produk Domestik Regional Bruto	5,21	4,98	5,51	5,08

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pacitan tahun 2016 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB (Rp.Juta)	12.767,11	13.810,32	15.010,81	15.978,18
PDRB ADHK (Rp.Juta)	9.489,68	9.962,50	10.511,44	11.045,06

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, diolah

Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2016 s/d tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.800,48	3991,77	4218,85	4.314,94
B	Pertambangan dan Penggalian	733,60	791,03	877,33	919,87
C	Industri Pengolahan	834,85	909,10	1007,81	1.089,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,63	4,25	4,64	5,01



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.	11,37	12,32	13,12	13,74
F	Konstruksi	1.941,04	2.144,47	2.340,48	2.499,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.112,01	2.349,83	2.618,66	2.842,91
H	Transportasi dan Pergudangan	280,93	319,76	355,34	393,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,56	293,05	321,90	352,79
J	Informasi dan Komunikasi	690,31	751,99	805,69	879,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	253,27	276,92	297,11	310,85
L	Real Estat	192,24	204,96	223,89	240,80
M,N	Jasa Perusahaan	34,34	37,61	41,64	45,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	537,16	571,45	632,21	705,66
P	Jasa Pendidikan	619,58	661,38	706,60	769,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,31	126,64	136,99	149,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	342,44	363,81	408,56	444,46
	Produk Domestik Bruto	12 767,11	13 810,32	15 010,81	15 978,18

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mayoritas ditopang oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahan selain sektor lain yang secara pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang baik meskipun kontribusinya terhadap PDRB belum dominan.

Berdasarkan atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 yaitu dari sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pacitan dalam menopang perekonomian secara makro.

2.1.3 Inflasi

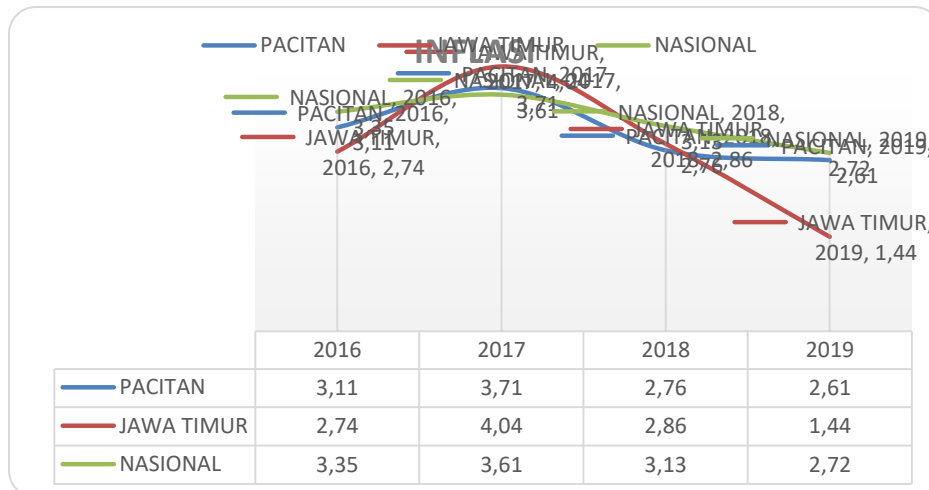
Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kabupaten Pacitan masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kabupaten Pacitan lebih detail selama tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Grafik Gambar.2

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019



Tingkat inflasi Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, inflasi mencapai 3,11 % sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,71 %. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,76 % di bawah Provinsi dan Nasional. Sedangkan di tahun kemarin 2019 mengalami penurunan lagi sehingga menjadi sebesar 2,61, yang berarti inflasi di Kabupaten Pacitan semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kabupaten Pacitan masih terkendali selama empat tahun terakhir.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Pada tahun 2018, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 353.845 orang terdiri dari bekerja 348.768 orang (98,57%) dan pengangguran terbuka 5.077 orang (1,43%). Proporsi terbesar pengangguran terbuka berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.640 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 356.302 orang terdiri dari bekerja 352.913 orang (99,05%) dan pengangguran terbuka sebesar 3.389 orang (0,95%). Proporsi terbesar pengangguran terbuka

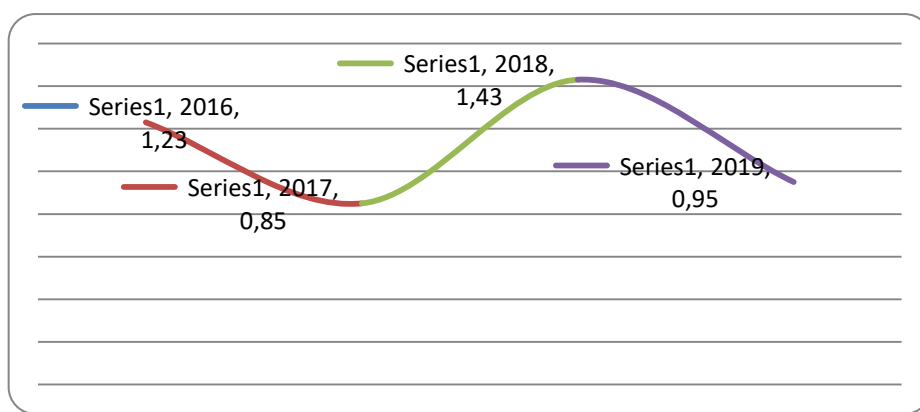


PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.407 orang. Jika dibandingkan kondisi tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 lebih rendah atau turun 0,48% dari 1,43% pada tahun 2018 menjadi 0,95% pada tahun 2019.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pacitan selama 2016-2019 dapat dicermati pada gambar dan tabel di bawah ini.

Grafik Gambar.3
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2016 – 2019



Tabel 4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pacitan 2016-2019

Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,77	28,98	28,17	27,01
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,54	16,80	17,25	17,79
Konstruksi	15,20	15,57	15,63	15,64
Industri Pengolahan	6,54	6,60	6,73	6,82

Sumber: BPS Pacitan Tahun 2020

Klasifikasi industri pengolahan di Kabupaten Pacitan didominasi oleh industri makanan dan minuman yaitu gula merah sebanyak 5.104 unit dan industri tempe menduduki peringkat kedua dengan jumlah 1.123 unit. Industri gula merah di Kabupaten Pacitan mampu menyerap 10.211 tenaga kerja dan industri tempe mampu menyerap 2.194 tenaga kerja.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pacitan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, perekonomian Nasional dan perekonomian global akibat wabah Covid-19, diperkirakan perekonomian Kabupaten Pacitan akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penanggulungan kemiskinan
- 2) Penguatan daya saing ekonomi lokal



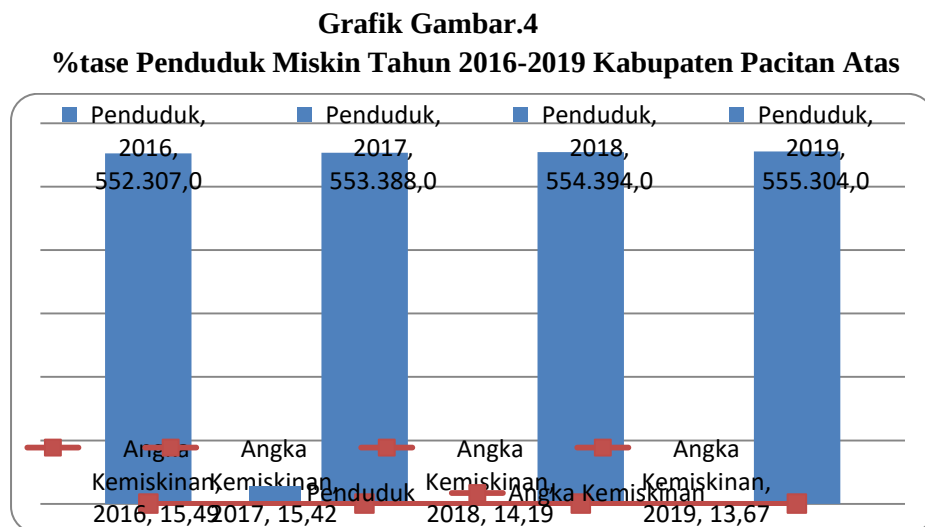
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 3) Pemulihan perekonomian lokal
- 4) Pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Setelah berakhirnya wabah Covid-19, dibukanya akses perekonomian dari berbagai sektor termasuk beroperasinya kembali sektor pariwisata diharapkan akan memulihkan kondisi ekonomi daerah. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2021 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kabupaten Pacitan terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, dan dengan pulihnya perekonomian lokal, regional dan nasional, maka kondisi perekonomian daerah pada RKPD Tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 4.5 - 5.5%. Untuk mencapai target tersebut perlu upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial utamanya sektor pertanian dan pangan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pacitan. Program dan kegiatan juga difokuskan pada peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

2.1.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Pacitan masih berada di atas angka kemiskinan provinsi maupun pusat, namun demikian dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi program penanganan kemiskinan di Kabupaten antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menunjukkan kinerja yang positif. Sedangkan perkembangan angka kemiskinan periode 2016 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Pacitan Tahun 2020

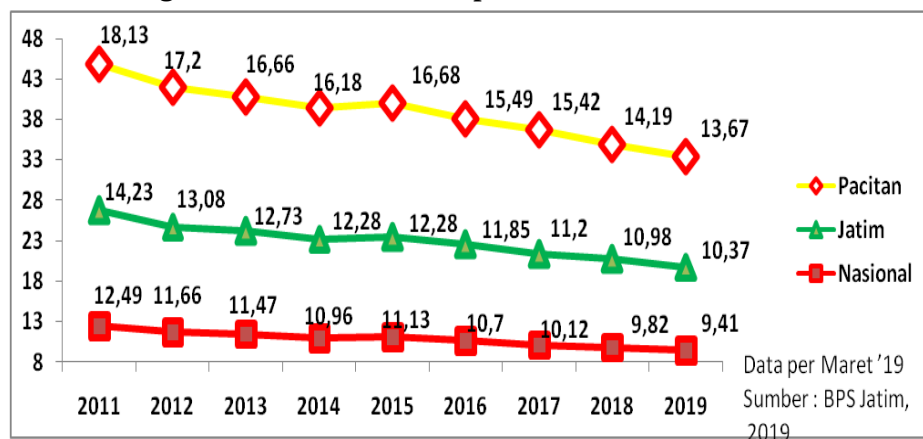
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan berturut-turut menurun, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 15,49%; Tahun 2017 sebesar 15,42%; Tahun 2018 sebesar 14,19% dan Tahun 2019 13,67%. Penurunan angka tersebut dapat diartikan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Pacitan telah menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kemiskinan. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Nasional. Tabel tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik Gambar.5
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2019



2.1.6 Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Berikut perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019

Tabel 5 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2019

Indeks Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
IPM	65,74	66,51	67,33	68,16
Umur Harapan Hidup	71,18	71,31	71,52	71,77
Harapan Lama Sekolah	12,19	12,41	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah	6,89	7,02	7,19	7,28
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	8.048	8.288	8.527	9.033

Sumber: BPS Pacitan Tahun 2020

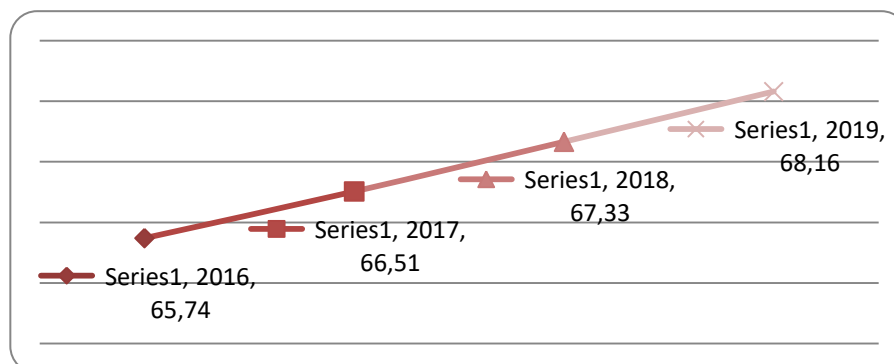
IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2016 sebesar 65,74 dan terus meningkat menjadi sebesar 68,16 pada tahun 2019. Perhitungan ini didasarkan pada formula perhitungan IPM yang baru.

Berikut kami sajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2019 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Gambar 6 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2019

2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Nasional tahun 2021 paska pandemi Covid-19 sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran ekonomi nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Kondisi perekonomian nasional dapat dilihat dari tabel indikator makro ekonomi nasional tahun 2016 s/d 2019 sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016 s/d 2019

NO	URAIAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	PDB Perkapita	47.937,70	51.891,20	55.990,50	59.065,30
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,07	5,17	5,02
3	Angka Kemiskinan	10,7	10,12	9,66	9,22
4	Pengangguran Terbuka	5,61	5,5	5,34	5,28
5	IPM	70,18	70,81	71,39	71,92
6	Gini Rasio	0,394	0,391	0,384	0,38

Sumber: Statistik Indonesia 2020

Dengan terjadinya bencana pandemi Covid-19 maka tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 dilakukan penyesuaian dan responsif terhadap kejadian tersebut sehingga tema RKP 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan menitikberatkan pada empat fokus pembangunan nasional:

- 1) Pemulihan industri, Pariwisata dan investasi
- 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- 3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
- 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Dengan ditetapkannya tema dan fokus pembangunan nasional dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan dan menjadi arah pemerintah daerah maka agenda pembangunan pada tahun 2021 adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- 7) Stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan demikian tema RKP 2021, fokus dan agenda tersebut maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 – 5,5 %;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 7,5 – 8,2 %;
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 %;
- 4) Indek Pembangunan Manusia menjadi 72,78 - 72,90 %;
- 5) Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379.

Sedangkan pembangunan Provinsi Jawa Timur berpijak pada visi dan misi, strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024. Misi Gubernur Jawa Timur dan strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Mewujudkan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
- 2) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
- 3) Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
- 4) Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka tema RKPD 2021 Provinsi Jawa Timur adalah **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”** dengan fokus pembangunan yaitu pada pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur.

Dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,6 – 5,58 %;
- 2) Tingkat kemiskinan pada kisaran 10,19 - 9,77 %;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 3) Indek Pembangunan Manusia menjadi 72,08 – 72,57;
- 4) Gini rasio pada kisaran 0,3688 – 0,3683; dan
- 5) Tingkat pengangguran terbuka 3,77 – 3,75 %.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan yang pada tahun 2021 memasuki tahun terakhir periode 2016 – 2021 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan sehingga diperlukan sinergitas dan keterpaduan program-program pembangunan agar angka kemiskinan terus dapat diturunkan, terutama yang berdampak pada pengurangan beban dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- 2) Kontribusi dari sektor ekonomi lokal masih rendah dan perlu mendapat perhatian untuk terus dikembangkan dengan diiringi pembinaan, pendampingan serta permodalan.
- 3) Pelayanan publik kepada masyarakat di semua bidang masih perlu ditingkatkan;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan baik dari aspek akses maupun mutu, sehingga akan berdampak pada meningkatkan rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator kualitas manusia (IPM);
- 5) Tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir di Kabupaten Pacitan masih cukup tinggi;
- 6) Diperlukan upaya peningkatan daya dukung lingkungan yang lebih memadai dengan upaya meningkatkan pengelolaan sampah, mempertahankan luasan RTH perkotaan, dan mengendalikan pencemaran lingkungan;
- 7) Sarana prasarana publik sangat diperlukan sebagai dasar pelayanan publik dan peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di Kabupaten Pacitan. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana publik melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Dengan melihat permasalahan tersebut maka tema RKPD tahun 2021 adalah **”Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Sektor Unggulan Daerah”**.

Dan untuk mewujudkan tema tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2021 adalah:

- 1) Layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik berbasis teknologi informasi
- 2) Ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan
- 3) Pengembangan sektor unggulan dan daya saing ekonomi
- 4) Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung sektor unggulan
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021 yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 - 5,5 %;
- 2) Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,70 - 12,85 %;
- 3) Indek Pembangunan Manusia menjadi 67,50 - 68,17;
- 4) Gini rasio pada kisaran 0,30 - 0,33; dan
- 5) Tingkat pengangguran terbuka 1,00 - 0,90 %.

Sedangkan arah kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi Tahun 2021 dan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulihan akses perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program diarahkan pada:
 - Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Pengembangan ekonomi kreatif.
 - Penanganan infrastruktur dasar dan infrastruktur perekonomian yang sempat berhenti akibat pandemi Covid-19
- 3) Meningkatkan daya saing sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan, program diarahkan pada:
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
 - Peningkatan pengelolaan destinasi wisata.
 - Pengembangan dan penguatan desa wisata.
 - Menjaga ketersediaan dan harga pangan terjangkau
 - Memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas
 - Memperbaiki logistik pangan
 - Mengurangi kelangkaan stok pangan dan disparitas bahan pokok pangan
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja, program diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
- 5) Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian, program diarahkan kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
- 6) Menurunkan angka kemiskinan, program diarahkan pada:
 - Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap permodalan sarana prasarana produksi dan peningkatan kapasitas.
 - Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.
- 7) Meningkatkan peran serta swasta, pelaku usaha dan lembaga masyarakat untuk pengembangan ekonomi lokal. Program diarahkan pada:
 - Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
 - Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Tiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut:

Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan belanja pembangunan yang sifat peruntukan dan anggarannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Provinsi.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.570.384.617.416	1.655.537.179.548	1.788.495.524.090	1.718.881.931.376	1.624.631.028.789	1.740.731.107.303
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	342.675.850.088	202.090.671.761	185.153.427.758	199.044.387.518	168.459.638.378	200.602.644.604
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	67.457.168.815	29.748.463.837	33.550.764.990	36.075.038.103	35.062.233.638	35.184.255.616
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.774.086.533	25.989.347.391	23.213.971.232	28.851.343.905	18.994.470.321	36.717.595.000
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.553.186.053	2.439.361.626	2.486.655.951	2.593.777.560	2.669.553.062	2.600.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.891.408.687	143.913.498.907	125.902.035.585	131.524.227.950	111.733.381.357	126.100.793.988
1.2.	Dana Perimbangan	1.726.713.610.875	1.081.180.109.317	1.170.405.463.618	1.192.754.353.367	1.106.069.120.350	1.220.695.841.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.715.573.584	52.713.507.009	99.006.905.287	81.796.889.037	82.626.327.469	66.709.384.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.172.557.802.000	793.715.346.000	793.715.346.000	817.563.878.000	739.879.366.000	846.684.712.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	477.440.235.291	234.751.256.308	277.683.212.331	293.393.586.330	283.563.426.881	307.301.745.000



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi RPJMD 2021
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	500.995.156.453	372.266.398.470	432.936.632.714	327.083.190.491	350.102.270.061	319.432.621.699
1.3.1.	Pendapatan Hibah	16.683.429.867	-	185.297.460.000	50.089.880.000	58.554.240.000	45.661.000.000
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	134.852.032.586	84.159.547.470	80.030.636.714	90.982.239.491	75.229.252.061	88.341.365.699
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.796.214.000	213.591.851.000	162.652.536.000	180.842.992.000	202.349.929.000	185.430.256.000
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	145.663.480.000	74.515.000.000	4.956.000.000	5.168.079.000	13.968.849.000	-

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 dan APBD 2021

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020, secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan perencanaan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD Tahun 2020 meliputi:

- 1) **Belanja pegawai** merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan 14. Sedangkan dalam perencanaan belanja pegawai diperhitungkan *accres* gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga;
- 2) **Belanja Hibah** digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

perusahaan daerah, masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- 3) **Belanja Bantuan Sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 4) **Belanja Bagi Hasil** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) **Belanja Bantuan Keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- 6) **Belanja Tak Terduga** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan kebijakan perencanaan **Belanja Langsung** yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah **belanja modal untuk meningkatkan aset daerah**.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2020 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas Pembangunan Daerah

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2020 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai unggulan daerah.

b. Efisien dan Efektifitas Anggaran

RKPD Tahun 2020 ini menerapkan prinsip penggunaan anggaran dan belanja daerah secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun pelaksanaannya, dilaksanakan *refocusing* anggaran untuk meningkatkan pencapaian target sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat hal ini diikuti dengan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dengan memberikan tunjangan kinerja.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator hasil yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan pada akhir kegiatan. Penetapan target yang dibebankan pada setiap program dan kegiatan harus dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Indikator dan target kinerja meliputi, keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah yang mengampunya, capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan indikator program dan sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi Target 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Belanja	1.644.719.320.619	1.629.539.754.070	1.595.939.987.645	1.921.214.125.566	1.570.270.990.460	1.739.281.107.303
2.1.	Belanja Tidak Langsung	999.717.047.413	970.051.810.279	968.381.424.996	1.161.549.922.426	1.080.929.046.606	1.020.273.481.114
2.1.1.	Belanja Pegawai	696.547.418.733	613.359.536.719,00	622.125.985.893	653.790.730.071	624.056.147.994	681.671.386.519
2.1.2.	Belanja Hibah	24.282.642.656	30.704.144.100,00	41.591.117.583	52.272.194.500	87.702.988.960	33.369.940.000
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	6.599.373.506	12.912.131.865,00	8.430.153.804	119.702.257.569	10.749.680.534	8.312.476.000
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	4.576.300.137	3.916.790.996,00	4.947.836.016	5.520.484.143	5.168.064.575	6.022.622.800
No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi Target 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	266.846.408.881	306.057.342.384,00	289.639.074.200	327.312.348.544	324.351.550.300	287.897.055.795
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	864.903.500	3.101.864.215,00	1.647.257.500	2.951.907.599	28.900.614.243	3.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	645.002.273.206	659.487.943.791	627.558.562.649	759.664.203.140	489.341.943.855	719.007.626.189
2.2.1.	Belanja Pegawai	52.206.025.090	62.614.137.539,41	40.029.499.657	37.743.537.026	28.924.311.643	37.495.524.749
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	213.629.250.899	250.271.504.108,94	315.608.818.338	349.856.181.230	320.359.144.542	369.082.348.232
2.2.3.	Belanja Modal	379.166.997.217	346.602.302.143,00	271.920.244.654	372.064.484.884	140.058.487.669	312.429.753.208

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 Unaudited dan APBD 2021

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan *likuiditas* keuangan daerah.

Tabel 9 Realisasi /Proyekai /Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi/Target RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PEMBIAYAAN	145.494.591.271,00	27.387.331.622,00	52.794.957.100,00	63.976.382.007,13	42.191.996.500,74	(1.450.000.000)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	146.444.591.271,00	28.337.331.622,00	53.394.957.100,00	64.926.382.007,13	42.191.996.500,74	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	146.414.491.271,00	28.306.481.622,00	53.384.757.100,00	36.075.038.102,63	42.184.796.500,74	0,00
3.1.2.	Penerimaan piutang daerah	30.100.000,00	30.850.000,00	10.200.000,00	28.851.343.904,50	7.200.000,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	600.000.000,00	950.000.000,00	0,00	1.450.000.000
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	600.000.000,00	950.000.000,00	0,00	1.450.000.000

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 Un audited dan APBD 2021

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2020, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2020.

Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari :

2.3.1 Urusan Wajib

Urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman; Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:

Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.3.2 Urusan Pilihan

Urusan Pilihan, yang terdiri dari urusan:

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

2.3.3 Urusan Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan:

Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Pemerintahan Umum.

Rekapitulasi Realisasi APBD, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dalam **Lampiran 1**.



III. KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Desember 2019 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 September 2020 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2020. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 6 April 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional,
- Hasil pertemuan DESK kegiatan DAK dengan Pemerintah Pusat,
- Perantuan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/660/201.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota untuk Dinas Kesehatan,
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/24.777/201.5/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Daerah
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/8215/101.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota untuk Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

b. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 20 Mei 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional,
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19),
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

c. Pergeseran III APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 29 Juni 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Adanya perubahan rincian objek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 160 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

d. Pergeseran IV APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Juli 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-267/PK/2020 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Juli 2020,



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

e. Pergeseran V APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Oktober 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode ke Tiga Tahun 2020,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler,
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020,
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 910/19333/201.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan atau semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya serangkaian upaya yang berkesinambungan antara pengelola program dan kegiatan yang baik, disamping itu sektor peningkatan pelayanan publik masih menjadi landasan utama dalam pencapaian target pendapatan daerah, sehingga ke depannya peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata hanya menjadi opini akan tetapi merupakan pendapatan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - 1.1 Pajak Daerah;
 - 1.2 Retribusi Daerah;
 - 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
 - 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - 2.2 Dana Alokasi Umum;
 - 2.3 Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:
 - 3.1 Hibah;
 - 3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - 3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - 3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Selanjutnya guna memacu peningkatan PAD Kabupaten Pacitan telah dilakukan serangkaian upaya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;
3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada masyarakat;
4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptannya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

6. Pendapatan lain-lain yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan serta meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang sah terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat dan provinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan;
8. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi;
9. Pembinaan dan *reward* kepada Wajib Pajak terutama PBB yang tertib dalam pelunasan pajak.

Berbagai kebijakan tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal. Kesenambungan program/kegiatan dalam penyediaan sarana dan prasarana merupakan landasan utama dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pendapatan daerah adalah suatu perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan sebesar Rp1.618.552.237.782,20 dapat terealisasi sebesar Rp1.624.631.028.789,38 atau mencapai 100,38%, sehingga melebihi target sebesar Rp6.078.791.007,18. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari:

- 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp168.459.638.378,38;
- 1.2 Dana Perimbangan sebesar Rp1.106.069.120.350,00; dan
- 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.102.270.061,00.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu dioptimalkan kembali. Sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah ditempuh serangkaian upaya yaitu melalui perencanaan dan pengendalian, intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber-sumber pendapatan, dan pengawasan untuk meminimalisir tingkat kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, dalam upaya guna meningkatkan sektor dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah dilakukan langkah koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah

Akan tetapi dalam rangka pemenuhan target APBD, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 tercapai 100,38 % dari total anggaran yang ditetapkan. Dana Perimbangan tidak dapat memenuhi target dikarenakan terdapat realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat menyesuaikan kondisi perekonomian secara nasional yang tidak menentu karena adanya pandemi Covid-19 yang belum stabil. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pelampauan dari target



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

APBD. Pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp350.102.270.061,00 atau 102,99% dari anggaran yang ditetapkan.

Secara umum jika dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya, Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Kabupaten Pacitan mengalami penurunan target dan realisasi dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia kecuali Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian penurunan dan kenaikan target dan realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp30.584.749.139,13 atau 15,37% dibandingkan Tahun 2019

Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp86.685.233.017,00 atau 7,27% dibandingkan Tahun 2019

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp23.019.079.570,00 atau 7,04% dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan adanya hibah PANSIMAS dari Pemerintah Pusat dan penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pembangunan Museum

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dan 2020, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	Pendapatan	Tahun				Growth
		2019		2020		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	199.044.387.517,51	11,58	168.459.638.378,38	10,37	(0,15)
	Hasil Pajak Daerah	36.075.038.102,63	2,10	35.062.233.638,16	2,16	(0,03)
	Hasil Retribusi Daerah	28.851.343.904,50	1,68	18.994.470.321,00	1,17	(0,34)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.593.777.560,31	0,15	2.669.553.062,20	0,16	0,03
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.524.227.950,07	7,65	111.733.381.357,02	6,88	(0,15)
2	Dana Perimbangan	1.192.754.353.367,00	69,39	1.106.069.120.350,00	68,08	(0,07)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.796.889.037,00	4,76	82.626.327.469,00	5,09	0,01
	Dana Alokasi Umum	817.563.878.000,00	47,56	739.879.366.000,00	45,54	(0,10)
	Dana Alokasi Khusus	293.393.586.330,00	17,07	283.563.426.881,00	17,45	(0,03)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	327.083.190.491,00	19,03	350.102.270.061,00	21,55	0,07
	Pendapatan Hibah	50.089.880.000,00	2,91	58.554.240.000,00	3,60	0,17
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	90.982.239.491,00	5,29	75.229.252.061,00	4,63	(0,17)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	180.842.992.000,00	10,52	202.349.929.000,00	12,46	0,12
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.168.079.000,00	0,30	13.968.849.000,00	0,86	1,70
	Jumlah	1.718.881.931.375,51	100,00	1.624.631.028.789,38	100,00	(0,05)

Keterangan: - Prosentase (%): Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah

- Growth: Pertumbuhan (%) Tahun 2019 ke Tahun 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah cukup besar yaitu Rp1.106.069.120.350,00 yang meliputi:

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak | Rp82.626.327.469,00 |
| 1.2 | Dana Alokasi Umum | Rp739.879.366.000,00 |
| 1.3 | Dana Alokasi Khusus | Rp283.563.426.881,00 |

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp168.459.638.378,38 atau 10,37% dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.624.631.028.789,38 atau mencapai 100,38%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.618.552.237.782,20 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78
	- Hasil Pajak Daerah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10
	- Hasil Retribusi Daerah	20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53
2	Dana Perimbangan	1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.677.414.442,00	82.626.327.469,00	101,16
	- Dana Alokasi Umum	748.480.938.000,00	739.879.366.000,00	98,85
	- Dana Alokasi Khusus	295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96,12
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.925.292.662,00	350.102.270.061,00	102,99
	- Pendapatan Hibah	57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114,08
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00
	- Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00
	Jumlah	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp168.459.638.378,38atau 109,78% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp153.458.081.130,20. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari:

- | | | |
|-----|--------------------|----------------------|
| 2.1 | Hasil Pajak Daerah | Rp 35.062.233.638,16 |
|-----|--------------------|----------------------|



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp	18.994.470.321,00
2.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	2.669.553.062,20
2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	111.733.381.357,02

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Pajak Hotel	172.971.482,00	284.141.167,00	164,27
1	Hotel Melati Tiga	93.148.180,00	165.750.422,00	177,94
2	Hotel Melati Dua	18.500.000,00	35.839.800,00	193,73
3	Hotel Melati Satu	46.323.302,00	61.149.445,00	132,01
4	Losmen / Rumah Peningapan / Pesanggrahan / Hotel / Rumah Kos	15.000.000,00	21.401.500,00	142,68
	Pajak Restoran	644.023.515,00	1.850.806.091,16	287,38
1	Restoran	47.490.800,00	92.191.984,00	194,13
2	Rumah Makan	39.643.818,00	62.165.000,00	156,81
3	Katering	556.888.897,00	1.696.449.107,16	304,63
	Pajak Hiburan	14.833.325,00	18.259.752,00	123,10
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	6.504.680,00	11.625.600,00	178,73
2	Permainan Biliar	298.500,00	298.500,00	100,00
3	Permainan Ketangkasan	7.050.263,00	5.774.652,00	81,91
4	Pusat Kebugaran	700.000,00	561.000,00	80,14
5	Pertandingan Olahraga	279.882,00	0,00	0,00
	Pajak Reklame	159.863.278,00	336.685.263,00	210,61
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	126.751.562,00	267.110.533,00	210,74
2	Reklame Kain	24.611.716,00	59.857.887,00	243,21
3	Reklame Berjalan	8.500.000,00	9.716.843,00	114,32
	Pajak Penerangan Jalan	11.688.500.000,00	12.135.694.507,00	103,83
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	11.688.500.000,00	12.135.694.507,00	103,83
	Pajak Parkir	30.784.268,00	33.491.100,00	108,79
1	Pajak Parkir	30.784.268,00	33.491.100,00	108,79
	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	53.654.409,00	178,85
1	Pajak Air Tanah.	30.000.000,00	53.654.409,00	178,85
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	50.175.687,00	449.111.233,00	895,08
1	Pajak Mineral bukan logam	38.803.687,00	429.340.033,00	1106,44
2	Pajak Batuan (Non Sirtu)	11.372.000,00	19.771.200,00	173,86
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.800.000.000,00	17.453.361.557,00	103,89
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	16.800.000.000,00	17.453.361.557,00	103,89
	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.686.338.827,00	2.447.028.559,00	145,11
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.686.338.827,00	2.447.028.559,00	145,11
	Jumlah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Retribusi Jasa Umum	12.437.333.916,00	12.915.407.400,00	103,84
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.843.263.916,00	7.186.614.400,00	91,63
2	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.239.655.000,00	1.873.344.500,00	151,12



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.650.450.000,00	2.801.533.000,00	105,70
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.965.000,00	293.010.000,00	115,37
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	760.905.500,00	169,09
	Retribusi Jasa Usaha	7.596.613.255,00	5.664.714.525,00	74,57
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.165.000,00	213.982.850,00	344,22
2	Retribusi Tempat Pelelangan	138.511.255,00	257.965.675,00	186,24
3	Retribusi Terminal	22.592.000,00	28.855.000,00	127,72
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.489.000,00	3.072.000,00	123,42
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	9.000.000,00	8.670.000,00	96,33
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.260.000,00	14.050.000,00	98,53
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.347.596.000,00	5.138.119.000,00	69,93
	Retribusi Perizinan Tertentu	254.490.000,00	414.348.396,00	162,82
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	412.138.396,00	164,86
2	Retribusi Izin Trayek	4.490.000,00	2.210.000,00	49,22
Jumlah		20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62

Tabel 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68
1	Bank Jatim	2.300.000.000,00	2.579.677.062,20	112,16
2	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	89.876.000,00	29,96
Jumlah		2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020
(dalam rupiah)

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	235.007.500,00	263.703.000,00	112,21
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	500.000,00	8.053.500,00	1.610,70
2	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	218.597.500,00	218.597.500,00	100,00
3	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	12.850.000,00	15.100.000,00	117,51
4	Penjualan hasil perikanan	3.060.000,00	21.952.000,00	717,39
	Penerimaan Jasa Giro	500.000.000,00	417.695.520,37	83,54
1	Jasa Giro Kas Daerah	500.000.000,00	417.695.520,37	83,54
	Pendapatan Bunga Deposito	3.000.000.000,00	5.834.513.767,02	194,48
1	Rekening Deposito pada BPD	1.900.000.000,00	4.502.191.780,01	236,96
2	Rekening Deposito Pada BRI	500.000.000,00	689.075.410,00	137,82
3	Rekening Deposito Pada BNI	400.000.000,00	417.876.714,00	104,47
4	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	100.000.000,00	115.565.068,49	115,57
5	Rekening Deposito pada Bank BTN	100.000.000,00	109.804.794,52	109,80
	Pendapatan Denda Pajak	199.921.261,20	246.184.508,00	123,14
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	605.878,00	1.852.571,00	305,77
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	19.400,00	226.477,00	1.167,41
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame	916.648,00	6.503.403,00	709,48
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	16.562,00	73.508,00	443,84
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	41.775,20	148.885,00	356,40
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	733.373,00	9.227.556,00	1.258,24
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.626.452,00	49.190.935,00	264,09
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	178.961.173,00	178.961.173,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pendapatan dari Pengembalian	17.867.950,00	182.704.558,00	1.022,53
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.867.950,00	182.704.558,00	1.022,53
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	225.000.000,00	320.688.677,57	142,53
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	225.000.000,00	320.688.677,57	142,53
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.000.000.000,00	83.738.575.010,08	113,16
1	Lain - lain Pendapatan BLUD	74.000.000.000,00	83.705.772.290,08	113,12
4	Sewa pabrik es tamperan	0,00	32.802.720,00	-
	Pendapatan Lain-lain	1.161.876.804,00	1.690.981.294,98	145,54
1	Pendapatan Lain-lain	359.373.404,00	844.421.946,98	234,97
2	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	802.503.400,00	846.559.348,00	105,49
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	19.952.480.062,00	19.038.335.021,00	95,42
1	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	816.785.209,00	827.282.336,00	101,29
2	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	1.594.037.017,00	1.568.774.018,00	98,42
3	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	755.230.260,00	776.662.295,00	102,84
4	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonoyo	437.690.072,00	436.601.144,00	99,75
5	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	1.090.559.463,00	1.143.306.590,00	104,84
6	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	392.710.840,00	303.842.900,00	77,37
7	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	576.303.791,00	579.574.676,00	100,57
8	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	377.142.416,00	348.547.638,00	92,42
9	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringuku	545.041.569,00	535.285.393,00	98,21
10	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	369.426.071,00	350.824.805,00	94,96
11	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	759.739.387,00	740.939.200,00	97,53
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	501.736.782,00	411.223.400,00	81,96
13	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	968.517.769,00	1.002.177.900,00	103,48
14	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	370.142.540,00	361.613.150,00	97,70
15	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	1.804.815.446,00	1.874.270.400,00	103,85
16	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	989.185.288,00	1.011.069.750,00	102,21
17	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	557.519.187,00	515.781.300,00	92,51
18	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	415.155.339,00	340.427.649,00	82,00
19	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.830.295.326,00	1.537.669.674,00	84,01
20	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	1.114.281.192,00	971.989.678,00	87,23
21	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	1.025.276.307,00	1.035.764.925,00	101,02
22	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	1.087.047.501,00	1.022.471.250,00	94,06
23	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	761.205.340,00	764.921.900,00	100,49
24	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	812.635.950,00	577.313.050,00	71,04
	Jumlah	99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Secara definitif belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi:

- 1.1 Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- 1.2 Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
- 1.3 Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
- 1.4 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1.1 Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- 1.2 Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
- 1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya maupun fungsional maupun masyarakat;
- 1.4 Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.659.176.387.136,94 realisasinya mencapai Rp1.570.270.990.460,45 atau 94,64% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.080.929.046.605,56 dan belanja langsung sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Rp489.341.943.854,89 sehingga terdapat penghematan belanja daerah sebesar Rp88.905.396.676,49 atau 5,36%.

Dari kelompok Belanja Tidak Langsung selain dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp640.044.604.708,30 dengan realisasi Rp624.056.147.994,00 pada tahun anggaran 2020 juga dialokasikan untuk:

- 2.1 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp98.687.874.355,00 terealisasi sebesar Rp87.702.988.960,00 yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional;
- 2.2 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp11.199.100.000,00 terealisasi sebesar Rp10.749.680.534,00 diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- 2.3 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp5.953.587.004,00 terealisasi sebesar Rp5.168.064.575,00, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil tersebut diarahkan sebagai kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;
- 2.4 Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dianggarkan sebesar Rp324.968.550.299,56 terealisasi sebesar Rp324.351.550.299,56 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;
- 2.5 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp39.939.731.923,95 terealisasi sebesar Rp28.900.614.243,00 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk:

- 2.1 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp29.936.928.902,00 terealisasi sebesar Rp28.924.311.643,40 yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- 2.2 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp353.222.763.477,02 terealisasi sebesar Rp320.359.144.542,49 digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- 2.3 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp155.223.246.467,11 terealisasi sebesar Rp140.058.487.669,00 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada:

- 2.1 Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik.
- 2.2 Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.
- 2.3 Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
- 2.4 Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- 2.5 Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja.
- 2.6 Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - 2.6.1 Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - 2.6.2 Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

Nomor	Jenis Belanja	Target		Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp)	Proporsi (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.793.448.290,81	67,55	1.080.929.046.605,56	68,84
1	Belanja Pegawai	640.044.604.708,30	38,58	624.056.147.994,00	39,74
2	Belanja Hibah	98.687.874.355,00	5,95	87.702.988.960,00	5,59
3	Belanja Bantuan Sosial	11.199.100.000,00	0,67	10.749.680.534,00	0,68
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemdes	5.953.587.004,00	0,36	5.168.064.575,00	0,33
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	324.968.550.299,56	19,59	324.351.550.299,56	20,66
6	Belanja Tidak Terduga	39.939.731.923,95	2,41	28.900.614.243,00	1,84
	BELANJA LANGSUNG	538.382.938.846,13	32,45	489.341.943.854,89	31,16
1	Belanja Pegawai	29.936.928.902,00	1,80	28.924.311.643,40	1,84
2	Belanja Barang Dan Jasa	353.222.763.477,02	21,29	320.359.144.542,49	20,40
3	Belanja Modal	155.223.246.467,11	9,36	140.058.487.669,00	8,92
	Jumlah	1.659.176.387.136,94	100,00	1.570.270.990.460,45	100,00

Keterangan : % Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38
1	Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78
2	Dana Perimbangan	1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.925.292.662,00	350.102.270.061,00	102,99
	BELANJA	1.659.176.387.136,94	1.570.270.990.460,45	94,64
1	Belanja tidak langsung	1.120.793.448.290,81	1.080.929.046.605,56	96,44
2	Belanja langsung	538.382.938.846,13	489.341.943.854,89	90,89
	Surplus/ Defisit	-40.624.149.354,74	54.360.038.328,93	133,81
	PEMBIAYAAN	40.624.149.354,74	42.191.996.500,74	103,86
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	42.074.149.354,74	42.191.996.500,74	100,28
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	96.552.034.829,67	-

Sesuai target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan semaksimal mungkin.



3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

- 1.1 Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Pajak Daerah;
- 1.2 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan Wajib Pajak Daerah;
- 1.3 Data piutang tidak akurat;
- 1.4 Sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak kurang *transparan* dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;
- 1.5 Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
- 1.6 Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar;
- 1.7 Belum tercukupinya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sebagai juru sita pajak;
- 1.8 Belum tersedianya sistem dan mekanisme di bidang pajak daerah.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

- 2.1 Rekrutmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;
- 2.2 Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2.3 Memutakhirkan data piutang pajak daerah melalui program kegiatan pendataan dan penilaian;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 2.4 Sosialisasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara kontinu bagi wajib pajak;
- 2.5 Pembenahan administrasi dan penyempurnaan regulasi pajak daerah;
- 2.6 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
- 2.7 Mengusulkan diklat kompetensi aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan juru sita pajak kepada BKPPD Kabupaten Pacitan; dan
- 2.8 Merencanakan studi tiru pelaksanaan dan mekanisme sidang pajak.

3.2.2 Pengelolaan Belanja

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

- 1.1 Adanya perubahan ketentuan aturan dari Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya di daerah khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK;
- 1.2 Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, JKN dan BLUD), yang digunakan langsung dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- 1.3 Belum *optimal*-nya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi Likin) dan jaringan *online* antar OPD. Hal ini dikarenakan proses pembangunan Aplikasi tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu;
- 1.4 Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
- 1.5 Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- 1.6 Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proposional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;
- 1.7 Adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuan keuangannya setelah Peraturan Daerah APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- 1.8 Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan Belanja Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

- 2.1 Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer;
- 2.2 Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);
- 2.3 Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - 2.3.1 Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara *online* antar OPD;
 - 2.3.2 Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan *online* antar OPD baik di *server* maupun jaringannya;
 - 2.3.3 Berkoordinasi secara aktif dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara *online* antar OPD;
- 2.4 Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
- 2.5 Aktif mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;
- 2.6 Terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menambah kapasitas jaringan *online* seluruh OPD peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.7 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar belanja yang didanai oleh bantuan tersebut dapat segera direalisasikan;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 2.8 Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna untuk alokasi Belanja Modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 2.9 Dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja daerah hanya diperuntukan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;
- 2.10 Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas yang ditetapkan;
- 2.11 Dalam rangka peningkatan jumlah personil OPD yang memahami dan memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - 2.11.1 Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah;
 - 2.11.2 Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di OPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai pengelolaan aset daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah. Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrua.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

- a) diterima di Rekening Kas Daerah; atau
 - b) diterima oleh SKPD; atau
 - c) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
 - d) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS).
- Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi prosentasi piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

- a. Piutang pajak;
- b. Piutang retribusi; dan
- c. Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2018. Dana bergulir diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - 2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;
 - 3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - 4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*).

Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut.

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2020 pada harga perolehan yang terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copy right*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), disamping yang dialihkan.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Pengungkapan - Pengungkapan lainnya

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya memuat pengungkapan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan atau penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, permasalahan hukum yang ditangani pemerintah kabupaten, catatan penting lainnya terkait pandemi Covid-19.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1. Pendapatan	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	1.718.881.931.375,51

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2020, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar **Rp1.618.552.237.782,20** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp1.624.631.028.789,38** atau sebesar 100,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019, realisasi pendapatan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp94.250.902.586,13 atau sebesar 5,48%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78	199.044.387.517,51	(30.584.749.139,13)
2	Pendapatan Transfer	1.407.431.916.652,00	1.397.617.150.411,00	99,30	1.469.747.663.858,00	(72.130.513.447,00)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55	50.089.880.000,00	8.464.360.000,00
Jumlah		1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38	1.718.881.931.375,51	(94.250.902.586,13)

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2020, anggaran PAD adalah sebesar Rp153.458.081.130,20 dan realisasinya sebesar Rp168.459.638.378,38 atau sebesar 109,78%. Jika



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi PAD pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.584.749.139,13 atau sebesar 15,37%.

Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Pajak Daerah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10	36.075.038.102,63	(1.012.804.464,47)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62	28.851.343.904,50	(9.856.873.583,50)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68	2.593.777.560,31	75.775.501,89
4	Lain-lain PAD yang Sah	99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53	131.524.227.950,07	(19.790.846.593,05)
Jumlah		153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78	199.044.387.517,51	(30.584.749.139,13)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2020 dari target sebesar Rp153.458.081.130,20 dan realisasinya sebesar Rp168.459.638.378,38 sehingga melebihi target sebesar Rp15.001.557.248,18 atau 9,78 %.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat satu jenis PAD yang tidak mencapai target, yaitu Pendapatan dari Retribusi Daerah yang pada Tahun 2020 hanya mencapai Rp18.994.470.321,00 atau 93,62% dari pagu anggaran sebesar Rp20.288.437.171,00. Uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 1 angka (7) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 1 angka (4) menyebutkan perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan merupakan Perangkat Daerah yang dipisahkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.062.233.638,16 atau sebesar 112,10% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	172.971.482,00	284.141.167,00	164,27	572.121.371,00	(287.980.204,00)
2	Pajak Restoran	644.023.515,00	1.850.806.091,16	287,38	2.762.601.321,63	(911.795.230,47)
3	Pajak Hiburan	14.833.325,00	18.259.752,00	123,10	71.948.829,00	(53.689.077,00)
4	Pajak Reklame	159.863.278,00	336.685.263,00	210,61	496.999.878,00	(160.314.615,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	11.688.500.000,00	12.135.694.507,00	103,83	12.624.100.123,00	(488.405.616,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
6	Pajak Parkir	30.784.268,00	33.491.100,00	108,79	61.592.138,00	(28.101.038,00)
7	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	53.654.409,00	178,85	66.904.028,00	(13.249.619,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.175.687,00	449.111.233,00	895,08	115.043.561,00	334.067.672,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.800.000.000,00	17.453.361.557,00	103,89	17.074.038.653,00	379.322.904,00
10	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.686.338.827,00	2.447.028.559,00	145,11	2.229.688.200,00	217.340.359,00
Jumlah		31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10	36.075.038.102,63	(1.012.804.464,47)

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi jenis pajak yang dipungut menggunakan *self assessment system* antara lain pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat terealisasi secara optimal disebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak yang berizin dan melakukan penambangan, sedangkan pajak reklame tidak dapat terealisasi secara optimal karena adanya beberapa obyek pajak reklame yang tidak dipasang lagi sehingga potensinya mengalami penurunan.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar 49,78% atau sebesar Rp17.453.361.557,00 diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2020.

Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.012.804.464,47 atau 2,81%.

Kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar Rp17.453.361.557,00 atau 49,78%, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.447.028.559,00 atau 6,98%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp449.111.233,00 atau 1,28%.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Realisasi Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2019 dikarenakan adanya obyek pajak (misal pajak hotel, restoran, dan hiburan) yang tidak beroperasi akibat terdampak pandemi Covid-19.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp18.994.470.321,00 atau sebesar 93,62% dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, pasal 1 angka (4) instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pasal



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang disertai tugas untuk memungut retribusi.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Khusus Parkir.

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pasal 1 angka (4) menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Tempat Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Retribusi Izin Gangguan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan sesuai Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Izin Gangguan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Izin Trayek.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	12.437.333.916,00	12.915.407.400,00	103,84	14.605.052.763,00	(1.689.645.363,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	7.596.613.255,00	5.664.714.525,00	74,57	13.877.434.665,00	(8.212.720.140,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	254.490.000,00	414.348.396,00	162,82	368.856.476,50	45.491.919,50
Jumlah		20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62	28.851.343.904,50	(9.856.873.583,50)

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp12.915.407.400,00 atau sebesar 103,84% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.843.263.916,00	7.186.614.400,00	91,63	9.095.917.763,00	(1.909.303.363,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	(20.100.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.239.655.000,00	1.873.344.500,00	151,12	1.961.264.500,00	(87.920.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.650.450.000,00	2.801.533.000,00	105,70	2.725.280.000,00	76.253.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.965.000,00	293.010.000,00	115,37	436.255.000,00	(143.245.000,00)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	(7.250.000,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	760.905.500,00	169,09	358.985.500,00	401.920.000,00
Jumlah		12.437.333.916,00	12.915.407.400,00	103,84	14.605.052.763,00	(1.689.645.363,00)

Dari jumlah Realisasi Jasa Umum tersebut diatas, sebesar 55,64% atau sebesar Rp7.186.614.400,00 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan pemberi kontribusi terbesar di Tahun 2020.

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.801.533.000,00 atau 105,70% dari anggaran, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp76.253.000,00 atau 2,80% dari tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami peningkatan sebesar Rp401.920.000,00 atau 111,96% dari tahun 2019

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak dikenakan target untuk tahun anggaran 2020 dikarenakan adanya regulasi Pemerintah Daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pencabutan atas Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak dikenakan target untuk tahun anggaran 2020 dikarenakan tidak adanya personil pemungut karena Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi pemungut fokus pada kegiatan satgas penanganan Covid-19.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.596.613.255,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.664.714.525,00 atau sebesar 74,57%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.165.000,00	213.982.850,00	344,22	668.072.140,00	(454.089.290,00)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	138.511.255,00	257.965.675,00	186,24	316.569.525,00	(58.603.850,00)
3	Retribusi Terminal	22.592.000,00	28.855.000,00	127,72	50.608.000,00	(21.753.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.489.000,00	3.072.000,00	123,42	3.363.000,00	(291.000,00)
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	9.000.000,00	8.670.000,00	96,33	36.000.000,00	(27.330.000,00)
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.260.000,00	14.050.000,00	98,53	16.610.000,00	(2.560.000,00)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.347.596.000,00	5.138.119.000,00	69,93	12.786.212.000,00	(7.648.093.000,00)
Jumlah		7.596.613.255,00	5.664.714.525,00	74,57	13.877.434.665,00	(8.212.720.140,00)

Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di Tahun 2020 adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dilakukan penutupan semua obyek wisata selama beberapa bulan sehingga tidak ada kunjungan wisata, sedangkan untuk retribusi rumah potong hewan tidak terealisasi dikarenakan kebutuhan daging sapi mengalami penurunan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp254.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp414.348.396,00 atau sebesar 162,82%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	412.138.396,00	164,86	355.276.476,50	56.861.919,50
2	Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
3	Retribusi Izin Trayek	4.490.000,00	2.210.000,00	49,22	12.530.000,00	(10.320.000,00)
Jumlah		254.490.000,00	414.348.396,00	214,08	368.856.476,50	45.491.919,50

Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp412.138.396,00 atau 164,86% dari anggaran dan Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp2.210.000,00 atau 49,22% dari pagu anggaran Rp4.490.000,00 dikarenakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda 2 (dua) sehingga kendaraan umum yang bertrayek banyak beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi dan tidak memperpanjang izin trayek.

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.669.553.062,20 atau sebesar 102,68 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim	2.300.000.000,00	2.579.677.062,20	112,16	2.441.059.560,31	138.617.501,89



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	89.876.000,00	29,96	152.718.000,00	(62.842.000,00)
Jumlah		2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68	2.593.777.560,31	75.775.501,89

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim. Pendapatan tersebut merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2019. Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 67 Tanggal 24 April 2020.

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 18 Tanggal 30 Juni 2020. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 0,36% untuk Bank Jatim dan 0,99% pada PT Bank BPR Jatim.

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp111.733.381.357,02 atau sebesar 112,53% dari anggaran yang telah ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Bunga Deposito dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan denda pajak dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD.
- Lain lain pendapatan yang sah lainnya dipungut oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	231.947.500,00	241.751.000,00	104,23	304.050.000,00	(62.299.000,00)
2	Penerimaan Jasa Giro	500.000.000,00	417.695.520,37	83,54	609.494.736,28	(191.799.215,91)
3	Pendapatan Bunga	3.225.000.000,00	6.155.202.444,59	190,86	22.275.532.611,70	(16.120.330.167,11)
4	Pendapatan Denda Pajak	199.921.261,20	246.184.508,00	123,14	54.510.204,00	191.674.304,00
5	Pendapatan Dari Pengembalian	17.867.950,00	182.704.558,00	1.022,53	8.273.620,00	174.430.938,00
6	Pendapatan BLUD	74.000.000.000,00	83.705.772.290,08	113,12	85.343.723.691,39	(1.637.951.401,31)
7	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	21.117.416.866,00	20.784.071.035,98	98,42	22.928.643.086,70	(2.144.572.050,72)
Jumlah		99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53	131.524.227.950,07	(19.790.846.593,05)

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan di Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp241.751.000,00 atau 104,23% merupakan pendapatan dari hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan dan peralatan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	219.097.500,00	226.651.000,00	103,45	0,00	226.651.000,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	12.850.000,00	15.100.000,00	117,51	304.050.000,00	(288.950.000,00)
Jumlah		231.947.500,00	241.751.000,00	104,23	304.050.000,00	(62.299.000,00)

- 2) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula prosentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro sejumlah Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp417.695.520,37 atau 83,54% turun sebesar Rp191.799.215,91 dibandingkan Tahun 2019. Anggaran pendapatan Jasa Giro TA 2020 turun dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 yang mengalami penurunan.
- 3) Pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp6.155.202.444,59 atau 190,86% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan Bunga Deposito BPD pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp5.834.513.767,02 dan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp320.688.677,57.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bunga Deposito	3.000.000.000,00	5.834.513.767,02	194,48	21.767.387.808,81	(15.932.874.041,79)
2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	225.000.000,00	320.688.677,57	142,53	508.144.802,89	(187.456.125,32)
Jumlah		3.225.000.000,00	6.155.202.444,59	190,86	22.275.532.611,70	(16.120.330.167,11)

- 4) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp246.184.508,00 atau sebesar 123,14% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	605.878,00	1.852.571,00	305,77	4.283.621,00	(2.431.050,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	19.400,00	226.477,00	1.167,41	656.575,00	(430.098,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	197.000,00	(197.000,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	916.648,00	6.503.403,00	709,48	8.802.500,00	(2.299.097,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	16.562,00	73.508,00	443,84	141.754,00	(68.246,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	41.775,20	148.885,00	356,40	207.701,00	(58.816,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	733.373,00	9.227.556,00	1.258,24	1.799.216,00	7.428.340,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.626.452,00	49.190.935,00	264,09	38.421.837,00	10.769.098,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	178.961.173,00	178.961.173,00	100,00	0,00	178.961.173,00
Jumlah		199.921.261,20	246.184.508,00	123,14	54.510.204,00	191.674.304,00

- 5) Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp182.704.558,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan atau sebesar 1.022,53%. Terjadi kenaikan sebesar Rp174.430.938,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.

- 6) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) terealisasi sebesar Rp83.705.772.290,08 atau 113,12% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian rekening pendapatan BLUD terdiri dari:

- Pendapatan Jasa layanan sebesar Rp81.762.590.138,34
- Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00
- Hasil kerjasama dengan pihak lain sebesar Rp9.300.000,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD sebesar Rp1.933.882.151,74

Penurunan Pendapatan BLUD sebesar Rp1.637.951.401,31 dari Tahun Anggaran 2019 dikarenakan adanya pembatasan pasien yang berkunjung ke rumah sakit mulai Bulan April Tahun 2020 yaitu per poliklinik maksimal 20 sampai dengan 50 pasien. Pembatasan pasien tersebut merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 7) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah lainnya terealisasi sebesar Rp20.784.071.035,98 atau sebesar 98,42% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan pendapatan yang diterima melalui RKUD Kabupaten Pacitan yang tidak dapat digolongkan dalam kategori pendapatan asli daerah lainnya. Adapun Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp21.117.416.866,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	362.433.404,00	866.373.946,98	239,04	2.132.778.674,70	(1.266.404.727,72)
2	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.952.480.062,00	19.038.335.021,00	95,42	19.765.735.718,00	(727.400.697,00)
3	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	802.503.400,00	879.362.068,00	109,58	1.030.128.694,00	(150.766.626,00)
Jumlah		21.117.416.866,00	20.784.071.035,98	98,42	22.928.643.086,70	(2.144.572.050,72)

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp866.373.946,98 atau 239,04% dari anggaran yang ditetapkan yang meliputi:

Tabel 31 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)
	Dinas Pariwisata	93.420.000,00
-	Sewa Lahan Pariwisata / Sewa Kios Tempat Pariwisata	68.186.000,00
-	Setoran MCK Tempat Pariwisata	25.234.000,00
	Dinas Perikanan	21.952.000,00
-	BBI	21.952.000,00
	BPKAD	751.001.946,98
-	Pengembalian Penyerapan Belanja	413.267.970,12
-	Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19	4.255.000,00
-	Denda Keterlambatan Pekerjaan	48.493.021,00
-	Penerimaan dari Penjualan Kelapa	2.400.000,00
-	Penerimaan dari Tindakan lanjut Temuan BPK	175.179.601,23
-	Penjualan BMD yang rusak	2.254.000,00
-	Selisih Pemotongan dan Setoran PFK	5.685.381,00
-	Penerimaan dari Piutang Anggota DPRD 1999-2004	2.000.000,00
-	Penerimaan dari temuan inspektorat	94.966.973,63
-	Setoran atas pelepasan tanah	2.500.000,00
Jumlah		866.373.946,98

Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	816.785.209,00	827.282.336,00	101,29	739.084.954,00	88.197.382,00
2	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	1.594.037.017,00	1.568.774.018,00	98,42	1.653.711.341,00	(84.937.323,00)
3	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	755.230.260,00	776.662.295,00	102,84	791.217.789,00	(14.555.494,00)
4	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonorejo	437.690.072,00	436.601.144,00	99,75	448.764.284,00	(12.163.140,00)
5	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	1.090.559.463,00	1.143.306.590,00	104,84	1.150.851.086,00	(7.544.496,00)
6	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	392.710.840,00	303.842.900,00	77,37	274.816.500,00	29.026.400,00
7	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	576.303.791,00	579.574.676,00	100,57	558.070.721,00	21.503.955,00
8	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	377.142.416,00	348.547.638,00	92,42	378.195.574,00	(29.647.936,00)
9	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuwu	545.041.569,00	535.285.393,00	98,21	508.953.093,00	26.332.300,00
10	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	369.426.071,00	350.824.805,00	94,96	356.527.564,00	(5.702.759,00)
11	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	759.739.387,00	740.939.200,00	97,53	736.951.725,00	3.987.475,00
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	501.736.782,00	411.223.400,00	81,96	491.977.894,00	(80.754.494,00)
13	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	968.517.769,00	1.002.177.900,00	103,48	994.322.100,00	7.855.800,00
14	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	370.142.540,00	361.613.150,00	97,70	341.503.780,00	20.109.370,00
15	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	1.804.815.446,00	1.874.270.400,00	103,85	1.815.570.529,00	58.699.871,00
16	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	989.185.288,00	1.011.069.750,00	102,21	1.009.972.186,00	1.097.564,00
17	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	557.519.187,00	515.781.300,00	92,51	639.173.226,00	(123.391.926,00)
18	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	415.155.339,00	340.427.649,00	82,00	361.343.100,00	(20.915.451,00)
19	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.830.295.326,00	1.537.669.674,00	84,01	1.687.410.804,00	(149.741.130,00)
20	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	1.114.281.192,00	971.989.678,00	87,23	1.042.096.130,00	(70.106.452,00)
21	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	1.025.276.307,00	1.035.764.925,00	101,02	1.170.580.656,00	(134.815.731,00)
22	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	1.087.047.501,00	1.022.471.250,00	94,06	1.104.233.800,00	(81.762.550,00)
23	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	761.205.340,00	764.921.900,00	100,49	901.216.150,00	(136.294.250,00)
24	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	812.635.950,00	577.313.050,00	71,04	609.190.732,00	(31.877.682,00)
Jumlah		19.952.480.062,00	19.038.335.021,00	95,42	19.765.735.718,00	(727.400.697,00)

Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama merupakan pendapatan yang dasar pemungutannya adalah kesepakatan dan perjanjian antar



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pemerintah Daerah dengan Fihak Ketiga. Pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp879.362.068,00 atau sebesar 109,58% dari target anggaran APBD dan mengalami penurunan sebesar Rp150.766.626,00 atau 14,64% dibandingkan Tahun 2019.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.407.431.916.652,00 dan realisasinya Rp1.397.617.150.411,00 atau sebesar 99,30%. Realisasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019, realisasi pendapatan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp72.130.513.447,00. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2020.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30	1.045.809.355.927,00	60.259.764.423,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00	327.787.989.440,00	(125.438.060.440,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114,08	90.982.239.491,00	(15.752.987.430,00)
4	Bantuan Keuangan	13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00	5.168.079.000,00	8.800.770.000,00
JUMLAH		1.407.431.916.652,00	1.397.617.150.411,00	99,30	1.469.747.663.858,00	(72.130.513.447,00)

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.106.069.120.350,00 atau sebesar 98,30% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp60.259.764.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	40.544.653.647,00	37.256.152.066,00	91,89	26.165.605.233,00	11.090.546.833,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	41.132.760.795,00	45.370.175.403,00	110,30	55.631.283.804,00	(10.261.108.401,00)
3	Dana Alokasi Umum	748.480.938.000,00	739.879.366.000,00	98,85	817.563.878.000,00	(77.684.512.000,00)
4	Dana Alokasi Khusus	295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96,12	146.448.588.890,00	137.114.837.991,00
JUMLAH		1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30	1.045.809.355.927,00	60.259.764.423,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp37.256.152.066,00 yang terdiri dari:

- 1.1) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.410.966.231,00 terealisasi sebesar Rp16.771.790.869,00.

Realisasi sebesar Rp16.771.790.869,00 terdiri dari sebesar Rp1.003.241.690,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp2.553.126.541,00 merupakan kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 36/PMK.07/2020, sebesar Rp8.003.091.000,00 merupakan realisasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp5.212.331.638,00 merupakan kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

- 1.2) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.706.436.997,00 terealisasi sebesar Rp16.326.714.866,00.

Realisasi sebesar Rp16.326.714.866,00 terdiri dari sebesar Rp424.773.997,00 kurang bayar tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp15.376.119.368,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp525.821.501,00 kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

- 1.3) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.427.250.419,00 terealisasi sebesar Rp4.157.646.331,00.

Realisasi sebesar Rp4.157.646.331,00 terdiri dari Rp647.195.288,00 kurang bayar tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp3.498.437.600,00 realisasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp12.013.443,00 kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar Rp45.370.175.403,00 yang terdiri dari:

- 2.1) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Kehutanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp357.568.133,00 terealisasi sebesar Rp193.834.428,00,



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Realisasi sebesar Rp193.834.428,00, terdiri dari sebesar Rp22.223.928,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp171.610.500,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp534.325,00 kurang bayar Tahun 2017 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020, sebesar (Rp534.325,00) pemotongan kurang bayar Tahun 2017 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020.

- 2.2) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56.261.436,00 terealisasi sebesar Rp44.296.086,00

Realisasi sebesar Rp44.296.086,00 terdiri dari sebesar Rp3.436,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp44.292.650,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

- 2.3) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.156.103.072,00 terealisasi sebesar Rp1.125.961.957,00.

Realisasi sebesar Rp1.125.961.957,00 terdiri dari sebesar Rp405.045.742,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp267.290.700,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp453.625.515,00 kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020, sebesar (Rp447.148.521,00) pemotongan kurang bayar Tahun 2019 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020.

- 2.4) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.592.666.192,00 terealisasi sebesar Rp788.276.289,00.

Realisasi sebesar Rp788.276.289,00 terdiri dari sebesar Rp3.677.289,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp784.599.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

- 2.5) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp37.803.687.552,00.

Realisasi sebesar Rp37.803.687.552,00 terdiri dari Rp7.995.279.045,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp14.977.035.600,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp14.831.372.907,00 kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

- 2.6) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.535.930.996,00 terealisasi sebesar Rp5.382.490.341,00.

Realisasi sebesar Rp5.382.490.341,00 terdiri dari Rp2.627.029.016,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20/PMK.07/2020, sebesar Rp1.730.586.200,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebesar Rp1.024.875.125,00 kurang bayar Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

- 2.7) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.233.524,00 terealisasi sebesar Rp31.628.750,00.

Realisasi sebesar Rp31.628.750,00 terdiri dari sebesar Rp31.628.750,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

3) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp739.879.366.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.10 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp748.480.938.000,00. Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp748.480.938.000,00 terealisasi sebesar Rp739.879.366.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp283.563.426.881,00

Dana Alokasi Khusus tersebut realisasi dari pagu APBD sebesar Rp295.010.511.548,00 terealisasi sebesar Rp283.563.426.881. Pada Tahun 2020 struktur rincian rekening Dana Alokasi Khusus berbeda dengan struktur rekening di Tahun 2019. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Bidang Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	19.538.018.087,00	(19.538.018.087,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
2	DAK Bidang Pendidikan – LRA	0,00	0,00	0,00	15.346.644.450,00	(15.346.644.450,00)
3	Dana Alokasi Khusus - LRA	295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96,12	111.563.926.353,00	171.999.500.528,00
Jumlah		295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96,12	146.448.588.890,00	137.114.837.991,00

DAK Bidang Kesehatan merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Sedangkan Anggaran dan realisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun 2020 masuk ke rekening Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus Terdiri dari:

4.1) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp95.705.677.357,00 dari Pagu Anggaran Rp104.539.499.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Alokasi Khusus Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Reguler untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp80.209.926.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp80.008.636.000,00, dan terealisasi sebesar Rp74.746.231.505,00.

- Dana Alokasi Khusus Penugasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Penugasan untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp24.828.603.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.530.863.755,00 dan terealisasi sebesar Rp20.959.445.852,00.

4.2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 Dana Alokasi Khusus Non Fisik



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

teralisasi sebesar Rp187.857.749.524,00 dari Pagu Anggaran Rp190.471.011.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp143.475.785.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp143.475.785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp143.475.785.000,00.

- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp0,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp221.125.000,00

- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp11.331.000.000, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.331.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.144.691.750,00.

- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOKB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOKB) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp24.279.559.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.411.980.793,00 dan terealisasi sebesar Rp29.313.115.389,00.

- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.932.186.000,00. Ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.932.186.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.908.256.885,00.

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.485.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.485.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.077.715.000,00

- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
 Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp491.010.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp491.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp477.972.500,00.

- Dana Pelayanan Kepariwisata

Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020 Dana Pelayanan Kepariwisata untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp344.050.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp344.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp239.088.000,00.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp202.349.929.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2020 merupakan Dana Penyesuaian terdiri dari:

Tabel 36 Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD – LRA	0,00	0,00	0,00	146.615.097.440,00	(146.615.097.440,00)
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	329.900.000,00	(329.900.000,00)
3	Dana Insentif Daerah - LRA	53.487.161.000,00	53.487.161.000,00	100,00	35.770.257.000,00	17.716.904.000,00
4	Dana Desa	148.862.768.000,00	148.862.768.000,00	100,00	145.072.735.000,00	3.790.033.000,00
Jumlah		202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00	327.787.989.440,00	(125.438.060.440,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)

Dana Tunjangan Profesi Guru PNS daerah (TPGPNSD) Tahun 2020 bersaldo Nol dikarenakan Anggaran dan Realisasi digabungkan pada rekening Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Tahun 2020 bersaldo Nol dikarenakan Anggaran dan Realisasi dipindah ke rekening Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3) Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp53.487.161.000,00 Pagu dan Realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.13, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp31.861.508.000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp12.589.569.000,00 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp9.036.084.000,00.

4) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp148.862.768.000,00. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.15 alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp148.862.768.000,00. ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp148.862.768.000,00 dengan realisasi sebesar Rp148.862.768.000,00 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - sebesar Rp75.229.252.061,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - sebesar Rp75.229.252.061,00 atau 114,08% dari anggaran yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37 Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.927.171.474,00	19.187.435.256,00	120,47	29.502.509.887,00	(10.315.074.631,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.201.018.526,00	7.207.664.723,00	138,58	12.483.245.663,00	(5.275.580.940,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.704.886.968,00	12.793.296.184,00	100,70	20.492.715.917,00	(7.699.419.733,00)
No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	181.006.578,00	204.902.566,00	113,20	255.935.781,00	(51.033.215,00)
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	31.930.191.116,00	35.835.953.332,00	112,23	28.247.832.243,00	7.588.121.089,00
	Jumlah	65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114,08	90.982.239.491,00	(15.752.987.430,00)

1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp19.187.435.256,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.206.038.105,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/317/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.007.547.632,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/481/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.007.547.632,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.238.054.587,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/611/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV pada Bulan Oktober



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dan Nopember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.728.247.300,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.927.171.474,00 dengan realisasi sebesar Rp19.187.435.256.

2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp7.207.664.723,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.155.781.895,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/317/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.444.727.368,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/481/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.444.727.368,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.582.194.892,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/611/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV pada Bulan Oktober dan Nopember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp580.233.200,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.201.018.526,00 dan terealisasi sebesar Rp7.207.664.723,00.

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp12.793.296.184,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.823.308.215,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/317/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.529.135.269,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/481/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.529.135.269,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.745.973.431,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/611/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV pada Bulan Oktober dan Nopember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.165.744.000,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.704.886.968,00 dengan realisasi sebesar Rp12.793.296.184,00.

4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan realisasi sebesar Rp204.902.566,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.223.684,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/317/KPTS/013/2020



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.279.605,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/481/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.279.605,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.161.872,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/611/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV pada Bulan Oktober dan Nopember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.957.800,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp181.006.578,00 dengan realisasi sebesar Rp204.902.566,00.

5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi sebesar Rp35.835.953.332,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/7/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.181.891.594,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/255/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas bagian Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.435.499.704,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/256/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.997.633.689,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/379/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.883.246.292,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/522/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.337.682.053,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.930.191.116,00 dengan realisasi sebesar Rp35.835.953.332,00.

Realisasi tersebut tidak termasuk didalamnya subsidi BPJS yang dipotong langsung dari Pendapatan Bagi Hasil pajak Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Pacitan dengan Kepala BPJS Kesehatan sebesar Rp3.097.168.292,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMk.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/646/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 diterima pada Kas Daerah sebesar Rp7.543.424.740,00 pada tanggal 8 Pebruari 2021 dengan Nomor STS 00006/STS/4.02.00/01/2021 sehingga pada Tahun 2020 ditetapkan sebagai Piutang Pendapatan lainnya.

1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya)

Bantuan Keuangan Tahun 2020 terealisasi Rp13.968.849.000,00 atau sebesar 100% dari pagu anggaran yang terdiri dari:

Tabel 38 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan keuangan dari Provinsi	13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00	5.168.079.000,00	8.800.770.000,00
Jumlah		13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00	5.168.079.000,00	8.800.770.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.800.770.000,00 atau 170,29% dikarenakan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan museum sebesar Rp9.000.000.000,00. Adapun rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1.	Pemenuhan Honor 45 orang Perawat Ponkesdes selama 12 bulan dengan kewajiban daerah menyediakan sharing sekurang-kurangnya 30%	783.000.000,00
2.	Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggihkan oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes	30.780.000,00
3.	Pemenuhan Honor 4 orang Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar selama 12 bulan	120.000.000,00
4.	Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang di tanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	5.040.000,00
5.	Pengembangan Taman Posyandu	125.000.000,00
6.	Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan	216.000.000,00
7.	Pendampingan Poskestren	121.029.000,00
8.	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-75 Tahun 2020	50.000.000,00
No	Uraian	Alokasi
9.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	2.832.000.000,00
10.	BOP MADIN	100.000.000,00
11.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru/Guru TK/Guru Paud Non PNS selama 12 bulan	576.000.000,00
12.	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00
13.	Pembangunan Museum SBY	9.000.000.000,00
Jumlah		13.968.849.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp57.662.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.554.240.000,00 atau sebesar 101,55%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	892.000.000,00	100,00	0,00	892.000.000,00
2	Hibah Dana BOS	57.662.240.000,00	57.662.240.000,00	100,00	50.089.880.000,00	7.572.360.000,00
Jumlah		57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55	50.089.880.000,00	8.464.360.000,00

1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp58.554.240.000,00 atau sebesar 101,55% dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp57.662.240.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp892.000.000,00

Realisasi sebesar Rp892.000.000,00 dikarenakan terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat di Tahun 2020 yang berasal dari Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS) di desa Kabupaten Pacitan.

2) Pendapatan hibah Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp57.662.240.000,00

Realisasi pendapatan dari dana BOS sebesar Rp57.662.240.000,00 0 atau sebesar 100,00% dari pagu yang ditetapkan. Pendapatan Hibah Bos yaitu bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah negeri jenjang pendidikan dasar guna menunjang kegiatan operasionalnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah penerima berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 231 Tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, Kemendikbud Nomor 419 Tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020, Kemendikbud Nomor 746/P Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Kemendikbud Nomor 1042/P/2020 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahap III Tahun 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 tanggal 28 September 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pendapatan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 dianggarkan dalam APBD pada Rekening Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Hibah Dana Bos, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana Bos pada entitas laporan PPKD. Adapun beberapa rincian pendapatan hibah SD Negeri dan SMP Negeri setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pemerintah	0,00	892.000.000,00	100,00	0,00	892.000.000,00
2	Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo	3.149.310.000,00	3.149.310.000,00	100,00	2.119.920.000,00	1.029.390.000,00
3	Hibah Dana BOS SD Kec. Punung	2.511.780.000,00	2.511.780.000,00	100,00	2.104.560.000,00	407.220.000,00
4	Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku	2.448.810.000,00	2.448.810.000,00	100,00	2.124.800.000,00	324.010.000,00
5	Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan	4.124.040.000,00	4.124.040.000,00	100,00	3.824.000.000,00	300.040.000,00
6	Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung	3.349.380.000,00	3.349.380.000,00	100,00	2.526.080.000,00	823.300.000,00
7	Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari	3.081.810.000,00	3.081.810.000,00	100,00	2.319.520.000,00	762.290.000,00
8	Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan	3.337.140.000,00	3.337.140.000,00	100,00	2.813.120.000,00	524.020.000,00
9	Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar	3.697.020.000,00	3.697.020.000,00	100,00	2.537.520.000,00	1.159.500.000,00
10	Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo	4.613.040.000,00	4.613.040.000,00	100,00	2.849.600.000,00	1.763.440.000,00
11	Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan	4.696.860.000,00	4.696.860.000,00	100,00	4.364.520.000,00	332.340.000,00
12	Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo	3.630.090.000,00	3.630.090.000,00	100,00	2.895.800.000,00	734.290.000,00
13	Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro	2.825.460.000,00	2.825.460.000,00	100,00	2.483.840.000,00	341.620.000,00
14	Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo	1.339.410.000,00	1.339.410.000,00	100,00	1.201.800.000,00	137.610.000,00
15	Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung	1.104.290.000,00	1.104.290.000,00	100,00	1.034.800.000,00	69.490.000,00
16	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku	990.380.000,00	864.160.000,00	87,26	845.200.000,00	18.960.000,00
17	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan	2.473.460.000,00	2.473.460.000,00	100,00	2.883.000.000,00	(409.540.000,00)
18	Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung	1.091.140.000,00	1.091.140.000,00	100,00	950.400.000,00	140.740.000,00
19	Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari	1.221.870.000,00	1.221.870.000,00	100,00	1.030.400.000,00	191.470.000,00
20	Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan	1.772.150.000,00	1.410.250.000,00	79,58	1.271.200.000,00	139.050.000,00
21	Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar	654.000.000,00	1.015.900.000,00	155,34	1.049.600.000,00	(33.700.000,00)
22	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo	1.102.300.000,00	1.102.300.000,00	100,00	890.600.000,00	211.700.000,00
23	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan	1.580.260.000,00	1.580.260.000,00	100,00	2.153.800.000,00	(573.540.000,00)
24	Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo	1.913.340.000,00	1.913.340.000,00	100,00	2.326.800.000,00	(413.460.000,00)
25	Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro	954.900.000,00	1.081.120.000,00	113,22	1.489.000.000,00	(407.880.000,00)
Jumlah		57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55	50.089.880.000,00	8.464.360.000,00

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai Rp1.106.069.120.350,00 atau mencapai 68,08% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencapai Rp2.669.553.062,2 atau 0,16% dari total realisasi pendapatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.624.631.028.789,38 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2020 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan sebesar Rp148.862.768.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2. Belanja	1.328.254.249.833,38	1.240.751.375.585,89	1.588.381.292.879,32

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.240.751.375.585,89 atau sebesar 93,41% dari anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.328.254.249.833,38. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp347.629.917.293,43 atau sebesar 21,89%. Rincian anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020, yaitu.

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.133.091.271.442,32	1.071.792.273.673,89	94,59	1.213.364.900.396,80	(141.572.626.722,91)
2	Belanja Modal	155.223.246.467,11	140.058.487.669,00	90,23	372.064.484.883,52	(232.005.997.214,52)
3	Belanja Tidak Terduga	39.939.731.923,95	28.900.614.243,00	72,36	2.951.907.599,00	25.948.706.644,00
Jumlah		1.328.254.249.833,38	1.240.751.375.585,89	93,41	1.588.381.292.879,32	(347.629.917.293,43)

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.071.792.273.673,89 atau sebesar 94,59% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	652.155.831.118,30	636.133.907.404,00	97,54	663.684.837.971,00	(27.550.930.567,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	371.048.465.969,02	337.205.696.775,89	90,88	377.705.610.356,80	(40.499.913.580,91)
3	Belanja Hibah	98.687.874.355,00	87.702.988.960,00	88,87	52.272.194.500,00	35.430.794.460,00
4	Belanja Bantuan Sosial	11.199.100.000,00	10.749.680.534,00	95,99	119.702.257.569,00	(108.952.577.035,00)
Jumlah		1.133.091.271.442,32	1.071.792.273.673,89	94,59	1.213.364.900.396,80	(141.572.626.722,91)

Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp141.572.626.722,91 atau 11,67% dari realisasi Tahun 2019. Penurunan realisasi terbesar terdapat pada komponen Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp636.133.907.404,00 atau sebesar 97,54% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar 2,46% merupakan penghematan anggaran tahun 2020 dikarenakan adanya mutasi pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	612.382.232.626,30	597.945.028.329,00	97,64	630.187.179.276,00	(32.242.150.947,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	19.203.657.800,00	17.829.881.639,00	92,85	15.242.440.330,00	2.587.441.309,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.272.581.100,00	6.196.430.950,00	98,79	5.806.496.000,00	389.934.950,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.563.874.519,00	1.547.857.821,00	98,98	1.652.579.500,00	(104.721.679,00)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	622.258.663,00	536.949.255,00	86,29	902.034.965,00	(365.085.710,00)
6	Uang Lembur	818.617.500,00	791.338.000,00	96,67	3.398.889.650,00	(2.607.551.650,00)
7	Belanja BOS	11.292.608.910,00	11.286.421.410,00	99,95	6.495.218.250,00	4.791.203.160,00
Jumlah		652.155.831.118,30	636.133.907.404,00	97,54	663.684.837.971,00	(27.550.930.567,00)

Realisasi tahun ini terjadi penurunan sebesar Rp27.550.930.567,00 atau 4,15% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2020. Diantara realisasi Belanja Pegawai sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BOS sebesar Rp11.286.421.410,00

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp337.205.696.775,89 atau sebesar 90,88% dari anggaran sebesar Rp371.048.465.969,02. Terjadi penghematan belanja sebesar 9,12% merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp40.499.913.580,91 atau 10,72% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp69.620.021.063,20, Honorarium Pengelola Dana BLUD sebesar Rp6.466.058.249,40 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp27.130.471.204,00.

Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.035.793.535,72	20.316.933.547,00	84,53	15.653.564.007,50	4.663.369.539,50
2	Belanja Bahan/Material	13.373.645.193,85	12.456.677.993,50	93,14	13.564.519.274,94	(1.107.841.281,44)
3	Belanja Jasa Kantor	80.375.073.139,20	76.919.128.255,74	95,70	64.196.132.556,60	12.722.995.699,14



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
4	Belanja Premi Asuransi	10.406.636.211,00	6.403.541.956,00	61,53	2.988.575.731,00	3.414.966.225,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.752.642.384,00	3.334.359.708,00	88,85	3.970.273.642,00	(635.913.934,00)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.470.202.451,00	7.176.316.850,00	96,07	10.077.402.656,00	(2.901.085.806,00)
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	737.961.952,00	469.105.867,00	63,57	1.001.828.350,00	(532.722.483,00)
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	239.384.210,00	228.039.400,00	95,26	941.218.400,00	(713.179.000,00)
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	(9.999.000,00)
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	760.200.400,00	713.808.900,00	93,90	1.676.133.970,00	(962.325.070,00)
11	Belanja Makanan dan Minuman	13.358.896.640,00	10.794.740.101,00	80,81	17.940.764.431,00	(7.146.024.330,00)
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.112.731.500,00	1.108.453.250,00	99,62	1.012.431.850,00	96.021.400,00
13	Belanja Pakaian Kerja	1.375.883.900,00	1.320.960.162,00	96,01	1.070.359.175,00	250.600.987,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.193.610.250,00	1.183.077.100,00	99,12	2.157.052.736,00	(973.975.636,00)
15	Belanja Perjalanan Dinas	46.048.604.117,00	39.533.670.801,25	85,85	63.490.228.147,00	(23.956.557.345,75)
16	Belanja Pemeliharaan	7.705.578.100,25	7.494.951.909,80	97,27	9.268.176.177,00	(1.773.224.267,20)
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.624.486.200,00	1.540.919.500,00	94,86	2.961.546.625,00	(1.420.627.125,00)
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.798.849.275,00	24.555.748.768,00	95,18	20.619.366.691,00	3.936.382.077,00
19	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	58.900.000,00	58,90	220.000.000,00	(161.100.000,00)
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.030.290.000,00	697.911.400,00	67,74	1.482.290.000,00	(784.378.600,00)
22	Belanja Honorarium Non Pegawai	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	0,00	56.000.000,00
23	Honorarium PNS	7.020.872.492,00	6.409.858.984,00	91,30	22.199.560.662,00	(15.789.701.678,00)
24	Honorarium Non PNS	6.500.330.971,00	6.200.715.000,00	95,39	1.515.302.300,00	4.685.412.700,00
25	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit	75.678.914.985,00	69.620.021.063,20	91,99	77.811.837.916,76	(8.191.816.853,56)
26	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	6.600.000.000,00	6.466.058.249,40	97,97	4.707.851.964,00	1.758.206.285,40
27	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	611.250.000,00	577.228.056,00	94,43	438.920.100,00	138.307.956,00
28	Belanja Jasa Profesi	5.711.002.840,00	4.388.098.750,00	76,84	8.492.505.209,00	(4.104.406.459,00)
29	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.319.625.222,00	27.130.471.204,00	95,80	28.237.768.785,00	(1.107.297.581,00)
Jumlah		371.048.465.969,02	337.205.696.775,89	90,88	377.705.610.356,80	(40.499.913.580,91)

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas terdapat Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan sebesar Rp25.798.849.275,00 dan terealisasi sebesar Rp24.555.748.768,00 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, harus dikonversi ke



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Belanja Hibah sebesar Anggaran Rp21.742.957.300,00 realisasi Rp20.557.232.968,00 dan dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial sebesar Anggaran Rp4.055.891.975,00 realisasi sebesar Rp3.998.515.800,00.

Adapun format konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam **Lampiran 2** dan Rincian Jenis Belanja Barang Yang akan Diserahkan Pada Masyarakat/Fihak Ketiga Per Satuan Kerja disajikan dalam **Lampiran 3**.

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp87.702.988.960,00 atau sebesar 88,87% dari anggaran sebesar Rp98.687.874.355,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	97.667.107.000,00	86.682.222.000,00	88,75	52.272.194.500,00	34.410.027.500,00
2	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.020.767.355,00	1.020.766.960,00	99,99	0,00	1.020.766.960,00
Jumlah		98.687.874.355,00	87.702.988.960,00	88,87	52.272.194.500,00	35.430.794.460,00

Realisasi Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp35.430.794.460,00 atau 67,78% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah. Adapun rincian penggunaan hibah dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	Keterangan Rincian Penerima
1	Badan/lembaga/organisasi swasta	30.851.500.000,00	20.778.500.000,00	535 Lembaga /Organisasi Swasta Yang Ada Di Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	11.169.000.000,00	10.708.500.000,00	852 Lembaga Paud berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/725/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020
3	Insentif Guru PAUD 166 desa	2.556.000.000,00	2.527.200.000,00	166 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 Hibah Insentif Guru PAUD 166 desa
4	KONI	950.000.000,00	950.000.000,00	Pembinaan Organisasi, Pembinaan Atlet Dan Pelatih, Porkab, Bonus Atlet Dan Pelatih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	Keterangan Rincian Penerima
5	PMI Kabupaten Pacitan	200.000.000,00	200.000.000,00	Operasional Kegiatan Pmi Kabbaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
6	Pramuka Kwarcab Pacitan	400.000.000,00	400.000.000,00	Operasional Pramuka Kwarcab Pacitan , berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
7	Kepolisian Resort Pacitan/Dukungan Pengamanan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	4.146.367.000,00	4.146.329.000,00	Pengamanan Idul Fitri, Natal Dan Tahun Baru, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/871/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
8	Kodim Kabupaten Pacitan/Panitia Pengamanan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	Pengamanan Idul Fitri, Natal Dan Tahun Baru, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/871/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
9	Kadin Kabupaten Pacitan	45.000.000,00	45.000.000,00	Operasional Kamar Dagang Dan Industri Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/871/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
10	KPU Kabupaten Pacitan	29.595.000.000,00	29.195.223.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
11	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	2.832.000.000,00	2.811.120.000,00	325 Lembaga, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/579/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
12	Insentif Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	271.200.000,00	271.200.000,00	95 Lembaga, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/579/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
13	Insentif Kinerja Guru Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	7 Lembaga, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/579/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	Keterangan Rincian Penerima
14	BANWASLU Kabupaten Pacitan	11.742.500.000,00	11.742.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Dan Pengadaan Alat Pelindung Diri Bagi Personil Jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/825/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
15	Operasional Organisasi, Apel Kebangsaan dan diklat kepemimpinan GP ANSOR Kec./Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	50.000.000,00	Operasional Organisasi Apel Kebangsaan Diklat Kepemimpinan Gp Ansor Kabupaten Pacitan, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/725/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
16	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	2.274.540.000,00	2.272.650.000,00	37 Lembaga, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/725/KPTS/408.12/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 Tentang Penerimaan dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkit Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
Total		97.667.107.000,00	86.682.222.000,00	

2) Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.020.767.355,00 terealisasi sebesar Rp1.020.766.960,00 atau anggaran kurang dari anggaran sebesar Rp395,00. Pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyesuaikan jumlah perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2020 dan mengacu pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/269/KPTS/408.12/2020 tentang Penerimaan dan Besaran Hibah Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	Partai DEMOKRAT	309.675.375,00	309.675.360,00	14
2	Partai GOLKAR	184.415.400,00	184.415.400,00	9
3	Partai PDI Perjuangan	118.023.300,00	118.023.200,00	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	99.060.975,00	99.060.960,00	5
5	Partai HANURA	76.711.950,00	76.711.920,00	3
6	Partai NASDEM	56.426.895,00	56.426.800,00	2
7	Partai GERINDRA	60.682.635,00	60.682.600,00	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	72.369.945,00	72.369.920,00	2



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
9	Partai Persatuan Pembangunan	43.400.880,00	43.400.800,00	2
Total		1.020.767.355,00	1.020.766.960,00	45

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2020, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.749.680.534,00 atau 95,99% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Bantuan Sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.	11.199.100.000,00	10.749.680.534,00	95,99	119.702.257.569,00	(108.952.577.035,00)
Jumlah		11.199.100.000,00	10.749.680.534,00	95,99	119.702.257.569,00	(108.952.577.035,00)

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp108.952.577.035,00 atau 91,02% dari tahun lalu dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas.

Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Bantuan Sosial tersebut pada pelaksanaannya dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.12/2020 tentang Penggunaan dan Besaran, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/848/KPTS/408.12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.12/2020. Adapun rincian jenis belanja bantuan sosial dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 50 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Keterangan Penggunaan
1	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	631.000.000,00	629.000.000,00	860 Orang, diperuntukkan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
2	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Pendidikan	150.000.000,00	0,00	
3	Bantuan Pangan daerah Grindulu Mapan	2.217.600.000,00	2.003.000.000,00	2226 orang, bantuan sosial pangan daerah grindulu mapan untuk rumah tangga miskin Kabupaten Pacitan.
4	Masyarakat Gangguan Jiwa/Pasung	247.500.000,00	247.030.700,00	88 Orang, Untuk penanganan pasien Kasus Gangguan Jiwa Kasus Gaduh Gelisah Agresifitas Rujukan meliputi Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan Pasien dan Transport Antar Jemput Pasien Rujukan ke RSJ jiwa Surakarta
5	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Penanggulangan Bencana	300.000.000,00	280.000.000,00	237 Orang, bantuan sosial bertujuan untuk memberikan stimulan bantuan berupa uang kepada masyarakat yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana alam
6	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Kesehatan	772.500.000,00	769.907.495,00	138 ORANG, Penerima bantuan social ini adalah masyarakat miskin non PBI yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan, Penerima bantuan social hanya dapat menerima dana bantuan sosial 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, Besaran bantuan social diberikan setinggi – tingginya Rp. 7.500.000,00
7	DAK Perumahan dan Permukiman	1.837.500.000,00	1.837.500.000,00	105 Orang, dipergunakan untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
8	Bantuan sosial tidak direncanakan (GNOTA)	68.000.000,00	68.000.000,00	340 Orang, Bantuan GNOTA digunakan untuk bantuan anak asuh (siswa miskin) tingkat Mt's se-Kabupaten Pacitan
9	Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi	500.000.000,00	444.550.000,00	90 orang, diperuntukkan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi
10	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3.975.000.000,00	3.975.000.000,00	318 Orang, dipergunakan untuk perbaikan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
11	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PMKS	200.000.000,00	195.692.339,00	151 Orang, Digunakan untuk Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2018
12	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	300.000.000,00	300.000.000,00	26 ORANG, dipergunakan untuk bantuan sosial Tidak direncanakan bidang rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		11.199.100.000,00	10.749.680.534,00	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 adalah sebesar Rp155.223.246.467,11, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp140.058.487.669,00 atau sebesar 90,23%. Penghematan belanja modal sebesar 9,77% merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2019, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp232.005.997.214,52 atau 62,36% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2020.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	1.591.045.975,00	934.954.200,00	58,76	7.403.905.650,00	(6.468.951.450,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.739.673.436,11	43.200.008.270,00	86,85	41.939.694.568,00	1.260.313.702,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.898.489.120,00	56.266.451.465,00	93,94	112.242.189.820,52	(55.975.738.355,52)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.047.370.062,00	33.804.571.317,00	88,85	191.062.012.582,00	(157.257.441.265,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.946.667.874,00	5.852.502.417,00	98,42	19.416.682.263,00	(13.564.179.846,00)
Jumlah		155.223.246.467,11	140.058.487.669,00	90,23	372.064.484.883,52	(232.005.997.214,52)

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp140.058.487.669,00, yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp8.074.923.866,37 atau 5,77%.

Diantara realisasi Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp19.097.426.844,00 yang terdiri dari peralatan mesin BOS sebesar Rp17.318.580.537,00 dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp1.778.846.307,00 serta Belanja Modal BLUD sebesar Rp2.396.720.210,00 yang dipergunakan untuk Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp2.381.225.060,00 dan Belanja Modal Gedung tempat Kerja BLUD sebesar Rp15.495.150,00

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp934.954.200,00 atau 58,76% dari target anggaran. Realisasi belanja



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

modal tanah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.468.951.450,00 atau 87,37%

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	320.000.000,00	291.054.000,00	90,95	6.890.394.300,00	(6.599.340.300,00)
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung	1.271.045.975,00	643.900.200,00	50,66	513.511.350,00	130.388.850,00
Jumlah		1.591.045.975,00	934.954.200,00	58,76	7.403.905.650,00	(6.468.951.450,00)

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2020 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp934.954.200,00 atau 100,00%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp43.200.008.270,00 atau 86,85% dari target anggaran yang dirincian sebagai berikut:

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	363.100.000,00	359.150.000,00	98,91	138.600.000,00	220.550.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	3.570.000.000,00	2.706.561.000,00	75,81	2.570.346.000,00	136.215.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.449.775.500,00	1.312.233.130,00	38,04	3.308.645.720,00	(1.996.412.590,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	3.135.000,00	56.265.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.889.058.500,00	1.539.852.500,00	81,51	862.898.800,00	676.953.700,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	23.206.000,00	21.648.000,00	93,29	500.617.860,00	(478.969.860,00)
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	113.320.000,00	111.677.500,00	98,55	406.769.000,00	(295.091.500,00)
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.560.326.716,00	1.422.772.670,00	91,18	2.240.412.224,00	(817.639.554,00)
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.694.943.630,00	1.938.577.106,00	71,93	1.670.849.038,00	267.728.068,00
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.908.871.129,00	2.818.197.136,00	96,88	6.077.372.899,00	(3.259.175.763,00)
11	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	852.370.775,00	824.813.225,00	96,77	1.197.781.016,00	(372.967.791,00)
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	652.707.738,00	623.092.319,00	95,46	955.750.157,00	(332.657.838,00)
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	46.795.000,00	45.619.000,00	97,49	78.608.500,00	(32.989.500,00)
14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	213.560.600,00	(213.560.600,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	7.835.346.323,11	6.859.490.477,00	87,55	8.185.998.260,00	(1.326.507.783,00)
16	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	74.535.000,00	70.396.970,00	94,45	811.376.560,00	(740.979.590,00)
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah	5.368.400.000,00	5.152.986.700,00	95,99	5.657.397.090,00	(504.410.390,00)
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73	60.915.000,00	(45.955.000,00)
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.261.917.125,00	17.318.580.537,00	94,83	6.998.660.844,00	10.319.919.693,00
Jumlah		49.739.673.436,11	43.200.008.270,00	86,85	41.939.694.568,00	1.260.313.702,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp43.200.008.270,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp40.675.350.450,63 atau 94% sedangkan realisasi sebesar Rp2.524.657.819,37 atau 6% dinonkapitalisasi.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp56.266.451.465,00 atau sebesar 93,94% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
A	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.321.475.415,00	46.994.275.003,00	95,28	89.724.530.763,53	(42.730.255.760,53)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.419.540.000,00	9.426.267.429,00	90,47	27.255.994.551,00	(17.829.727.122,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	12.207.327.000,00	10.980.902.084,00	89,95	16.664.012.952,53	(5.683.110.868,53)
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.541.608.415,00	26.436.210.865,00	99,60	37.537.169.190,00	(11.100.958.325,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	38.000.000,00	37.616.200,00	98,99	374.076.092,00	(336.459.892,00)
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	115.000.000,00	113.278.425,00	98,50	7.748.644.978,00	(7.635.366.553,00)
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kios Pedagang	0,00	0,00	0,00	144.633.000,00	(144.633.000,00)
B	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	500.000.000,00	498.065.000,00	99,61	205.801.000,00	292.264.000,00
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Menara	0,00	0,00	0,00	102.533.000,00	(102.533.000,00)
2	Belanja modal Pengadaan konstruksi / Pembelian Tempat Tanaman	0,00	0,00	0,00	3.745.500,00	(3.745.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja modal Pengadaan konstruksi Penerangan Jalan dan Taman	500.000.000,00	498.065.000,00	99,61	0,00	0,00
4	Belanja modal Sarana dan Prasarana Persampahan	0,00	0,00	0,00	99.522.500,00	(99.522.500,00)
C	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	270.000.000,00	268.482.500,00	99,44	488.067.248,00	(219.584.748,00)
1	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	270.000.000,00	268.482.500,00	99,44	488.067.248,00	(219.584.748,00)
D	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	0,00	0,00	94,24	275.264.300,00	(275.264.300,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu-Rambu	0,00	0,00	94,24	275.264.300,00	(275.264.300,00)
E	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian	9.807.013.705,00	8.505.628.962,00	86,73	21.548.526.508,99	(13.042.897.546,99)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Wisata	5.524.328.880,00	4.342.580.754,00	78,61	10.113.634.270,00	(5.771.053.516,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Fasilitas Sanitasi	0,00	0,00	0,00	539.361.368,00	(539.361.368,00)
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK	3.578.919.700,00	3.578.066.100,00	99,98	5.225.989.450,00	(1.647.923.350,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pengolah Sampah	0,00	0,00	0,00	2.896.107.413,00	(2.896.107.413,00)
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam	2.000.000,00	1.645.600,00	82,28	579.899.500,00	(578.253.900,00)
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	655.565.125,00	568.150.383,00	86,67	1.763.091.547,00	(1.194.941.164,00)
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	33.600.000,00	2.977.975,00	8,86	106.640.835,36	(103.662.860,36)
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura	12.600.000,00	12.208.150,00	96,89	323.802.125,63	(311.593.975,63)
Jumlah		59.898.489.120,00	56.266.451.465,00	93,94	112.242.189.820,52	(55.975.738.355,52)

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp56.266.451.465,00 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp51.741.661.042,00 atau 92% sedangkan realisasi sebesar Rp4.524.790.423,00 atau 8% dinonkapitalisasi.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut termasuk belanja untuk memperoleh aset yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp2.267.447.986,26 ada pada Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp33.804.571.317,00 atau sebesar 88,85% dari anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
A	Belanja Modal Pengadaan Jalan	28.751.366.562,00	26.052.971.490,00	90,61	121.559.002.116,00	(95.506.030.626,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	28.353.792.565,00	25.656.413.490,00	90,49	98.147.481.010,00	(72.491.067.520,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	397.573.997,00	396.558.000,00	99,74	23.411.521.106,00	(23.014.963.106,00)
B	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	28.070.000,00	26.766.500,00	95,36	26.159.096.341,00	(26.132.329.841,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung	670.000,00	580.000,00	86,57	422.602.042,00	(422.022.042,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	27.400.000,00	26.186.500,00	95,57	25.736.494.299,00	(25.710.307.799,00)
C	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.450.068.500,00	6.069.170.875,00	81,46	30.414.284.768,00	(24.345.113.893,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.742.122.550,00	5.370.065.025,00	79,65	27.412.662.332,00	(22.042.597.307,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	707.945.950,00	699.105.850,00	98,75	3.001.622.436,00	(2.302.516.586,00)
D	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	354.240.000,00	349.315.000,00	98,61	918.316.608,00	(569.001.608,00)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	354.240.000,00	349.315.000,00	98,61	918.316.608,00	(569.001.608,00)
E	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.111.125.000,00	1.048.412.722,00	94,36	5.369.421.372,00	(4.321.008.650,00)
1	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	1.111.125.000,00	1.048.412.722,00	94,36	5.369.421.372,00	(4.321.008.650,00)
F	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
1	Belanja Modal Konstruksi Sumur Bor/Gas	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
G	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	12.500.000,00	9.770.000,00	78,16	0,00	9.770.000,00
1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	12.500.000,00	9.770.000,00	78,16	0,00	9.770.000,00
H	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	255.000.000,00	248.164.730,00	97,32	804.155.864,00	(555.991.134,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	744.762.564,00	(744.762.564,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	224.000.000,00	222.375.230,00	99,27	59.393.300,00	162.981.930,00
3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	31.000.000,00	25.789.500,00	83,19	0,00	25.789.500,00
I	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	5.837.735.513,00	(5.837.735.513,00)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	5.837.735.513,00	(5.837.735.513,00)
Jumlah		38.047.370.062,00	33.804.571.317,00	88,85	191.062.012.582,00	(157.257.441.265,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp33.804.571.317,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp33.804.571.317,00 atau 100,00%.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp5.852.502.417,00, atau 98,42% dari target anggaran yang terdiri dari:

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	198.469.305,00	197.891.200,00	99,71	7.273.291.561,00	(7.075.400.361,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.237.000.000,00	1.229.393.000,00	99,39	2.125.790.900,00	(896.397.900,00)
3	Belanja modal Pengadaan Hewan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	0,00	34.000.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	21.600.000,00	19.910.000,00	92,18	20.500.000,00	(590.000,00)
5	Belanja Modal BLUD	2.400.000.000,00	2.396.720.210,00	99,86	3.237.688.832,00	(840.968.622,00)
6	Belanja Modal Software	272.320.000,00	195.741.700,00	71,88	256.846.700,00	(61.105.000,00)
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.783.278.569,00	1.778.846.307,00	99,75	6.502.564.270,00	(4.723.717.963,00)
Jumlah		5.946.667.874,00	5.852.502.417,00	98,42	19.416.682.263,00	(13.564.179.846,00)

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp5.852.502.417,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp4.827.026.793,00 atau 82% sedangkan realisasi Rp1.025.475.624,00 atau 18% dinonkapitalisasi.

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp28.900.614.243,00 atau 72,36% dari anggaran sebesar Rp39.939.731.923,95. Adapun rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 57 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	RSUD DR. DARSONO KABUPATEN PACITAN	6.659.277.617,00
A	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 655 / KPTS / 408.12 / 2020	1.808.219.339,00
-	Pencairan Batuan Tidak terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 untuk Penunjang Alat Kesehatan dan APD dari RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	250.075.625,00
-	Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	49.477.803,00
-	Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	317.665.775,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi
	- Pencairan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid-19 RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	1.191.000.136,00
B	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 781 / KPTS / 408.12 / 2020	1.822.630.636,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 untuk RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahap IV Tahun 2020	800.000.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Covid-19 untuk RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	577.267.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Covid-19 untuk RSUD dr. Darsono Tahap III Kabupaten Pacitan Tahun 2020	445.363.636,00
C	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahap Keempat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor: 188.45 / 911 / KPTS / 408.12 / 2020	2.313.005.960,00
	- Pencairan data Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid-19 untuk Insentif Petugas Kesehatan Tahun 2020	1.174.902.884,00
	- Pencairan dana BTT penanganan Covid untuk RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	1.500.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan untuk Insentif Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 Bulan September s/d Nopember Tahun 2020	1.136.603.076,00
D	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahap kedua sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 575 / KPTS / 408.12 / 2020	716.884.182,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap I untuk Penanganan Covid -19 Pengadaan APD dan Alat Kedokteran pada RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	221.441.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk Pengadaan Alat Kedokteran dll. Tahun 2020	462.443.182,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap 3 untuk Pengadaan Kelengkapan Kerja / Masker Bedah pada RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	33.000.000,00
E	Pengembalian Belanja Belanja Tidak Terduga (BTT) Penganganan Covid-19 dari RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2020	(1.462.500,00)
2	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN	10.750.410.783,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 538 / KPTS / 408.12 / 2020	751.000.000,00
	- Pencairan Anggaran Tak Terduga untuk Pengadaan Barang Logistik untuk Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	751.000.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga 188.45 / 646 / KPTS / 408.12 / 2020	7.965.650.000,00
	- Pencairan dan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	7.965.650.000,00
C	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 578 / KPTS / 408.12 / 2020	6.807.576.301,00
	- Pencaira bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid-19 belanja peralatan penguji kesehatan dll. Tahun 2020	194.098.908,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk Pengadaan Alat Kedokteran dll. Tahun 2020	1.197.993.311,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020	2.888.666.736,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Insentif Tenaga Medis, Honor/Jasa	209.167.346,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi
	Tenaga Sukarela dan Kedaruratan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020	
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Tertuga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020	2.317.650.000,00
D	Pengembalian penyerapan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 dari Dinas Kesehatan Tahun 2020	(4.773.815.518,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.162.866.500,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana alam banjir di Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 498.A / KPTS / 408.12 / 2020	450.000.000,00
	- Pencairan dana tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Kerusakan Jalan dan Jembatan Akibat Banjir di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	450.000.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 996 / KPTS / 408.12 / 2020	252.500.000,00
	- Pencairan Bantuan Dana Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	252.500.000,00
C	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 966 / KPTS / 408.12 / 2020	475.000.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	475.000.000,00
D	Pengembalian Belanja Tidak Terduga (BTT) kedaruratan akibat Becana Tanah Longsor Tahun 2020	(12.407.500,00)
E	Pengembalian bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	(2.226.000,00)
4	SATPOL PP	800.988.000,00
A	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 656 / KPTS / 408.12 / 2020	288.848.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	93.696.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	195.152.000,00
B	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahap Kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 833 / KPTS / 408.12 / 2020	94.650.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 untuk Satpol PP Tahun 2020	94.650.000,00
C	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 840 / KPTS / 408.12 / 2020	150.000.000,00
	- Pencairan dana BTT penanganan Covid-19 untuk Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	150.000.000,00
D	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahap Keempat sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 993 / KPTS / 408.12 / 2020	177.150.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 (Tahap V) untuk Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	17.850.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 (Tahap V) untuk Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	159.300.000,00
E	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 188.45 / 1015 / KPTS / 408.12 / 2020	110.940.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Satpol PP Kabupaten Pacitan untuk Operasional Penegakan Disiplin dan Protokol Kesehatan penanganan Covid-19 Tahun 2020	110.940.000,00
F	Pengembalian Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 dari Satpol PP Kabupaten Pacitan Tahun 2020	(20.600.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.326.504.575,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 564 / KPTS / 408.12 / 2020	688.150.000,00
	- Pencairan Anggaran Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	688.150.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahap Kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan nomor 188.45 / 591 / KPTS / 408.12 / 2020	1.694.660.000,00
	- Pencairan dana dari Belanja Tak Terduga untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> kebutuhan Operasional Posko Induk dan Posko Perbatasan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	1.126.987.500,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> Tahun 2020	567.672.500,00
C	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 653 / KPTS / 408.12 / 2020	423.650.000,00
	- Pencairan Bantuan dari dana Belanja Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> di Kabupaten Pacitan	198.670.000,00
	- Pencairan dan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i> di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	112.500.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2020	112.480.000,00
D	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 1014 / KPTS / 408.12 / 2020	54.670.000,00
	- Pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kabupaten Pacitan untuk Pembuatan Banner Himbauan 3 M Tahun 2020	54.670.000,00
E	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45 / 1079 / KPTS / 408.12 / 2020	32.355.000,00
F	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor: 188.45 / 979 / KPTS / 408.12 / 2020	29.500.000,00
	Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	29.500.000,00
	- Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 pada BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2020	32.355.000,00
F	Pengembalian Bantau Tidak terduga (BTT) penanganan Covid-19 dari BPBD	(596.480.425,00)
6	DINAS SOSIAL	4.174.875.000,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 577 / KPTS / 408.12 / 2020	4.050.000.000,00
	- Pencairan dana dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus (Covid-19) untuk pengadaan sembako dalam rangka penanganan tanggap darurat Tahun 2020	4.050.000.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahab Kedua sesuai Surat Keputusan bupati Pacitan Nomor: 188.45 / 652 / KPTS / 408.12 / 2020	93.318.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2020	93.318.000,00
C	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga sesuai Surat Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 838 / KPTS / 408.12 / 2020	21.185.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2020	21.185.000,00
D	Penanggulangan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian	12.405.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi
	dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga sesuai Surat Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 919 / KPTS / 408.12 / 2020	
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19 untuk Dinas Sosial Tahun 2020	12.405.000,00
E	Pengembalian bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Dinas Sosial Tahun 2020	(2.033.000,00)
7	DINAS PERHUNUNGAN	179.646.880,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 574 / KPTS / 408.12 / 2020	176.000.000,00
	- Pencairan Anggaran Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	176.000.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahap Kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 651 / KPTS / 408.12 / 2020	25.500.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2020	25.500.000,00
C	Pengembalian Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Dinas Perhubungan Tahun 2020	(21.853.120,00)
8	DINAS PARIWISATA	468.757.600,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 696 / KPTS / 408.12 / 2020	470.913.000,00
	- Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Persiapan New Normal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2020	470.913.000,00
B	Pengembalian Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 dari Disparpora Tahun 2020	(2.155.400,00)
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	113.013.484,00
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 576 / KPTS / 408.12 / 2020	150.000.000,00
	- Pencairan dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020	150.000.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahap Kedua sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 657 / KPTS / 408.12 / 2020	15.000.000,00
	- Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Perindag Kabupaten Pacitan Tahun 2020	15.000.000,00
C	Pengembalian Belanja Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Dinas Perindag	(51.986.516,00)
10	PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN LALU	2.264.273.804,00
A	Pengembalian Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Pemerintah Kabupaten Pacitan TA 2018 (melalui Aplikasi Simponi)	2.085.173.804,00
B	Pencairan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	74.100.000,00
C	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kesalahan penyetoran Desa Purwasri Kecamatan Kebonagung Tahun Anggaran 2019	105.000.000,00
Jumlah		28.900.614.243,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Terjadi kenaikan realisasi yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yaitu sebesar Rp25.948.706.644,00 atau 879,05% dari realisasi Tahun 2019 karena adanya penanganan tanggap darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dan pengembalian pendapatan tahun sebelumnya.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
3. Transfer	330.922.137.303,56	329.519.614.874,56	332.832.832.687,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp329.519.614.874,56 atau sebesar 99,58% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp3.313.217.812,44,00 atau sebesar 1,00% dari realisasi Tahun 2019. Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak	3.812.519.203,00	3.610.057.615,00	94,69	3.591.658.857,00	18.398.758,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.141.067.801,00	1.558.006.960,00	72,77	1.928.825.286,00	(370.818.326,00)
3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	324.968.550.299,56	324.351.550.299,56	99,81	327.312.348.544,00	(2.960.798.244,44)
JUMLAH		330.922.137.303,56	329.519.614.874,56	99,58	332.832.832.687,00	(3.313.217.812,44)

3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak

Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp3.610.057.615,00 atau sebesar 94,69% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.398.758,00 atau sebesar 0,51% dari realisasi Tahun 2019. Rincian Bagi Hasil Pajak masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa					
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	284.498.111,00	272.245.695,00	95,69	435.631.481,00	(163.385.786,00)
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	300.682.009,00	286.812.823,00	95,39	387.748.568,00	(100.935.745,00)
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	307.104.876,00	293.600.723,00	95,60	344.996.218,00	(51.395.495,00)
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	450.710.261,00	421.004.116,00	93,41	296.657.813,00	124.346.303,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	423.875.181,00	400.038.598,00	94,38	283.618.700,00	116.419.898,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	382.825.968,00	354.692.790,00	92,65	259.500.242,00	95.192.548,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	219.715.954,00	209.876.918,00	95,52	246.709.942,00	(36.833.024,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
	Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan					
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	187.876.454,00	180.580.579,00	96,12	372.014.795,00	(191.434.216,00)
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	256.949.247,00	245.818.170,00	95,67	348.178.583,00	(102.360.413,00)
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	364.753.478,00	346.432.453,00	94,98	226.276.381,00	120.156.072,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	399.347.880,00	374.311.441,00	93,73	212.642.869,00	161.668.572,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	234.179.784,00	224.643.309,00	95,93	177.683.265,00	46.960.044,00
JUMLAH		3.812.519.203,00	3.610.057.615,00	94,69	3.591.658.857,00	18.398.758,00

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa. Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per obyek pajak untuk masing-masing desa TA 2020 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 4**.

3.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi

Transfer Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.558.006.960,00 atau sebesar 72,77% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp370.818.326,00 atau sebesar 19,23% dari realisasi Tahun 2019. Dari realisasi tersebut diatas sebesar Rp235.682.420,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan dan sebesar Rp1.322.324.540,00 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri dari.

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan.	237.015.360,00	235.682.420,00	99,44	356.778.740,00	(121.096.320,00)
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	312.756.063,00	243.277.295,00	77,78	153.344.357,00	89.932.938,00
3	Belanja Bagi Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	288.795.057,00	193.133.880,00	66,88	128.251.908,00	64.881.972,00
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	176.387.977,00	108.205.916,00	61,35	158.674.540,00	(50.468.624,00)
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	182.324.940,00	125.992.120,00	69,10	133.814.860,00	(7.822.740,00)
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	152.911.886,00	106.229.883,00	69,47	232.408.701,00	(126.178.818,00)
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan	187.338.716,00	125.196.777,00	66,83	250.251.770,00	(125.054.993,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
	Arjosari					
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	77.232.595,00	53.934.059,00	69,83	75.429.178,00	(21.495.119,00)
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	68.203.031,00	46.784.214,00	68,60	131.710.928,00	(84.926.714,00)
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	88.527.923,00	61.501.495,00	69,47	115.711.280,00	(54.209.785,00)
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	133.306.048,00	93.611.160,00	70,22	68.571.980,00	25.039.180,00
12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	155.788.275,00	108.547.291,00	69,68	65.373.481,00	43.173.810,00
13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	80.479.930,00	55.910.450,00	69,47	58.503.563,00	(2.593.113,00)
JUMLAH		2.141.067.801,00	1.558.006.960,00	72,77	1.928.825.286,00	(370.818.326,00)

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa. Total penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 untuk masing-masing desa adalah sebesar Rp1.322.324.540,00, adapun rincian per obyek retribusi di masing-masing desa dijelaskan dalam **Lampiran 5**.

3.3 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp324.351.550.299,56 atau sebesar 99,81% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp2.960.798.244,44 atau sebesar 0,90% dari realisasi Tahun 2019. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/146/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/951/KPTS/408.12/2020.

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	996.040.990,00	(996.040.990,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	19.818.859.633,69	19.817.659.633,69	99,99	18.605.938.083,00	1.211.721.550,69



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
	Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo					
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	27.926.572.860,74	27.926.572.860,74	100,00	26.187.930.170,00	1.738.642.690,74
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	25.112.665.439,55	25.011.465.439,55	99,60	22.452.509.344,00	2.558.956.095,55
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	32.471.117.056,00	32.394.917.056,00	99,77	31.571.725.893,00	823.191.163,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	35.285.543.698,87	35.284.343.698,87	100,00	34.901.321.232,00	383.022.466,87
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	24.871.629.134,71	24.865.629.134,71	99,98	25.733.771.467,00	(868.142.332,29)
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	28.631.126.548,00	28.631.126.548,00	100,00	31.082.733.401,00	(2.451.606.853,00)
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	20.477.904.335,00	20.427.904.335,00	99,76	19.095.760.122,00	1.332.144.213,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	21.709.906.495,00	21.559.906.495,00	99,31	22.937.430.260,00	(1.377.523.765,00)
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	38.383.977.648,00	38.227.777.648,00	99,59	37.795.347.826,00	432.429.822,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	30.685.678.551,00	30.665.678.551,00	99,93	35.264.537.525,00	(4.598.858.974,00)
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	19.593.568.899,00	19.538.568.899,00	99,72	20.687.302.231,00	(1.148.733.332,00)
Jumlah		324.968.550.299,56	324.351.550.299,56	99,81	327.312.348.544,00	(2.960.798.244,44)

Di dalam realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp324.351.550.299,56 termasuk di dalamnya terdapat realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagaimana **Lampiran 6**.

Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar Rp148.862.768.000,00 yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN total sebesar Rp148.862.768.000,00. Realisasi Penggunaan Dana Desa adalah sebesar Rp142.857.582.942,00 dan sisa dana sebesar Rp6.005.185.101,00 menjadi SiLPA pada masing-masing desa. Adapun rincian penggunaan atau realisasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 7**.

	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	(40.624.149.354,74)	54.360.038.328,93	(202.332.194.190,81)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp54.360.038.328,93 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38	1.718.881.931.375,51	(94.250.902.586,13)
2	Belanja dan Transfer	1.659.176.387.136,94	1.570.270.990.460,45	94,64	1.921.214.125.566,32	(350.943.135.105,87)
	Surplus (Defisit)	(40.624.149.354,74)	54.360.038.328,93	5,74	(202.332.194.190,81)	256.692.232.519,74

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	40.624.149.354,74	42.191.996.500,74	244.403.143.545,55

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp42.191.996.500,74 atau sebesar 96,94% dari anggaran sebesar Rp40.624.149.354,74 dan turun sebesar Rp202.211.147.044,81 atau 82,87% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	42.074.149.354,74	42.191.996.500,74	100,28	245.353.143.545,55	(203.161.147.044,81)
2	Pengeluaran pembiayaan	1.450.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	(950.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	40.624.149.354,74	42.191.996.500,74	96,94	244.403.143.545,55	(202.211.147.044,81)

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp42.191.996.500,74 atau 100,28% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp203.161.147.044,81 atau 82,80% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	42.070.949.354,74	42.184.796.500,74	100,27	245.350.493.545,55	(203.165.697.044,81)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.200.000,00	7.200.000,00	225,00	2.650.000,00	4.550.000,00
	Jumlah	42.074.149.354,74	42.191.996.500,74	100,28	245.353.143.545,55	(203.161.147.044,81)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar 42.184.796.500,74 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp42.070.949.354,74 dan koreksi atas Kopersasi PPh21 atas kesalahan pencatatan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2019 sebesar Rp113.847.146,00.

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp7.200.000,00 merupakan penerimaan dari Perjanjian Pinjaman (pokok piutang Dana Bergulir/*revolving*) pada Dinas Pertanian.

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 berupa penyertaan modal tidak ada realisasi dikarenakan adanya penyempurnaan Perda Penyertaan Modal.

Tabel 65 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	(600.000.000,00)
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	(350.000.000,00)
Jumlah		1.450.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	(950.000.000,00)

5.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp50.000.000,00 setiap tahun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) pada Tahun 2020 tidak direalisasikan dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah terbaru terkait Penyertaan Modal.

Perda Penyertaan Modal terhadap PDAM masih dalam proses penyempurnaan dalam tahap proses evaluasi Gubernur sedangkan untuk Investasi pada BPR Jatim belum bisa dilaksanakan karena proposal yang diajukan tidak memenuhi ketentuan/kurang layak.

5.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 dikarenakan Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pelayanan masyarakat untuk memberikan bantuan modal secara bergulir masih dapat dipenuhi dari Saldo Bank Dana Bergulir yang berasal dari angsuran pokok dana bergulir yang akan digulirkan kembali. Kas dan Bank dari dana guliran dan dampak pandemi Covid-19 dibulan-bulan awal ada keterbatasan pada proses penyaluran pinjaman.

		Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan				
Anggaran Tahun		0,00	96.552.034.829,67	42.070.949.354,74
Berkenaan (SiLPA)				

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp96.552.034.829,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38	1.718.881.931.375,51	(94.250.902.586,13)
2	Belanja dan Transfer	1.659.176.387.136,94	1.570.270.990.460,45	94,64	1.921.214.125.566,32	(350.943.135.105,87)
3	Surplus/Defisit	(40.624.149.354,74)	54.360.038.328,93	(133,81)	(202.332.194.190,81)	256.692.232.519,74
4	Pembiayaan Netto	40.624.149.354,74	42.191.996.500,74	103,86	244.403.143.545,55	(202.211.147.044,81)
	SILPA	0,00	96.552.034.829,67	0,00	3.682.167.006.296,57	(390.712.952.217,07)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp96.552.034.829,67 tersebut terdiri dari.

Tabel 67 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2020	Jumlah Kas 2019
1	Kas Di Kas Daerah	74.422.988.355,87	24.603.345.598,92
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	32.276.393,00	32.073.827,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	18.369.611.359,67	13.146.841.158,19
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1.584.048.353,13	2.407.346.090,63
6	Kas di Bendahara Dana BOS	2.143.110.368,00	1.995.189.826,00
8	Utang Pajak	0,00	-113.847.146,00
	SiLPA LRA	96.552.034.829,67	42.070.949.354,74

Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp42.070.949.354,74. Terdapat koreksi atas Kopersasi PPh21 sebesar Rp113.847.146,00 pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2019 sehingga Tahun 2020 untuk nilai realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp42.184.796.500,74 yang terdiri dari:

Silpa Tahun 2019 : Rp42.070.949.354,74



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Koreksi Kesalahan	: Rp 113.847.146,00
Saldo Silpa	: Rp42.184.796.500,74

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam Pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

1. SAL Awal

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	42.184.796.500,74	245.350.493.545,55

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp42.184.796.500,74 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 sebesar Rp42.070.949.354,74 ditambah koreksi atas kesalahan pencatatan utang kompensasi PPh21 Tahun 2018 sebesar Rp113.847.146,00 sehingga untuk rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah sebagai berikut:

SiLPA BEBAS	Rp13.385.690.374,92
SiLPA TERIKAT :	Rp28.685.258.979,82
BLUD	Rp 13.178.914.985,19
JKN	Rp 2.407.346.090,63
BOS	Rp 1.995.189.826,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp 1.666.832.326,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) :	
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp 81.899.000,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp 522.875.000,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp 1.186.308.250,00
- Dana Bantuan	Rp 407.285.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	4.843.051.783,00	
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	23.929.115,00	
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp	13.037.500,00	
- Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	104.962.000,00	
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	Rp	23.259.050,00	
Bantuan Keuangan	Rp	145.195.250,00	
Hibah Pemerintah Pusat	Rp	2.085.173.804,00	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			Rp 113.847.146,00
Jumlah SiLPA			Rp 42.184.796.500,74

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penggunaan SAL		
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	42.184.796.500,74	245.350.493.545,55

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp42.184.796.500,74 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2020 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah tahun 2019.

Pelampauan penerimaan PAD	Rp (756.500.137,93)
Pajak Daerah	Rp 2.781.980.102,63
Retribusi Daerah	Rp 808.395.522,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp 168.600.907,31



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dipisahkan		
Lain-Lain PAD yang sah	Rp	(4.515.476.670,37)
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	Rp	(73.831.465.244,00)
Bagi Hasil Pajak	Rp	(50.825.788.499,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	-
Dana Alokasi Khusus	Rp	(23.005.676.745,00)
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	16.621.352.143,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	-
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	16.621.352.143,00
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	Rp	99.648.759.739,67
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	Rp	25.139.579.774,39
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Rp	2.438.565.974,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	42.338.131.525,14
Belanja Modal	Rp	21.447.005.755,14
Belanja Hibah	Rp	3.403.954.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.861.342.431,00
Belanja Bagi Hasil	Rp	1.172.652.314,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.056.935.565,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	790.592.401,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.650.000,00
Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah	Rp	2.650.000,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	500.000.000,00
Penghematan Penyertaan Modal (Investasi)	Rp	500.000.000,00
Penggunaan SiLPA	Rp	42.184.796.500,74

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	96.552.034.829,67	42.070.949.354,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp96.552.034.829,67, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut

Pelampauan penerimaan PAD	Rp	15.001.557.248,18
Pajak Daerah	Rp	3.784.743.256,16
Retribusi Daerah	Rp	(1.293.966.850,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di	Rp	69.553.062,20



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

pisahkan

Lain-lain PAD yang sah	Rp	12.441.227.779,82
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	Rp	(19.099.743.640,00)
Bagi Hasil Pajak	Rp	(3.288.501.581,00)
Bagi Hasil Pajak bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	4.237.414.608,00
Dana Alokasi Umum	Rp	(8.601.572.000,00)
Dana Alokasi Khusus	Rp	(11.447.084.667,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp	10.176.977.399,00
Pendapatan Hibah	Rp	892.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	9.284.977.399,00
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	Rp	88.905.396.676,49
Belanja Pegawai dari belanja tidak langsung	Rp	15.988.456.714,30
Belanja Pegawai dari belanja langsung	Rp	1.012.617.258,60
Belanja Barang dan Jasa	Rp	32.863.618.934,53
Belanja Modal	Rp	15.164.758.798,11
Belanja Hibah	Rp	10.984.885.395,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	449.419.466,00
Belanja Bagi Hasil	Rp	785.522.429,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	617.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	11.039.117.680,95
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	117.847.146,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp	113.847.146,00
Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah	Rp	4.000.000,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.450.000.000,00
Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	1.450.000.000,00
Penggunaan SiLPA	Rp	96.552.034.829,67

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	113.847.146,00,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

5. SAL Akhir

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
SAL Akhir	96.552.034.829,67	42.184.796.500,74

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Sal Akhir diperoleh dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain. Adapun rincian Silpa terdiri menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SILPA BEBAS **Rp42.806.438.844,87**
SILPA TERIKAT : **Rp53.745.595.984,80**

BLUD	Rp	18.401.887.752,67
JKN	Rp	1.584.048.353,13
BOS	Rp	2.143.110.368,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	1.639.439.614,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) :		
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp	7.286.512.860,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMPSIL PNSD)	Rp	63.500.000,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	493.815.150,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	34.888.350,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	9.374.881.812,00
- Dana Pelayanan Administrasi	Rp	338.404.258,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Kependudukan		
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp	264.555,00
- Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	29.432.550,00
- Bantuan Keuangan	Rp	9.223.732.780,00
- DAU Tambahan	Rp	(884.455.845,00)
- Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	3.847.470.935,00
- Dana Alokasi Khusus	Rp	168.6492,00
Jumlah SiLPA		Rp96.552.034.829,67

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.167.475.675.889,87 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1.1 Aset lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp158.514.800.714,25 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Aset Lancar		158.514.800.714,25	134.663.163.690,79	
		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	74.422.988.355,87	24.603.345.598,92	49.819.642.756,95
1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
1.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan	32.276.393,00	32.073.827,00	202.566,00
1.1.4.	Kas di BLUD	18.369.611.359,67	13.146.841.158,19	5.222.770.201,48
1.1.5.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1.584.048.353,13	2.407.346.090,63	(823.297.737,50)
1.1.6.	Kas di Bendahara Dana BOS	2.143.110.368,00	1.995.189.826,00	147.920.542,00
1.1.7.	Kas Lainnya	64.142.198,82	45.904.715,12	18.237.483,70
1.1.8.	Piutang Pajak Daerah	2.711.773.996,00	2.416.066.091,00	295.707.905,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.1.9	Piutang Retribusi	1.203.387.261,37	2.064.344.511,37	(860.957.250,00)
1.1.10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.230.045.439,24	21.168.723.393,42	(12.938.677.954,18)
1.1.11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	6.901.177.873,00	26.200.965.442,00	(19.299.787.569,00)
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.543.424.740,00	4.181.891.594,00	3.361.533.146,00
1.1.13	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.599.229.872,00)	(4.451.773.395,08)	(147.456.476,92)
1.1.14	Beban Dibayar Dimuka	45.781.333,00	-	45.781.333,00
1.1.15	Persediaan	39.862.262.915,15	40.852.244.838,22	(989.981.923,07)
Jumlah Aset Lancar		158.514.800.714,25	134.663.163.690,79	23.851.637.023,46

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp158.514.800.714,25 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp96.616.177.028,49 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bendahara Kapitasi JKN, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	74.422.988.355,87	24.603.345.598,92	49.819.642.756,95
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	32.276.393,00	32.073.827,00	202.566,00
1.1.4	Kas di BLUD	18.369.611.359,67	13.146.841.158,19	5.222.770.201,48
1.1.5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1.584.048.353,13	2.407.346.090,63	(823.297.737,50)
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	2.143.110.368,00	1.995.189.826,00	147.920.542,00
1.1.7	Kas Lainnya	64.142.198,82	45.904.715,12	18.237.483,70
Jumlah Kas Setara Kas		96.616.177.028,49	42.230.701.215,86	54.385.475.812,63



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	74.422.988.355,87	24.603.345.598,92	49.819.642.756,95

Kas di Kas Daerah sebesar Rp74.422.988.355,87 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim, Tbk dengan nomor Giro 0211002166.

1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo Rp0,00.

1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	32.276.393,00	32.073.827,00	202.566,00

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2020, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp32.276.393,00. Saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada tanggal 31 Desember 2020 setelah jam 12.00 WIB, bank tidak dapat melakukan pembukuan pada hari yang sama pada BLUD RSUD sesuai jadwal operasional bank.

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat melebihi batas waktu penyetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara BLUD	18.369.611.359,67	13.146.841.158,19	5.222.770.201,48



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp18.369.611.359,67 tersimpan pada rekening di PT Bank Jatim Tbk. dengan rekening giro nomor 021.101.3613 sebesar Rp18.369.611.359,67.

1.1.5 Kas di Bendahara JKN

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Kas di Bendahara JKN	1.584.048.353,13	2.407.346.090,63	(823.297.737,50)

Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP posisi 31 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi.

Saldo Kas di Bendahara JKN sejumlah Rp1.584.048.353,13 tersebut tersimpan pada rekening FKTP.

Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp1.584.048.353,13, termasuk di dalamnya terdapat pendapatan jasa giro PT BNI (Persero) Tbk. yang belum dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.104.439,00. Adapun rincian Kas di Bendahara JKN masing-masing FKTP dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 68 Laporan Realisasi dan Sisa Kas Dana JKN FKTP 24 UPT Puskesmas

(Dalam Rupiah)

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER				TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2020 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBIT JASA GIRO	AUTO DEBIT JASA GIRO YANG TERUTANG DITAHUN 2019			
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PACITAN	120.047.772,00	827.232.000,00	1.812.755,00	(1.762.419,00)	92.744,00	827.282.336,00	879.470.458,00	67.859.650,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TANJUNGSARI	71.510.312,00	1.568.803.200,00	1.657.338,00	(1.686.520,00)	135.004,00	1.568.774.018,00	1.545.886.310,00	94.398.020,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KEBONAGUNG	98.003.602,00	776.698.800,00	863.068,00	(899.573,00)	68.957,00	776.662.295,00	828.108.116,00	46.557.781,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KETROWONOJOYO	26.372.438,00	436.592.925,00	465.465,00	(457.246,00)	21.220,00	436.601.144,00	430.270.214,00	32.703.368,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS ARJOSARI	124.606.590,00	1.143.253.800,00	2.337.201,00	(2.284.411,00)	116.791,00	1.143.306.590,00	1.081.035.324,00	186.877.856,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	19.964.731,00	303.846.800,00	266.501,00	(270.401,00)	21.095,00	303.842.900,00	300.877.115,00	22.930.516,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER				TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2020 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO YANG TERUTANG DITAHUN 2019			
PUSKESMAS KEDUNGBENDO								
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PUNUNG	22.258.916,00	579.586.800,00	583.155,00	(595.279,00)	48.877,00	579.574.676,00	552.876.907,00	48.956.685,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GONDOSARI	18.342.297,00	348.551.025,00	148.585,00	(151.972,00)	10.391,00	348.547.638,00	366.762.990,00	126.945,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PRINGKUKU	17.897.328,00	535.291.200,00	307.982,00	(313.789,00)	14.399,00	535.285.393,00	538.403.925,00	14.778.796,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS CANDI	36.638.082,00	350.840.325,00	240.131,00	(255.651,00)	22.084,00	350.824.805,00	385.952.638,00	1.510.249,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS DONOROJO	17.064.393,09	740.939.200,00	409.274,97	(409.274,97)	0,00	740.939.200,00	747.969.523,00	10.034.070,09
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KALAK	1.228.833,89	411.223.400,00	0,00	0,00	0,00	411.223.400,00	410.484.737,00	1.967.496,89
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NGADIROJO	134.510.770,48	1.002.177.900,00	0,00	0,00	0,00	1.002.177.900,00	1.055.202.124,50	81.486.545,98
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS WONOKARTO	19.306.600,80	361.613.150,00	0,00	0,00	0,00	361.613.150,00	360.080.005,00	20.839.745,80
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TULAKAN	301.703.369,00	1.874.270.400,00	0,00	0,00	0,00	1.874.270.400,00	1.949.327.630,00	226.646.139,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BUBAKAN	101.747.311,82	1.011.069.750,00	0,00	0,00	0,00	1.011.069.750,00	1.031.392.866,00	81.424.195,82
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUDIMORO	275.016.483,28	515.781.300,00	0,00	0,00	0,00	515.781.300,00	667.766.627,00	123.031.156,28
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUKOREJO	13.720.275,47	340.427.649,00	0,00	0,00	0,00	340.427.649,00	351.597.926,00	2.549.998,47
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TEGALOMBO	582.225.072,00	1.538.048.650,00	8.010.905,00	(8.389.881,00)	838.545,00	1.537.669.674,00	1.810.909.678,00	308.985.068,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GEMAHARJO	32.428.928,00	972.050.600,00	1.084.851,00	(1.145.773,00)	149.310,00	971.989.678,00	999.990.453,00	4.428.153,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NAWANGAN	157.404.650,49	1.035.764.925,00	0,00	0,00	0,00	1.035.764.925,00	1.160.833.284,00	32.336.291,49
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PAKISBARU	96.804.563,84	1.022.471.250,00	0,00	0,00	0,00	1.022.471.250,00	1.072.298.323,00	46.977.490,84
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BANDAR	83.584.930,77	764.921.900,00	0,00	0,00	0,00	764.921.900,00	756.822.572,00	91.684.258,77
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS JERUK	34.957.839,70	577.313.050,00	0,00	0,00	0,00	577.313.050,00	577.313.013,00	34.957.876,70
JUMLAH	2.407.346.090,63	19.038.769.999,00	18.187.211,97	(18.622.189,97)	1.539.417,00	19.038.335.021,00	19.861.632.758,50	1.584.048.353,13



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.1.6 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Dana BOS	2.143.110.368,00	1.995.189.826,00	147.920.542,00

Saldo kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS pada posisi 31 Desember 2020. Saldo Kas BOS Tahun 2020 sebesar Rp2.143.110.368,00 terdiri dari saldo tunai sebesar Rp198.587.414,00 dan saldo bank sebesar Rp1.944.522.954,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana Bos di satuan Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP Negeri dapat diuraikan sebagaimana **Lampiran 8**.

1.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas lainnya	64.142.198,82	45.904.715,12	18.237.483,70

Akun kas lainnya adalah posisi dana yang ada pada entitas teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan, tanpa melalui mekanisme APBD. Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp64.142.198,82 yang terdiri dari Saldo awal sebesar Rp45.904.715,12 ditambah Pengakuan Utang PFK Tahun 2020 sebesar Rp55.929.116,00 dan Pajak Daerah berupa Pajak Makan Minum dari pengelolaan dana Bos Tahun 2020 sebesar Rp8.213.082,82 dikurangi penyeteroran pajak terhutang sebesar Rp30.093.602,00 dikurangi koreksi pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.184.330,12 dan koreksi ekuitas awal atas sisa kas lainnya di Dinas Sosial sebesar Rp75.360,12.

Adapun rincian Kas Lainnya Tahun 2020 masing-masing Satuan Pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 69 Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Tahun 2020 Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Rupiah)

NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	KECAMATAN	AKUMULASI PAJAK				
				PAJAK TERUTANG 2019 DAN PAJAK TERUTANG 2020 PER 31 DESEMBER 2020				JUMLAH
				PPh 21	PPh 23	PPN	Pajak Daerah (PPD)	
20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	SD	ARJOSARI	0,00	0,00	318.182,00	0,00	318.182,00
20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	SD	ARJOSARI	0,00	0,00	290.909,00	10.000,00	300.909,00
20511395	SD NEGERI 2	SD	ARJOSARI	0,00	5.000,00	0,00	7.600,00	12.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	KECAMATAN	AKUMULASI PAJAK				JUMLAH
				PAJAK TERUTANG 2019 DAN PAJAK TERUTANG 2020 PER 31 DESEMBER 2020				
				PPh 21	PPh 23	PPN	Pajak Daerah (PPD)	
	KEDUNGBENDO							
20510875	SD NEGERI 2 MLATI	SD	ARJOSARI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	SD	ARJOSARI	0,00	58.800,00	0,00	29.400,00	88.200,00
20511056	SD NEGERI 3 TEMON	SD	ARJOSARI	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
20511055	SD NEGERI 4 TEMON	SD	ARJOSARI	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
20511288	SD NEGERI ARJOSARI	SD	ARJOSARI	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO	SD	ARJOSARI	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	SD	BANDAR	0,00	76.399,82	454.546,00	382.000,00	912.945,82
20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT	SD	BANDAR	0,00	0,00	1.139.291,00	0,00	1.139.291,00
20511261	SD NEGERI 2 BANDAR	SD	BANDAR	0,00	180.000,00	266.364,00	0,00	446.364,00
20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	SD	BANDAR	0,00	0,00	227.273,00	0,00	227.273,00
20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK	SD	BANDAR	0,00	6.300,00	263.455,00	31.500,00	301.255,00
20511521	SD NEGERI 3 JERUK	SD	BANDAR	0,00	0,00	376.364,00	0,00	376.364,00
20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK	SD	BANDAR	0,00	6.280,00	0,00	31.400,00	37.680,00
20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK	SD	BANDAR	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20511258	SD NEGERI 5 BANDAR	SD	BANDAR	36.000,00	13.140,00	440.909,00	67.700,00	557.749,00
20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	SD	BANDAR	0,00	21.000,00	104.591,00	60.000,00	185.591,00
20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	SD	DONOROJO	0,00	25.000,00	957.850,00	75.000,00	1.057.850,00
20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	SD	DONOROJO	102.500,00	117.600,00	420.000,00	294.000,00	934.100,00
20510783	SD NEGERI 2 SEKAR	SD	DONOROJO	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	SD	DONOROJO	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20511268	SD NEGERI 3 BELAH	SD	DONOROJO	0,00	32.800,00	0,00	164.000,00	196.800,00
20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	SD	KEBONAGUNG	0,00	2.100,00	0,00	12.600,00	14.700,00
20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG	SD	KEBONAGUNG	56.250,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI	SD	KEBONAGUNG	0,00	0,00	204.546,00	0,00	204.546,00
20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG	SD	KEBONAGUNG	99.000,00	86.613,00	0,00	39.600,00	225.213,00
20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	SD	KEBONAGUNG	0,00	34.320,00	270.000,00	431.850,00	736.170,00
20511543	SD NEGERI 1 GONDANG	SD	NAWANGAN	0,00	0,00	2.062.421,00	0,00	2.062.421,00
20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR	SD	NAWANGAN	0,00	58.240,00	611.227,00	291.200,00	960.667,00
20510869	SD NEGERI 1 NGROMO	SD	NAWANGAN	0,00	45.000,00	0,00	21.410,00	66.410,00
20510781	SD NEGERI 1 SEMPUR	SD	NAWANGAN	0,00	66.300,00	0,00	358.100,00	424.400,00
20510883	SD NEGERI 2 MUJING	SD	NAWANGAN	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN	SD	NAWANGAN	30.000,00	25.572,00	347.727,00	0,00	403.299,00
20510868	SD NEGERI 2 NGROMO	SD	NAWANGAN	0,00	8.000,00	2.904.546,00	20.000,00	2.932.546,00
20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	SD	NAWANGAN	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00
20510780	SD NEGERI 2 SEMPUR	SD	NAWANGAN	0,00	206.000,00	0,00	28.000,00	234.000,00
20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI	SD	NAWANGAN	0,00	0,00	2.147.009,00	0,00	2.147.009,00
20510914	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	SD	NAWANGAN	105.000,00	35.860,00	0,00	179.300,00	320.160,00
20510898	SD NEGERI 3 PENGUNGUNG	SD	NAWANGAN	9.000,00	0,00	1.990.417,00	45.000,00	2.044.417,00
20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI	SD	NAWANGAN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20510886	SD NEGERI 4 NAWANGAN	SD	NAWANGAN	0,00	0,00	246.427,00	0,00	246.427,00
20510897	SD NEGERI 4 PENGUNGUNG	SD	NAWANGAN	0,00	358.500,00	7.012.183,00	1.230.000,00	8.600.683,00
20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI	SD	NAWANGAN	0,00	120.000,00	4.221.728,00	0,00	4.341.728,00
20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO	SD	NGADIROJO	0,00	0,00	857.091,00	0,00	857.091,00
20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI	SD	NGADIROJO	0,00	11.500,00	531.182,00	52.500,00	595.182,00
20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	SD	NGADIROJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20511256	SD NEGERI 2 BODAG	SD	NGADIROJO	102.000,00	0,00	1.550.909,00	0,00	1.652.909,00
20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI	SD	NGADIROJO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20511093	SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	SD	NGADIROJO	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	KECAMATAN	AKUMULASI PAJAK				
				PAJAK TERUTANG 2019 DAN PAJAK TERUTANG 2020 PER 31 DESEMBER 2020				JUMLAH
				PPh 21	PPh 23	PPN	Pajak Daerah (PPD)	
20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO	SD	NGADIROJO	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
20511087	SD NEGERI 3 WONODADIKULON	SD	NGADIROJO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO	SD	NGADIROJO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
20511471	SD NEGERI 1 DERSONO	SD	PRINGKUKU	0,00	7.000,00	272.727,00	75.000,00	354.727,00
20511470	SD NEGERI 2 DERSONO	SD	PRINGKUKU	112.500,00	0,00	0,00	178.500,00	291.000,00
20510843	SD NEGERI SOBO	SD	PRINGKUKU	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
20511038	SD NEGERI WATUKARUNG	SD	PRINGKUKU	0,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	SD	PUNUNG	0,00	0,00	545.454,00	0,00	545.454,00
20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	SD	PUNUNG	0,00	0,00	227.273,00	0,00	227.273,00
20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	SD	PUNUNG	0,00	0,00	3.371.363,00	0,00	3.371.363,00
20511043	SD NEGERI 2 TINATAR	SD	PUNUNG	0,00	0,00	309.909,00	80.000,00	389.909,00
20511397	SD NEGERI KEBONSARI	SD	PUNUNG	0,00	0,00	440.819,00	0,00	440.819,00
20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	SD	SUDIMORO	0,00	0,00	272.727,00	0,00	272.727,00
20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR	SD	SUDIMORO	683.100,00	218.200,00	0,00	760.000,00	1.661.300,00
20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	SD	SUDIMORO	0,00	60.000,00	245.273,00	150.000,00	455.273,00
20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO	SD	SUDIMORO	48.000,00	0,00	303.900,00	0,00	351.900,00
20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN	SD	TEGALOMBO	0,00	25.000,00	0,00	102.500,00	127.500,00
20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	SD	TEGALOMBO	201.000,00	37.600,00	1.380.456,00	0,00	1.619.056,00
20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN	SD	TEGALOMBO	0,00	44.030,00	3.203.456,00	220.150,00	3.467.636,00
20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	SD	TEGALOMBO	0,00	0,00	0,00	146.773,00	146.773,00
20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	SD	TEGALOMBO	0,00	16.000,00	1.700.001,00	70.000,00	1.786.001,00
20511454	SD NEGERI 1 KETRO	SD	TULAKAN	215.300,00	42.400,00	0,00	601.400,00	859.100,00
20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH	SD	TULAKAN	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
20510860	SD NEGERI 1 NGILE	SD	TULAKAN	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
20511507	SD NEGERI 2 JETAK	SD	TULAKAN	0,00	8.000,00	0,00	14.000,00	22.000,00
20511464	SD NEGERI 2 KETRO	SD	TULAKAN	0,00	0,00	818.182,00	95.500,00	913.682,00
20510859	SD NEGERI 2 NGILE	SD	TULAKAN	0,00	0,00	676.320,00	0,00	676.320,00
20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI	SD	TULAKAN	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	SD	TULAKAN	58.000,00	6.800,00	0,00	17.000,00	81.800,00
20511462	SD NEGERI 3 KETRO	SD	TULAKAN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20511461	SD NEGERI 4 KETRO	SD	TULAKAN	1.552.550,00	180.900,00	665.500,00	144.000,00	2.542.950,00
20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI	SD	TULAKAN	79.500,00	18.200,00	271.454,00	91.000,00	460.154,00
20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI	SD	TULAKAN	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
20511021	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	SMP	TEGALOMBO	90.000,00	279.800,00	0,00	0,00	369.800,00
20510938	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	SMP	NAWANGAN	683.100,00	187.200,00	0,00	0,00	870.300,00
20510952	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	SMP	TEGALOMBO	163.500,00	235.400,00	0,00	648.500,00	1.047.400,00
JUMLAH				4.706.800,00	3.219.355,00	48.002.961,00	8.213.083,00	64.142.198,82

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.589.809.309,61 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 70 Piutang Daerah Tahun 2020

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak	2.711.773.996,00	2.416.066.091,00	295.707.905,00
Piutang Retribusi	1.203.387.261,37	2.064.344.511,37	(860.957.250,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.230.045.439,24	21.168.723.393,42	(12.938.677.954,18)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	6.901.177.873,00	26.200.965.442,00	(19.299.787.569,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.543.424.740,00	4.181.891.594,00	3.361.533.146,00
Jumlah Piutang Bersih	26.589.809.309,61	56.031.991.031,79	(29.442.181.722,18)

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 71 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2020

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2019	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2020
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	2.416.066.091,00	0,00	482.235.733,00	0,00	186.527.828,00	2.711.773.996,00
Piutang Retribusi	2.064.344.511,37	0,00	306.198.000,00	77.097.000,00	1.090.058.250,00	1.203.387.261,37
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.168.723.393,42	0,00	6.429.985.095,06	0,00	19.368.663.049,24	8.230.045.439,24
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	26.200.965.442,00	0,00	6.901.177.873,00	10.519.369.470,00	15.681.595.972,00	6.901.177.873,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.181.891.594,00	0,00	7.543.424.740,00	0,00	4.181.891.594,00	7.543.424.740,00
Jumlah Piutang Bersih	56.031.991.031,79	0,00	21.663.021.441,06	10.596.466.470,00	40.508.736.693,24	26.589.809.309,61

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.8 Piutang Pajak

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Pajak	2.711.773.996,00	2.416.066.091,00	295.707.905,00

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp2.711.773.996,00 berada di Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 72 Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2020	Penambahan 2020	Saldo Akhir 2020
1	Piutang Pajak Hotel	8.186.980,00	0,00	5.243.980,00	255.000,00	3.198.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2020	Penambahan 2020	Saldo Akhir 2020
2	Piutang Pajak Restoran	18.427.000,00	0,00	11.330.500,00	2.016.000,00	9.112.500,00
3	Piutang Pajak Hiburan	9.242.150,00	0,00	761.750,00	488.600,00	8.969.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	3.302.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.482.000,00
5	Piutang Pajak Parkir	391.200,00	0,00	00	0,00	391.200,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	2.603.420,00	0,00	2.123.840,00	15.168,00	494.748,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.373.913.341,00	0,00	167.067.758,00	479.280.965,00	2.686.126.548,00
TOTAL		2.416.066.091,00	0,00	186.527.828,00	482.235.733,00	2.711.773.996,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp2.711.773.996,00 di Tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp295.707.905,00 atau 12,24% dibandingkan realisasi Tahun 2019. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2019 Rp2.416.066.091,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp186.527.828,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2020 sebesar Rp482.235.733,00.

Saldo piutang pajak sebesar Rp2.711.773.996,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.686.126.548,00 atau 99,05% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00 Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang.

Pemeliharaan basis data SISMIOP dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang sampai dengan Tahun 2020 masih dalam tahap penyusunan database yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan pemeliharaan data piutang.

Sampai dengan 31 Desember 2020 saldo piutang PBB-P2 tercatat sejumlah Rp2.686.126.548,00 sementara pada database SISMIOP masih terdapat data piutang sejumlah Rp8.726.049.950,00 sehingga terdapat selisih Rp6.039.923.402,00 Adapun Data SISMIOP Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

(dalam rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 1 JANUARI 2014			KONDISI PER 31 DESEMBER 2020		
	BA - 15/WPJ.24/ KP.14/2014 (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)	SALDO PIUTANG (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2020				479.280.965,00	488.803.769,00	9.522.804,00
2019				147.746.360,00	173.450.621,00	25.704.261,00
2018				249.999.299,00	212.497.363,00	(37.501.936,00)
2017				252.778.996,00	270.639.419,00	17.860.423,00
2016				220.917.652,00	228.763.114,00	7.845.462,00
2015				186.443.332,00	206.240.008,00	19.796.676,00
2014				167.991.463,00	179.489.752,00	11.498.289,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183,00	2.037.714.011,00	153.424.108,00	163.933.793,00	10.509.685,00
2012	170.191.557,00	170.191.557,00	-	139.651.980,00	143.467.502,00	3.815.522,00
2011	309.988.483,00	309.988.483,00	-	222.758.039,00	215.433.358,00	(7.324.681,00)
2010	1.002.353,00	1.002.353,00	-	-	-	-
2009	1.180.860,00	1.180.860,00	-	241.835,00	241.835,00	-
2008	98.679,00	98.679,00	-	98.679,00	98.679,00	-
2007	84.567.000,00	1.327.280.315,00	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.327.280.315,00	1.242.713.315,00
2006	56.914.000,00	549.778.043,00	492.864.043,00	56.914.000,00	549.778.043,00	492.864.043,00
2005	75.650.000,00	885.185.071,00	809.535.071,00	75.650.000,00	885.185.071,00	809.535.071,00
2004	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	-	643.619.733,00	643.619.733,00	-	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	247.723.000,00	1.290.641.675,00	1.042.918.675,00	247.645.840,00	1.290.641.675,00	1.042.995.835,00
2002		69.341.791,00	69.341.791,00		69.341.791,00	69.341.791,00
2001		311.497.292,00	311.497.292,00		311.497.292,00	311.497.292,00
2000		251.511.235,00	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522,00	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526,00	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963,00	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050,00	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		-	-		-	-
1994		4.441.296,00	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	1.187.434.104,00	7.912.626.177,00	6.725.192.073,00	2.686.126.548,00	7.435.408.275,00	4.749.281.727,00

1.1.8 Piutang Retribusi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Retribusi	1.203.387.261,37	2.064.344.511,37	(860.957.250,00)

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.203.387.261,37 yaitu terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 74 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2020	Penambahan per 31 Des 2020	Saldo Akhir 2020
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	705.718.000,00	-	705.718.000,00	165.887.000,00	165.887.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	77.097.000,00	(77.097.000,00)		-	-
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	390.778.000,00	-	315.727.000,00	140.311.000,00	215.362.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	508.883.931,00	-	63.000.000,00	-	445.883.931,00
6	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	276.542.330,37	-	5.613.250,00	-	270.929.080,37
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00			-	105.325.250,00
	Total	2.064.344.511,37	(77.097.000,00)	1.090.058.250,00	306.198.000,00	1.203.387.261,37

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp1.203.387.261,37 di Tahun 2020, mengalami penurunan sebesar Rp860.957.250,00 atau 41,71% dibandingkan Tahun 2019.

Nilai Piutang sebesar Rp1.203.387.261,37 berasal dari saldo awal Tahun 2019 Rp2.064.344.511,37 dikurangi koreksi atas Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum karena kesalahan pembebanan tahun lalu sebesar Rp77.097.000,00, kemudian dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp1.090.058.250,00 dan penambahan piutang Tahun 2020 sebesar Rp306.198.000,00.

Koreksi terhadap saldo awal sebesar Rp77.097.000,00 atas piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Koreksi terhadap nilai piutang sebesar Rp77.097.000,00 tersebut merupakan kurang bayar bagi hasil retribusi di tepi jalan umum kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Polres Pacitan. Kurang bayar tersebut telah ditindaklanjuti dengan pencairan pada Bulan Januari untuk Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Bulan Februari untuk Polres Pacitan.

1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	8.230.045.439,24	21.168.723.393,42	(12.938.677.954,18)

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp8.230.045.439,24 terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2020	Penambahan 2020	Saldo Akhir 2020
1	Piutang Jasa Giro	42.402.825,53	-	42.402.825,53	30.427.664,42	30.427.664,42
2	Piutang Bunga Deposito	8.698.630,14	-	8.698.630,14	2.003.424,66	2.003.424,66
3	Piutang Denda Pajak (BAPENDA)	989.204.196,96	-	36.900.581,00	109.144.776,98	1.061.448.392,94
4	Piutang dari Pengembalian	325.000.000,00	-	230.000.000,00	-	95.000.000,00
5	Piutang BLUD (RSUD)	18.684.676.924,00	-	18.615.797.335,00	6.286.889.229,00	6.355.768.818,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	339.396.066,79	-	588.677,57	0,00	338.807.389,22
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	779.344.750,00	-	434.275.000,00	1.520.000,00	346.589.750,00
-	<i>Piutang Revolving-Pertanian</i>	<i>53.110.000,00</i>	-	<i>7.200.000,00</i>		<i>45.910.000,00</i>
-	<i>Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan</i>	<i>15.696.000,00</i>	-	-	-	<i>15.696.000,00</i>
-	<i>Hasil Perjanjian Kerja Sama - BPKAD</i>	<i>423.075.000,00</i>	-	<i>423.075.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>
-	<i>Anggota DPRD 1999-2004</i>	<i>287.463.750,00</i>	-	<i>4.000.000,00</i>	-	<i>283.463.750,00</i>
TOTAL		21.168.723.393,42	-	19.368.663.049,24	6.429.985.095,06	8.230.045.439,24

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp8.230.045.439,24 di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.938.677.954,18 atau 61,12% yang berasal dari saldo awal Tahun 2019 sebesar Rp21.168.723.393,42, pelunasan sebesar Rp19.368.663.049,24, dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.429.985.095,06.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pelunasan Piutang BLUD-RSUD sebesar Rp18.615.797.335,00 di Tahun 2020.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

- 1) Piutang Jasa Giro pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp30.427.664,42 yang terdiri dari Piutang Jasa Giro PT Bank Jatim yaitu Jasa Giro Bulan Desember 2020 yang dipindahbukukan pada awal bulan berikutnya.
- 2) Piutang bunga Deposito pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.003.424,66 yang terdiri dari Piutang Deposito PT Bank Mandiri Tbk. sebesar Rp2.003.424,66 merupakan kurang bayar penerimaan bunga deposito Bulan Desember 2020 atas bilyet 171-02-0036756-6 senilai Rp2.500.000.000,00.
- 3) Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.061.448.392,94. Piutang tersebut merupakan piutang atas sanksi administrasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- 4) Berdasar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat Piutang dari Pengembalian sebesar Rp95.000.000,00 yang merupakan piutang atas kelebihan penyerapan SP2D pada Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.
 - 5) Piutang BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp6.355.768.818,00 merupakan piutang lain-lain. Piutang BLUD merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien, yang belum diterima hingga 31 Desember 2020. Piutang BLUD RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 diakui sebesar Rp6.355.768.818,00 yang terdiri dari:
 - Piutang pasien umum pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.755.779,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - Pasien umum pelayanan s.d Tahun 2017 sebesar Rp42.519.505,00.
 - Pasien umum pelayanan Tahun 2018 sebesar Rp10.886.246,00.
 - Pasien umum dalam perawatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.350.028,00.
 - Piutang pasien BPJS (JKN) untuk klaim layanan s.d Desember 2020 sebesar Rp6.108.328.352,00.
 - Piutang pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp119.137.417,00.
 - Piutang pasien BPJS Tenaga Kerja untuk klaim layanan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp40.700.750,00.
 - Piutang pasien Taspen untuk klaim layanan sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp3.846.520,00.
- Dari nilai piutang sebesar Rp6.355.768.818,00 tidak termasuk didalamnya
- Pelayanan Pasien Covid-19 dengan penjamin dana BTT Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp236.852.520,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Pelayanan Pasien dengan penjamin dana Bansos Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp232.635.895,00;
 - Pelayanan Pasien dengan penjamin TCM Dinas Kesehatan Provinsi sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp5.865.000,00;
 - Pelayanan Pasien Covid-19 dengan penjamin APBN sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp2.356.519.979;
 - Pelayanan Pasien Umum Rp15.243.601,00.
- 6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp338.807.389,22. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir yang macet sejak Tahun 2002 s/d 2017 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- 7) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp346.589.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) yang dikelola oleh Dinas Perikanan sebesar Rp15.696.000,00. Piutang tersebut sesuai Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pabrik Es di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan yang terdiri dari: Perjanjian Nomor: 523/1155/408.31/2015 dan Nomor: 003/05/KNM/X/2015 atas nama Aleng Sumanto (Ketua KUB Mutiara Tamperan). Terhadap Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) tidak ada mutasi di Tahun 2020
 - Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama sebesar Rp1.520.000,00 yang dikelola BPKAD atas sewa Kios Pacitan per 31 Desember 2020. Sedangkan saldo Piutang Tahun 2019 telah dilunasi 100%.
 - Piutang Pendapatan Lainnya (Purna Tugas Anggota DPRD)
Piutang Pendapatan Lainnya merupakan tagihan kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti sebesar Rp287.463.750,00. Pada Tahun 2020 terdapat pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 atas tunggakan 2019 sehingga jumlah piutang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp283.463.750,00.
 - Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp53.110.000,00 pada Dinas Pertanian yang terdiri sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Rp44.830.000,00 merupakan Pokok dan sebesar Rp1.080.000 ,00 merupakan bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Piutang Pokok- dan Bunga - Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2019		Mutasi 2020		Saldo Piutang 31 Desember 2020		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong	9.730.000,00	1.080.000,00	(3.730.000,00)	0,00	6.000.000,00	1.080.000,00	7.080.000,00
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	19.000.000,00	0,00	(2.470.000,00)	0,00	16.530.000,00	0,00	16.530.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	23.300.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	52.030.000,00	1.080.000,00	(7.200.000,00)	0,00	44.830.000,00	1.080.000,00	45.910.000,00

1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	6.901.177.873,00	26.200.965.442,00	(19.299.787.569,00)

Berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, terdapat rincian kurang bayar Tahun 2018 sebesar Rp13.128.469.431,00 dan berdasarkan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 terdapat rincian kurang bayar Tahun 2019 sebesar Rp13.072.496.011,00 sebagai dasar Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp26.200.965.442,00 di Tahun 2019.

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sehingga perlu adanya koreksi terhadap saldo awal piutang menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sebagai dasar pengakuan piutang pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Adapun daftar mutasi piutang transfer pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 77 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2020	Penambahan 2020	Saldo Akhir 2020
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	5.058.645.647,00	(430.308.131,00)	4.628.337.516,00	5.780.328.949,00	5.780.328.949,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.142.319.795,00	(10.089.061.339,00)	11.053.258.456,00	1.120.848.924,00	1.120.848.924,00
TOTAL		26.200.965.442,00	(10.519.369.470,00)	15.681.595.972,00	6.901.177.873,00	6.901.177.873,00

1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.543.424.740,00	4.181.891.594,00	3.361.533.146,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.543.424.740,00 Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.361.533.146,00 atau 80,38% dibandingkan tahun 2019. Saldo tersebut berasal dari saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp4.181.891.594,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp4.181.891.594,00. Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.543.424.740,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/646/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020.

Nilai sebesar Rp7.543.424.740,00 tersebut telah diterima di rekening Kas Daerah pada tanggal 8 Pebruari 2021 dengan Nomor STS 00006/STS/4.02.00/01/2021.

1.1.12 Penyisihan Piutang Pendapatan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penyisihan Piutang	(4.599.229.872,00)	(4.451.773.395,08)	(147.456.476,92)

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit belum melunasi, penyisihan 50%,
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Piutang Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%,
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%,
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyesian 10%,
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyesian 50%,
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyesian 100%.

Penyesian Piutang Tahun 2020 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 78 Daftar Penyesian Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyesian Piutang (Rp)
1	Penyesian Piutang Pajak Daerah	(1.721.983.174,17)
2	Penyesian Piutang Retribusi	(898.720.251,37)
3	Penyesian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.940.809.322,76)
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(37.717.123,70)
Jumlah		(4.599.229.872,00)

Penyesian piutang sebesar Rp4.599.229.872,00 diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyesian piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 79 Rekapitulasi Penyesian Piutang

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	2.711.773.996,00	482.235.733,00	157.246.935,00	736.888.052,00	1.335.403.276,00
1	Piutang Pajak Hotel	3.198.000,00	255.000,00	308.000,00	2.635.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	9.112.500,00	2.016.000,00	2.486.000,00	4.610.500,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	8.969.000,00	488.600,00	6.110.400,00	2.370.000,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	3.482.000,00	180.000,00	192.000,00	3.110.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Parkir	391.200,00	0,00	261.825,00	129.375,00	0,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	494.748,00	15.168,00	142.350,00	337.230,00	0,00
7	PBB-P2	2.686.126.548,00	479.280.965,00	147.746.360,00	723.695.947,00	1.335.403.276,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	1.203.387.261,37	306.198.000,00	0,00	0,00	897.189.261,37
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	165.887.000,00	165.887.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.362.000,00	140.311.000,00	0,00	0,00	75.051.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	445.883.931,00	0,00	0,00	0,00	445.883.931,00
5	Piutang Retribusi Izin	270.929.080,37	0,00	0,00	0,00	270.929.080,37



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Mendirikan Bangunan					
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.230.045.439,24	6.320.840.318,08	0,00	0,00	1.909.205.121,16
1	Piutang Jasa Giro	30.427.664,42	30.427.664,42	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Bunga deposito	2.003.424,66	2.003.424,66	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA)	1.061.448.392,94	0,00	0,00	0,00	1.061.448.392,94
4	Piutang dari Pengembalian	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
5	Piutang BLUD (RSUD)	6.355.768.818,00	6.286.889.229,00	0,00	0,00	68.879.589,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	338.807.389,22	0,00	0,00	0,00	338.807.389,22
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	346.589.750,00	1.520.000,00	0,00	0,00	345.069.750,00
-	<i>Piutang Revolving- Pertanian</i>	<i>45.910.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.910.000,00</i>
-	<i>Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)- Perikanan</i>	<i>15.696.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.696.000,00</i>
-	<i>Hasil Perjanjian Kerja Sama -BPKAD</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>Anggota DPRD 1999-2004</i>	<i>283.463.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283.463.750,00</i>
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	6.901.177.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	5.780.328.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.120.848.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.543.424.740,00	7.543.424.740,00	0,00	0,00	0,00
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.543.424.740,00	7.543.424.740,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PIUTANG	26.589.809.309,61	14.652.698.791,08	157.246.935,00	736.888.052,00	4.141.797.658,53

Tabel 80 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	2.711.773.996,00	482.235.733,00	157.246.935,00	736.888.052,00	1.335.403.276,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.721.983.174,17	2.411.178,67	15.724.693,50	368.444.026,00	1.335.403.276,00
	NRV Piutang	989.790.821,83	479.824.554,33	141.522.241,50	368.444.026,00	-
1	Piutang Pajak Hotel	3.198.000,00	255.000,00	308.000,00	2.635.000,00	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.349.575,00	1.275,00	30.800,00	1.317.500,00	-
	NRV Piutang	1.848.425,00	253.725,00	277.200,00	1.317.500,00	-
2	Piutang Pajak Restoran	9.112.500,00	2.016.000,00	2.486.000,00	4.610.500,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.563.930,00	10.080,00	248.600,00	2.305.250,00	-
	NRV Piutang	6.548.570,00	2.005.920,00	2.237.400,00	2.305.250,00	-
3	Piutang Pajak Hiburan	8.969.000,00	488.600,00	6.110.400,00	2.370.000,00	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.798.483,00	2.443,00	611.040,00	1.185.000,00	-
	NRV Piutang	7.170.517,00	486.157,00	5.499.360,00	1.185.000,00	-
4	Piutang Pajak Reklame	3.482.000,00	180.000,00	192.000,00	3.110.000,00	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.575.100,00	900,00	19.200,00	1.555.000,00	-
	NRV Piutang	1.906.900,00	179.100,00	172.800,00	1.555.000,00	-
5	Piutang Pajak Parkir	391.200,00	-	261.825,00	129.375,00	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	90.870,00	-	26.182,50	64.687,50	-
	NRV Piutang	300.330,00	-	235.642,50	64.687,50	-
6	Piutang Pajak Air Tanah	494.748,00	15.168,00	142.350,00	337.230,00	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	182.925,84	75,84	14.235,00	168.615,00	-
	NRV Piutang	311.822,16	15.092,16	128.115,00	168.615,00	-
7	PBB-P2	2.686.126.548,00	479.280.965,00	147.746.360,00	723.695.947,00	1.335.403.276,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.714.422.290,33	2.396.404,83	14.774.636,00	361.847.973,50	1.335.403.276,00
	NRV Piutang	971.704.257,67	476.884.560,17	132.971.724,00	361.847.973,50	-
2	PIUTANG RETRIBUSI	1.203.387.261,37	306.198.000,00	-	-	897.189.261,37
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	898.720.251,37	1.530.990,00	-	-	897.189.261,37
	NRV Piutang	304.667.010,00	304.667.010,00	-	-	-
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	165.887.000,00	165.887.000,00	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	829.435,00	829.435,00	-	-	-
	NRV Piutang	165.057.565,00	165.057.565,00	-	-	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.362.000,00	140.311.000,00	-	-	75.051.000,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	75.752.555,00	701.555,00	-	-	75.051.000,00
	NRV Piutang	139.609.445,00	139.609.445,00	-	-	-
4	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	445.883.931,00	-	-	-	445.883.931,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	445.883.931,00	-	-	-	445.883.931,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	270.929.080,37	-	-	-	270.929.080,37
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	270.929.080,37	-	-	-	270.929.080,37
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	-	-	-	105.325.250,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	105.325.250,00	-	-	-	105.325.250,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.230.045.439,24	6.320.840.318,08	-	-	1.909.205.121,16
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.940.809.322,76	31.604.201,60	-	-	1.909.205.121,16
	NRV Piutang	6.289.236.116,48	6.289.236.116,48	-	-	-
1	Piutang Jasa Giro	30.427.664,42	30.427.664,42	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	152.138,32	152.138,32	-	-	-
	NRV Piutang	30.275.526,10	30.275.526,10	-	-	-
2	Piutang Bunga deposito	2.003.424,66	2.003.424,66	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	10.017,12	10.017,12	-	-	-
	NRV Piutang	1.993.407,54	1.993.407,54	-	-	-
3	Piutang Denda Pajak (PBB P2 - Bapenda)	1.061.448.392,94	-	-	-	1.061.448.392,94



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.061.448.392,94	-	-	-	1.061.448.392,94
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
4	Piutang dari Pengembalian	95.000.000,00	-	-	-	95.000.000,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	95.000.000,00	-	-	-	95.000.000,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
5	Piutang BLUD (RSUD)	6.355.768.818,00	6.286.889.229,00	-	-	68.879.589,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	100.314.035,15	31.434.446,15	-	-	68.879.589,00
	NRV Piutang	6.255.454.782,86	6.255.454.782,86	-	-	-
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	338.807.389,22	-	-	-	338.807.389,22
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	338.807.389,22	-	-	-	338.807.389,22
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	346.589.750,00	1.520.000,00	-	-	345.069.750,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	345.077.350,00	7.600,00	-	-	345.069.750,00
	NRV Piutang	1.512.400,00	1.512.400,00	-	-	-
-	Piutang Revolving-Pertanian	45.910.000,00	-	-	-	45.910.000,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	45.910.000,00	-	-	-	45.910.000,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan	15.696.000,00	-	-	-	15.696.000,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	15.696.000,00	-	-	-	15.696.000,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	Hasil Perjanjian Kerja Sama-BPKAD	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	7.600,00	7.600,00	-	-	-
	NRV Piutang	1.512.400,00	1.512.400,00	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
-	Anggota DPRD 1999-2004	283.463.750,00	-	-	-	283.463.750,00
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	283.463.750,00	-	-	-	283.463.750,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	6.901.177.873,00	-	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	6.901.177.873,00	-	-	-	-
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	5.780.328.949,00	-	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	5.780.328.949,00	-	-	-	-
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.120.848.924,00	-	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	1.120.848.924,00	-	-	-	-
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.543.424.740,00	7.543.424.740,00	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	37.717.123,70	37.717.123,70	-	-	-
	NRV Piutang	7.505.707.616,30	7.505.707.616,30	-	-	-
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.543.424.740,00	7.543.424.740,00	-	-	-
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	37.717.123,70	37.717.123,70	-	-	-
	NRV Piutang	7.505.707.616,30	7.505.707.616,30	-	-	-
TOTAL PIUTANG		26.589.809.309,61	14.652.698.791,08	157.246.935,00	736.888.052,00	4.141.797.658,53
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	4.599.229.872,00	73.263.493,97	15.724.693,50	368.444.026,00	4.141.797.658,53
	NRV Piutang	21.990.579.437,61	14.579.435.297,11	141.522.241,50	368.444.026,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	45.781.333,00	0,00	45.781.333,00

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.781.333,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2020 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya. Adapun rincian beban dibayar dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Biaya Workshop Kredensial Nakes Lain II Rp4.500.000,00 sesuai surat dari RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor 059/NAKES/IX/2020 yang semula di jadwalkan dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 Maret 2020 dijadwalkan ulang (*rescheduling*) pada Tahun 2021.
- 2) Premi Asuransi Proteksi Profesi Dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Nomor 415.4/28/SPK/408.51/2020 Jangka waktu 01 Juni 2020 – 01 Juni 2021. Sehingga beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp38.221.333,00
- 3) Premi Asuransi Proteksi Profesi Dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Nomor 415.4/31/SPK/408.51/2020 Jangka waktu 01 Agustus 2020 – 01 Juni 2021. Sehingga beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp2.310.000,00
- 4) Premi Asuransi Proteksi Profesi Dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan Nomor 415.4/32/SPK/408.51/2020 Jangka waktu 01 September 2020 – 01 Juni 2021. Sehingga beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp750.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.1.14 Persediaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Persediaan	39.862.262.915,15	40.852.244.838,22	(989.981.923,07)

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.862.262.915,15. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual*. Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik. Sehingga nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Nomor	Nama SKPD	SALDO	MUTASI		SALDO
		AWAL	1/1/2020 s/d 31/12/2020		AKHIR
		Jumlah Harga	Bertambah Jumlah Harga	Berkurang Jumlah Harga	Jumlah Harga
1	Dinas Pendidikan	7.510.470,00	19.400.028.785,79	17.150.632.786,00	2.256.906.469,79
2	Dinas Kesehatan	7.225.032.488,41	24.818.588.759,98	22.550.588.721,37	9.493.032.527,02
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.903.542.177,53	39.774.539.895,33	39.234.558.724,84	7.443.523.348,02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.242.861.422,00	12.089.944.909,47	2.909.943.172,00	11.422.863.159,47
5	Bappeda	0,00	367.394.038,00	367.394.038,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	57.487.472,00	682.470.480,03	651.993.884,03	87.964.068,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	133.264.650,00	133.264.650,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	622.432.618,00	1.018.083.600,00	1.542.351.118,00	98.165.100,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	302.733.314,10	1.927.389.370,00	1.747.581.479,90	482.541.204,20
10	DPPKB dan PPPA	573.315.972,00	760.103.334,00	1.045.546.345,40	287.872.960,60
11	Dinas Sosial	0,00	4.412.377.560,00	4.412.377.560,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	1.226.516.679,00	1.226.516.679,00	0,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98.457.971,00	480.445.578,00	528.916.044,00	49.987.505,00
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7.260.000,00	403.255.550,00	410.229.550,00	286.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	131.274.050,00	131.274.050,00	0,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	46.556.263,00	46.556.263,00	0,00
17	BPBD	0,00	616.932.500,00	608.963.000,00	7.969.500,00
18	Sekretariat Daerah	4.543.550,00	2.017.025.985,00	2.017.556.735,00	4.012.800,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	388.286.423,00	388.286.423,00	0,00
20	BPKAD	65.079.850,00	1.461.533.910,00	1.474.424.700,00	52.189.060,00
21	Bappenda	228.943.890,68	324.274.548,00	311.499.061,03	241.719.377,65



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Nomor	Nama SKPD	SALDO	MUTASI		SALDO
		AWAL	1/1/2020 s/d 31/12/2020		AKHIR
		Jumlah Harga	Bertambah Jumlah Harga	Berkurang Jumlah Harga	Jumlah Harga
1	Dinas Pendidikan	7.510.470,00	19.400.028.785,79	17.150.632.786,00	2.256.906.469,79
22	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	48.587.395,00	48.587.395,00	0,00
23	Inspektorat	799.700,00	122.071.598,00	121.874.298,00	997.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.722.116,00	263.593.275,00	264.635.041,00	680.350,00
25	Dinas PMPTSP	0,00	141.470.467,00	141.470.467,00	0,00
26	Kantor Kecamatan Pacitan	0,00	3.270.093.399,00	3.270.093.399,00	0,00
27	Kantor Kecamatan Kebonagung	0,00	109.908.800,00	109.908.800,00	0,00
28	Kantor Kecamatan Tulakan	0,00	154.234.911,00	154.234.911,00	0,00
29	Kantor Kecamatan Ngadirojo	0,00	71.473.000,00	71.473.000,00	0,00
30	Kantor Kecamatan Sudimoro	0,00	55.931.500,00	55.931.500,00	0,00
31	Kantor Kecamatan Arjosari	0,00	117.126.700,00	117.126.700,00	0,00
32	Kantor Kecamatan Tegalombo	0,00	105.068.350,00	105.068.350,00	0,00
33	Kantor Kecamatan Nawangan	0,00	148.071.500,00	148.071.500,00	0,00
34	Kantor Kecamatan Bandar	0,00	71.452.250,00	71.452.250,00	0,00
35	Kantor Kecamatan Pringuku	0,00	93.604.000,00	93.604.000,00	0,00
36	Kantor Kecamatan Punung	0,00	108.823.000,00	108.823.000,00	0,00
37	Kantor Kecamatan Donorojo	0,00	62.912.250,00	62.912.250,00	0,00
38	Dinas Pangan	333.838,50	1.363.249.100,00	1.168.604.070,50	194.978.868,00
39	Dinas PMD	0,00	210.229.150,00	210.229.150,00	0,00
40	Dinas Perpustakaan	0,00	99.315.650,00	99.315.650,00	0,00
41	Dinas Pertanian	2.706.000,00	5.908.065.915,00	5.878.112.915,00	32.659.000,00
42	Dinas Perkim dan Pertanahan	22.329.194.990,00	134.960.150,00	14.925.903.368,60	7.538.251.771,40
43	Dinas Perikanan	178.286.998,00	3.056.208.490,00	3.068.832.642,00	165.662.846,00
	Jumlah	40.852.244.838,22	128.196.737.718,60	129.186.719.641,67	39.862.262.915,15

Tabel 82 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Persediaan (Rp)
A	Alat Tulis Kantor (ATK)	454.863.710,87
1	Dinas Pendidikan	22.942.500,00
2	Dinas Kesehatan	24.516.920,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	61.728.726,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.150.500,00
5	Dinas Perhubungan	7.204.040,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.728.100,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	300.551.704,20
8	Sekretariat Daerah	4.012.800,00
9	BPKAD	28.504.960,00
10	Inspektorat	997.000,00
11	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	526.460,00
B	Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	62.813.758,00
1	Dinas Pendidikan	7.807.350,00
2	Dinas Kesehatan	3.539.250,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.252.145,00
4	Dinas Perhubungan	12.215.013,00
C	Bahan Baku Bangunan	41.155.605,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.155.605,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Satuan Kerja	Persediaan (Rp)
D	Bibit Ternak	3.300.000,00
1	Dinas Pertanian	3.300.000,00
E	Obat-obatan	14.149.305.310,78
1	Dinas Pendidikan	4.747.500,00
2	Dinas Kesehatan	8.032.929.679,16
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.823.171.958,02
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	259.097.173,60
5	Dinas Pertanian	29.359.000,00
F	Bahan Kimia	1.345.556.215,00
1	Dinas Kesehatan	123.200.275,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.222.355.940,00
G	Bahan Pembersih	291.235.648,00
1	Dinas Pendidikan	11.489.800,00
2	Dinas Kesehatan	5.717.966,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	177.590.882,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	96.437.000,00
H	Bibit Ikan	23.847.846,00
1	Dinas Perikanan	23.847.846,00
I	Materai	42.000,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	42.000,00
J	Bahan Bakar	295.000,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	295.000,00
K	Bahan Makanan	213.543.188,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	18.564.320,00
2	Dinas Pangan	194.978.868,00
L	Bahan Cetak	361.854.162,00
1	Dinas Kesehatan	7.964.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	86.447.657,00
3	Dinas Perhubungan	61.615.015,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	181.989.500,00
5	BPKAD	23.684.100,00
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	153.890,00
M	Karcis	282.053.077,65
1	Dinas Kesehatan	24.285.800,00
2	Dinas Perhubungan	6.930.000,00
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.831.900,00
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	286.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	241.719.377,65
N	Persediaan Lainnya	22.632.397.393,85
1	Dinas Pendidikan	2.209.919.319,79
2	Dinas Kesehatan	1.270.878.636,19
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.074.720,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11.420.712.659,47
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	28.775.787,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.969.500,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.538.251.771,40
8	Dinas Perikanan	141.815.000,00
Total Persediaan		39.862.262.915,15

Persediaan karcis pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berasal dari pengadaan karcis pada Badan Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Persediaan barang lainnya berupa aset yang akan di serahkan kepada masyarakat senilai Rp22.632.397.393,85 ada pada SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.209.919.319,79 berupa sarana dan prasarana pendidikan yang akan diserahkan ke sekolah swasta;
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.270.878.636,19 berupa peralatan penunjang kesehatan APD (Alat Pelindung Diri) dan masker;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono sebesar Rp14.074.720,00 berupa Persediaan Embalase;
- 4) Dinas PUPR sebesar Rp11.420.712.659,47 berupa sarana dan prasarana jalan, jaringan air dan gedung;
- 5) Dinas PPKB & PPPA sebesar Rp28.775.787,00 berupa obat-obatan dan alat Kesehatan IUD Kit;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.969.500,00 merupakan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- 7) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp7.538.251.771,40 berupa jalan-jalan desa;
- 8) Dinas Perikanan sebesar Rp141.815.000,00 berupa kolam untuk pembibitan yang akan diserahkan pada kelompok masyarakat.

Dari total Persediaan sebesar Rp39.862.262.915,15 tersebut termasuk didalamnya sisa persediaan dari anggaran Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp217.266.504,00 dan sisa dari persediaan donasi dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp51.773.570,00 yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun rincian Sisa persediaan Belanja Tidak Terduga terdiri dari Alat kesehatan dan bahan habis pakai farmasi sebesar Rp6.066.504,00 dan Alat kesehatan dan habis pakai laboratorium sebesar Rp211.200.000,00. Sedangkan sisa dari persediaan dari dana donasi penanganan Covid-19 terdiri dari persediaan obat-obatan sebesar Rp285.000,00 dan Alat kesehatan dan bahan habis pakai farmasi sebesar Rp51.488.570,00.

Persediaan obat *expired* dan rusak sebesar Rp1.006.178.576,56 sudah dikeluarkan dari catatan persediaan Dinas Kesehatan dan RSUD. Begitu juga persediaan alat kontrasepsi yang kedaluwarsa sebesar Rp76.633.685,00. Rincian Obat kedaluwarsa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 83 Daftar Obat Expired Date 2020

(dalam rupiah)

NOMOR	UNIT PENGGUNA	DAK	JKN	TOTAL
1	Puskesmas Arjosari	7.199.862,00	0,00	7.199.862,00
2	Puskesmas Bandar	13.107.513,00	71.120,00	13.178.633,00
3	Puskesmas Bubakan	9.051.065,56	0,00	9.051.065,56
4	Puskesmas Candi	31.874.083,22	110.903,20	31.984.986,42
5	Puskesmas Donorojo	21.844.220,17	90.320,00	21.934.540,17
6	Puskesmas Gemaharjo	16.837.253,00	0,00	16.837.253,00
7	Puskesmas Gondosari	39.619.281,00	0,00	39.619.281,00
8	Puskesmas Jeruk	15.015.374,00	0,00	15.015.374,00
9	Puskesmas Kalak	5.252.795,00	0,00	5.252.795,00
10	Puskesmas Kebonagung	40.588.587,00	0,00	40.588.587,00
11	Puskesmas Kedungbendo	4.611.352,00	121.663,00	4.733.015,00
12	Puskesmas Ketrowonojoyo	18.691.438,00	0,00	18.691.438,00
13	Puskesmas Nawangan	29.934.613,00	0,00	29.934.613,00
14	Puskesmas Ngadirojo	30.454.026,40	0,00	30.454.026,40
15	Puskesmas Pacitan	8.845.474,00	0,00	8.845.474,00
16	Puskesmas Pakis Baru	8.654.448,50	0,00	8.654.448,50
17	Puskesmas Pringkuku	12.915.320,16	6.379.280,00	19.294.600,16
18	Puskesmas Punung	10.631.125,66	2.191.080,00	12.822.205,66
19	Puskesmas Sudimoro	13.948.623,00	522.740,00	14.471.363,00
20	Puskesmas Sukorejo	14.773.101,00	0,00	14.773.101,00
21	Puskesmas Tanjungsari	3.162.918,00	68.744,50	3.231.662,50
22	Puskesmas Tegalombo	36.973.860,20	0,00	36.973.860,20
23	Puskesmas Tulakan	34.517.761,00	14.500,00	34.532.261,00
24	Puskesmas Wonokarto	17.816.997,00	0,00	17.816.997,00
25	GFK	468.057.787,00	0,00	468.057.787,00
26	RSUD	82.229.346,99	0,00	82.229.346,99
JUMLAH		996.608.225,86	9.570.350,70	1.006.178.576,56

Tabel 84 Daftar Obat Expired Date 2020

(Dalam Rupiah)

NOMOR	UNIT PENGGUNA	TOTAL
1	Pil KB	21.100.200,00
2	Suntik KB	51.991.520,00
3	Kondom	1.344.000,00
4	Removal Implan Kit	1.878.030,00
5	Ultra One Test Hamil	319.935,00
JUMLAH		76.633.685,00

1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.656.685.846,17. Investasi Jangka Panjang tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pacitan pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 terdiri dari.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang			
Non Permanen	8.347.366.953,06	8.552.742.264,71	(205.375.311,65)
Investasi Jangka Panjang	49.309.318.893,11	49.299.885.842,88	9.433.050,23



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Permanen

Jumlah	57.656.685.846,17	57.852.628.107,59	(195.942.261,42)
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Dana Bergulir	9.849.133.800,00	9.849.133.800,00	0,00
Dana Bergulir diragukan tertagih	(1.501.766.846,94)	(1.296.391.535,29)	(205.375.311,65)
Jumlah	8.347.366.953,06	8.552.742.264,71	(205.375.311,65)

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2020 merupakan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp9.849.133.800,00 dengan nilai penyisihan (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) sebesar Rp1.501.766.846,94.

Tabel 85 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Th	Sasaran						Jumlah (Rp)
		Koperasi		Lembaga Keuangan Mikro		Usaha Kecil Mikro		
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	
1	2002	10	200.000.000,00	10	100.000.000,00	66	329.700.000,00	629.700.000,00
2	2003	30	400.000.000,00	10	63.000.000,00	110	320.000.000,00	783.000.000,00
3	2004	15	300.000.000,00	5	50.000.000,00	100	458.000.000,00	808.000.000,00
4	2005	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	86	480.000.000,00	680.000.000,00
5	2006	7	285.000.000,00	10	100.000.000,00	92	478.000.000,00	863.000.000,00
6	2007	10	368.000.000,00	17	465.000.000,00	181	1.315.000.000,00	2.148.000.000,00
7	2008	-	-	50	50.000.000,00	40	180.000.000,00	230.000.000,00
8	2009	79	125.000.000,00	3	45.000.000,00	27	152.000.000,00	322.000.000,00
9	2010	-	-	-	-	29	585.433.800,00	585.433.800,00
10	2011	4	70.000.000,00	2	20.000.000,00	31	260.000.000,00	350.000.000,00
11	2012	8	298.000.000,00	13	52.000.000,00	-	-	350.000.000,00
12	2013	5	120.000.000,00	1	25.000.000,00	30	205.000.000,00	350.000.000,00
13	2014	1	10.000.000,00	-	-	55	340.000.000,00	350.000.000,00
14	2015	5	135.000.000,00	1	20.000.000,00	40	195.000.000,00	350.000.000,00
15	2016	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	60	320.000.000,00	350.000.000,00
16	2017	3	80.000.000,00			29	270.000.000,00	350.000.000,00
17	2018	-	-	-	-	-	-	-
18	2019	-	350.000.000,00	-	-	-	-	350.000.000,00
19	2020	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	183	2.906.000.000,00	128	1.055.000.000,00	976	5.888.133.800,00	9.849.133.800,00

Dana Bergulir Koperasi dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat dan Koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir pada Tahun 2002 s/d 2020 sebesar Rp9.849.133.800,00. Penambahan Investasi Non Permanen Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dari Tahun 2002 s/d 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir Koperasi, yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

sebesar Rp9.849.133.800,00 terdapat pada:

- 1) Rekening rekening Giro Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Bank Jatim Nomor 0211016370 sebesar Rp1.223.048.872,00; dan
- 2) Nasabah sebesar Rp8.626.084.928,00.

Penghitungan Penyisihan Dana Bergulir diatur melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Penyisihan Dana Bergulir dicatat sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat tertagih sesuai umurnya. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pacitan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0.5%,
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 3 tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >3tahun - 5 tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbitbelum melunasi, penyisihan 50%,
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih adalah sebesar Rp1.501.766.846,94 dan dicatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sedangkan pengelolaan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Nilai tersebut merupakan penyisihan terhadap Saldo Investasi Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro yang posisinya berada pada nasabah sebesar Rp8.626.084.928,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori lancar Rp 28.213.250,00
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori kurang lancar (10%) Rp 149.857.685,31
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori diragukan (50%) Rp 161.162.163,01
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori macet (100%) Rp1.162.533.748,62



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Adapun NRV atas Investasi Dana Bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 86 NRV Investasi Dana Bergulir

(dalam rupiah)

Uraian	Total	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar (0 s/d 1 Th)	Krg Lancar (>1 s/d 3 Th)	Diragukan (>3 s/d 5 Th)	Macet (> 5 Th)
Jumlah Investasi Non Permanen	8.626.084.927,74	5.642.650.000,00	1.498.576.853,10	322.324.326,02	1.162.533.748,62
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	(1.501.766.846,94)	(28.213.250,00)	(149.857.685,31)	(161.162.163,01)	(1.162.533.748,62)
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	7.124.318.080,80	5.614.436.750,00	1.348.719.167,69	161.162.162,71	0,00

1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Investasi Permanen	49.309.318.893,11	49.299.885.842,88	9.433.050,23

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp49.309.318.893,11 terdiri dari saldo awal Tahun 2019 sebesar Rp49.299.885.842,88 ditambah dengan laba Tahun 2020 pada PDAM dan pengurangan atas penyertaan modal pada PDAU menyesuaikan terhadap hasil audit Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) oleh Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Surabaya.

Adapun rincian investasi permanen Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 87 Investasi Permanen

(dalam rupiah)

Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	31.423.235.326,20	0,00	319.669.261,91	0,00	31.742.904.588,11
Perusda Aneka Usaha	371.582.766,68	310.236.211,68	0,00	0,00	61.346.555,00
Jumlah	49.299.885.842,88	310.236.211,68	319.669.261,91	0,00	49.309.318.893,11

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk mencatat penyertaan modal pada Bank Jatim dimana persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,99%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dimana persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

Penyertaan Modal pada Bank Jatim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mulai berlaku pada APBD Tahun 2011, Perda tersebut tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus dilaksanakan melalui Bursa Efek. Namun demikian, sejak Tahun 2015 ketersediaan modal pada Bank Jatim masih mencukupi, sehingga belum menerbitkan saham untuk dijual. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sejumlah 53.520.271 lembar saham. Adapun rincian penambahan investasi permanen pada Bank Jatim dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 88 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	Metode Pencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	Prosentase Kepemilikan Se-Jawa Timur	Cost Metode (Metode Biaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode (Metode Biaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode (Metode Biaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode (Metode Biaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode (Metode Biaya)
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2013	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2014	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2015	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2016	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2017	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	Metode Pencatatan
2018	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2019	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode (Metode Biaya)
2020	0,00		13.380.067.750,00	Belum Rups	Cost Metode (Metode Biaya)

2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi Tahun 2020 dikarenakan hasil dari analisis investasi yang tidak dapat menyatakan suatu kesimpulan atas kelayakan investasi di BPR Jatim. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,99%.

Adapun rincian penambahan investasi permanen pada BPR Jatim dapat dirinci sebagaimana tabel berikut

Tabel 89 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	Metode Pencatatan
saldo 2007	525.000.000,00		525.000.000,00	0,46%	Cost Metode (Metode Biaya)
2008	300.000.000,00		825.000.000,00	0,94%	Cost Metode (Metode Biaya)
2009	300.000.000,00		1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode (Metode Biaya)
2010	300.000.000,00		1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode (Metode Biaya)
2011	300.000.000,00		1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode (Metode Biaya)
2012	300.000.000,00		2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode (Metode Biaya)
2013	300.000.000,00		2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode (Metode Biaya)
2014	300.000.000,00		2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode (Metode Biaya)
2015	300.000.000,00		2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode (Metode Biaya)
2016	300.000.000,00		3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode (Metode Biaya)
2017	300.000.000,00		3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode (Metode Biaya)
2018	300.000.000,00		3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode (Metode Biaya)
2019	300.000.000,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode (Metode Biaya)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	Metode Pencatatan
2020	0,00		4.125.000.000,00	Belum Rups	Cost Metode (Metode Biaya)

3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp31.742.904.588,11

Tabel 90 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam rupiah)

Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan	Saldo 31 Des 2020 (Rp)
PDAM	31.423.235.326,20	0,00	319.669.261,91	0,00	31.742.904.588,11
Jumlah	31.423.235.326,20	0,00	319.669.261,91	0,00	31.742.904.588,11

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp50.000.000,00 setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp31.742.904.588,11 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp31.423.235.326,20. Pada Tahun 2020 terdapat penambahan investasi sebesar Rp319.669.261,91 yang merupakan laba Tahun 2020 atas kepemilikan 100% PDAM yang menambah nilai investasi.

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 91 Rincian Investasi PDAM

(dalam rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	Rp 6.374.304.823,20		Rp 6.374.304.823,20
2008	Rp250.000.000,00		Rp 6.624.304.823,20
2009	Rp822.000.000,00		Rp 7.446.304.823,20
Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
2010	Rp100.000.000,00		Rp 7.546.304.823,20
2011	Rp100.000.000,00	Rp (5.103.266.911,04)	Rp 2.543.037.912,16
2012	Rp100.000.000,00	Rp (2.643.037.912,16)	Rp -
2013	Rp420.000.000,00		Rp 420.000.000,00
2014	Rp100.000.000,00		Rp 520.000.000,00
2015	Rp300.000.000,00		Rp 820.000.000,00
2016	Rp300.000.000,00		Rp 1.120.000.000,00
2017	Rp300.000.000,00		Rp 1.420.000.000,00
koreksi	Rp7.746.304.823,20		Rp 9.166.304.823,20
2018	Rp300.000.000,00		Rp 9.466.304.823,20
2019	Rp300.000.000,00		Rp 9.766.304.823,20
koreksi	Rp 21.656.930.503,00		Rp 31.423.235.326,20
2020	Rp 0,00	Rp319.669.261,91	Rp 31.742.904.588,11



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 4) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp61.346.555,00

Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Surabaya, Nomor 00129/3/0067/AU.2/11/1321-21/1/XII/2019 perihal Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 serta Laporan Auditor Independen dan Management Letter Hasil Audited Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Nomor: 00129A/ML/KAP.BSN/XII/2019 untuk tahun yang berakhir 31 desember 2018, dengan hasil kesimpulan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sejak awal berdiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, usaha yang dijalankan tidak menguntungkan sehingga gagal mengembangkan modalnya. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memutuskan untuk menghentikan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dan untuk segala aset/kekayaan PDAU diserahkan kepada Pemerintah Daerah selaku Pemilik sesuai dengan Surat Bupati Pacitan Nomor 501/029/408.16/2020 Tentang Pemberhentian Operasional PDAU Kabupaten Pacitan.

Adapun Aset/Kekayaan yang harus diserahkan:

a. Keuangan

Adapun aset keuangan yang harus diserahkan berupa:

- Kas	Rp	54.851,00
- Bank	Rp	2.466.067,00
- Piutang	Rp	4.800.000,00
- Biaya Dibayar Dimuka	Rp	1.500.000,00
- Aset Tetap (Nilai Wajar)	Rp	32.500.000,00
- Aset Lain-lain	Rp	20.025.637,00
Total	Rp	61.346.555,00

Adapun jenis kondisi aset tetap/inventaris PDAU per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

Tabel 92 Rincian Aset Tetap/Inventaris PDAU

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Konsisi
1	Meja Direktur	1	Rusak Ringan
2	Sekat Ruangan	1	Rusak Ringan
3	Kaca Pintu	1	Rusak Ringan
4	Neon Box	1	Rusak Ringan
5	Note Book	2	Baik
6	Kursi Direktur	1	Baik
7	Meja Rapat	1	Rusak Ringan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Konsisi
8	Kursi Rapat	2	Baik
9	Oven Pengering	1	Rusak Berat
10	Oven chip chasava unit agrobisnis	1	Rusak Berat
11	Pembuatan Indik dan perlengkapan chip chasava unit agrobisnis	1	Rusak Berat
12	widik Unit Agribisnis	1	Rusak Berat
13	Bedeng nama unit agrobisnis	1	Rusak Berat
14	Pengadaan Meubelair Kursi Rapat	2	Rusak Ringan
15	Meja kerja 2 Unit	2	Rusak Ringan
16	Pengadaan Mesin fex	1	Rusak Ringan
17	Televisi	1	Rusak Ringan
18	Meja kerja 2 Unit	2	Baik
19	Box Arsip	1	Rusak Ringan
20	Kipas Angin	1	Rusak Berat
21	Meubelair Kursi rapat	2	Baik
22	Mesin Pengolah air siap minum	1	Baik
23	Pembelian Tangga besi 240	1	Baik
24	Pembelian bak besar	1	Baik
25	Pembelian Tangga besi 170	1	Baik
26	Pembelian Tempat sampah dan Gelas Polos	1	Baik
27	Pembelian Tangga besi 171	1	Baik
28	Pembelian Tiang Penyangga Galon	1	Rusak Berat
29	Pembelian Pesawat Telepon	1	Rusak Berat
30	Pembelian Wastafel,sifon,kran,fiser,baut,fiser semen PC dan saringan wasbak	1	Baik
31	Pembelian hairdrayer untuk penyegelan	1	Rusak Berat
32	Etalase KBU (1 Pengisian,1 Pencucian)	1	Rusak Berat
33	Pembelian Mesin Sikat Galon	1	Baik
34	Pembelian Housing Filter Bening, Houseing Filter Rasa, Sprayer, dan Selenoit Kran Pengisian	1	Rusak Berat
35	Tandon air	1	Baik
36	Pembelian Printer Canon Pixma MP237 dan infus	1	Rusak Berat
37	Tandon air	1	Baik
38	Pintu Gawang	1	Baik
39	Kamera Digital	2	Baik

1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap	1.889.917.534.410,68	2.016.956.793.554,43

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 meliputi tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian Adapun mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 93 Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	TANAH	501.428.577.662,02	171.221.920.944,00	171.263.172.932,06	501.387.325.673,96
1	Tanah	501.428.577.662,02	171.221.920.944,00	171.263.172.932,06	501.387.325.673,96
	PERALATAN DAN MESIN	434.370.654.189,51	94.660.813.601,37	33.836.746.869,78	495.194.720.921,10
2	Alat-Alat Besar	27.279.383.764,00	4.325.310.264,49	1.385.542.970,00	30.219.151.058,49



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
3	Alat Angkutan	88.231.981.297,90	4.206.193.557,00	3.547.959.804,00	88.890.215.050,90
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.563.058.804,00	1.224.529.255,00	2.109.981.784,00	9.677.606.275,00
5	Alat Pertanian	5.241.076.660,00	611.477.435,00	2.047.527.915,00	3.805.026.180,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	135.663.132.116,56	43.263.136.885,52	3.296.557.307,00	175.629.711.695,08
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	21.997.366.102,78	741.528.895,00	9.618.282.785,70	13.120.612.212,08
8	Alat Kedokteran	109.374.750.602,05	21.572.049.807,71	2.651.512.488,44	128.295.287.921,32
9	Alat Laboratorium	34.975.109.177,22	12.044.810.743,12	9.179.381.815,64	37.840.538.104,70
10	Alat Keamanan	1.044.795.665,00	6.671.776.758,53	-	7.716.572.423,53
	GEDUNG DAN BANGUNAN	854.177.974.970,56	78.543.899.917,93	62.036.996.191,51	870.684.878.696,98
11	Bangunan Gedung	838.139.256.238,07	60.267.563.442,68	56.229.541.787,51	842.177.277.893,24
12	Monumen/Bangunan Bersejarah	16.038.718.732,49	18.276.336.475,25	5.807.454.404,00	28.507.600.803,74
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.557.767.408.292,42	101.371.673.524,47	45.801.702.348,16	1.613.337.379.468,73
13	Jalan dan Jembatan	1.128.717.272.584,98	31.063.949.265,04	2.474.934.658,52	1.157.306.287.191,50
14	Bangunan Air	224.292.091.972,47	50.784.898.860,20	6.525.636.735,05	268.551.354.097,62
15	Instalasi	28.101.404.132,00	4.915.009.499,21	12.037.216.200,00	20.979.197.431,21
16	Jaringan	176.656.639.602,97	14.607.815.900,02	24.763.914.754,59	166.500.540.748,40
	ASET TETAP LAINNYA	76.066.645.301,60	7.187.358.657,77	5.450.507.025,18	77.803.496.934,19
17	Buku dan Barang-barang Perpustakaan	65.627.795.563,30	4.569.199.417,00	2.944.884.805,18	67.252.110.175,12
18	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya	9.292.233.338,30	1.401.116.000,00	1.808.362.020,00	8.884.987.318,30
19	Hewan/Tanaman	1.146.616.400,00	81.860.000,00	697.260.200,00	531.216.200,00
20	Aset Tetap Renovasi		1.135.183.240,77	-	1.135.183.240,77
	KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN	36.452.450.935,44	2.819.837.882,63	-	39.272.288.818,07
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.452.450.935,44	2.819.837.882,63	-	39.272.288.818,07
22	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.443.306.917.797,12)	(326.089.309.997,84)	(61.633.671.692,61)	(1.707.762.556.102,35)
	JUMLAH ASET TETAP	2.016.956.793.554,43	129.716.194.530,33	256.755.453.674,08	1.889.917.534.410,68

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.889.917.534.410,68 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2019

Penambahan Tahun 2020	Rp	455.805.504.528,17
Jumlah	Rp	3.916.069.215.879,72
Pengurangan Tahun 2020	Rp	(318.389.125.366,69)
Aset Tetap per 31 Desember 2020	Rp	3.597.680.090.513,03
Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	Rp	(1.707.762.556.102,35)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	1.889.917.534.410,68

Nilai Aset *extracomtabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 9** dan **Lampiran 10**.

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Tanah	501.387.325.673,96	501.428.577.662,02

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 94 Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	501.428.577.662,02	171.221.920.944,00	171.263.172.932,06	501.387.325.673,96
JUMLAH	501.428.577.662,02	171.221.920.944,00	171.263.172.932,06	501.387.325.673,96

Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 95 Mutasi Tanah Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	25.368.739.685,00	4.566.468.002,00		29.935.207.687,00
Dinas Kesehatan	4.525.877.625,00	4.095.827.310,00		8.621.704.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.698.386.000,00			8.698.386.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.496.143.949,00	86.169.956.179,00		113.666.100.128,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.441.713.234,00	934.954.200,00	17.135.713.234,00	1.240.954.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00			120.000.000,00
Dinas Sosial	2.556.890.000,00	488.627.000,00		3.045.517.000,00
Dinas Pangan	437.500.000,00	475.000.000,00		912.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.844.871.300,00	3.399.546.363,00		5.244.417.663,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	896.725.000,00	13.536.000,00		910.261.000,00
Dinas Perhubungan	7.009.101.062,00	112.258.000,00		7.121.359.062,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.518.744.012,00	1.402.400.000,00		3.921.144.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00			375.000.000,00
Dinas Perpustakaan	472.650.000,00			472.650.000,00
Dinas Perikanan	540.110.000,00	312.075.000,00		852.185.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	86.545.421.524,07	25.989.067.580,00		112.534.489.104,07
Dinas Pertanian	19.136.068.750,00	294.750.000,00		19.430.818.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	280.500.000,00	25.053.566.810,00		25.334.066.810,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.978.002.085,00	4.005.128.200,00	151.095.984.848,06	49.887.145.436,94
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	493.250.000,00			493.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Daerah				
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000,00			150.000.000,00
Inspektorat	261.100.000,00			261.100.000,00
Sekretariat Daerah	52.323.351.257,95	9.232.285.300,00	3.031.474.850,00	58.524.161.707,95
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00			2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00			392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00			290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00			796.250.000,00
Kecamatan Pringkuku	57.500.000,00			57.500.000,00
Kecamatan Pacitan	36.220.707.178,00	4.639.075.000,00		40.859.782.178,00
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00			300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00			297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00			237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00			181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	772.600.000,00	37.400.000,00		810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00			354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00			2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00			333.375.000,00
JUMLAH	501.428.577.662,02	171.221.920.944,00	171.263.172.932,06	501.387.325.673,96

Sedangkan mutasi aset tanah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah

Saldo Awal **Rp 501.428.577.662,02**

Penambahan **Rp 171.221.920.944,00**

Pengadaan Rp 934.954.200,00

Mutasi Masuk Rp 167.996.593.994,00

Hibah Masuk Rp 20.000.000,00

Kurang Catat Rp 2.270.372.750,00

Pengurangan **Rp 171.263.172.932,06**

Lebih Catat Rp 2.920.000.000,00

Mutasi Keluar Rp 167.996.593.994,00

Hibah Keluar Rp 346.578.938,06

Saldo Akhir

Tanah **Rp 501.387.325.673,96**

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp934.954.200,00
- 2) Mutasi masuk tanah senilai Rp167.996.593.994,00 ke:
 - (1) Dinas Pendidikan senilai Rp4.566.468.002,00
 - (2) Dinas Kesehatan senilai Rp4.095.827.310,00
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp86.169.956.179,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- (4) Dinas Sosial senilai Rp488.627.000,00
 - (5) Dinas Pangan senilai Rp475.000.000,00
 - (6) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.399.546.363,00
 - (7) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp1.402.400.000,00
 - (8) Dinas Perikanan senilai Rp312.075.000,00
 - (9) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp25.989.067.580,00
 - (10) Dinas Pertanian senilai Rp294.750.000,00
 - (11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp25.053.566.810,00
 - (12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.840.549.450,00
 - (13) Sekretariat Daerah senilai Rp9.232.285.300,00
 - (14) Kecamatan Pacitan senilai Rp4.639.075.000,00
 - (15) Kecamatan Tegalombo senilai Rp37.400.000,00
- 3) Hibah masuk tanah dari Badan Pertanahan Nasional senilai Rp20.000.000,00 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- 4) Kurang catat tanah karena terjadi kekurangan nilai aset tanah berdasarkan hasil *appraisal* Sucofindo senilai Rp2.270.372.750,00 yaitu pada:
- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak senilai Rp13.536.000,00
 - (2) Dinas Perhubungan senilai Rp112.258.000,00
 - (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.144.578.750,00

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Lebih catat tanah senilai Rp2.920.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Mutasi keluar tanah senilai Rp167.996.593.994,00 dari :
 - (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp17.135.713.234,00
 - (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp147.829.405.910,00
 - (3) Sekretariat Daerah senilai Rp3.031.474.850,00
- 3) Hibah keluar tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp346.578.938,06



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Peralatan Dan Mesin	495.194.720.921,10	434.370.654.189,51

Tabel 96 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Alat-Alat Besar	27.279.383.764,00	4.325.310.264,49	1.385.542.970,00	30.219.151.058,49
Alat Angkutan	88.231.981.297,90	4.206.193.557,00	3.547.959.804,00	88.890.215.050,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.563.058.804,00	1.224.529.255,00	2.109.981.784,00	9.677.606.275,00
Alat Pertanian	5.241.076.660,00	611.477.435,00	2.047.527.915,00	3.805.026.180,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	135.663.132.116,56	43.263.136.885,52	3.296.557.307,00	175.629.711.695,08
Alat Studio dan Alat Komunikasi	21.997.366.102,78	741.528.895,00	9.618.282.785,70	13.120.612.212,08
Alat Kedokteran	109.374.750.602,05	21.572.049.807,71	2.651.512.488,44	128.295.287.921,32
Alat Laboratorium	34.975.109.177,22	12.044.810.743,12	9.179.381.815,64	37.840.538.104,70
Alat Keamanan	1.044.795.665,00	6.671.776.758,53	0,00	7.716.572.423,53
JUMLAH	434.370.654.189,51	94.660.813.601,37	33.836.746.869,78	495.194.720.921,10

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 97 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	89.070.321.827,43	35.415.681.381,08	11.145.336.096,83	113.340.667.111,68
Dinas Kesehatan	75.910.487.512,07	11.896.466.139,56	5.633.321.435,03	82.173.632.216,60
Rumah Sakit Umum Daerah	108.575.094.956,20	19.515.506.057,22	2.345.900.292,12	125.744.700.721,30
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.468.902.436,00	2.116.471.127,00	938.630.752,00	16.646.742.811,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.723.312.443,00	363.503.512,00	111.631.130,00	1.975.184.825,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.275.003.647,75	126.720.131,00	95.590.131,00	5.306.133.647,75
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.124.797.232,00	912.120.860,00	432.938.000,00	5.603.980.092,00
Dinas Sosial	1.570.689.550,00	181.447.800,00	154.142.100,00	1.597.995.250,00
Dinas Pangan	1.351.256.025,00	190.614.700,00	440.183.700,00	1.101.687.025,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.179.641.774,00	2.063.125.700,00	963.991.327,00	13.278.776.147,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.730.894.867,00	452.320.000,00	23.220.000,00	3.159.994.867,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.174.747.945,00	71.657.750,00	181.501.145,00	1.064.904.550,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6.238.977.250,51	424.762.520,00	167.030.000,00	6.496.709.770,51
Dinas Perhubungan	4.747.779.447,00	5.229.103.019,00	248.269.900,00	9.728.612.566,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.410.856.188,00	1.129.061.449,00	214.180.700,00	5.325.736.937,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.588.564.094,00	353.589.050,00	339.972.150,00	2.602.180.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.832.447.256,09	82.020.500,00	156.614.691,00	1.757.853.065,09
Dinas Perpustakaan	2.468.445.812,00	54.085.498,00	29.555.498,00	2.492.975.812,00
Dinas Perikanan	5.802.429.390,00	1.077.365.405,00	1.082.720.125,00	5.797.074.670,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2.996.993.380,99	1.868.245.979,71	167.985.000,00	4.697.254.360,70
Dinas Pertanian	8.119.629.023,80	1.700.128.393,80	1.473.495.993,80	8.346.261.423,80
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.333.367.228,00	1.102.603.225,00	797.528.800,00	4.638.441.653,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.573.034.994,00	213.311.850,00	122.126.850,00	2.664.219.994,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.412.805.873,00	1.499.630.000,00	1.829.908.042,00	15.082.527.831,00
Badan Pendapatan Daerah	2.694.472.115,69	270.701.700,00	59.144.200,00	2.906.029.615,69
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.630.108.094,00	461.460.876,00	419.422.000,00	2.672.146.970,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.255.641.362,00	14.345.000,00	4.500.000,00	1.265.486.362,00
Inspektorat	2.029.554.512,00	177.199.455,00	299.218.940,00	1.907.535.027,00
Sekretariat Daerah	20.635.584.816,00	3.295.738.407,00	2.512.089.557,00	21.419.233.666,00
Sekretariat DPRD	7.935.900.663,00	464.088.478,00	369.871.078,00	8.030.118.063,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.261.642.150,00	24.022.500,00	24.022.500,00	1.261.642.150,00
Kecamatan Donorojo	858.965.563,33	100.463.200,00	22.998.200,00	936.430.563,33
Kecamatan Punung	1.034.587.052,33	130.505.902,00	28.927.800,00	1.136.165.154,33
Kecamatan Pringkuku	914.851.726,00	144.698.200,00	46.498.200,00	1.013.051.726,00
Kecamatan Pacitan	2.862.890.651,00	159.548.400,00	103.900.900,00	2.918.538.151,00
Kecamatan Kebonagung	1.276.358.114,00	353.408.836,00	273.079.836,00	1.356.687.114,00
Kecamatan Arjosari	1.146.219.876,00	324.812.000,00	246.800.000,00	1.224.231.876,00
Kecamatan Nawangan	847.577.388,33	54.101.200,00	6.998.200,00	894.680.388,33
Kecamatan Bandar	820.088.813,33	80.509.200,00	6.998.200,00	893.599.813,33
Kecamatan Tegalombo	993.242.863,33	102.073.400,00	14.698.200,00	1.080.618.063,33
Kecamatan Tulakan	1.158.841.988,33	115.130.400,00	27.475.800,00	1.246.496.588,33
Kecamatan Ngadirojo	1.321.748.905,00	327.006.200,00	252.371.200,00	1.396.383.905,00
Kecamatan Sudimoro	1.011.897.383,00	21.458.200,00	21.958.200,00	1.011.397.383,00
JUMLAH	434.370.654.189,51	94.660.813.601,37	33.836.746.869,78	495.194.720.921,10

Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Rp	434.370.654.189,51
Penambahan	Rp	94.660.813.601,37
Pengadaan	Rp	43.200.008.270,00
Aset dari Belanja Barang		
Jasa	Rp	236.073.156,00
Reklas dari Persediaan	Rp	11.748.000,00
Mutasi Masuk	Rp	3.032.132.820,00
Hibah Masuk	Rp	13.034.696.049,39
Kurang Catat	Rp	586.479.407,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Koreksi/Reklas Aset	Rp	34.559.675.898,98		
Pengurangan			Rp	33.836.746.869,78
Koreksi/Reklas Aset	Rp	24.598.260.824,41		
ExtracompTabel	Rp	3.272.665.193,37		
Reklas ke Persediaan	Rp	101.178.000,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	318.314.827,00		
Lebih Catat	Rp	477.038.557,00		
Penghapusan	Rp	1.460.051.648,00		
Mutasi Keluar	Rp	3.032.132.820,00		
Hibah Keluar	Rp	577.105.000,00		
Saldo Akhir			Rp	495.194.720.921,10

Penambahan nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp43.200.008.270,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	22.831.353.037,00
Dinas Kesehatan	Rp	10.041.719.550,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.025.849.550,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	494.979.975,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	254.172.382,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	407.550.000,00
Dinas Sosial	Rp	65.095.700,00
Dinas Pangan	Rp	105.158.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.233.927.200,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	162.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	14.195.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	257.732.520,00
Dinas Perhubungan	Rp	46.393.050,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	322.558.449,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	8.688.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	30.370.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	24.530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dinas Perikanan	Rp	11.459.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	76.253.000,00
Dinas Pertanian	Rp	225.713.400,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	165.264.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	83.985.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	354.531.600,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	234.008.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	13.805.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	14.345.000,00
Inspektorat	Rp	103.932.455,00
Sekretariat Daerah	Rp	509.551.700,00
Sekretariat DPRD	Rp	163.937.400,00
Kecamatan Donorojo	Rp	77.450.000,00
Kecamatan Punung	Rp	101.578.102,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	98.000.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	86.170.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	94.519.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	91.872.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	47.103.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	55.550.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	87.375.200,00
Kecamatan Tulakan	Rp	101.895.200,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	74.635.000,00
Jumlah	Rp	43.200.008.270,00

- 2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp236.073.156,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp31.130.000,00 dari Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Persediaan Peralatan Penunjang Kesehatan, Dinas Perikanan senilai Rp6.011.280,00 dari Belanja Persediaan Bahan baku Perikanan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah senilai Rp198.931.876,00 dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- 3) Reklas dari Persediaan senilai Rp11.748.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp979.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp1.958.000,00 dan Dinas Perindustrian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dan Perdagangan Rp8.811.000,00 berupa tong sampah dari Dinas Lingkungan Hidup.

- 4) Mutasi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp3.032.132.820,00 untuk Peralatan dan Mesin pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	5.940.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	850.282.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	178.470.400,00
Dinas Pangan	Rp	19.800.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	82.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	21.930.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	25.320.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	57.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	2.970.000,00
Dinas Pertanian	Rp	35.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	33.767.520,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	24.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	997.322.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	17.380.000,00
Inspektorat	Rp	6.376.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	6.875.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	13.125.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	217.958.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	217.958.000,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	217.958.000,00
JUMLAH	Rp	3.032.132.820,00

- 5) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp13.034.696.049,39 yaitu pada SKPD berikut:

- Dinas Pendidikan senilai Rp1.391.775.000,00 merupakan hibah masuk dari Belanja yang bersumber dana APBN yang diberikan kepada beberapa Sekolah Negeri di Kabupaten Pacitan.
- Dinas Kesehatan senilai Rp487.485.000,00 terdiri dari sebesar Rp467.485.000,00 merupakan hibah dari PPKD (Dana BTT Covid-19) berupa alat kesehatan *Thermogun*, *Sprayer*, Lemari dokumen dan *Springbed*. Selain itu sebesar Rp2.000.000,00 berupa *Sprayer* dari BUMD dan sebesar Rp18.000.000,00 berupa *Thermogun* dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono senilai Rp10.223.474.255,10 terdiri dari Hibah BMN dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor KN.02.07/1.3/7029/2020 sebesar Rp7.208.520.000,00, barang donasi dari masyarakat dan pihak ketiga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 kepada RSUD berdasarkan pengesahan BUD Nomor 0013/SP3BP-BLUD/1.02.02/2020 sebesar Rp1.214.861.573,00 dan Hibah dari PPKD dana BTT Kabupaten Pacitan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1.800.092.682,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp494.560.000,00 berupa turbin dan pompa air hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp20.755.000,00 merupakan Hibah dari PPKD dana BTT Covid-19 berupa pompa air senilai Rp3.300.000,00, *hand sprayer* sebesar Rp14.355.000,00 dan televisi senilai Rp3.100.000,00
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp266.300.000,00 berupa Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri dan *Printer* dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - Dinas Perhubungan senilai Rp7.500.000,00 merupakan Hibah dari PPKD dana BTT Covid-19.
 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp95.106.264,29 merupakan Hibah dari PPKD dana BTT Covid-19.
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp29.779.530,00 merupakan Hibah dari PPKD dana BTT Covid-19 berupa Alat Semprot, *Thermogun* dan *Wastafel*.
 - Kecamatan Bandar senilai Rp17.961.000,00 berupa sepeda motor yaitu hibah dari Bank Jatim.
- 6) Kurang Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp586.479.407,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp26.800.000,00 berupa Sepeda Motor dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp287.679.407,00 berupa Kendaraan Roda Dua (Motor) dan Rp272.000.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat (Mobil)
- 7) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp34.559.675.898,98 pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dinas Pendidikan	Rp	11.186.613.344,08
Dinas Kesehatan	Rp	1.367.261.589,56
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.415.899.852,12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	948.460.752,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	109.331.130,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	95.590.131,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	483.815.860,00
Dinas Sosial	Rp	116.352.100,00
Dinas Pangan	Rp	65.655.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	747.198.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	23.220.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	35.532.250,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	167.030.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	5.149.889.969,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	748.024.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	339.972.150,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	51.650.500,00
Dinas Perpustakaan	Rp	29.555.498,00
Dinas Perikanan	Rp	1.059.895.125,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	1.696.886.715,42
Dinas Pertanian	Rp	1.439.214.993,80
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	864.981.175,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	105.326.850,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	120.975.900,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	36.693.200,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	231.344.000,00
Inspektorat	Rp	66.891.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	2.219.632.300,00
Sekretariat DPRD	Rp	300.151.078,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	24.022.500,00
Kecamatan Donorojo	Rp	23.013.200,00
Kecamatan Punung	Rp	28.927.800,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	46.698.200,00
Kecamatan Pacitan	Rp	60.253.400,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	40.931.836,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Kecamatan Arjosari	Rp	14.982.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	6.998.200,00
Kecamatan Bandar	Rp	6.998.200,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	14.698.200,00
Kecamatan Tulakan	Rp	13.235.200,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	34.413.200,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	21.458.200,00
Jumlah	Rp	34.559.675.898,98

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp24.598.260.824,41 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	8.375.478.128,83
Dinas Kesehatan	Rp	3.855.773.909,66
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	2.278.281.792,12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	899.360.752,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	109.331.130,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	95.590.131,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	432.938.000,00
Dinas Sosial	Rp	116.352.100,00
Dinas Pangan	Rp	65.655.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	747.198.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	23.220.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	35.532.250,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	167.030.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	228.919.900,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	212.893.700,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	339.972.150,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	49.350.500,00
Dinas Perpustakaan	Rp	29.555.498,00
Dinas Perikanan	Rp	1.059.895.125,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	167.985.000,00
Dinas Pertanian	Rp	1.440.407.993,80
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	797.528.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	105.326.850,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	120.975.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Badan Pendapatan Daerah	Rp	36.693.200,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	234.144.000,00
Inspektorat	Rp	66.891.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	1.865.915.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	300.151.078,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	24.022.500,00
Kecamatan Donorojo	Rp	22.998.200,00
Kecamatan Punung	Rp	28.927.800,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	46.498.200,00
Kecamatan Pacitan	Rp	63.250.900,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	40.931.836,00
Kecamatan Arjosari	Rp	14.982.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	6.998.200,00
Kecamatan Bandar	Rp	6.998.200,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	14.698.200,00
Kecamatan Tulakan	Rp	13.235.200,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	34.413.200,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	21.958.200,00
JUMLAH	Rp	24.598.260.824,41

2) Merupakan Barang *Extracomptable* Tahun 2020 senilai Rp3.272.665.193,37 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	2.723.857.968,00
Dinas Kesehatan	Rp	277.662.125,37
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	32.618.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	39.270.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	2.300.000,00
Dinas Sosial	Rp	2.190.000,00
Dinas Pangan	Rp	7.260.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	1.287.000,00
Dinas Perikanan	Rp	2.325.000,00
Dinas Pertanian	Rp	33.088.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	4.500.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	104.016.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	14.190.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	13.860.000,00
Kecamatan Tulakan	Rp	14.240.600,00
JUMLAH	Rp	3.272.665.193,37



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

3) Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp101.178.000,00 pada Dinas. Lingkungan Hidup berupa mesin pencacah sampah, kendaraan roda 3 dan gerobak dan telah dihibahkan pada Tahun 2020 kepada masyarakat.

4) Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp318.314.827,00 merupakan barang-barang rusak/yang akan dihibahkan, namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan yaitu pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup	Rp	71.472.827,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	181.722.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	65.120.000,00
Jumlah	Rp	318.314.827,00

5) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp477.038.557,00 pada Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor senilai Rp264.038.600,00 dan mobil senilai Rp212.999.957,00

6) Penghapusan Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Bupati Pacitan senilai Rp1.460.051.648,00 pada SKPD:

Dinas Sosial	Rp	28.600.000,00
Dinas Pangan	Rp	307.204.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	139.668.895,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	107.264.191,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	450.396.222,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	22.451.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	172.138.500,00
Inspektorat	Rp	232.327.940,00
Jumlah	Rp	1.460.051.648,00

7) Mutasi keluar Peralatan Mesin senilai Rp3.032.132.820,00 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	46.000.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	1.499.885.400,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	35.000.000,00
Dinas Sosial	Rp	7.000.000,00
Dinas Pangan	Rp	60.063.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	44.142.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Rp	6.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Desa		
Dinas Perhubungan	Rp	19.350.000,00
Dinas Perikanan	Rp	20.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	16.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	499.708.920,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	13.139.500,00
Sekretariat DPRD	Rp	69.720.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	40.650.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	217.958.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	217.958.000,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	217.958.000,00
JUMLAH	Rp	3.032.132.820,00

- 8) Hibah Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp577.105.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Kendaraan Roda Empat ke Desa Tumpuk, Desa Gondosari, Desa Mantren, Desa Sudimoro, PPD I Desa Tinatar, Desa Ponggok, GP Ansor, senilai Rp565.005.000,00 dan berupa *ambulance* senilai Rp12.100.000,00 ke Desa Sukoharjo.

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN **495.194.720.921,10**

Alat-Alat Besar dan Alat Bantu

Saldo Awal	Rp	27.279.383.764,00
Penambahan	Rp	4.325.310.264,49
Pengadaan	Rp	1.893.502.500,00
Aset dari Belanja	Rp	20.306.000,00
Barang Jasa		
Hibah Masuk	Rp	508.172.500,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.903.329.264,49
Pengurangan	Rp	1.385.542.970,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.385.542.970,00
Saldo Akhir	Rp	30.219.151.058,49

Alat Angkutan

Saldo Awal	Rp	88.231.981.297,90
Penambahan	Rp	4.206.193.557,00
Pengadaan	Rp	1.371.633.130,00
Mutasi Masuk	Rp	2.161.835.920,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Hibah Masuk	Rp	17.961.000,00		
Kurang Catat	Rp	586.479.407,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	68.284.100,00		
Pengurangan			Rp	3.547.959.804,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	198.000,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	253.194.827,00		
Lebih Catat	Rp	477.038.557,00		
Penghapusan	Rp	9.947.500,00		
Mutasi Keluar	Rp	2.161.835.920,00		
Hibah Keluar	Rp	577.105.000,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	68.640.000,00		
Saldo Akhir			Rp	88.890.215.050,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Saldo Awal			Rp	10.563.058.804,00
Penambahan			Rp	1.224.529.255,00
Pengadaan	Rp	27.148.000,00		
Aset dari Belanja	Rp	2.420.000,00		
Barang Jasa				
Hibah Masuk	Rp	13.417.500,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.181.543.755,00		
Pengurangan			Rp	2.109.981.784,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	2.063.792.784,00		
Extracomptable	Rp	1.320.000,00		
Penghapusan	Rp	44.869.000,00		
Saldo Akhir			Rp	9.677.606.275,00
Alat Pertanian				
Saldo Awal			Rp	5.241.076.660,00
Penambahan			Rp	611.477.435,00
Pengadaan	Rp	111.677.500,00		
Aset dari Belanja	Rp	1.655.280,00		
Barang Jasa				
Hibah Masuk	Rp	56.587.300,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	441.557.355,00		
Pengurangan			Rp	2.047.527.915,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.985.399.915,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	32.538.000,00		
Penghapusan	Rp	29.590.000,00		
Saldo Akhir			Rp	3.805.026.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Saldo Awal		Rp	135.663.132.116,56
Penambahan		Rp	43.263.136.885,52
Pengadaan	Rp	24.351.507.124,00	
Aset dari Belanja	Rp	198.931.876,00	
Barang Jasa			
Masuk dari aset lain	Rp	11.748.000,00	
Mutasi Masuk	Rp	20.014.500,00	
Hibah Masuk	Rp	1.786.583.494,29	
Koreksi/Reklas Aset	Rp	16.894.351.891,23	
Pengurangan		Rp	3.296.557.307,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	424.344.698,00	
Extracomptable	Rp	1.509.207.961,00	
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	65.120.000,00	
Penghapusan	Rp	1.277.870.148,00	
Mutasi Keluar	Rp	20.014.500,00	
Saldo Akhir		Rp	175.629.711.695,08

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Saldo Awal		Rp	21.997.366.102,78
Penambahan		Rp	741.528.895,00
Pengadaan	Rp	640.144.869,00	
Hibah Masuk	Rp	1.400.000,00	
Koreksi/Reklas Aset	Rp	99.984.026,00	
Pengurangan		Rp	9.618.282.785,70
Koreksi/Reklas Aset	Rp	9.518.980.385,70	
Extracomptable	Rp	2.682.400,00	
Penghapusan	Rp	96.620.000,00	
Saldo Akhir		Rp	13.120.612.212,08

Alat Kedokteran

Saldo Awal		Rp	109.374.750.602,05
Penambahan		Rp	21.572.049.807,71
Pengadaan	Rp	6.859.490.477,00	
Mutasi Masuk	Rp	850.282.400,00	
Hibah Masuk	Rp	10.098.778.255,10	
Koreksi/Reklas Aset	Rp	3.763.498.675,61	
Pengurangan		Rp	2.651.512.488,44
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.744.022.976,07	
Extracomptable	Rp	57.207.112,37	
Mutasi Keluar	Rp	850.282.400,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Saldo Akhir **Rp 128.295.287.921,32**

Alat Laboratorium

Saldo Awal **Rp 34.975.109.177,22**

Penambahan **Rp 12.044.810.743,12**

Pengadaan Rp 7.929.944.670,00

Aset dari Belanja Rp 12.760.000,00

Barang Jasa

Hibah Masuk Rp 551.796.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 3.550.310.073,12

Pengurangan **Rp 9.179.381.815,64**

Koreksi/Reklas Aset Rp 7.475.979.095,64

Extracomptable Rp 1.702.247.720,00

Penghapusan Rp 1.155.000,00

Saldo Akhir **Rp 37.840.538.104,70**

Alat Keamanan

Saldo Awal **Rp 1.044.795.665,00**

Penambahan **Rp 6.671.776.758,53**

Pengadaan Rp 14.960.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 6.656.816.758,53

Saldo Akhir **Rp 7.716.572.423,53**

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Gedung dan Bangunan	870.684.878.696,98	854.177.974.970,56

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 98 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bangunan Gedung	838.139.256.238,07	60.267.563.442,68	56.229.541.787,51	842.177.277.893,24
Monumen/Bangunan Bersejarah	16.038.718.732,49	18.276.336.475,25	5.807.454.404,00	28.507.600.803,74
JUMLAH	854.177.974.970,56	78.543.899.917,93	62.036.996.191,51	870.684.878.696,98

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 99 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2020

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	377.043.826.775,06	36.194.015.169,48	26.125.662.684,83	387.112.179.259,71



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Kesehatan	75.564.082.438,90	7.554.998.692,05	3.500.835.859,69	79.618.245.271,26
Rumah Sakit Umum Daerah	68.898.434.187,10	12.415.176.549,78	3.479.470.776,77	77.834.139.960,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.704.876.211,47	2.630.157.406,00	2.731.699.490,23	9.603.334.127,24
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	446.580.022,00	239.928.000,00	65.128.000,00	621.380.022,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	-	-	609.873.661,02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.454.860,00	102.860.000,00	141.087.860,00	278.227.000,00
Dinas Sosial	1.869.700.945,00	144.300.000,00	134.350.000,00	1.879.650.945,00
Dinas Pangan	1.442.689.743,64	51.578.500,00	51.578.500,00	1.442.689.743,64
Dinas Lingkungan Hidup	13.930.608.867,07	810.784.516,00	544.728.027,00	14.196.665.356,07
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.723.910.192,00	-	-	2.723.910.192,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	-	-	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.942.992.875,11	2.232.718.276,73	1.830.244.276,73	6.345.466.875,11
Dinas Perhubungan	10.233.890.015,00	498.065.000,00	5.755.674.069,00	4.976.280.946,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	0
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.791.459.565,36	928.542.500,00	725.587.500,00	14.994.414.565,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.796.931.557,24	-	-	2.796.931.557,24
Dinas Perpustakaan	2.178.788.642,76	281.644.656,28	281.644.656,28	2.178.788.642,76
Dinas Perikanan	15.394.366.790,00	2.875.192.359,98	4.791.253.000,00	13.478.306.149,98
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	82.699.043.589,04	6.421.390.059,42	6.014.760.861,54	83.105.672.786,92
Dinas Pertanian	17.433.915.518,02	617.203.655,00	974.660.555,00	17.076.458.618,02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.185.258.771,30	909.647.378,00	677.731.433,49	71.417.174.715,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.711.285.313,00	-	-	4.711.285.313,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.651.033.317,50	1.923.281.808,45	2.066.741.205,19	13.507.573.920,76
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.629.942.075,00	185.053.000,00	185.053.000,00	3.629.942.075,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	322.236.911,00	-	-	322.236.911,00
Inspektorat	460.948.100,00	-	-	460.948.100,00
Sekretariat Daerah	20.530.893.489,11	276.337.220,00	757.779.265,00	20.049.451.444,11
Sekretariat DPRD	7.811.005.986,00	-	-	7.811.005.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	670.432.850,00	49.700.000,00	-	720.132.850,00
Kecamatan Donorojo	2.456.804.347,92	99.141.000,00	99.141.000,00	2.456.804.347,92
Kecamatan Punung	1.554.937.905,76	193.983.285,76	193.983.285,76	1.554.937.905,76
Kecamatan Pringkuku	2.021.183.947,26	-	-	2.021.183.947,26
Kecamatan Pacitan	8.112.704.377,07	159.220.000,00	159.220.000,00	8.112.704.377,07
Kecamatan Kebonagung	1.569.610.809,00	449.030.000,00	449.030.000,00	1.569.610.809,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	-	-	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	-	-	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.578.693.513,48	299.950.885,00	299.950.885,00	1.578.693.513,48
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	-	-	1.686.891.408,18



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Kecamatan Tulakan	1.347.423.973,56	-	-	1.347.423.973,56
Kecamatan Ngadirojo	1.237.255.582,96	-	-	1.237.255.582,96
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	-	-	1.271.601.287,00
JUMLAH	854.177.974.970,56	78.543.899.917,93	62.036.996.191,51	870.684.878.696,98

Sedangkan mutasi Aset Gedung dan Bangunan yang terjadi karena penyesuaian adalah sebagai berikut.

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Awal **Rp 854.177.974.970,56**

Penambahan **Rp 78.543.899.917,93**

Pengadaan Rp 56.266.451.465,00

Aset dari Belanja Rp 174.800.000,00

Barang Jasa

Mutasi Masuk Rp 1.341.892.414,70

Hibah Masuk Rp 782.829.903,00

Koreksi/Reklas Rp 19.977.926.135,23

Aset

Pengurangan **Rp 62.036.996.191,51**

Koreksi/Reklas Rp 49.871.899.964,62

Aset

Extracomptable Rp 1.684.552.286,74

Reklas ke Rp 2.933.079.336,26

Persediaan

Penghapusan Rp 844.845.128,49

Mutasi Keluar Rp 1.341.892.414,70

Hibah Keluar Rp 5.360.727.060,70

Saldo akhir Gedung dan Bangunan **Rp 870.684.878.696,98**

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp56.266.451.465,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan Rp 29.891.668.865,00

Dinas Kesehatan Rp 6.403.362.432,00

Rumah Sakit Umum Daerah Rp 10.743.333.550,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 2.630.157.406,00

Dinas Lingkungan Hidup Rp 568.150.383,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Rp 402.474.000,00

Dinas Perhubungan Rp 498.065.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	202.955.000,00
Dinas Perikanan	Rp	6.832.725,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	4.380.196.954,00
Dinas Pertanian	Rp	376.276.725,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	113.278.425,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	49.700.000,00
Jumlah	Rp	56.266.451.465,00

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp174.800.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Bangunan Tempat Ibadah dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

3) Mutasi masuk senilai Rp1.341.892.414,70 untuk Gedung dan Bangunan pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Lingkungan Hidup	Rp	242.634.133,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.099.258.281,70
JUMLAH	Rp	1.341.892.414,70

4) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp782.829.903,00 yang terdapat pada SKPD berikut.

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp770.179.903,00 berupa Los PKL Timur Alun-Alun Kab Pacitan, Los PKL Mareci Alun-Alun Pacitan, Los PKL Alun-Alun Selatan, Hibah Panggung Tengah Alun-Alun dari Bank BPD Jatim,
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp12.650.000,00 merupakan Hibah dari PPKD dana BTT Covid-19 berupa Pos jaga Wisma Atlit.

5) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp19.977.926.135,23 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	6.302.346.304,48
Dinas Kesehatan	Rp	1.151.636.260,05
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	1.671.842.999,78
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	65.128.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	90.210.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dinas Sosial	Rp	144.300.000,00
Dinas Pangan	Rp	51.578.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	1.830.244.276,73
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	725.587.500,00
Dinas Perpustakaan	Rp	281.644.656,28
Dinas Perikanan	Rp	2.868.359.634,98
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	2.041.193.105,42
Dinas Pertanian	Rp	240.926.930,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	26.189.050,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	824.023.526,75
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	185.053.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	276.337.220,00
Kecamatan Donorojo	Rp	99.141.000,00
Kecamatan Punung	Rp	193.983.285,76
Kecamatan Pacitan	Rp	159.220.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	449.030.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	299.950.885,00
Jumlah	Rp	19.977.926.135,23

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp49.871.899.964,62 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	22.276.731.578,30
Dinas Kesehatan	Rp	2.401.577.577,99
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	3.479.470.776,77
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.757.981.040,76
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	65.128.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	141.087.860,00
Dinas Sosial	Rp	134.350.000,00
Dinas Pangan	Rp	51.578.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	544.728.027,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	1.830.244.276,73



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dinas Perhubungan	Rp	5.755.674.069,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	725.587.500,00
Dinas Perpustakaan	Rp	281.644.656,28
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	5.977.144.661,54
Dinas Pertanian	Rp	974.660.555,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	503.443.115,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	900.760.334,49
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	185.053.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	683.729.265,00
Kecamatan Donorojo	Rp	99.141.000,00
Kecamatan Punung	Rp	193.983.285,76
Kecamatan Pacitan	Rp	159.220.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	449.030.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	299.950.885,00
Jumlah	Rp	49.871.899.964,62

- 2) Merupakan *Extracomptable* senilai Rp1.684.552.286,74 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.646.936.086,74
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	37.616.200,00
Jumlah	Rp	1.684.552.286,74

- 3) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke akun Persediaan sejumlah Rp2.933.079.336,26 karena akan dihibahkan kepada pihak lain, namun hingga akhir periode pelaporan SK Hibah/Penghapusan belum terbit sehingga masih tercatat sebagai persediaan. Yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.201.995.019,79 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp731.084.316,47.

- 4) Penghapusan Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp844.845.128,49 sesuai SK Penghapusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp174.288.318,49, pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah sebesar Rp596.506.810,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp74.050.000,00.

- 5) Mutasi keluar Gedung dan Bangunan TA 2020 senilai Rp1.341.892.414,70 yaitu pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Kesehatan	Rp	1.099.258.281,70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	242.634.133,00
Jumlah	Rp	1.341.892.414,70



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 6) Hibah Keluar Gedung dan Bangunan senilai Rp5.360.727.060,70 pada Dinas Perikanan sebesar Rp4.791.253.000,00 sesuai BAST Nomor 028/858.1/408.55/2020 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp569.474.060,70.

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.613.337.379.468,73	1.557.767.408.292,42

Rincian jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 100 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.128.717.272.584,98	31.063.949.265,04	2.474.934.658,52	1.157.306.287.191,50
Bangunan Air	224.292.091.972,47	50.784.898.860,20	6.525.636.735,05	268.551.354.097,62
Instalasi	28.101.404.132,00	4.915.009.499,21	12.037.216.200,00	20.979.197.431,21
Jaringan	176.656.639.602,97	14.607.815.900,02	24.763.914.754,59	166.500.540.748,40
JUMLAH	1.557.767.408.292,42	101.371.673.524,47	45.801.702.348,16	1.613.337.379.468,73

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD TA 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 101 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	25.604.063.625,58	14.848.244.070,75	136.993.697,00	40.315.313.999,33
Dinas Kesehatan	2.116.590.129,25	3.883.959.971,40	0,00	6.000.550.100,65
Rumah Sakit Umum Daerah	9.469.428.337,16	323.614.300,00	244.314.300,01	9.548.728.337,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.338.465.242.422,30	34.904.597.439,05	39.544.910,06	1.373.330.294.951,29
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.550.026.671,00	581.954.000,00	185.396.000,00	15.946.584.671,00
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0,00	0,00	33.980.650,00
Dinas Sosial	28.826.000,00	11.099.000,00	21.049.000,00	18.876.000,00
Dinas Pangan	69.314.500,00	0,00	0,00	69.314.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.617.426.609,00	544.728.027,00	0,00	2.162.154.636,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0,00	0,00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	20.887.966.137,00	14.431.872.350,00	11.052.912.350,00	24.266.926.137,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	548.990.300,00	0,00	535.130.300,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	167.584.000,00	0,00	0,00	167.584.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.300.000,00	0,00	2.300.000,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan	1.363.500,00	0,00	0,00	1.363.500,00
Dinas Perikanan	24.611.960.698,00	3.811.803.669,01	9.494.393.028,99	18.929.371.338,02



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	25.604.063.625,58	14.848.244.070,75	136.993.697,00	40.315.313.999,33
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	15.132.368.485,17	3.948.729.425,93	1.420.010.958,51	17.661.086.952,59
Dinas Pertanian	97.054.972.235,06	23.300.626.978,59	22.581.424.253,59	97.774.174.960,06
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.999.650,00	409.801.690,00	0,00	429.801.340,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.851.000,00	0,00	0,00	23.851.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.146.607.952,90	83.486.807,74	6.750.000,00	4.223.344.760,64
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	57.712.600,00	0,00	0,00	57.712.600,00
Sekretariat Daerah	599.118.550,00	259.013.295,00	56.838.550,00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0,00	0,00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	1.343.936.400,00	24.642.500,00	21.645.000,00	1.346.933.900,00
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
JUMLAH	1.557.767.408.292,42	101.371.673.524,47	45.801.702.348,16	1.613.337.379.468,73

Sedangkan mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi pada Tahun 2020 karena penyesuaian adalah sebagai berikut.

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Awal **Rp 1.557.767.408.292,42**
Penambahan **Rp 101.371.673.524,47**

Pengadaan Rp 33.804.571.317,00
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 223.765.000,00
Hibah Masuk Rp 3.843.777.552,71
Koreksi/Reklas
Aset Rp 63.499.559.654,76

Pengurangan **Rp 45.801.702.348,16**

Koreksi/Reklas
Aset Rp 43.160.228.348,16
Extracomptable Rp 3.000.000,00
Hibah Keluar Rp 2.638.474.000,00

Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp 1.613.337.379.468,73**

Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp33.804.571.317,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Kesehatan Rp 248.164.730,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 33.149.606.412,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Rp 396.558.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pertanahan		
Dinas Perikanan	Rp	472.175,00
Dinas Pertanian	Rp	6.770.000,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	3.000.000,00
Jumlah	Rp	33.804.571.317,00

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

- 2) Aset dari Belanja Barang Jasa senilai Rp223.765.000,00 berasal dari Belanja Barang yang akan diserahkan masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Peningkatan jalan RT 01/RW 11 Ling Teleng Kelurahan Sidoharjo dan Peningkatan jalan RT 03/RW 02 Dusun Krajan Desa Klesem.
- 3) Hibah masuk jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp3.843.777.552,71 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.169.202.017,00 berupa *Microhydro* dari satker Balai, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.544.256.000,00 dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp130.319.535,71 dari Belanja Tidak Terduga PPKD.
- 4) Reklas tambah antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp63.499.559.654,76 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	14.848.244.070,75
Dinas Kesehatan	Rp	3.635.795.241,40
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	323.614.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	362.024.010,05
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	185.396.000,00
Dinas Sosial	Rp	11.099.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	544.728.027,00
Dinas Perhubungan	Rp	11.887.616.350,00
Dinas Perikanan	Rp	3.811.331.494,01
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	3.818.409.890,22
Dinas Pertanian	Rp	23.293.856.978,59
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	409.801.690,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	83.486.807,74
Sekretariat Daerah	Rp	259.013.295,00
Kecamatan Pacitan	Rp	24.642.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Kecamatan Sudimoro	Rp	500.000,00
Jumlah	Rp	63.499.559.654,76

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2020 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp43.160.228.348,16 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	136.993.697,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	244.314.300,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	39.544.910,06
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	185.396.000,00
Dinas Sosial	Rp	21.049.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	11.052.912.350,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	535.130.300,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	2.300.000,00
Dinas Perikanan	Rp	6.855.919.028,99
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	1.420.010.958,51
Dinas Pertanian	Rp	22.581.424.253,59
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	6.750.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	56.838.550,00
Kecamatan Pacitan	Rp	21.645.000,00
Jumlah	Rp	43.160.228.348,16

- 2) Merupakan *Extracomptable* senilai Rp3.000.000,00 pada Kecamatan Ngadirojo.

- 3) Hibah keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.638.474.000,00 pada Dinas Perikanan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Jalan dan Jembatan

Saldo Awal	Rp	1.128.717.272.584,98
Penambahan	Rp	31.063.949.265,04
Pengadaan	Rp	26.079.737.990,00
Aset dari Belanja	Rp	223.765.000,00
Barang Jasa		



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Koreksi/Reklas Aset	Rp	4.760.446.275,04		
Pengurangan			Rp	2.474.934.658,52
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.352.022.658,52		
Hibah Keluar	Rp	1.122.912.000,00		
Saldo Akhir			Rp	1.157.306.287.191,50
Bangunan Air				
Saldo Awal			Rp	224.292.091.972,47
Penambahan			Rp	50.784.898.860,20
Pengadaan	Rp	7.466.898.597,00		
Hibah Masuk	Rp	1.258.938.592,71		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	42.059.061.670,49		
Pengurangan			Rp	6.525.636.735,05
Koreksi/Reklas Aset	Rp	6.261.503.735,05		
Hibah Keluar	Rp	264.133.000,00		
Saldo Akhir			Rp	268.551.354.097,62
Instalasi				
Saldo Awal			Rp	28.101.404.132,00
Penambahan			Rp	4.915.009.499,21
Pengadaan	Rp	257.934.730,00		
Hibah Masuk	Rp	40.582.960,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	4.616.491.809,21		
Pengurangan			Rp	12.037.216.200,00
Koreksi/Reklas Aset	Rp	11.868.796.200,00		
Extracomptable	Rp	3.000.000,00		
Hibah Keluar	Rp	165.420.000,00		
Saldo Akhir			Rp	20.979.197.431,21
Jaringan				
Saldo Awal			Rp	176.656.639.602,97
Penambahan			Rp	14.607.815.900,02
Hibah Masuk	Rp	2.544.256.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	12.063.559.900,02		
Pengurangan			Rp	24.763.914.754,59
Koreksi/Reklas Aset	Rp	23.677.905.754,59		
Hibah Keluar	Rp	1.086.009.000,00		
Saldo Akhir			Rp	166.500.540.748,40
Total Jaringan, Irigasi dan Jaringan			Rp	1.613.337.379.468,73



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap Lainnya	77.803.496.934,19	76.066.645.301,60

Rincian Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 102 Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Buku dan Barang-barang Perpustakaan	65.627.795.563,30	4.569.199.417,00	2.944.884.805,18	67.252.110.175,12
Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya	9.292.233.338,30	1.401.116.000,00	1.808.362.020,00	8.884.987.318,30
Hewan/Tanaman	1.146.616.400,00	81.860.000,00	697.260.200,00	531.216.200,00
Aset Tetap Renovasi		1.135.183.240,77		1.135.183.240,77
JUMLAH	76.066.645.301,60	7.187.358.657,77	5.450.507.025,18	77.803.496.934,19

Rincian mutasi aset tetap lainnya Tahun 2020 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 103 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	73.339.721.288,30	3.050.636.907,00	1.867.069.115,18	74.523.289.080,12
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	44.550.000,00	44.550.000,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	535.000,00	2.396.720.210,00	2.397.105.210,00	150.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.800.000,00	1.135.183.240,77	-	1.232.983.240,77
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69.048.000,00	-	-	69.048.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	11.495.000,00	11.495.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	59.016.000,00	-	-	59.016.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	29.700.000,00	29.700.000,00	-
Dinas Perpustakaan	808.651.913,30	6.993.600,00	-	815.645.513,30
Dinas Perikanan	-	168.923.000,00	-	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	482.009.700,00	-	148.750.000,00	333.259.700,00
Dinas Pertanian	810.810.000,00	-	664.176.000,00	146.634.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.985.000,00	-	-	4.985.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	27.950.000,00	27.950.000,00	-
Badan Pendapatan Daerah	-	109.996.700,00	109.996.700,00	-
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	25.640.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	27.440.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.346.400,00	34.000.000,00	-	38.346.400,00
Sekretariat Daerah	263.739.000,00	148.500.000,00	148.500.000,00	263.739.000,00
Sekretariat DPRD	48.618.000,00	-	-	48.618.000,00
Kecamatan Donorojo	2.180.000,00	-	15.000,00	2.165.000,00
Kecamatan Pringkuku	250.000,00	-	200.000,00	50.000,00
Kecamatan Pacitan	38.045.000,00	19.910.000,00	-	57.955.000,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00
JUMLAH	76.066.645.301,60	7.187.358.657,77	5.450.507.025,18	77.803.496.934,19

Sedangkan mutasi Aset Tetap Lainnya terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal		Rp 76.066.645.301,60
Penambahan		Rp 7.187.358.657,77
Pengadaan	Rp 5.852.502.417,00	
Mutasi Masuk	Rp 27.950.000,00	
Koreksi/Reklas Aset	Rp 1.306.906.240,77	
Pengurangan		Rp 5.450.507.025,18
Koreksi/Reklas Aset	Rp 4.533.516.675,18	
Extracomptable	Rp 113.867.650,00	
Reklas ke Software	Rp 109.996.700,00	
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp 32.276.000,00	
Penghapusan	Rp 1.000.000,00	
Mutasi Keluar	Rp 27.950.000,00	
Hibah Keluar	Rp 631.900.000,00	
Saldo Akhir		Rp 77.803.496.934,19

Penambahan nilai aset tetap lainnya selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.852.502.417,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp 3.050.636.907,00
Dinas Kesehatan	Rp 44.550.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 2.396.720.210,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 11.495.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 29.700.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp 6.993.600,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp 109.996.700,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 34.000.000,00
Sekretariat Daerah	Rp 148.500.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp 19.910.000,00
Jumlah	Rp 5.852.502.417,00

- 2) Mutasi masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp27.950.000 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Sapi Ternak.

- 3) Reklas tambah antar Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.306.906.240,77 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.135.183.240,77
Dinas Perikanan	Rp 168.923.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	Rp 2.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pelatihan Daerah

Jumlah	Rp 1.306.906.240,77
---------------	----------------------------

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2020 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar aset tetap untuk aset tetap lainnya senilai Rp4.533.516.675,18 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.794.396.465,18
Dinas Kesehatan	Rp	44.550.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	2.397.105.210,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	148.750.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	148.500.000,00
Kecamatan Donorojo	Rp	15.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	200.000,00
Jumlah	Rp	4.533.516.675,18

- 2) Merupakan *Extracomptable* senilai Rp113.867.650,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	72.672.650,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	11.495.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	29.700.000,00
Jumlah	Rp	113.867.650,00

- 3) Aset Tetap lainnya dari Belanja Modal *Software* direklas ke Aset *Software* senilai Rp109.996.700,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Aset Tetap lainnya direklas ke Aset lain-lain senilai Rp32.276.000,00 merupakan barang-barang yang rusak namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan sehingga dicatat sebagai aset lain-lain pada Dinas Pertanian yaitu berupa Sapi Ternak.
- 5) Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.000.000,00 berupa Tanaman pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- 6) Mutasi Keluar senilai Rp27.950.000,00 pada Dinas Pertanian berupa Hewan Ternak Sapi dimutasi ke BPKAD.
- 7) Hibah Keluar Aset Tetap Lainnya senilai Rp631.900.000,00 terdiri dari pengeluaran aset dari SKPD berikut:
- Dinas Pertanian sebesar Rp603.950.000,00 berupa hewan ternak sapi yang dihibahkan kepada masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp27.950.000,00 berupa hewan ternak sapi yang dihibahkan kepada Kodim.

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Buku dan Barang-barang Perpustakaan

Saldo Awal **Rp 65.627.795.563,30**

Penambahan **Rp 4.569.199.417,00**

Pengadaan Rp 4.569.199.417,00

Pengurangan **Rp 2.944.884.805,18**

Koreksi/Reklas Rp 2.741.447.455,18

Aset

Extracomptable Rp 93.440.650,00

Reklas ke Rp 109.996.700,00

Software

Saldo Akhir **Rp 67.252.110.175,12**

Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya

Saldo Awal **Rp 9.292.233.338,30**

Penambahan **Rp 1.401.116.000,00**

Pengadaan Rp 1.229.393.000,00

Koreksi/Reklas Rp 171.723.000,00

Aset

Pengurangan **Rp 1.808.362.020,00**

Koreksi/Reklas Rp 1.787.935.020,00

Aset

Extracomptable Rp 20.427.000,00

Saldo Akhir **Rp 8.884.987.318,30**

Hewan/Tanaman

Saldo Awal **Rp 1.146.616.400,00**

Penambahan **Rp 81.860.000,00**

Pengadaan Rp 53.910.000,00

Mutasi Masuk Rp 27.950.000,00

Pengurangan **Rp 697.260.200,00**

Koreksi/Reklas Rp 4.134.200,00

Aset

Reklas ke Aset Rp 32.276.000,00

Lain-lain

Penghapusan Rp 1.000.000,00

Mutasi Keluar Rp 27.950.000,00

Hibah Keluar Rp 631.900.000,00

Saldo Akhir **Rp 531.216.200,00**

Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Renovasi

Saldo Awal

Penambahan

Rp 1.135.183.240,77

Koreksi / Reklas Rp 1.135.183.240,77

Aset

Saldo Akhir

Rp 1.135.183.240,77

Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya

Rp 77.803.496.934,19

Aset Tetap Lainnya berupa ATR (Aset Tetap Renovasi) yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.135.183.240,72 sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 11**.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.272.288.818,07	36.452.450.935,44

Konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar Rp39.272.288.818,07 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2019 sebesar Rp36.452.450.935,44 ditambah pengakuan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2020 sebesar Rp2.819.837.882,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	12.925.366.821,76	2.770.223.607,63	-	15.695.590.429,39
- Dinas Pendidikan	-	246.396.150,00		246.396.150,00
- Dinas Kesehatan	2.595.715.379,00	147.208.396,64		2.742.923.775,64
- RSUD	4.348.063.300,00	1.987.814.927,00		6.335.878.227,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Permukiman	5.778.593.519,21	203.722.200,00		5.982.315.719,21
- Dinas Pariwisata	202.994.623,55	157.400.908,99		360.395.532,54
- Dinas Pertanian		22.493.900,00		22.493.900,00
- Dinas Perikanan		5.187.125,00		5.187.125,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	23.527.084.113,68	26.766.500,00	-	23.553.850.613,68
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Permukiman	23.527.084.113,68	26.766.500,00		23.553.850.613,68
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya	-	22.847.775,00		22.847.775,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Permukiman		20.730.000,00		20.730.000,00
- Dinas Perikanan		2.117.775,00		2.117.775,00
JUMLAH	36.452.450.935,44	2.819.837.882,63	-	39.272.288.818,07

Tabel 105 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	Dinas Pendidikan	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :	246.396.150,00
	Gedung Bangunan Sekolah yang terdiri dari Ruang Kelas, Ruang Guru, Perpustakaan, Paving, MCK dan lain-lain (Pengadaan Tahun 2020)	246.396.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
2	Dinas Kesehatan	2.742.923.775,64
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :	2.742.923.775,64
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan	2.595.715.379,00
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahap II (Tahun 2020)	65.076.000,00
	Perencanaan Gedung Puskesmas Candi (Tahun 2020)	82.132.396,64
3	Rumah Sakit dr. Darsono	6.335.878.227,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :	6.335.878.227,00
	Gedung Rawat Inap	4.348.063.300,00
	Gedung Rawat Inap Tahab 2 (Tahun 2020)	1.732.992.377,00
	Pengurugan dan Pematangan Lahan (Tahun 2020)	254.822.550,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	29.556.896.332,89
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung :	5.982.315.719,21
	Pengadaan s/d 2019	5.778.593.519,21
	Gedung Kelurahan Pacitan	2.180.367.635,21
	Gedung ex. Kantor Camat Ngadirojo	146.585.200,00
	Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2 (2019)	3.250.176.084,00
	Rehabilitasi EX Kantor Camat Ngadirojo Tahap-2 (2019)	201.464.600,00
	Pengadaan Tahun 2020	203.722.200,00
	Penataan Kawasan ex. Kantor Kawedanan Lorok di Ngadirojo Tahap 1	203.722.200,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan :	23.553.850.613,68
	Pengadaan s/d 2019	23.527.084.113,68
	Jembatan Gunungsari	2.114.313.728,68
	Jembatan Giwang - Bolang (Dsn. Gedangan Ds. Ketjo)	102.798.000,00
	Jembatan Gantung Dsn. Kraket Ds.Wonodadi Wetan	198.946.000,00
	Jembatan Gegeran	1.760.517.777,00
	Jembatan Gunungsari Tahap II	4.355.818.446,00
	Jembatan Gunungsari Tahap III 150 m x 8,0 m	12.594.330.780,00
	Jembatan Gegeran Tahap II 150 m x 8,0 m	2.297.823.382,00
	Jembatan Gantung Kraket Desa Wonodadi di Wetan	102.536.000,00
	Pengadaan Tahun 2020	26.766.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung Kraket	580.000,00
	Jembatan Bolang	985.000,00
	Jembatan Tosari	985.000,00
	Jembatan Gunungsari IV	24.216.500,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya	20.730.000,00
	Pengadaan Tahun 2020	20.730.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Gayam Ds. Mujing Nawangan	6.910.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Blumbang, Kledung Bandar	6.910.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Miri, Gejek DS. Sempu Nawangan	6.910.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Olah Raga	360.395.532,54
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :	202.994.623,55
	Lapangan Olah Raga - Ploso	202.994.623,55
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya	157.400.908,99
	Pembuatan Desain Engineering Detail (DED) Pantai Pancer Door (Tahun 2020)	52.818.489,09
	Pembuatan Desain Engineering Detail (DED) Pantai Klayar (tahun 2020)	51.822.157,96
	Pembuatan Desain Engineering Detail (DED) Pantai Srau (Tahun 2020)	52.760.261,94
6	Dinas Pertanian	22.493.900,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	22.493.900,00
	Perencanaan Perbaikan Gedung BPP Kecamatan Bandar (Tahun 2020)	11.254.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	URAIAN		JUMLAH
	Perencanaan Perbaikan Gedung BPP Kecamatan Tulakan (Tahun 2020)	11.239.800,00	
7	Dinas Perikanan		7.304.900,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja		5.187.125,00
	Perencanaan Pengadaan Kontruksi BBI Kukur (Tahun 2020)	2.977.975,00	
	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gerbang BBI Kukur (Tahun 2020)	2.209.150,00	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya		2.117.775,00
	Perencanaan Pembangunan Kolam UPR (Tahun 2020)	1.645.600,00	
	Perencanaan Jalan Rabat BBI Kukur (Tahun 2020)	472.175,00	
	JUMLAH		39.272.288.818,07

Adapun Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 senilai Rp39.272.288.818,07 berada pada masing-masing SKPD dengan rincian kegiatan sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 12**.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(1.707.762.556.102,35)	(1.443.306.917.797,12)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

Tabel 106 Akumulasi Penyusutan

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	(dalam rupiah) SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(1.443.306.917.797,12)	(326.089.309.997,84)	(61.633.671.692,61)	(1.707.762.556.102,35)

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 107 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	TANAH	-	-	-	-
	Tanah	-	-	-	-
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	(324.742.555.172,05)	(74.879.128.219,65)	(20.441.699.968,11)	(379.179.983.423,59)
	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(14.537.155.592,49)	(2.740.480.785,51)	(1.248.502.745,99)	(16.029.133.632,01)
	Alat Angkutan	(60.652.694.678,28)	(8.048.788.677,97)	(2.995.260.049,01)	(65.706.223.307,24)
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(8.724.483.480,88)	(1.584.260.658,18)	(1.371.153.426,72)	(8.937.590.712,34)
	Alat Pertanian	(4.588.633.622,50)	(416.908.502,50)	(1.793.619.020,63)	(3.211.923.104,37)
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(94.011.204.356,05)	(31.678.123.068,34)	(1.627.866.635,63)	(124.061.460.788,76)
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(17.151.287.999,71)	(1.222.184.095,83)	(7.177.851.956,92)	(11.195.620.138,62)
	Alat Kedokteran	(92.487.453.257,65)	(19.611.471.207,02)	(857.323.400,00)	(111.241.601.064,67)
	Alat Laboratorium	(31.727.839.895,21)	(3.738.516.366,61)	(3.369.172.733,19)	(32.097.183.528,63)
	Alat Keamanan	(861.802.289,28)	(5.838.394.857,69)	(950.000,02)	(6.699.247.146,95)
KIB C	GEDUNG DAN BANGUNAN	(173.092.390.821,00)	(66.459.256.581,81)	(8.582.131.527,83)	(230.969.515.874,98)
	Bangunan Gedung	(166.071.897.183,60)	(54.310.861.152,35)	(4.363.559.037,75)	(216.019.199.298,20)
	Monumen/Bangunan Bersejarah	(7.020.493.637,40)	(12.148.395.429,46)	(4.218.572.490,08)	(14.950.316.576,78)
KIB D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(939.880.813.281,40)	(184.619.615.428,38)	(26.995.064.435,53)	(1.097.505.364.274,25)
	Jalan dan Jembatan	(702.774.752.346,13)	(116.023.913.169,57)	(2.371.931.011,09)	(816.426.734.504,61)
	Bangunan Air	(103.370.224.180,56)	(48.541.616.154,47)	(5.450.710.274,63)	(146.461.130.060,40)
	Instalasi	(17.175.702.419,17)	(2.418.560.479,25)	(6.200.665.767,26)	(13.393.597.131,16)
	Jaringan	(116.560.134.335,54)	(17.635.525.625,09)	(12.971.757.382,55)	(121.223.902.578,08)
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	(5.591.158.522,67)	(131.309.768,00)	(5.614.775.761,14)	(107.692.529,53)
	Buku dan Barang-barang Perpustakaan	-	-	-	-
	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya	(5.591.158.522,67)	(26.325.571,81)	(5.614.775.761,14)	(2.708.333,34)
	Hewan/Tanaman	-	-	-	-
	Aset Tetap Renovasi	-	(104.984.196,19)	-	(104.984.196,19)
KIB F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.443.306.917.797,12)	(326.089.309.997,84)	(61.633.671.692,61)	(1.707.762.556.102,35)

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Awal	Rp (1.443.306.917.797,12)
Penambahan	Rp (326.089.309.997,84)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Beban Penyusutan	Rp	(228.267.558.100,65)		
Aset dari Belanja				
Barang Jasa	Rp	-		
Dari Aset Lain	Rp	-		
Mutasi Masuk	Rp	(2.806.898.990,39)		
Hibah Masuk	Rp	(39.692.359,80)		
Kurang Catat	Rp	(582.008.573,67)		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(94.393.151.973,33)		
Pengurangan			Rp	(61.633.671.692,61)
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(51.507.766.698,46)		
Extracomptable	Rp	-		
Reklas ke Persediaan	Rp	-		
Reklas ke Software	Rp	-		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	(291.250.202,00)		
Lebih Catat	Rp	(477.038.557,00)		
Penghapusan	Rp	(1.618.484.706,55)		
Mutasi Keluar	Rp	(2.806.898.990,39)		
Hibah Keluar	Rp	(4.932.232.538,21)		
Saldo Akhir			Rp	(1.707.762.556.102,35)

1.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	61.386.654.918,77	139.699.055.380,28

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.386.654.918,77 terdiri dari:

Tabel 108 Aset Lainnya

<i>(dalam rupiah)</i>					
NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.507.527.700,00	-	-	24.507.527.700,00
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	-	-	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	-	-	1.361.060.800,00
	Aset Tidak Berwujud	1.251.636.612,80	(149.262.112,80)	41.195.000,00	1.061.179.500,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.625.638.850,00	478.138.700,00	41.195.000,00	4.062.582.550,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.374.002.237,20)	(627.400.812,80)	-	(3.001.403.050,00)
	Aset Lain-lain	113.939.891.067,48	59.340.625,00	78.181.283.973,71	35.817.947.718,77
5	Aset Lain-lain	113.939.891.067,48	59.340.625,00	78.181.283.973,71	35.817.947.718,77



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

JUMLAH ASET LAINNYA	139.699.055.380,28	(89.921.487,80)	78.222.478.973,71	61.386.654.918,77
------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Rincian Aset lainnya Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi (KSO)

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria. Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

- Ex Cotage Happy Bay	Rp	420.433.000,00
- Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

-	Tanah seluas 135.001 m ²	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m² Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 109 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	<i>Cottage happy bay</i>	1	420.433.000,00
3	Ruang pameran produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 Amusement park	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 Amusement park	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 Amusement park	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 Amusement park	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 Amusement park	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 Amusement park	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 Amusement park	1	911.000,00
12	Gazebo 8 Amusement park	1	911.000,00
13	Gazebo 9 Amusement park	1	2.733.000,00
14	Gedung Baywatch	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	<i>Shelter tipe 1</i>	10	57.590.000,00
27	<i>Shelter tipe 2</i>	1	8.337.000,00
28	<i>Shelter tipe 3</i>	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	<i>Tribune</i>	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket <i>water park</i>	1	213.601.000,00
36	Mushola <i>water park</i>	1	69.959.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
37	Toilet <i>water park</i>	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	<i>Waterboom</i>	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		52	23.146.466.900,00

2. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang di hasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.

- Kerjasama Pemerintah daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Kontruksi yang berada diatas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 110 Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/ <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	-	-	-	-	1	1.361.060.800,00
2	Bangun Guna Serah/ <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu	1	945.750.000,00	-	-	1	945.750.000,00	0	-
JUMLAH			2.306.810.800,00		-		945.750.000,00		1.361.060.800,00

1.4.2 Aset Tidak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 sebesar Rp4.062.582.550,00 berupa *software* antara lain:

Tabel 111 Aset Tidak Berwujud - *Software*

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00	-	-	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	-	-	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.870.100,00	-	-	99.870.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	11.495.000,00	11.495.000,00	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	29.700.000,00	29.700.000,00	-
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.034.400.000,00	298.050.000,00	-	1.332.450.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	-	-	99.111.264,00
9	Dinas Perikanan	17.820.000,00	-	-	17.820.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	46.794.000,00	-	-	46.794.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	149.999.300,00	-	-	149.999.300,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.886.000,00	-	-	83.886.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	633.390.000,00	-	-	633.390.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	51.124.700,00	138.893.700,00	-	190.018.400,00
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	618.815.200,00	-	-	618.815.200,00
	JUMLAH	3.625.638.850,00	478.138.700,00	41.195.000,00	4.062.582.550,00

Adapun mutasi aset tidak berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE

Saldo Awal **Rp 3.625.638.850,00**

Penambahan **Rp 478.138.700,00**

Pengadaan

Belanja Modal Rp 151.191.700,00

Pengadaan

Belanja Barang dan Jasa Rp -

Koreksi/Reklas

Aset Rp 326.947.000,00

Pengurangan **Rp 41.195.000,00**

Extracomptable Rp 41.195.000,00

Reklas ke Aset

Lain-lain Rp -

Saldo Akhir **Rp 4.062.582.550,00**

Penambahan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2020 berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- (1) Pengadaan Belanja Modal *Software* yang memenuhi batas kapitalisasi dan diakui sebagai *software* senilai Rp151.191.700,00 pada SKPD sebagai berikut.

Badan Pendapatan Daerah	Rp	109.996.700,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	29.700.000,00
Satpol PP	Rp	11.495.000,00
Jumlah	Rp	151.191.700,00

- (2) Koreksi kurang catat senilai Rp326.947.000,00 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	298.050.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	28.897.000,00
Jumlah	Rp	326.947.000,00

- (3) Pengurangan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2020 sebesar Rp41.195.000,00 merupakan *Extracomptable* yaitu *software* dari belanja modal pengadaan *software* di bawah batas kapitalisasi pada SKPD sebagai berikut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	29.700.000,00
Satpol PP	Rp	11.495.000,00
Jumlah	Rp	41.195.000,00

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.001.403.050,00)	(2.374.002.237,20)

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 112 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(2.374.002.237,20)	(627.400.812,80)	(0,00)	(3.001.403.050,00)

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 113 Rincian Akumulasi Amortisasi per Golongan

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(551.182.286,00)	(26.643.000,00)	0.00	(577.825.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(69.586.000,00)	(27.192.000,00)	0.00	(96.778.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(19.974.020,00)	(19.974.020,00)	0.00	(39.948.040,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(20.000.000,00)	(10.000.000,00)	0.00	(30.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(305.880.000,00)	(385.710.000,00)	0.00	(691.590.000,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(97.289.011,20)	(1.822.252,80)	0.00	(99.111.264,00)
7	Dinas Perikanan	(10.692.000,00)	(3.564.000,00)	0.00	(14.256.000,00)
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	(28.076.400,00)	(9.358.800,00)	0.00	(37.435.200,00)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(89.999.580,00)	(29.999.860,00)	0.00	(119.999.440,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(68.692.800,00)	(15.193.200,00)	0.00	(83.886.000,00)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(613.390.000,00)	(10.000.000,00)	0.00	(623.390.000,00)
12	Badan Pendapatan Daerah	(10.224.940,00)	(38.003.680,00)	0.00	(48.228.620,00)
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	(489.015.200,00)	(49.940.000,00)	0.00	(538.955.200,00)
	Jumlah	(2.374.002.237,20)	(627.400.812,80)	0.00	(3.001.403.050,00)

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	(2.374.002.237,20)
Penambahan	Rp	(627.400.812,80)
Beban Amortisasi	Rp	(627.400.812,80)
Pengurangan	Rp	0,00
Reklas ke Aset	Rp	-
Lain-lain		
Saldo Akhir	Rp	(3.001.403.050,00)

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.817.947.718,77. Perbandingan dengan saldo Tahun 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
ASET LAIN-LAIN	35.817.947.718,77	113.939.891.067,48

Penambahan saldo Aset Lain-lain disebabkan karena adanya aset tetap yang akan dihapus karena rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi atau akan dihibahkan kepada pihak ketiga yang sampai akhir periode pelaporan belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku. Rincian mutasi Aset Lain-lain TA 2020 pada SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Mutasi Aset Lain-lain 2020

(dalam rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	167.850.833,33		167.850.833,33	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.479.912.408,40			3.479.912.408,40
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	108.005.191.988,25		75.771.987.894,55	32.233.204.093,70
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.614.645.520,83	3.850.458,33	1.611.788.729,16	6.707.250,00
5	Dinas Perpustakaan	330.916,67		330.916,67	0,00
6	Dinas Pertanian		32.276.000,00		32.276.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	434.637.700,00	10.967.500,00	434.637.700,00	10.967.500,00
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.588.125,00		1.588.125,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	42.633.800,00	12.246.666,67		54.880.466,67
10	Kecamatan Donorojo	101.643.200,00		101.643.200,00	0,00
11	Kecamatan Ngadirojo	91.456.575,00		91.456.575,00	0,00
	JUMLAH	113.939.891.067,48	59.340.625,00	78.181.283.973,71	35.817.947.718,77

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.680.975.478,13 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.929.116,00	45.829.355,00	10.099.761,00
Pendapatan Diterima Dimuka	888.863.365,73	1.089.313.121,95	(200.449.756,22)
Utang Belanja	3.713.531.555,40	6.526.474.958,05	(2.812.943.402,65)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.022.651.441,00	1.358.182.740,00	(335.531.299,00)
Jumlah	5.680.975.478,13	9.019.800.175,00	(3.338.824.696,87)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Rincian mutasi kewajiban jangka pendek TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 115 Kewajiban Jangka Pendek 2020

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.829.355,00	55.929.116,00	45.829.355,00	55.929.116,00
Pendapatan Diterima Di Muka	1.089.313.121,95	482.433.251,62	682.883.007,84	888.863.365,73
Utang Belanja	6.526.474.958,05	3.713.531.555,40	6.526.474.958,05	3.713.531.555,40
utang Jangka Pendek Lainnya	1.358.182.740,00	1.022.651.441,00	1.358.182.740,00	1.022.651.441,00
JUMLAH	9.019.800.175,00	5.274.545.364,02	8.613.370.060,89	5.680.975.478,13

2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.929.116,00 merupakan Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp55.929.116,00 dengan rincian sebagai berikut.

- PPN sebesar	:	Rp	48.002.961,00
- PPh 21	:	Rp	4.706.800,00
- PPh23	:	Rp	3.219.355,00
Total	:	Rp	55.929.116,00

2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 sebesar Rp888.863.365,73. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 116 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2019	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2020
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	180.576.334,62	180.527.154,29	116.066.717,92	116.115.898,25
2	Pajak Reklame Kain	8.175.040,19	8.175.040,19	902.646,51	902.646,51
3	Pajak Reklame Berjalan	5.926.400,10	5.926.400,10	3.582.230,10	3.582.230,10
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	433.070.833,33	334.916.666,67	231.175.000,00	329.329.166,67
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	18.819.000,00	9.546.000,00	-	9.273.000,00
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	442.745.513,70	143.791.746,58	130.706.657,08	429.660.424,20
TOTAL		1.089.313.121,95	682.883.007,83	482.433.251,61	888.863.365,73

2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada Bapenda sebesar Rp116.115.898,25

Saldo Awal sebesar Rp180.576.334,62, terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp180.527.154,29 serta penambahan tahun ini sebesar Rp116.066.717,92



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada Bapenda sebesar Rp902.646,51

Saldo Awal sebesar Rp8.175.040,19 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2020 sebesar Rp8.175.040,19 dan penambahan tahun ini sebesar Rp902.646,51 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada Bapenda sebesar Rp3.582.230,10

Saldo Awal sebesar Rp5.926.400,10 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2020 sebesar Rp5.926.400,10 dan penambahan tahun ini sebesar Rp3.582.230,10 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp329.329.166,67

Saldo Awal sebesar Rp433.070.833,33 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp334.916.666,67 dan penambahan tahun ini sebesar Rp231.175.000,00 sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp329.329.166,67.

2.2.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp9.273.000,00

Saldo Awal sebesar Rp18.819.000,00, menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2020 sebesar Rp9.546.000,00, dan tidak ada penambahan tahun ini sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp9.273.000,00.

2.2.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BPKAD sebesar Rp429.660.424,20

Saldo Awal sebesar Rp442.745.513,70, terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp143.791.746,58 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp130.706.657,08 sehingga menjadi saldo akhir tahun sebesar Rp429.660.424,20. Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2020 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a) Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
----------------	----	--------------



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

(b) Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c) Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d) Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e) Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f) Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g) Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h) Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i) Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j) Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k) Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l) Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m) Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	Rp	229.300.000,00

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

- 1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
- 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali.
- 3) Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2020.

2.3 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp3.713.531.555,40 merupakan beban Tahun 2020 yang masih belum dibayarkan, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 117 Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2019	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2020
1	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	Utang Belanja Jasa	895.348.862,00	895.348.862,00	56.904.659,00	56.904.659,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD - RSUD	5.631.126.096,05	5.631.126.096,05	3.656.626.896,40	3.656.626.896,40
Jumlah		6.526.474.958,05	6.526.474.958,05	3.713.531.555,40	3.713.531.555,40

2.3.1 Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa sebesar Rp56.904.659,00 dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 118 Utang Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	SKPD	telepon	listrik	air	Total Utang Belanja Jasa
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	760.607,00			760.607,00
2	Dinas Kesehatan	8.392.881,00	36.744.386,00	3.099.670,00	48.236.937,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana			572.190,00	572.190,00
4	Dinas Perpustakaan			109.320,00	109.320,00
5	Dinas Pariwisata		3.041.675,00	1.508.080,00	4.549.755,00
6	Dinas Pertanian			296.370,00	296.370,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			128.970,00	128.970,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			93.600,00	93.600,00
9	Inspektorat			756.030,00	756.030,00
10	Sekretariat Daerah			1.400.880,00	1.400.880,00
Total		9.153.488,00	39.786.061,00	7.965.110,00	56.904.659,00

2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD-RSUD

Sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD - RSUD sebesar Rp3.656.626.896,40 terdiri dari:

I	Hutang Pihak Ketiga	1.923.324.925,40
1	Hutang Obat	660.243.214,40
2	Hutang Gas Medis	250.457.032,00
3	Hutang Bhp Farmasi	749.021.769,00
4	Hutang Bhp Laboratorium Pk	43.500.000,00
5	Hutang Mamin Pasien	8.115.756,00
6	Hutang Embalace	19.200.000,00
7	Hutang Darah	84.405.000,00
8	Bbm Ambulance	1.056.904,00
9	Hutang Atk	9.845.000,00
10	Hutang Bahan Kebersihan Dan Alat Kebersihan	20.143.200,00
11	Hutang Makan Pegawai	99.440,00
12	Hutang Jasa Pihak Ketiga	67.651.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

13	Hutang Perlengkapan Ruang Pasien	8.153.130,00
14	Hutang Perjalanan Dinas	820.500,00
15	Hutang Bbm Perjudin	612.000,00
II	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.733.301.971,00
14	Biaya Jasa Langganan Telepon	2.293.491,00
15	Biaya Jasa Langganan Internet	6.432.700,00
16	Biaya Jasa Kebersihan	97.670.774,00
17	Biaya Jasa Langganan Listrik	129.129.200,00
18	Biaya Jasa Langganan Air	250.190,00
20	Biaya Jasa Pelayanan	1.497.525.616,00
Jumlah		3.656.626.896,40

2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp1.022.651.441,00 dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 119 Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian Utang	Saldo 31 Desember 2019	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2020
1	Utang Bagi Hasil pajak ke Desa	684.770.165,00	684.770.165,00	580.935.914,00	580.935.914,00
2	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa	659.535.115,00	659.535.115,00	336.090.767,00	336.090.767,00
3	Utang Parkir Berlangganan kepada Dinas Pendapatan Jatim dan Polres Pacitan	13.877.460,00	13.877.460,00	105.624.760,00	105.624.760,00
Jumlah		1.358.182.740,00	1.358.182.740,00	1.022.651.441,00	1.022.651.441,00

2.4.1 Utang Bagi Hasil pajak

Pada Tahun 2020 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp580.935.914,00.

2.4.2. Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2020 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp336.090.767,00.

2.4.3 Utang Parkir Berlangganan

Pada Tahun 2020 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Polres Pacitan sebesar Rp105.624.760,00.

3. Ekuitas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	2.161.794.700.411,74	2.340.151.840.558,09



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.161.794.700.411,74.

Saldo akhir tersebut merupakan penurunan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp178.357.140.146,35, yaitu yang terdiri dari.

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	(124.304.756.864,53)
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	(54.213.514.201,82)
Koreksi Atas Beban	Rp	161.130.920,00
Jumlah	Rp	(178.357.140.146,35)

5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1. Pendapatan-LO	1.479.879.616.944,93	1.622.949.318.185,53

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2020, pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.479.879.616.944,93. Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2019 yang sebesar Rp1.622.949.318.185,53, maka Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp143.069.701.240,60 atau sebesar 8,82%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2020 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 120 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	165.089.177.800,73	207.298.563.164,82	(42.209.385.364,09)	(20,36)
2	Pendapatan Transfer	1.243.364.873.887,00	1.349.510.050.188,00	(106.145.176.301,00)	(7,87)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	71.425.565.257,20	66.140.704.832,71	5.284.860.424,49	7,99
	Jumlah	1.479.879.616.944,93	1.622.949.318.185,53	(143.069.701.240,60)	(8,82)

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp165.089.177.800,73 mengalami penurunan sebesar Rp42.209.385.364,09 atau 20,36% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 121 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.440.231.626,02	36.009.154.091,72	(568.922.465,70)	(1,58)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.210.875.471,00	29.225.971.059,00	(11.015.095.588,00)	(37,69)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.989.222.323,59	2.593.777.560,31	395.444.763,28	15,25
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	108.448.848.380,12	139.469.660.453,79	(31.020.812.073,67)	(22,24)
Jumlah		165.089.177.800,73	207.298.563.164,82	(42.209.385.364,09)	(20,36)

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp35.440.231.626,02 berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:

Tabel 122 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	279.152.187,00	572.504.851,00	(293.352.664,00)	(51,24)
2	Pajak Restoran-LO	1.849.704.673,98	2.765.896.321,63	(916.191.647,65)	(33,12)
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Pajak Hiburan-LO	17.986.602,00	74.936.929,00	(56.950.327,00)	(76,00)
4	Pajak Reklame-LO	410.942.263,04	314.471.949,09	96.470.313,95	30,68
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	12.135.694.507,00	12.624.100.123,00	(488.405.616,00)	(3,87)
6	Pajak Parkir-LO	33.491.100,00	61.568.963,00	(28.077.863,00)	(45,60)
7	Pajak Air Tanah-LO	51.545.737,00	67.267.420,00	(15.721.683,00)	(23,37)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	449.111.233,00	115.043.561,00	334.067.672,00	290,38
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	17.765.574.764,00	17.183.675.774,00	581.898.990,00	3,39
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.447.028.559,00	2.229.688.200,00	217.340.359,00	9,75
Jumlah		35.440.231.626,02	36.009.154.091,72	(568.922.465,70)	(1,58)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp279.152.187,00 terdiri dari.

Tabel 123 Rincian Pajak Hotel Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hotel - LO	260.927.687,00	541.711.901,00	(280.784.214,00)	(51,83)
2	Losmen - LO	18.224.500,00	30.792.950,00	(12.568.450,00)	(40,82)
Jumlah		279.152.187,00	572.504.851,00	(293.352.664,00)	(51,24)

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami penurunan sebesar Rp293.352.664,00 atau 51,24% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

2) Pajak Restoran-LO

Realisasi Pajak Restoran-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.849.704.673,98 terdiri dari:

Tabel 124 Rincian Pajak Restoran Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Restoran - LO	88.617.984,00	141.155.917,00	(52.537.933,00)	(37,22)
2	Rumah Makan - LO	56.424.500,00	107.638.000,00	(51.213.500,00)	(47,58)
3	Jasa Boga/ Katering - LO	1.704.662.189,98	2.517.102.404,63	(812.440.214,65)	(32,28)
Jumlah		1.849.704.673,98	2.765.896.321,63	(916.191.647,65)	(33,12)

Terdapat penurunan realisasi Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun 2020 sebesar Rp916.191.647,65 atau 33,12% dibandingkan dengan Tahun 2019.

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp17.986.602,00 yang terdiri dari:

Tabel 125 Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	11.625.600,00	40.352.000,00	(28.726.400,00)	(71,19)
2	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	298.500,00	1.195.500,00	(897.000,00)	(75,03)
3	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,	5.496.502,00	26.617.429,00	(21.120.927,00)	(79,35)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
	Permainan Ketangkasan - LO				
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	566.000,00	3.002.000,00	(2.436.000,00)	(81,15)
5	Pertandingan Olahraga - LO	0,00	3.770.000,00	(3.770.000,00)	(100,00)
Jumlah		17.986.602,00	74.936.929,00	(56.950.327,00)	(76,00)

Terdapat penurunan realisasi atas pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar Rp56.950.327,00 atau 76% dibandingkan dengan Tahun 2019.

4) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp410.942.263,04, yaitu terdiri dari:

Tabel 126 Pajak Reklame - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan Billboard / Videotron / Megatron - LO	331.750.969,37	255.616.479,38	76.134.489,99	29,78
2	Pajak Reklame Kain - LO	67.130.280,67	49.505.963,81	17.624.316,86	35,60
3	Pajak Reklame Berjalan - LO	12.061.013,00	9.349.505,90	2.711.507,10	29,00
Jumlah		410.942.263,04	314.471.949,09	96.470.313,95	30,68

Terdapat kenaikan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2020 sebesar Rp96.470.313,95 atau 30,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.

5) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp12.135.694.507,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp488.405.616,00 atau 3,87% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp12.624.100.123,00.

6) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp33.491.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.077.863,00 atau 45,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp61.568.963,00.

7) Pajak Air Tanah-LO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pajak air tanah-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp51.545.737,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.721.683,00 atau 23,37% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp67.267.420,00.

8) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp449.111.233,00 mengalami kenaikan sebesar Rp334.067.672,00 atau 290,38% dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp115.043.561,00.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp17.765.574.764,00 mengalami peningkatan sebesar Rp581.898.990,00 atau 3,39% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp17.183.675.774,00.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp2.447.028.559,00 mengalami kenaikan sebesar Rp217.340.359,00 atau 9,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.229.688.200,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 50,13% atau sebesar Rp17.765.574.764,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2020.

Adapun penurunan sebesar Rp568.922.465,70 tidak terlepas dari kontribusi penurunan penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 161,04% dari total penurunan pendapatan Pajak Daerah.

Dari total saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp35.440.231.626,02, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp34.755.154.215,62 dan transaksi non kas sebesar Rp685.077.410,40. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp482.235.733,00,
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp194.628.594,58, dan
- Pendapatan Jasa Boga/Katering sebesar Rp8.213.082,82 yang belum diterima di Rekening Kasda BUD, yaitu Pajak Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Boga/Katering yang dipungut oleh Bendahara BOS pada beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pacitan.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp18.210.875.471,00 berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari

Tabel 127 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.647.048.800,00	9.257.240.763,00	(2.610.191.963,00)	(28,20)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	20.100.000,00	(20.100.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.873.344.500,00	2.038.361.500,00	(165.017.000,00)	(8,10)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.801.533.000,00	2.725.280.000,00	76.253.000,00	2,80
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	293.010.000,00	436.255.000,00	(143.245.000,00)	(32,84)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	7.250.000,00	(7.250.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	585.489.500,00	586.623.500,00	(1.134.000,00)	(0,19)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	213.982.850,00	667.679.240,00	(453.696.390,00)	(67,95)
9	Retribusi Tempat Pelelangan	194.965.675,00	266.569.525,00	(71.603.850,00)	(26,86)
10	Retribusi Terminal	28.855.000,00	50.608.000,00	(21.753.000,00)	(42,98)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.072.000,00	3.363.000,00	(291.000,00)	(8,65)
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	8.670.000,00	36.000.000,00	(27.330.000,00)	(75,92)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.050.000,00	16.610.000,00	(2.560.000,00)	(15,41)
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5.138.119.000,00	12.786.212.000,00	(7.648.093.000,00)	(59,82)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	406.525.146,00	315.288.531,00	91.236.615,00	28,94
16	Retribusi Izin Trayek	2.210.000,00	12.530.000,00	(10.320.000,00)	(82,36)
Jumlah		18.210.875.471,00	29.225.971.059,00	(11.015.095.588,00)	(37,69)

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 36,50% dihasilkan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang total realisasinya mencapai Rp6.647.048.800,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019, Retribusi Daerah-LO mengalami penurunan sebesar Rp11.015.095.588,00 atau 37,69%. Penurunan terbesar pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu sebesar 69,43% dari total penurunan seluruh Pendapatan Retribusi Daerah.

Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp18.210.875.471,00 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp17.904.412.071,00 dan transaksi non kas sebesar Rp306.463.400,00. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp306.198.000,00, dan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Pendapatan Retribusi Daerah dari pelunasan piutang 2019 yang digunakan untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan atas transfer penerimaan pelunasan Piutang 2019 sebesar Rp265.400,00.

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp2.989.222.323,59 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 128 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.669.553.062,20	2.593.777.560,31	75.775.501,89	2,92
	- Bank Jatim	2.579.677.062,20	2.441.059.560,31	138.617.501,89	5,68
	- Bank Perkreditan Rakyat	89.876.000,00	152.718.000,00	(62.842.000,00)	(41,15)
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO	319.669.261,39	0,00	319.669.261,39	-
	- PDAM	319.669.261,39	0,00	319.669.261,39	-
Jumlah		2.989.222.323,59	2.593.777.560,31	395.444.763,28	15,25

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar 86,30% dihasilkan dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.579.677.062,20. Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp138.617.501,89 atau 5,68%. Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurun sebesar Rp62.842.000,00 atau 41,15% dari tahun sebelumnya.

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.669.553.062,20 merupakan penerimaan berupa kas. Sedangkan sebesar Rp319.669.261,39 merupakan laba pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah.

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun 2020 sebesar Rp108.448.848.380,12. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 129 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	241.751.000,00	304.050.000,00	(62.299.000,00)	(20,49)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	405.720.359,26	651.897.561,81	(246.177.202,55)	(37,76)
3	Pendapatan Bunga - LO	6.251.660.228,21	22.029.684.287,38	(15.778.024.059,17)	(71,62)
4	Pendapatan Denda Pajak - LO	318.428.703,98	155.882.929,26	162.545.774,72	104,27
5	Pendapatan dari Pengembalian - LO	182.704.558,00	333.273.620,00	(150.569.062,00)	(45,18)
6	Pendapatan BLUD - LO	80.906.982.405,18	92.641.216.103,34	(11.734.233.698,16)	(12,67)
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	1.103.266.104,49	3.587.920.234,00	(2.484.654.129,51)	(69,25)
8	Pendapatan JKN - LO	19.038.335.021,00	19.765.735.718,00	(727.400.697,00)	(3,68)
Jumlah		108.448.848.380,12	139.469.660.453,79	(31.020.812.073,67)	(22,24)

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp241.751.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.299.000,00 atau 20,49% dibandingkan Tahun 2019.

2) Penerimaan Jasa Giro - LO

Penerimaan Jasa Giro - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp405.720.359,26 mengalami penurunan sebesar Rp246.177.202,55 atau 37,76% dibandingkan Tahun 2019.

3) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp6.251.660.228,21 yang terdiri dari:

Tabel 130 Rincian Pendapatan Bunga - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bunga Deposito - LO	5.827.818.561,54	21.715.538.454,05	(15.887.719.892,51)	(73,16)
2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	423.841.666,67	314.145.833,33	109.695.833,34	34,92
Jumlah		6.251.660.228,21	22.029.684.287,38	(15.778.024.059,17)	(71,62)

Pendapatan tersebut menurun sebesar Rp15.778.024.059,17 atau 71,62% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

4) Pendapatan Denda Pajak - LO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp318.428.703,98 yang terdiri dari,

Tabel 131 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	1.852.571,00	4.283.621,00	(2.431.050,00)	(56,75)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	226.477,00	656.575,00	(430.098,00)	(65,51)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	0,00	197.000,00	(197.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	6.503.403,00	8.802.500,00	(2.299.097,00)	(26,12)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	73.508,00	141.754,00	(68.246,00)	(48,14)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	148.885,00	207.701,00	(58.816,00)	(28,32)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	9.227.556,00	1.799.216,00	7.428.340,00	412,87
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	121.435.130,98	139.794.562,26	(18.359.431,28)	(13,13)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	178.961.173,00	0,00	178.961.173,00	-
Jumlah		318.428.703,98	155.882.929,26	162.545.774,72	104,27

Terdapat kenaikan sebesar Rp162.545.774,72 atau 104,27% dibandingkan Tahun 2019. Kenaikan tersebut karena adanya sumber penerimaan dari denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp182.704.558,00 yang terdiri dari:

Tabel 132 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	182.704.558,00	8.273.620,00	174.430.938,00	2.108,28
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan - LO	0,00	325.000.000,00	(325.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		182.704.558,00	333.273.620,00	(150.569.062,00)	(45,18)

Terdapat penurunan sebesar Rp150.569.062,00 atau 45,18% dibandingkan Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

6) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp80.906.982.405,18 yang terdiri dari:

Tabel 133 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	69.433.826.532,34	90.293.091.014,20	(20.859.264.481,86)	(23,10)
2	Pendapatan Hibah BLUD - LO	9.520.427.721,10	0,00	9.520.427.721,10	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	18.846.000,00	19.423.168,95	(577.168,95)	(2,97)
4	Pendapatan BLUD Lainnya-LO	1.933.882.151,74	2.328.701.920,19	(394.819.768,45)	(16,95)
Jumlah		80.906.982.405,18	92.641.216.103,34	(11.734.233.698,16)	(12,67)

Terdapat penurunan sebesar Rp11.734.233.698,16 atau 12,67% dibandingkan Tahun 2019.

7) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp1.103.266.104,49 yang terdiri dari:

Tabel 134 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya-LO	633.893.946,98	2.131.778.674,70	(1.497.884.727,72)	(70,26)
2	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	469.372.157,51	1.456.141.559,30	(986.769.401,79)	(67,77)
Jumlah		1.103.266.104,49	3.587.920.234,00	(2.484.654.129,51)	(69,25)

Terdapat penurunan sebesar Rp2.484.654.129,51 atau 69,25% dibandingkan Tahun 2019.

8) Pendapatan JKN - LO

Pendapatan JKN - LO pada Tahun 2020 sebesar Rp19.038.335.021,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas di Kecamatan se-Kabupaten Pacitan yang terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 135 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2020 dan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	827.282.336,00	739.084.954,00	88.197.382,00	11,93
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	1.568.774.018,00	1.653.711.341,00	(84.937.323,00)	(5,14)
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	776.662.295,00	791.217.789,00	(14.555.494,00)	(1,84)
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketrowonojoyo	436.601.144,00	448.764.284,00	(12.163.140,00)	(2,71)
5	pendapatan Dana Kapitasi jkn fkt puskemas Arjosari	1.143.306.590,00	1.150.851.086,00	(7.544.496,00)	(0,66)
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	303.842.900,00	274.816.500,00	29.026.400,00	10,56
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	579.574.676,00	558.070.721,00	21.503.955,00	3,85
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	348.547.638,00	378.195.574,00	(29.647.936,00)	(7,84)
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	535.285.393,00	508.953.093,00	26.332.300,00	5,17
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	350.824.805,00	356.527.564,00	(5.702.759,00)	(1,60)
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	740.939.200,00	736.951.725,00	3.987.475,00	0,54
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	411.223.400,00	491.977.894,00	(80.754.494,00)	(16,41)
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	1.002.177.900,00	994.322.100,00	7.855.800,00	0,79
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	361.613.150,00	341.503.780,00	20.109.370,00	5,89
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	1.874.270.400,00	1.815.570.529,00	58.699.871,00	3,23
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	1.011.069.750,00	1.009.972.186,00	1.097.564,00	0,11
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	515.781.300,00	639.173.226,00	(123.391.926,00)	(19,30)
18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	340.427.649,00	361.343.100,00	(20.915.451,00)	(5,79)
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.537.669.674,00	1.687.410.804,00	(149.741.130,00)	(8,87)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	971.989.678,00	1.042.096.130,00	(70.106.452,00)	(6,73)
21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	1.035.764.925,00	1.170.580.656,00	(134.815.731,00)	(11,52)
22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	1.022.471.250,00	1.104.233.800,00	(81.762.550,00)	(7,40)
23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	764.921.900,00	901.216.150,00	(136.294.250,00)	(15,12)
24	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	577.313.050,00	609.190.732,00	(31.877.682,00)	(5,23)
Jumlah		19.038.335.021,00	19.765.735.718,00	(727.400.697,00)	(3,68)

Terdapat penurunan sebesar Rp727.400.697,00 atau 3,68% dibandingkan Tahun 2019.

Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang dirinci pada Tabel 145 di atas, sebesar 74,60% dihasilkan dari objek penerimaan pendapatan BLUD yaitu RSUD dr. Darsono yang total penerimaannya mencapai Rp80.906.982.405,18. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp31.020.812.073,67 atau 22,24%. Kenaikan hanya terjadi pada pos Pendapatan Denda Pajak - LO. Karena Pendapatan Denda Pajak – LO sebesar 0,29% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Kenaikan tersebut tidak berpengaruh signifikan pada penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Dari total saldo PAD Lainnya sebesar Rp108.448.848.380,12, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp92.010.036.650,70 dan transaksi non kas sebesar Rp16.438.811.729,41. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Pendapatan Hibah BLUD berupa barang senilai Rp9.520.427.721,10
- Penambahan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp6.429.985.095,06,
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp488.254.413,25 yang menambah saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO, dan
- Lain –lain PAD yang sah dari pelunasan piutang 2019 yang digunakan untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan atas transfer penerimaan pelunasan Piutang 2019 sebesar Rp144.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai Rp1.243.364.873.887,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 136 Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	909.460.329.156,00	1.035.140.534.632,00	(125.680.205.476,00)	(12,14)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	241.344.910.524,00	220.531.621.177,00	20.813.289.347,00	9,44
3	Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan	92.559.634.207,00	93.837.894.379,00	(1.278.260.172,00)	(1,36)
Jumlah		1.243.364.873.887,00	1.349.510.050.188,00	(106.145.176.301,00)	(7,87)

Pendapatan Transfer pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp106.145.176.301,00 atau 7,87% dibandingkan Tahun 2019.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan senilai Rp909.460.329.156,00 menurut obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 137 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.437.519.928,00	31.224.250.880,00	7.213.269.048,00	23,10
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35.437.765.871,00	76.773.603.599,00	(41.335.837.728,00)	(53,84)
3	Dana Alokasi Umum	739.879.366.000,00	818.510.458.000,00	(78.631.092.000,00)	(9,61)
4	Dana Alokasi Khusus	95.705.677.357,00	108.632.222.153,00	(12.926.544.796,00)	(11,90)
Jumlah		909.460.329.156,00	1.035.140.534.632,00	(125.680.205.476,00)	(12,14)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp909.460.329.156,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp38.437.519.928,00 yang terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 138 Rincian Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	15.844.836.525,00	10.975.704.255,00	4.869.132.270,00	44,36
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	17.807.484.501,00	14.641.872.106,00	3.165.612.395,00	21,62
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	4.785.198.902,00	5.606.674.519,00	(821.475.617,00)	(14,65)
Jumlah		38.437.519.928,00	31.224.250.880,00	7.213.269.048,00	23,10

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Trasfer-LO mengalami kenaikan sebesar Rp7.213.269.048,00 atau 23,10% dibandingkan Tahun 2019.

- 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.437.765.871,00, yaitu terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	438.284.173,00	213.400.733,00	224.883.440,00	105,38
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	50.275.325,00	82.575.500,00	(32.300.175,00)	(39,12)
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	744.964.365,00	567.954.800,00	177.009.565,00	31,17
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	1.013.899.150,00	764.460.992,00	249.438.158,00	32,63
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	30.381.098.207,00	48.234.346.615,00	(17.853.248.408,00)	(37,01)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	2.765.293.225,00	5.978.092.816,00	(3.212.799.591,00)	(53,74)
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	43.951.426,00	38.789.197,00	5.162.229,00	13,31
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Migas	0,00	20.053.263.438,00	(20.053.263.438,00)	(100,00)
9	Bagi Hasil Dari Pertambangan MINERBA	0,00	840.719.508,00	(840.719.508,00)	(100,00)
Jumlah		35.437.765.871,00	76.773.603.599,00	(41.335.837.728,00)	(53,84)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.437.765.871,00, terdapat penurunan sebesar Rp41.335.837.728,00 atau 53,84% dibandingkan Tahun 2019.

- 3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2020 sebesar Rp739.879.366.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp78.631.092.000,00 atau 9,61% dibandingkan dengan Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebesar Rp95.705.677.357,00 merupakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Khusus Reguler	Rp	74.746.231.505,00
- Dana Alokasi Khusus Penugasan	Rp	20.959.445.852,00
	Rp	95.705.677.357,00

Dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp904.776.375.338,00, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp902.529.774.854,00 dan transaksi non kas sebesar Rp2.246.600.484,00 berupa Penambahan Piutang Tahun 2020 yang penetapannya berdasarkan PMK Nomor 113/PMK/07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2020 mencabut PMK Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya senilai Rp241.344.910.524,00 merupakan Dana Penyesuaian Tahun 2020 yang terdiri dari:

Tabel 140 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	143.475.785.000,00	146.615.097.440,00	(3.139.312.440,00)	(2,14)
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	221.125.000,00	329.900.000,00	(108.775.000,00)	(32,97)
3	Dana Insentif Daerah - LO	53.487.161.000,00	35.770.257.000,00	17.716.904.000,00	49,53
4	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	10.144.691.750,00	11.378.944.450,00	(1.234.252.700,00)	(10,85)
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	29.313.115.389,00	19.538.018.087,00	9.775.097.302,00	50,03
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah & Ketenagakerjaan	477.972.500,00	470.000.000,00	7.972.500,00	1,70
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.908.256.885,00	1.548.666.200,00	359.590.685,00	23,22
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.077.715.000,00	3.967.700.000,00	(1.889.985.000,00)	(47,63)
9	Dana Pelayanan Kepariwisata	239.088.000,00	913.038.000,00	(673.950.000,00)	(73,81)
Jumlah		241.344.910.524,00	220.531.621.177,00	20.813.289.347,00	9,44



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Terdapat kenaikan sebesar Rp20.813.289.347,00 atau 9,44% dibandingkan Tahun 2019.

Total saldo Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya senilai Rp241.344.910.524,00 tersebut merupakan penerimaan berupa kas.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp92.559.634.207,00 yang terdiri atas:

Tabel 141 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78.590.785.207,00	88.669.815.379,00	(10.079.030.172,00)	(11,37)
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	13.968.849.000,00	5.168.079.000,00	8.800.770.000,00	170,29
Jumlah		92.559.634.207,00	93.837.894.379,00	(1.278.260.172,00)	(1,36)

1) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp78.590.785.207,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.079.030.172,00 atau 11,37% dibandingkan Tahun 2019.

2) **Pendapatan Bagi Hasil Lainnya**

Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp13.968.849.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2019, penerimaan tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.800.770.000,00 atau 170,29%.

Dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp92.559.634.207,00, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp85.016.209.467,00 dan transaksi non kas sebesar Rp7.543.424.740,00 berupa Penambahan Piutang Tahun 2020.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 senilai Rp71.425.565.257,20 merupakan penerimaan dari pos Pendapatan Hibah yang terdiri dari:

Tabel 142 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah - LO				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	63.872.360.543,20	61.944.912.539,38	1.927.448.003,82	3,11



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7.548.704.714,00	3.871.592.210,00	3.677.112.504,00	94,98
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	4.500.000,00	324.200.083,33	(319.700.083,33)	(98,61)
	Jumlah	71.425.565.257,20	66.140.704.832,71	5.284.860.424,49	7,99

1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2020 sebesar Rp63.872.360.543,20 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 143 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	6.210.120.543,20	11.855.032.539,38	(5.644.911.996,18)	(47,62)
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	57.662.240.000,00	50.089.880.000,00	7.572.360.000,00	15,12
	Jumlah	63.872.360.543,20	61.944.912.539,38	1.927.448.003,82	3,11

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa penerimaan kas sebesar Rp892.000.000,00. Sedangkan berupa barang senilai Rp5.318.120.543,20 yang diterima oleh beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.389.275.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp54.350.000,00 Hibah APBN berupa Peralatan dan Mesin untuk SDN 1 Pringkuku, SDN 2 Sidomulyo, SDN Arjosari, SDN 1 Bandar, SDN Ngadirejan, SDN 4 Punung, SDN 3 Karanggede, SDN 1 Kedungbendo, SDN 1 Punung dan SDN Kebonagung;
 - Sebesar Rp452.425.000,00 Hibah APBN berupa Peralatan dan Mesin untuk SMPN 5 Tegalombo Satap, SMPN 4 Ngadirojo Satap, SMPN 4 Tegalombo Satap, SMPN 1 Punung, dan SMPN 4 Donorojo Satap;
 - Sebesar Rp882.500.000,00 Hibah APBN berupa Peralatan dan Mesin untuk SDN 1 Pringkuku, SDN 2 Sidomulyo, SDN Arjosari, SDN 1 Bandar, SDN Ngadirejan, SDN 4 Punung, SDN 3 Karanggede, SDN 1 Kedungbendo, SDN 1 Punung dan SDN Kebonagung.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp634.102.000,00 merupakan Hibah APBN berupa Blangko Kependudukan;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

3. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.544.256.000,00 merupakan Hibah dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;	
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp730.487.543,20 yang terdiri dari:	
- Sebesar Rp286.228.000,00 merupakan Hibah Masuk berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari Bank Jatim;	
- Sebesar Rp444.259.543,20 merupakan Hibah Masuk berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5. BPKAD sebesar Rp20.000.000,00 merupakan Hibah dari BPN berupa Tanah	
2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp57.662.240.000,00 yang terdiri dari:	
1	Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo Rp 3.149.310.000,00
2	Hibah Dana BOS SD Kec. Punung Rp 2.511.780.000,00
3	Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku Rp 2.448.810.000,00
4	Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan Rp 4.124.040.000,00
5	Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung Rp 3.349.380.000,00
6	Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari Rp 3.081.810.000,00
7	Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan Rp 3.337.140.000,00
8	Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar Rp 3.697.020.000,00
9	Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo Rp 4.613.040.000,00
10	Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan Rp 4.696.860.000,00
11	Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo Rp 3.630.090.000,00
12	Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro Rp 2.825.460.000,00
13	Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo Rp 1.339.410.000,00
14	Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung Rp 1.104.290.000,00
15	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku Rp 864.160.000,00
16	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan Rp 2.473.460.000,00
17	Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung Rp 1.091.140.000,00
18	Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari Rp 1.221.870.000,00
19	Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan Rp 1.410.250.000,00
20	Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar Rp 1.015.900.000,00
21	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo Rp 1.102.300.000,00
22	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan Rp 1.580.260.000,00
23	Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo Rp 1.913.340.000,00
24	Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro Rp 1.081.120.000,00
Jumlah	
Rp 57.662.240.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah penerima berdasarkan Kepmendikbud 231 Tahun 2020 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, Kepmendikbud 419 Tahun 2020 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020, Kepmendikbud 746/P Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Kepmendikbud 1042/P/2020 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahap III Tahun 2020.

1.3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.548.704.714,00 merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh OPD berikut:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.052.580.897,00:
 - Sebesar Rp18.000.000,00 merupakan Hibah masuk berupa *thermogun* dari BPBD Provinsi Jawa Timur; dan
 - Sebesar Rp5.034.580.897,00 merupakan Hibah berupa obat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.663.762.017,00 merupakan Hibah Masuk berupa dua buah *Microhidro* dari Satker Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp266.300.000,00:
 - Sebesar Rp80.300.000,00 merupakan Mutasi Masuk Hibah berupa Printer;
 - Sebesar Rp186.000.000,00 merupakan Mutasi Masuk Hibah berupa ADM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp544.800.800,00 merupakan Hibah berupa Obat Obatan dari BKKBN Provinsi Jatim;
5. Dinas Pertanian sebesar Rp3.300.000,00 merupakan Persediaan Bibit Ternak (Bibit DOC Ayam Potong);
6. Kecamatan Bandar sebesar Rp17.961.000,00 merupakan Pendapatan Hibah berupa Sepeda Motor dari Bank Jatim.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp4.500.000,00 merupakan penerimaan berupa barang pada OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.500.000,00 merupakan Hibah masuk aset berupa Televisi dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pacitan;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 merupakan Hibah masuk asset berupa *sprayer* dari Bank Mandiri.

Dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 senilai Rp70.981.305.714,00 terdapat penerimaan berupa kas dari pos Pendapatan Hibah sebesar Rp58.554.240.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2. Beban	1.525.639.163.733,89	1.623.788.122.837,56

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2020 beban terealisasi sebesar Rp1.525.639.163.733,89. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.623.788.122.837,56 tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp98.148.959.103,67 atau sebesar 6,04%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 144 Beban Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	636.133.907.404,00	663.684.837.971,00	(27.550.930.567,00)	(4,15)
2	Beban Persediaan	81.274.908.670,79	88.024.192.864,68	(6.749.284.193,89)	(7,67)
3	Beban Jasa	220.145.004.695,52	225.854.913.158,20	(5.709.908.462,68)	(2,53)
4	Beban Pemeliharaan	8.290.991.533,80	9.020.034.677,00	(729.043.143,20)	(8,08)
5	Beban Perjalanan Dinas	41.856.514.505,25	63.490.228.147,00	(21.633.713.641,75)	(34,07)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	-
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	-
8	Beban Hibah	94.602.887.792,55	55.703.075.401,26	38.899.812.391,29	69,83
9	Beban Bantuan Sosial	10.749.680.534,00	119.702.257.569,00	(108.952.577.035,00)	(91,02)
10	Beban Penyusutan	229.311.322.531,38	204.819.324.008,52	24.491.998.522,86	11,96
11	Beban Transfer	180.321.315.575,56	188.005.417.767,80	(7.684.102.192,24)	(4,09)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Beban Lain-lain	22.952.630.491,04	5.483.841.273,10	17.468.789.217,94	318,55
Jumlah		1.525.639.163.733,89	1.623.788.122.837,56	(98.148.959.103,67)	(6,04)

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp636.133.907.404,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.550.930.567,00 atau 4,15% dari tahun realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 145 Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	597.945.028.329,00	630.187.179.276,00	(32.242.150.947,00)	(5,12)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	17.829.881.639,00	15.242.440.330,00	2.587.441.309,00	16,98
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.196.430.950,00	5.806.496.000,00	389.934.950,00	6,72
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.547.857.821,00	1.652.579.500,00	(104.721.679,00)	(6,34)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	536.949.255,00	902.034.965,00	(365.085.710,00)	(40,47)
6	Uang Lembur	791.338.000,00	3.398.889.650,00	(2.607.551.650,00)	(76,72)
7	Beban BOS	11.286.421.410,00	6.495.218.250,00	4.791.203.160,00	73,77
JUMLAH		636.133.907.404,00	663.684.837.971,00	(27.550.930.567,00)	(4,15)

Dibandingkan dengan Tahun 2019, kenaikan belanja pegawai Tahun 2020 terbesar yaitu pada Beban BOS. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Gaji dan Tunjangan.

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 sebesar Rp597.945.028.329,00 yang terdiri dari:

Tabel 146 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	349.584.626.328,00	363.463.893.844,90	(13.879.267.516,90)	(3,82)
2	Tunjangan Keluarga - LO	31.032.145.533,00	32.328.954.551,20	(1.296.809.018,20)	(4,01)
3	Tunjangan Jabatan - LO	8.527.889.000,00	8.569.283.020,00	(41.394.020,00)	(0,48)
4	Tunjangan Fungsional - LO	23.321.387.750,00	24.189.144.192,90	(867.756.442,90)	(3,59)
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	4.411.381.688,00	4.807.009.000,00	(395.627.312,00)	(8,23)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Tunjangan Beras - LO	15.506.296.917,00	16.224.603.975,00	(718.307.058,00)	(4,43)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.185.311.720,00	2.142.427.776,00	42.883.944,00	2,00
8	Pembulatan Gaji - LO	6.233.107,00	4.978.216,00	1.254.891,00	25,21
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.317.924.775,00	10.261.763.515,00	4.056.161.260,00	39,53
10	Uang Paket - LO	84.766.500,00	79.506.000,00	5.260.500,00	6,62
11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	28.272.825,00	21.345.450,00	6.927.375,00	32,45
12	Tunjangan Komisi - LO	55.814.850,00	43.665.300,00	12.149.550,00	27,82
13	Tunjangan Badan Anggaran - LO	28.272.825,00	21.345.450,00	6.927.375,00	32,45
14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO	7.856.100,00	6.546.750,00	1.309.350,00	20,00
15	Tunjangan Perumahan - LO	4.091.150.000,00	3.815.300.000,00	275.850.000,00	7,23
16	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	10.710.000,00	376.110.000,00	(365.400.000,00)	(97,15)
17	Tunjangan Profesi Guru - LO	136.271.171.140,00	155.966.672.920,00	(19.695.501.780,00)	(12,63)
18	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	2.873.417.271,00	2.991.805.365,00	(118.388.094,00)	(3,96)
19	Tunjangan Reses	1.396.500.000,00	892.500.000,00	504.000.000,00	56,47
20	Tunjangan Transportasi	3.977.100.000,00	3.790.800.000,00	186.300.000,00	4,91
21	Dana Operasional	226.800.000,00	176.400.000,00	50.400.000,00	28,57
22	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	0,00	13.123.950,00	(13.123.950,00)	(100)
Jumlah		597.945.028.329,00	630.187.179.276,00	(32.242.150.947,00)	(5,12)

Terdapat penurunan sebesar Rp32.242.150.947,00 atau 5,12% dari Tahun 2019.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020 sebesar Rp17.829.881.639,00 yang terdiri dari:

Tabel 147 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	17.149.381.639,00	14.816.940.330,00	2.332.441.309,00	15,74
2	Tambahan Penghasilan Guru - LO	680.500.000,00	425.500.000,00	255.000.000,00	59,93
Jumlah		17.829.881.639,00	15.242.440.330,00	2.587.441.309,00	16,98

Terdapat kenaikan sebesar Rp2.587.441.309,00 atau 16,98% dari realisasi Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.1.3 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 sebesar Rp6.196.430.950,00 yang terdiri dari:

Tabel 148 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	5.596.500.000,00	5.250.000.000,00	346.500.000,00	6,60
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	581.935.000,00	556.496.000,00	25.439.000,00	4,57
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Lainnya - LO	17.995.950,00	0,00	17.995.950,00	-
Jumlah		6.196.430.950,00	5.806.496.000,00	389.934.950,00	6,72

Terdapat kenaikan sebesar Rp389.934.950,00 atau 6,72% dari realisasi Tahun 2019.

2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.547.857.821,00 Terdapat penurunan sebesar Rp104.721.679,00 atau 6,34% dari Tahun 2019.

2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp536.949.255,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp365.085.710,00 atau 40,47% dari Tahun 2019.

2.1.6 Uang Lembur

Uang Lembur Tahun 2020 sebesar Rp791.338.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 149 Rincian Uang Lembur Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Uang Lembur PNS - LO	8.893.000,00	3.064.030.650,00	(3.055.137.650,00)	(99,71)
2	Uang Lembur Non PNS - LO	782.445.000,00	334.859.000,00	447.586.000,00	133,66
Jumlah		791.338.000,00	3.398.889.650,00	(2.607.551.650,00)	(76,72)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Terdapat penurunan sebesar Rp2.607.551.650,00 atau 76,72% dari beban Tahun 2019.

2.1.7 Beban BOS

Beban BOS Tahun 2020 sebesar Rp11.286.421.410,00 merupakan beban pegawai yang pendanaannya berasal dari penerimaan Dana BOS. Adapun dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pada Tahun 2020 Pendapatan Dana Bos pada Satuan Pendidikan dianggarkan dalam APBD pada Rekening pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Hibah Dana Bos, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana Bos pada PPKD.

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2020 senilai Rp81.274.908.670,79 terdiri dari.

Tabel 150 Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	21.549.374.269,04	15.440.460.429,80	6.108.913.839,24	39,56
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	17.544.658.499,87	19.057.094.527,06	(1.512.436.027,19)	(7,94)
3	Beban Penggantian Suku Cadang	1.624.889.281,00	2.064.874.814,00	(439.985.533,00)	(21,31)
4	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	586.874.260,00	760.365.179,00	(173.490.919,00)	(22,82)
5	Beban Cetak	6.245.237.122,03	7.901.423.031,82	(1.656.185.909,79)	(20,96)
6	Beban Makanan dan Minuman	11.876.594.789,00	17.940.764.431,00	(6.064.169.642,00)	(33,80)
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.108.453.250,00	1.012.431.850,00	96.021.400,00	9,48
8	Belanja Pakaian Kerja	1.813.375.194,85	1.070.359.175,00	743.016.019,85	69,42
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.239.577.100,00	2.157.052.736,00	(917.475.636,00)	(42,53)
10	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.635.874.905,00	20.619.366.691,00	(2.983.491.786,00)	(14,47)
11	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-
Jumlah		81.274.908.670,79	88.024.192.864,68	(6.749.284.193,89)	(7,67)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tahun 2020 terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar Rp6.749.284.193,89 atau 7,67% dari beban tahun lalu. Penurunan terbesar dari total penurunan Beban Persediaan terjadi pada Beban Makanan dan Minuman yaitu sebesar Rp6.064.169.642,00 atau 33,80% dari beban tahun sebelumnya.

2.2.1 Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2020 sebesar Rp21.549.374.269,04 yang terdiri dari.

Tabel 151 Rincian Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	6.120.661.094,23	8.069.700.938,30	(1.949.039.844,07)	(24,15)
2	Beban Persediaan dokumen/ administrasi tender	5.475.000,00	4.340.000,00	1.135.000,00	26,15
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.295.223.027,00	1.125.889.496,00	169.333.531,00	15,04
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	178.423.000,00	202.732.650,00	(24.309.650,00)	(11,99)
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.666.406.863,00	1.323.083.998,00	343.322.865,00	25,95
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.935.668.589,00	3.243.638.419,50	(307.969.830,50)	(9,49)
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	33.581.400,00	24.687.000,00	8.894.400,00	36,03
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	145.331.000,00	121.224.975,00	24.106.025,00	19,89
9	Beban Persediaan Peralatan Penunjang Kesehatan	8.949.028.715,81	722.773.143,00	8.226.255.572,81	1.138,15
10	Beban Persediaan Pengadaan blanko Cek/Giro	10.072.000,00	11.490.000,00	(1.418.000,00)	(12,34)
11	Beban Persediaan Dokumentasi/ Dekorasi	209.503.580,00	590.899.810,00	(381.396.230,00)	(64,54)
Jumlah		21.549.374.269,04	15.440.460.429,80	6.108.913.839,24	39,56

Terjadi kenaikan sebesar Rp6.108.913.839,24 atau 39,56% dari beban habis pakai Tahun 2019.

2.2.2 Beban Persediaan Bahan/Material

Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2020 sebesar Rp17.544.658.499,87 yang terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 152 Rincian Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan bahan baku bangunan	2.725.064.844,00	1.543.747.880,00	1.181.316.964,00	76,52
2	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	190.027.600,00	367.459.200,00	(177.431.600,00)	(48,29)
3	Beban Persediaan bahan obat-obatan	9.398.401.708,37	12.168.752.272,56	(2.770.350.564,19)	(22,77)
4	Beban Persediaan bahan kimia	1.221.023.820,00	806.748.926,00	414.274.894,00	51,35
5	Beban Persediaan Makanan Pokok	2.412.398.360,50	2.254.246.111,50	158.152.249,00	7,02
6	Beban Persediaan Tropy/ Piagam/Hadiah	386.235.100,00	313.081.900,00	73.153.200,00	23,37
7	Beban Persediaan Pakan Ternak	382.926.950,00	354.310.000,00	28.616.950,00	8,08
8	Beban Persediaan Bahan Pupuk	29.700.000,00	107.008.299,00	(77.308.299,00)	(72,25)
9	Beban Persediaan Bibit Ikan dan Pakan	56.365.152,00	154.127.518,00	(97.762.366,00)	(63,43)
10	Beban Persediaan Bahan Baku Perikanan	5.988.720,00	26.842.640,00	(20.853.920,00)	(77,69)
11	Beban Persediaan Bahan Praktik/Peraga/Pelatihan/ Diklat	279.073.858,00	508.536.380,00	(229.462.522,00)	(45,12)
12	Beban Persediaan Peralatan Industri	4.994.000,00	18.150.000,00	(13.156.000,00)	(72,48)
13	Beban Persediaan Induk Ikan	0,00	12.787.500,00	(12.787.500,00)	(100,00)
14	Beban Persediaan Bingkai/ Figura Lambang/Logo/ Lukisan/Hiasan Dinding	27.676.000,00	16.225.000,00	11.451.000,00	70,58
15	Beban Persediaan Souvenir	424.782.387,00	405.070.900,00	19.711.487,00	4,87
Jumlah		17.544.658.499,87	19.057.094.527,06	(1.512.436.027,19)	(7,94)

Terjadi penurunan sebesar Rp1.512.436.027,19 atau 7,94% dari Tahun 2019.

2.2.3 Beban Penggantian Suku Cadang

Beban Penggantian Suku Cadang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.624.889.281,00. Beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp439.985.533,00 atau 21,31% dari beban Tahun 2019.

2.2.4 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun 2020 sebesar Rp586.874.260,00 mengalami penurunan sebesar Rp173.490.919,00 atau 22,82% dari Tahun 2019.

2.2.5 Beban Cetak

Beban Cetak Tahun 2020 sebesar Rp6.245.237.122,03 mengalami penurunan sebesar Rp1.656.185.909,79 atau 20,96% dari Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.2.6 Beban Makanan dan Minuman

Beban Makanan dan Minuman Tahun 2020 sebesar Rp11.876.594.789,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.064.169.642,00 atau 33,80% dari Tahun 2019. Beban Makanan dan Minuman terdiri dari.

Tabel 153 Rincian Beban Makanan dan Minuman Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban makanan dan minuman harian pegawai	1.565.550.070,00	947.039.040,00	618.511.030,00	65,31
2	Beban makanan dan minuman rapat	8.574.913.172,00	15.444.914.366,00	(6.870.001.194,00)	(44,48)
3	Beban makanan dan minuman tamu	861.399.156,00	1.043.504.175,00	(182.105.019,00)	(17,45)
4	Beban makanan dan minuman pelatihan	99.821.275,00	359.294.400,00	(259.473.125,00)	(72,22)
5	Beban makanan dan minuman pasien	691.390.336,00	146.012.450,00	545.377.886,00	373,51
6	Beban Makan Minum Kegiatan	83.520.780,00	0,00	83.520.780,00	-
Jumlah		11.876.594.789,00	17.940.764.431,00	(6.064.169.642,00)	(33,80)

2.2.7 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020 sebesar Rp1.108.453.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp96.021.400,00 atau 9,48% dari Tahun 2019, yang terdiri dari:

Tabel 154 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	38.610.000,00	28.435.000,00	10.175.000,00	35,78
2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	203.543.450,00	180.412.100,00	23.131.350,00	12,82
3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	179.833.500,00	209.394.900,00	(29.561.400,00)	(14,12)
4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	429.851.700,00	337.623.100,00	92.228.600,00	27,32
5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.900.000,00	99.330.000,00	(89.430.000,00)	(90,03)
6	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	157.350.600,00	157.236.750,00	113.850,00	0,07
7	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	89.364.000,00	0,00	89.364.000,00	-
Jumlah		1.108.453.250,00	1.012.431.850,00	96.021.400,00	9,48

2.2.8 Beban Pakaian Kerja

Beban Pakaian Kerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.813.375.194,85, Beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp743.016.019,85 atau 69,42% dari beban tahun lalu, yang terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 155 Rincian Belanja Pakaian Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban pakaian kerja lapangan	448.262.044,00	725.208.675,00	(276.946.631,00)	(38,19)
2	Beban Kelengkapan Pakaian Kerja	1.365.113.150,85	345.150.500,00	1.019.962.650,85	295,51
Jumlah		1.813.375.194,85	1.070.359.175,00	743.016.019,85	69,42

2.2.9 Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu

Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2020 sebesar Rp1.239.577.100,00, beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp917.475.636,00 atau 42,53% dari Tahun 2019, yang terdiri dari:

Tabel 156 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban pakaian KORPRI	2.000.000,00	5.025.000,00	(3.025.000,00)	(60,20)
2	Beban pakaian adat daerah	192.270.650,00	278.497.950,00	(86.227.300,00)	(30,96)
3	Beban pakaian batik tradisional	472.201.300,00	827.128.550,00	(354.927.250,00)	(42,91)
4	Beban pakaian olahraga	573.105.150,00	1.046.401.236,00	(473.296.086,00)	(45,23)
Jumlah		1.239.577.100,00	2.157.052.736,00	(917.475.636,00)	(42,53)

2.2.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp17.635.874.905,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.983.491.786,00 atau 14,47% dari Tahun 2019 yang terdiri dari:

Tabel 157 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.992.035.280,00	3.096.976.300,00	4.895.058.980,00	158,06
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.643.839.625,00	17.522.390.391,00	(7.878.550.766,00)	(44,96)
Jumlah		17.635.874.905,00	20.619.366.691,00	(2.983.491.786,00)	(14,47)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.2.11 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00.

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2020 mencapai Rp220.145.004.695,52. Terjadi penurunan sebesar Rp5.709.908.462,68 atau 2,53% dari beban Tahun 2019. Beban Jasa tersebut dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 158 Beban Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	87.196.074.336,74	65.017.339.832,60	22.178.734.504,14	34,11
2	Beban Premi Asuransi	6.403.541.956,00	3.935.155.731,00	2.468.386.225,00	62,73
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1.109.149.667,00	1.146.785.149,00	(37.635.482,00)	(3,28)
4	Beban Penggandaan	1.654.626.934,00	2.631.144.163,00	(976.517.229,00)	(37,11)
5	Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	469.105.867,00	1.001.828.350,00	(532.722.483,00)	(53,18)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	259.442.400,00	941.218.400,00	(681.776.000,00)	(72,44)
7	Beban Sewa Alat Berat	8.000.000,00	9.999.000,00	(1.999.000,00)	(19,99)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	730.398.900,00	1.676.133.970,00	(945.735.070,00)	(56,42)
9	Beban Jasa Konsultasi	1.540.919.500,00	2.961.546.625,00	(1.420.627.125,00)	(47,97)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	58.900.000,00	220.000.000,00	(161.100.000,00)	(73,23)
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	697.911.400,00	1.482.290.000,00	(784.378.600,00)	(52,92)
12	Honorarium PNS	6.409.858.984,00	21.818.360.662,00	(15.408.501.678,00)	(70,62)
13	Honorarium Non PNS	6.308.065.000,00	1.515.302.300,00	4.792.762.700,00	316,29
14	Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit	75.247.553.740,78	84.751.693.281,60	(9.504.139.540,82)	(11,21)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	27.086.129.204,00	28.167.290.385,00	(1.081.161.181,00)	(3,84)
16	Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197.555.906,00	438.920.100,00	(241.364.194,00)	(54,99)
17	Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	379.672.150,00	0,00	379.672.150,00	-
18	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.388.098.750,00	8.139.905.209,00	(3.751.806.459,00)	(46,09)
Jumlah		220.145.004.695,52	225.854.913.158,20	(5.709.908.462,68)	(2,53)

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2020 sebesar Rp87.196.074.336,74 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 159 Beban Jasa Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Jasa telepon	626.404.671,00	682.295.263,00	(55.890.592,00)	(8,19)
2	Beban Jasa air	170.103.180,00	149.425.680,00	20.677.500,00	13,84
3	Beban Jasa listrik	9.129.781.103,00	8.928.327.432,00	201.453.671,00	2,26
4	Beban Jasa surat kabar/majalah	277.316.400,00	287.708.454,00	(10.392.054,00)	(3,61)
5	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	1.239.855.562,00	992.207.463,00	247.648.099,00	24,96
6	Beban Jasa paket/pengiriman	5.868.000,00	1.477.900,00	4.390.100,00	297,05
7	Beban Jasa Sertifikasi	14.812.320,00	44.500.000,00	(29.687.680,00)	(66,71)
8	Beban Jasa Transaksi Keuangan	335.600,00	214.561,00	121.039,00	56,41
9	Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan PBB	0,00	78.975.000,00	(78.975.000,00)	(100,00)
10	Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara	12.600.000,00	20.300.000,00	(7.700.000,00)	(37,93)
11	Beban <i>Software</i>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
12	Beban Pemasangan iklan	628.868.800,00	1.023.756.950,00	(394.888.150,00)	(38,57)
13	Beban Layanan Kesehatan	16.624.365.268,00	16.025.298.768,60	599.066.499,40	3,74
14	Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah	0,00	55.017.900,00	(55.017.900,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Media	178.309.000,00	310.003.851,00	(131.694.851,00)	(42,48)
16	Beban Akomodasi	116.248.807,00	316.974.386,00	(200.725.579,00)	(63,33)
17	Beban Jasa Laundry	70.431.050,00	52.294.665,00	18.136.385,00	34,68
18	Beban Jasa Medis/Paramedis	5.590.196.796,00	2.333.902.443,00	3.256.294.353,00	139,52
19	Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	1.116.100.330,00	946.296.407,44	169.803.922,56	17,94
20	Beban Jasa Cleaning Service	825.902.416,00	766.153.824,28	59.748.591,72	7,80
21	Beban Jasa Teknis	34.164.879.266,00	22.153.275.448,28	12.011.603.817,72	54,22
22	Beban Jasa Pihak Ketiga	4.126.330.420,74	8.454.128.126,00	(4.327.797.705,26)	(51,19)
23	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	244.500.000,00	353.000.000,00	(108.500.000,00)	(30,74)
24	Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	31.350.000,00	334.550.000,00	(303.200.000,00)	(90,63)
25	Beban Uang untuk diberikan kepada siswa / pelajar	0,00	580.582.000,00	(580.582.000,00)	(100,00)
26	Beban Jasa Profesi	14.700.000,00	102.000.000,00	(87.300.000,00)	(85,59)
27	Belanja Biaya Retribusi	42.985.902,00	24.673.310,00	18.312.592,00	74,22
28	Beban Insentif Nakes Yang Menangani COVID-19	11.933.829.445,00	0,00	11.933.829.445,00	-
Jumlah		87.196.074.336,74	65.017.339.832,60	22.178.734.504,14	34,11

Terjadi kenaikan sebesar Rp22.178.734.504,14 atau 34,11% dari



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

tahun sebelumnya.

2.3.2 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi Tahun 2020 sebesar Rp6.403.541.956,00 yang terdiri dari:

Tabel 160 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	6.240.982.640,00	3.703.861.091,00	2.537.121.549,00	68,50
2	Beban Premi Asuransi Kecelakaan	161.776.592,00	227.131.215,00	(65.354.623,00)	(28,77)
3	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	782.724,00	4.163.425,00	(3.380.701,00)	(81,20)
Jumlah		6.403.541.956,00	3.935.155.731,00	2.468.386.225,00	62,73

Terjadi kenaikan sebesar Rp2.468.386.225,00 atau 62,73% dari tahun sebelumnya.

2.3.3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebesar Rp1.109.149.667,00 yang terdiri dari:

Tabel 161 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Service	732.217.767,00	749.494.399,00	(17.276.632,00)	(2,31)
2	Beban Jasa KIR	3.885.000,00	3.395.000,00	490.000,00	14,43
3	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	373.046.900,00	393.895.750,00	(20.848.850,00)	(5,29)
Jumlah		1.109.149.667,00	1.146.785.149,00	(37.635.482,00)	(3,28)

Terjadi penurunan sebesar Rp37.635.482,00 atau 3,28% dari tahun sebelumnya.

2.3.4 Beban Penggandaan

Beban Penggandaan Tahun 2020 sebesar Rp1.654.626.934,00. Terjadi penurunan sebesar Rp976.517.229,00 atau 37,11% dari tahun sebelumnya.

2.3.5 Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020 sebesar Rp469.105.867,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 162 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas	40.590.000,00	77.550.000,00	(36.960.000,00)	(47,66)
2	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	183.548.652,00	406.985.400,00	(223.436.748,00)	(54,90)
3	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	69.522.771,00	182.657.950,00	(113.135.179,00)	(61,94)
4	Beban Sewa Tanah	175.444.444,00	334.635.000,00	(159.190.556,00)	(47,57)
Jumlah		469.105.867,00	1.001.828.350,00	(532.722.483,00)	(53,18)

Terjadi penurunan sebesar Rp532.722.483,00 atau 53,18% dari tahun sebelumnya. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir berasal dari belanja APBD selama Tahun 2020.

2.3.6 Beban Sewa Sarana Mobilitas

Beban Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2020 sebesar Rp259.442.400,00. Terjadi penurunan sebesar Rp681.776.000,00 atau 72,44% dari tahun sebelumnya.

2.3.7 Beban Sewa Alat Berat

Beban Sewa Alat Berat Tahun 2020 sebesar Rp8.000.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.999.000,00 atau 19,99% dari tahun sebelumnya.

2.3.8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020 sebesar Rp730.398.900,00 yang terdiri dari:

Tabel 163 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban sewa meja kursi	39.421.900,00	120.953.400,00	(81.531.500,00)	(67,41)
2	Beban sewa komputer dan printer	256.278.000,00	209.082.500,00	47.195.500,00	22,57
3	Beban sewa generator	8.800.000,00	15.345.000,00	(6.545.000,00)	(42,65)
4	Beban sewa tenda	118.026.000,00	405.021.700,00	(286.995.700,00)	(70,86)
5	Beban sewa pakaian adat/tradisional	0,00	171.377.500,00	(171.377.500,00)	(100,00)
6	Beban Sewa Sound System	68.678.000,00	417.690.965,00	(349.012.965,00)	(83,56)
7	Beban sewa panggung	56.255.000,00	156.077.465,00	(99.822.465,00)	(63,96)
8	Beban Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	33.830.000,00	166.344.970,00	(132.514.970,00)	(79,66)
9	Beban Sewa Genset	17.110.000,00	14.240.470,00	2.869.530,00	20,15
10	Beban Sewa Layanan PPDB Online	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	-
Jumlah		730.398.900,00	1.676.133.970,00	(945.735.070,00)	(56,42)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Terjadi penurunan sebesar Rp945.735.070,00 atau 56,42% dari tahun sebelumnya.

2.3.9 Beban Jasa Konsultasi

Beban Jasa Konsultasi Tahun 2020 sebesar Rp1.540.919.500,00. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.961.546.625,00, tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1.420.627.125,00 atau 47,97%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 164 Rincian Beban Jasa Konsultasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	603.297.500,00	551.621.800,00	51.675.700,00	9,37
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	753.617.700,00	1.602.733.825,00	(849.116.125,00)	(52,98)
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	3.974.300,00	0,00	3.974.300,00	-
4	Beban Jasa Konsultasi	180.030.000,00	807.191.000,00	(627.161.000,00)	(77,70)
Jumlah		1.540.919.500,00	2.961.546.625,00	(1.420.627.125,00)	(47,97)

2.3.10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS tahun ini sebesar Rp58.900.000,00. Dibandingkan dengan beban Tahun 2019 sebesar Rp145.000.000,00, tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp161.100.000,00 atau sebesar 73,23%.

2.3.11 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp697.911.400,00. Jika dibandingkan dengan beban yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.482.290.000,00, tahun ini mengalami penurunan Rp784.378.600,00 atau sebesar 52,92%. Rincian beban tersebut terdiri dari.

Tabel 165 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	675.292.300,00	1.053.029.500,00	(377.737.200,00)	(35,87)
2	Beban bimbingan teknis	22.619.100,00	429.260.500,00	406.641.400	(94,73)
Jumlah		697.911.400,00	1.482.290.000,00	(784.378.600,00)	(52,92)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.3.12 Honorarium PNS

Honorarium PNS Tahun 2020 sebesar Rp6.409.858.984,00, terdiri dari:

Tabel 166 Rincian Honorarium PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.068.633.984,00	21.226.478.662,00	(15.157.844.678,00)	(71,41)
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	341.225.000,00	513.332.000,00	(172.107.000,00)	(33,53)
3	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	0,00	13.750.000,00	(13.750.000,00)	(100,00)
4	Honorarium Penilik	0,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(100,00)
Jumlah		6.409.858.984,00	21.818.360.662,00	(15.408.501.678,00)	(70,62)

Terjadi penurunan sebesar Rp15.408.501.678,00 atau 70,62% dari tahun sebelumnya.

2.3.13 Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS Tahun 2020 sebesar Rp6.308.065.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 167 Rincian Honorarium Non PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	-
2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.972.200.000,00	934.816.500,00	1.037.383.500,00	110,97
3	Upah Tenaga Harian	4.218.440.000,00	580.485.800,00	3.637.954.200,00	626,71
4	Upah Tenaga Borongan	61.425.000,00	0,00	61.425.000,00	-
Jumlah		6.308.065.000,00	1.515.302.300,00	4.792.762.700,00	316,29

Terjadi kenaikan sebesar Rp4.792.762.700,00 atau 316,29% dari tahun sebelumnya.

2.3.14 Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit

Beban Barang Jasa BLUD RSUD dr. Darsono Tahun 2020 sebesar Rp75.247.553.740,78. Beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.504.139.540,82 atau 11,21% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp84.751.693.281,60.

2.3.15 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2020 sebesar Rp27.086.129.204,00. Beban ini berasal dari penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

BOS, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa BOS. Tahun 2019 beban tersebut dirinci sesuai rekening beban penggunaannya. Pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.3.16 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 sebesar Rp197.555.906,00. Terjadi penurunan sebesar Rp241.364.194,00 atau 54,99% dari tahun sebelumnya.

2.3.17 Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 sebesar Rp379.672.150,00.

2.3.18 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tahun 2020 sebesar Rp4.388.098.750,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp3.751.806.459,00 atau 46,09% dari tahun sebelumnya.

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp8.290.991.533,80 mengalami penurunan sebesar Rp729.043.143,20 atau 8,08% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp9.020.034.677,00. Beban pemeliharaan tersebut terdiri dari:

Tabel 168 Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.414.615.399,00	1.716.115.768,00	(301.500.369,00)	(17,57)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.099.372.334,80	2.888.849.694,00	(789.477.359,20)	(27,33)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.770.098.800,00	4.415.069.215,00	355.029.585,00	8,04
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.905.000,00	0,00	6.905.000,00	-
Jumlah		8.290.991.533,80	9.020.034.677,00	(729.043.143,20)	(8,08)

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp41.856.514.505,25 yang



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

terdiri dari:

Tabel 169 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	20.133.230.055,00	23.249.824.758,00	(3.116.594.703,00)	(13,40)
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	21.723.284.450,25	40.137.344.778,00	(18.414.060.327,75)	(45,88)
3	Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	103.058.611,00	(103.058.611,00)	(100,00)
Jumlah		41.856.514.505,25	63.490.228.147,00	(21.633.713.641,75)	(34,07)

Terjadi penurunan sebesar Rp21.633.713.641,75 atau 34,07% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp63.490.228.147,00.

2.6 Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga di Tahun 2020.

2.7 Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi di Tahun 2020.

2.8 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2020 sebesar Rp94.602.887.792,55 mengalami kenaikan sebesar Rp38.899.812.391,29 atau 69,83% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.703.075.401,26. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 170 Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	3.245.441.680,00	483.846.901,26	2.761.594.778,74	570,76
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	773.160.780,55	0,00	773.160.780,55	-
3	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	2.771.729.000,00	(2.771.729.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.881.296.372,00	175.305.000,00	2.705.991.372,00	-
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	86.682.222.000,00	52.272.194.500,00	34.410.027.500,00	65,83
6	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.020.766.960,00	0,00	1.020.766.960,00	-
Jumlah		94.602.887.792,55	55.703.075.401,26	38.899.812.391,29	69,83

2.7.1 Beban Hibah kepada Pemerintah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.245.441.680,00 yang merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.7.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2020 adalah sebesar nilai buku Rp773.160.780,55 yang merupakan hibah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang terdiri dari:

- Binatang Ternak dihibahkan ke Kodim	Rp	27.950.000,00
- Tanah Kebun ke Polres Pacitan	Rp	346.578.938,06
- Bangunan Klinik/Puskesmas dihibahkan ke Desa setempat	Rp	398.631.842,49
- Kendaraan dihibahkan ke beberapa Desa di Kabupaten Pacitan dengan nilai buku sebesar penyusutannya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	Rp773.160.780,55

2.7.3 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

Tahun 2020 tidak ada Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.

2.7.4 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.881.296.372,00 yang terdiri dari.:

- Hibah barang persediaan yang dihibahkan kepada kelompok masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.232.422.372,00
- Hibah 50 ekor Sapi kepada Kelompok Masyarakat oleh Dinas Pertanian	Rp	603.950.000,00
- Hibah Persediaan Barang Lainnya kepada kelompok pengolah dan pemasar Tri Setya Bakti Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	44.924.000,00
Jumlah	Rp	2.881.296.372,00

2.7.5 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp86.682.222.000,00. Beban tersebut merupakan hibah dari APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/332/KPTS/408.12/2020 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/968/KPTS/408.12/2020.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp34.410.027.500,00 atau sebesar 65,83% dari tahun lalu.

2.7.6 Beban Belanja Hibah kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.020.766.960,00. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2020 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.

2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar Rp10.749.680.534,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.952.577.035,00 atau 91,02% dibandingkan dengan beban tahun lalu. Penurunan Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 merupakan penurunan beban terbesar dibandingkan beban yang lain. Beban tersebut merupakan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.12/2020 tentang Penggunaan dan Besaran, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/848/KPTS/408.12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.12/2020.

2.9 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp229.311.322.531,38 mengalami kenaikan sebesar Rp24.491.998.522,86 atau 11,96% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu yaitu sebesar Rp204.819.324.008,52. Beban Penyusutan tahun ini terdiri atas:

Tabel 171 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	228.775.738.913,45	204.118.352.771,69	24.657.386.141,76	12,08
2	Beban Penyisihan Piutang	535.583.617,93	700.971.236,83	(165.387.618,90)	(23,59)
Jumlah		229.311.322.531,38	204.819.324.008,52	24.491.998.522,86	11,96

2.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp228.775.738.913,45 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Tabel 172 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	508.180.812,80	502.914.288,80	5.266.524,00	1,05
2	Beban Penyusutan Aset Tetap.	228.267.558.100,65	203.615.438.482,89	24.652.119.617,76	12,11
Jumlah		228.775.738.913,45	204.118.352.771,69	24.657.386.141,76	12,08

Terdapat kenaikan sebesar Rp24.657.386.141,76 atau 12,08% dari tahun sebelumnya.

2.9.2 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp535.583.617,93 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp165.387.618,90 atau 23,59% dari tahun sebelumnya.

Beban penyisihan piutang pendapatan tersebut terdiri dari.

Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	214.358.451,34	222.610.459,94	(8.252.008,60)	(3,71)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	32.237.595,50	119.597.565,35	(87.359.969,85)	(73,04)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	251.270.447,39	337.853.753,57	(86.583.306,18)	(25,63)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	37.717.123,70	20.909.457,97	16.807.665,73	80,38
Jumlah		535.583.617,93	700.971.236,83	(165.387.618,90)	(23,59)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

- Piutang Pajak Hotel	Rp	256.535,00
- Piutang Pajak Restoran	Rp	1.549.710,00
- Piutang Pajak Hiburan	Rp	1.435.931,00
- Piutang Pajak Reklame	Rp	1.244.900,00
- Piutang Pajak Parkir	Rp	72.063,37
- Piutang Pajak Air Tanah	Rp	145.617,34
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	209.653.694,63



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Jumlah **Rp 214.358.451,34**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 829.435,00
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 28.465.125,00
- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 2.943.035,50

Jumlah **Rp 32.237.595,50**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

- Piutang Jasa Giro (BPKAD) Rp 152.138,32
- Piutang Bunga deposito (BPKAD) Rp 10.017,13
- Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA) Rp 109.144.776,98
- Piutang dari Pengembalian (BPKAD) Rp 94.525.000,00
- Piutang BLUD (RSUD) Rp 46.830.914,96
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro) Rp 600.000,00
- Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (BPKAD) Rp 7.600,00

Jumlah **Rp 251.270.447,39**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih atas piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp37.717.123,70.

2.10 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2020 sebesar Rp180.321.315.575,56 mengalami penurunan sebesar Rp7.684.102.192,24 atau 4,09% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu sebesar Rp188.005.417.767,80. Rincian Beban Transfer tersebut terdiri dari:

Tabel 174 Beban Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.506.223.364,00	3.609.555.383,00	(103.332.019,00)	(2,86)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	985.002.732,00	1.785.592.640,80	(800.589.908,80)	(44,84)
3	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan	341.307.180,00	370.656.200,00	(29.349.020,00)	(7,92)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	175.488.782.299,56	181.243.572.554,00	(5.754.790.254,44)	(3,18)
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	996.040.990,00	(996.040.990,00)	(100,00)
Jumlah		180.321.315.575,56	188.005.417.767,80	(7.684.102.192,24)	(4,09)

Beban transfer Tahun 2020 merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp179.298.664.134,56 dan transaksi non kas sebesar Rp1.022.651.441,00 berupa:

- Penambahan Utang Bagi hasil Pajak	Rp	580.935.914,00
- Penambahan Utang Bagi Hasil Retribusi	Rp	336.090.767,00
- Utang Retribusi Parkir Berlangganan yang belum ditransfer kepada Dinas Pendapatan Jatim dan Polres Pacitan	Rp	105.624.760,00
Jumlah	Rp	1.022.651.441,00

2.11 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2020 sebesar Rp22.952.630.491,04 yang terdiri dari

Tabel 175 Beban Lain - Lain Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	223.348.970,33	228.884.281,96	(5.535.311,63)	(2,42)
2	Beban Lain-lain	22.729.281.520,71	5.254.956.991,14	17.474.324.529,57	332,53
Jumlah		22.952.630.491,04	5.483.841.273,10	17.468.789.217,94	318,55

Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp5.483.841.273,10, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp17.468.789.217,94 atau 318,55%.

2.11.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir tahun berjalan adalah sebesar Rp223.348.970,33 merupakan Pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.11.2 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain tahun berjalan adalah sebesar Rp22.729.281.520,71 merupakan *Extracomptable* dari Belanja Modal dan Hibah Masuk APBN sebesar Rp5.074.085.130,11, penggunaan sisa persediaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.358.862.586,60 dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Wabah Covid-19 sebesar Rp2.296.333.804,00.

Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(78.545.210.075,57)	(3.029.429.698,53)

Selama Tahun 2020 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp78.545.210.075,57. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.029.429.698,53, tahun ini mengalami kenaikan defisit sebesar Rp75.515.780.377,04. Defisit tersebut merupakan selisih dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 176 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	405.715.314,69	230.429.367,08	175.285.947,61	76,07
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	78.950.925.390,26	3.259.859.065,61	75.691.066.324,65	2.321,91
Jumlah		(78.545.210.075,57)	(3.029.429.698,53)	(75.515.780.377,04)	2.492,74

1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp405.715.314,69. Surplus tersebut merupakan Pendapatan dari Penyisihan Piutang Tahun 2019 yang dilunasi selama Tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp230.429.367,08, tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp175.285.947,61 atau 76,07%.

1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas penghapusan persediaan yang telah rusak dan *expired*. Adapun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi penghapusan aset tetap dan aset tetap yang sebelumnya telah direklas ke aset lain-lain terlebih



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

dahulu sebelum terbit Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun berjalan adalah sebesar Rp78.950.925.390,26, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3.259.859.065,61, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp75.691.066.324,65 atau 2.321,91%. Defisit tersebut terdiri dari:

Tabel 177 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	82.229.346,61	59.233.692,36	22.995.654,25	38,82
2	Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	78.868.696.043,65	3.200.625.373,25	75.668.070.670,40	2.364,17
Jumlah		78.950.925.390,26	3.259.859.065,61	75.691.066.324,65	2.321,91

Pos Luar Biasa

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1. Beban Luar Biasa	0, 00	2.951.907.599,00

Pada Tahun 2020 tidak ada beban luar biasa.

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp194.418.525.997,93.

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.624.631.028.789,38 yang terdiri dari:

1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	35.062.233.638,16
1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	18.994.470.321,00
1.3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	2.669.553.062,20
1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	111.733.381.357,02
1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	37.256.152.066,00
1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	45.370.175.403,00
1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	739.879.366.000,00
1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	283.563.426.881,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	202.349.929.000,00
1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	75.229.252.061,00
1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	13.968.849.000,00
1.12	Penerimaan Hibah	Rp	58.554.240.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp	1.624.631.028.789,38

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp13.968.849.000,00 sebagaimana tersebut di atas merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.430.212.502.791,45 yang terdiri dari:

1.1	Pembayaran Pegawai	Rp	636.133.907.404,00
1.2	Pembayaran Barang	Rp	337.205.696.775,89
1.3	Pembayaran Hibah	Rp	87.702.988.960,00
1.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	10.749.680.534,00
1.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	28.900.614.243,00
1.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	3.610.057.615,00
1.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.558.006.960,00
1.8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan	Rp	324.351.550.299,56
Jumlah Arus Kas Keluar		Rp	1.430.212.502.791,45

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp324.351.550.299,563 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp169.732.290.692,71 Tahun 2020 sebesar Rp194.418.525.997,93 mengalami penurunan sebesar Rp24.686.235.305,22.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2020 adalah (Rp140.058.487.669,00). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp0,00.

Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah Rp140.058.487.669,00 dengan rincian sebagai berikut.

2.1	Perolehan Tanah	Rp	934.954.200,00
2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	43.200.008.270,00
2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	56.266.451.465,00
2.4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	33.804.571.317,00
2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	5.852.502.417,00
2.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
2.7	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar			Rp 140.058.487.669,00

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar Rp373.014.484.883,52, pada tahun berjalan adalah sebesar Rp140.058.487.669,00 mengalami penurunan sebesar Rp232.955.997.214,52.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.200.000,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Piutang Pinjaman *Revolving*).

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Anggaran 2020, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari:

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris yang merupakan arus kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp61.243.834.342,00 yang terdiri dari:

- Potongan PFK dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp51.786.983.623,00 berupa potongan PFK 2% Gaji PNSD, PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNSD, PFK 3% IJK Pemkab/Kota, PFK 8% Gaji PNSD, Tabungan Wajib Perumahan, Tunjangan JKK, Tunjangan JKM.
- Potongan Pajak Atas Belanja Langsung sebesar Rp9.456.850.719,00 yang terdiri Pajak-Pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, PPh Final Lainnya.
- Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp61.243.834.342,00 yang terdiri dari pembayaran potongan perhitungan fihak ketiga Tahun 2020.

5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp96.552.034.829,67 yang terdiri dari saldo awal kas tahun 2019 sebesar Rp42.184.796.500,74 ditambah kenaikan kas tahun 2019 sebesar Rp54.367.238.328,93

Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp	74.422.988.355,87
5.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	32.276.393,00
5.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
5.4	Kas di BLUD	Rp	18.369.611.359,67
5.5	Kas di Bendahara JKN	Rp	1.584.048.353,13
5.6	Kas di Bendahara Dana Bos	Rp	2.143.110.368,00
Saldo Akhir Kas		Rp	96.552.034.829,67

Saldo akhir kas di laporan Arus Kas sebesar Rp96.552.034.829,67, tidak sama dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp96.616.177.028,49 terjadi selisih sebesar Rp64.142.198,82.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat selisih Kas di Neraca dengan Saldo Akhir di Laporan Arus Kas dikarenakan pada Laporan Neraca memperhitungkan adanya Saldo Kas yang bukan merupakan komponen SiLPA yaitu berupa kas lainnya yang terdiri dari sebesar Rp55.929.116,00 merupakan sisa kas dari utang PFK kegiatan Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Operasional Sekolah (BOS) dan pengakuan Pendapatan LO di PPKD atas Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering sebesar Rp8.213.082,82 yang penerimaannya belum masuk ke Rekening Kas Daerah yaitu Pajak Jasa Boga/Katering yang dipungut oleh Bendahara BOS pada beberapa Sekolah.

5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp2.161.794.700.411,74 terdiri dari:

Tabel 178 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	2.340.151.840.558,09	2.264.886.070.566,09
Surplus/Defisit - LO	(124.304.756.864,53)	(6.820.141.949,56)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(54.052.383.281,82)	82.085.911.941,56
JUMLAH	2.161.794.700.411,74	2.340.151.840.558,09

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.340.151.840.558,09 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2019 pada Neraca *Audited* tahun 2019.

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2020 sebesar (124.304.756.864,53) merupakan nilai defisit pada Laporan Operasional Tahun 2020 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 yang berasal dari:

▪ Pendapatan Asli Daerah	Rp	165.089.177.800,73	
▪ Pendapatan Transfer	Rp	1.243.364.873.887,00	
▪ Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	71.425.655.257,20	
▪ Jumlah Pendapatan	Rp	1.479.879.616.944,93	
▪ Jumlah Beban	Rp	1.525.639.163.733,89	
▪ Surplus/Defisit dari Operasi			Rp (45.759.546.788,96)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

▪ Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(78.545.210.075,57)
▪ Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit – LO	Rp	(124.304.756.864,53)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2020, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sejumlah Rp54.052.383.281,82 terdiri dari:

I. KOREKSI PENYUSUTAN DAN ASET

1. DINAS PENDIDIKAN	Rp	(34.049.064.301,52)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(34.049.064.301,52)
2. DINAS KESEHATAN	Rp	(718.764.471,77)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(718.764.471,77)
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp	(35.401.163,04)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(35.401.163,04)
4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp	(26.593.933,33)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(26.593.933,33)
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp	1.720.800,00
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	1.720.800,00
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp	64.978.651,25
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	64.978.651,25
7. DINAS SOSIAL	Rp	(172.779.407,19)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(172.704.047,07)
b. Koreksi Kas Lainnya	Rp	(75.360,12)
8. DINAS PANGAN	Rp	(11.691.126,67)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(11.691.126,67)
9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp	(318.688.306,76)
a. Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang		(318.688.306,76)
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	(80.447.984,74)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(80.447.984,74)
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp	(28.957.944,93)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(28.957.944,93)
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	Rp	(507.636.184,88)
a.	Kurang Catat Tanah	Rp	13.536.000,00
b.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(521.172.184,88)
13.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	(1.666.536.784,67)
a.	Kurang Catat Tanah	Rp	112.258.000,00
b.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(1.778.794.784,67)
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	48.932.613,52
a.	Kurang Catat Software		178.830.000,00
b.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang		(129.897.386,48)
15.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Rp	(385.191.561,66)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(385.191.561,66)
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Rp	4.926.620,81
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	4.926.620,81
17.	DINAS PERPUSTAKAAN	Rp	(101.219.394,38)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(101.219.394,38)
18.	DINAS PERIKANAN	Rp	(227.912.923,49)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(227.912.923,49)
19.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	Rp	(1.268.437.221,97)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(1.268.437.221,97)
20.	DINAS PERTANIAN	Rp	(890.218.003,03)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(890.218.003,03)
21.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp	(702.267.862,27)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(702.267.862,27)
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	(11.540.300,77)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(11.540.300,77)	
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp	(1.199.708.106,35)	
a.	Kurang Catat Tanah	Rp	2.144.578.750,00	
b.	Lebih Catat Hutan Lindung	Rp	(2.920.000.000,00)	
c.	Koreksi Kurang Catat	Rp	4.470.833,33	
d.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(428.757.689,68)	
24.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	25.584.833,33	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(48.381.641,67)	
b.	Koreksi Kurang Catat Software	Rp	28.897.000,00	
c.	Koreksi Persediaan Karcis dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Rp	18.810.000,00	
d.	Koreksi Persediaan Karcis 2020	Rp	65.540.200,00	
e.	Koreksi Persediaan Bahan Cetakan	Rp	(39.280.725,00)	
25.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp	(1.376.591,02)	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(1.376.591,02)	
26.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	(100.174.528,59)	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(100.174.528,59)	
27.	INSPEKTORAT	Rp	(80.972.491,87)	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(80.972.491,87)	
28.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	(325.460.126,32)	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(325.460.126,32)	
29.	SEKRETARIAT DPRD	Rp	66.338.191,45	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	66.338.191,45	
30.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp	34.409.468,75	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	34.409.468,75	
31.	KECAMATAN DONOROJO	Rp	(43.787.275,00)	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang		(43.787.275,00)	
32.	KECAMATAN PUNUNG	Rp	66.124.313,06	
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang		66.124.313,06	
33.	KECAMATAN PRINGKUKU	Rp	(0,01)	



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang		(0,01)		
34.	KECAMATAN PACITAN			Rp	(45.134.728,59)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(45.134.728,59)		
35.	KECAMATAN KEBONAGUNG			Rp	(56.128.750,00)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(56.128.750,00)		
36.	KECAMATAN ARJOSARI			Rp	(139.263.518,74)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(139.263.518,74)		
37.	KECAMATAN NAWANGAN			Rp	(3.201.255,30)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(3.201.255,30)		
38.	KECAMATAN BANDAR			Rp	(151.008.214,92)
a.	Koreksi Penyusutan atasreklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(151.008.214,92)		
39.	KECAMATAN TEGALOMBO			Rp	(92.397.377,66)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(92.397.377,66)		
40.	KECAMATAN TULAKAN			Rp	334.618,58
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	334.618,58		
41.	KECAMATAN SUDIMORO			Rp	(149.208.845,97)
a.	Koreksi Penyusutan atas reklas aset menyesuaikan kode barang	Rp	(149.208.845,97)		
II. KOREKSI PIUTANG DAN PENDAPATAN					
1.	DINAS PERHUBUNGAN			Rp	(76.711.515,00)
a.	Koreksi atas saldo piutang	Rp	385.485,00		
b.	Koreksi atas saldo piutang	Rp	(77.097.000,00)		
2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)				(10.548.745.899,00)
a.	Pembatalan Piutang bagi hasil pajak	Rp	(10.519.369.470,00)		
b.	Koreksi kelebihan pengakuan piutang dari PMK Nomor 113/PMK.07/2020	Rp	(29.376.429,00)		
III. KOREKSI INVESTASI					
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)				(310.236.211,16)
a.	Koreksi atas Penyertaan Modal Pada PDAU	Rp	(310.236.211,68)		
b.	Koreksi atas Penyertaan Modal Pada PDAM	Rp	0,52		
JUMLAH KOREKSI ATAS EKUITAS AWAL				Rp	(54.213.514.201,82)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

IV. KOREKSI ATAS BEBAN

1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			161.130.920,00
a.	Koreksi Atas Beban Listrik Desember 2019	Rp	145.494.420,00	
b.	Koreksi atas Beban Pemeliharaan Tahun 2019	Rp	15.636.500,00	

JUMLAH KOREKSI ATAS BEBAN Rp **161.130.920,00**

JUMLAH KOREKSI ATAS EKUITAS AWAL DAN KOREKSI ATAS BEBAN Rp **(54.052.383.281,82)**

4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.161.794.700.411,74. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp178.357.140.146,35 jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.340.151.840.558,09.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis AkruaI pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2020, Pendapatan-LRA sebesar Rp1.624.631.028.789,38 sedangkan pada Pendapatan-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.480.285.332.259,62. Selisih sebesar Rp144.345.696.529,76 terdiri dari:

Tabel 179 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168.459.638.378,38	165.089.177.800,73	3.370.460.577,65
2	Pendapatan Transfer	1.397.617.150.411,00	1.243.364.873.887,00	154.252.276.524,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	58.554.240.000,00	71.425.565.257,20	(12.871.325.257,20)
4	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	405.715.314,69	(405.715.314,69)
	Jumlah	1.624.631.028.789,38	1.480.285.332.259,62	144.345.696.529,76

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp144.345.696.529,76 adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.370.460.577,65 terdiri dari:

Tabel 180 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.062.233.638,16	35.440.231.626,02	(377.997.987,86)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.994.470.321,00	18.210.875.471,00	783.594.850,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.669.553.062,20	2.989.222.323,59	(319.669.261,39)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	111.733.381.357,02	108.448.848.380,12	3.284.532.976,90
	Jumlah	168.459.638.378,38	165.089.177.800,73	3.370.460.577,65

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp377.997.987,86 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 181 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Piutang 2019 (Pengakuan di LRA)	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka (Pengakuan di LRA)	Penambahan Piutang 2020 (Pengakuan di LO)	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka (Pengakuan di LO)	Pendapatan LO bukan Pendapatan LRA	Total Selisih
1	Pajak Hotel	5.243.980,00	0,00	(255.000,00)	0,00	0,00	4.988.980,00
2	Pajak Restoran	11.330.500,00	0,00	(2.016.000,00)	0,00	(8.213.082,82)	1.101.417,18
3	Pajak Hiburan	761.750,00	0,00	(488.600,00)	0,00	0,00	273.150,00
4	Pajak Reklame	0,00	120.551.594,54	(180.000,00)	(194.628.594,59)	0,00	(74.257.000,04)
5	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	2.123.840,00	0,00	(15.168,00)	0,00	0,00	2.108.672,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	167.067.758,00	0,00	(479.280.965,00)	0,00	0,00	(312.213.207,00)
	Jumlah	186.527.828,00	120.551.594,54	(482.235.733,00)	(194.628.594,59)	(8.213.082,82)	(377.997.987,86)

Penerimaan kas Tahun 2020 dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar Rp186.527.828,00 diakui sebagai Pendapatan pada LRA saja karena pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp120.551.594,54, karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2020 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan Pendapatan LO nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp482.235.733,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya akan dilakukan pada saat kas diterima).



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp194.628.594,59, Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan pada Tahun 2020 diakui sebagai Pendapatan LO.

Adapun Pendapatan LO yang tidak menjadi Pendapatan LRA sebesar Rp8.213.082,82 merupakan Pajak Jasa Boga/ Katering yang dipungut oleh Bendahara BOS yang belum disetorkan ke Kas BUD.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Retribusi Daerah sebesar Rp783.594.850,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 182 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Piutang (Transaksi LRA)	Penambahan Piutang (Transaksi LO)	Pengurangan Piutang 2019 untuk Beban Jasa Transaksi Keuangan (Transaksi LO)	Total Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	705.718.000,00	(165.887.000,00)	(265.400,00)	539.565.600,00
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	315.727.000,00	(140.311.000,00)	0,00	175.416.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
4	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.613.250,00	0,00	0,00	5.613.250,00
	Jumlah	1.090.058.250,00	(306.198.000,00)	(265.400,00)	783.594.850,00

Penerimaan kas Tahun 2020 dari pengurangan piutang tahun 2019 sebesar Rp1.090.058.250,00 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan Pendapatan LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sedangkan penambahan piutang sebesar Rp306.198.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya akan dilakukan pada saat kas diterima).

Adapun Pengurangan Piutang 2019 yang pendapatannya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) terjadi pada pos Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp265.400,00.

1.3 Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp319.669.261,39 merupakan laba PDAM sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan. Laba tersebut menambah nilai



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan tidak ada aliran kas masuk ke BUD sehingga hanya diakui pada Laporan Operasional (LO).

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.284.532.976,90 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 183 Penjelasan Selisih Saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Piutang (Transaksi LRA)	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka (Transaksi LRA)	Penambahan Piutang (Transaksi LO)	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka (Transaksi LO)	Hibah Masuk (berupa Barang) (Transaksi LO)	Pengurangan Piutang 2019 untuk Beban Jasa Transaksi Keuangan (Transaksi LO)	Total Selisih
1	Penerimaan Jasa Giro	42.402.825,53	0,00	(30.427.664,42)	0,00	0,00	0,00	11.975.161,11
2	Pendapatan Bunga	9.287.307,71	231.175.000,00	(2.003.424,66)	(334.916.666,67)	0,00	0,00	(96.457.783,62)
3	Pendapatan Denda Pajak	36.900.581,00	0,00	(109.144.776,98)	0,00	0,00	0,00	(72.244.195,98)
4	Pendapatan BLUD	18.615.797.335,00	0,00	(6.286.889.229,00)	(9.546.000,00)	(9.520.427.721,10)	(144.500,00)	2.798.789.884,90
5	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	657.075.000,00	130.706.657,07	(1.520.000,00)	(143.791.746,58)	0,00	0,00	642.469.910,49
	Jumlah	19.361.463.049,24	361.881.657,07	(6.429.985.095,06)	(488.254.413,25)	(9.520.427.721,10)	(144.500,00)	3.284.532.976,90

Penerimaan kas Tahun 2020 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar Rp19.361.463.049,24 diakui sebagai Pendapatan LRA, hal tersebut dikarenakan pengakuan Pendapatan LO-nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp361.881.657,07, karena penerimaan kasnya di Tahun 2020 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan Pendapatan LO-nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp6.429.985.095,06 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan LRA-nya akan dilakukan pada saat kas diterima).

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp488.254.413,25, Pendapatan LRA diakui pada tahun sebelumnya yaitu pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan pada Tahun 2020 diakui sebagai Pendapatan LO.

Pendapatan hibah masuk berupa barang senilai Rp9.520.427.721,10 tidak masuk pada Pendapatan LRA karena bukan transaksi kas. Hibah tersebut merupakan Pendapatan Hibah barang yang diterima oleh RSUD.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Adapun Pengurangan Piutang Tahun 2019 yang pendapatannya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) terjadi pada pos Pendapatan Pendapatan BLUD sebesar Rp144.500,00.

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp154.252.276.524,00 terdiri dari.

Tabel 184 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.106.069.120.350,00	909.460.329.156,00	196.608.791.194,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	202.349.929.000,00	241.344.910.524,00	(38.994.981.524,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	89.198.101.061,00	92.559.634.207,00	(3.361.533.146,00)
	Jumlah	1.397.617.150.411,00	1.243.364.873.887,00	154.252.276.524,00

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp196.608.791.194,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 185 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Perbedaan Kelompok Rekening (Ada di LRA)	Pengurangan Piutang (Transaksi LRA)	Penambahan Piutang (Transaksi LO)	Total Selisih
1	Bagi Hasil Pajak	0,00	4.628.337.516,00	(5.809.705.378,00)	(1.181.367.862,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	11.053.258.456,00	(1.120.848.924,00)	9.932.409.532,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) :	187.857.749.524,00	0,00	0,00	187.857.749.524,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	143.475.785.000,00			
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSI PNSD)	221.125.000,00			
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	10.144.691.750,00			
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOKB)	29.313.115.389,00			
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.908.256.885,00			
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan	2.077.715.000,00			
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	477.972.500,00			
	Dana Pelayanan Kepariwisata	239.088.000,00			
	Jumlah	187.857.749.524,00	15.681.595.972,00	(6.930.554.302,00)	196.608.791.194,00

Pada rincian Pendapatan DAK, terdapat perbedaan rincian rekening pada LRA dan LO. Rincian rekening yang jumlah saldonya sebesar Rp187.857.749.524,00 sebagaimana tabel di atas merupakan rincian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

rekening DAK pada LRA sedangkan pada LO masuk dalam rincian rekening Dana Penyesuaian.

Transaksi pengurangan piutang sebesar Rp15.681.595.972,00 mengakibatkan saldo pendapatan pada LO lebih besar dari saldo pendapatan LRA-nya.

Penambahan piutang sebesar Rp6.930.554.302,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan LRA-nya akan dilakukan pada saat kas diterima).

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp38.994.981.524,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 186 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Perbedaan Kelompok Rekening (Ada di LRA)	Perbedaan Kelompok Rekening (Ada di LO)	Total Selisih
1	Dana Penyesuaian	148.862.768.000,00	(187.857.749.524,00)	(38.994.981.524,00)
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)		(143.475.785.000,00)	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)		(221.125.000,00)	
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)		(10.144.691.750,00)	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOKB)		(29.313.115.389,00)	
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		(1.908.256.885,00)	
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		(2.077.715.000,00)	
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		(477.972.500,00)	
	Dana Pelayanan Kepariwisata		(239.088.000,00)	
	Dana Desa	148.862.768.000,00		
	Jumlah	148.862.768.000,00	(187.857.749.524,00)	(38.994.981.524,00)

Pada rincian Pendapatan Dana Penyesuaian, terdapat perbedaan rincian rekening pada LRA dan LO. Rincian rekening yang jumlah saldonya sebesar Rp187.857.749.524,00 sebagaimana tabel di atas, merupakan rincian rekening Dana Penyesuaian pada LO sedangkan pada LRA masuk dalam rincian rekening DAK.

Khusus untuk Dana Desa sebesar Rp148.862.768.000,00, pengakuannya hanya pada LRA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan sebesar Rp3.361.533.146,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 187 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Piutang (Transaksi LRA)	Penambahan Piutang (Transaksi LO)	Total Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.181.891.594,00	(7.543.424.740,00)	(3.361.533.146,00)
	Jumlah	4.181.891.594,00	(7.543.424.740,00)	(3.361.533.146,00)

Penerimaan kas Tahun 2020 dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar Rp4.181.891.594,00 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan Pendapatan LO nya pada tahun lalu. Adapun penambahan Piutang sebesar Rp7.543.424.740,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya pada saat kas diterima).

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar (Rp12.871.325.257,20) terdiri dari:

Tabel 188 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	58.554.240.000,00	63.872.360.543,20	(5.318.120.543,20)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7.548.704.714,00	(7.548.704.714,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
	JUMLAH	58.554.240.000,00	71.425.565.257,20	(12.871.325.257,20)

3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah sebesar (Rp5.318.120.543,20) merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah - 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya sebesar (Rp7.548.704.714,00) merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah - 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar (Rp4.500.000,00) merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa barang sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO angka 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, angka 1.3.1 Pendapatan Hibah, dan angka 3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp405.715.314,69 merupakan pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2020. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA sebesar Rp1.624.631.028.789,38 dengan saldo Pendapatan dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada LO sebesar Rp1.474.837.449.637,03 terdapat selisih senilai Rp149.793.579.152,35 yang dirinci sebagai berikut:

1. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun 2019)	Rp	40.501.536.693,24
2. Penambahan Piutang	Rp	(17.008.444.052,06)
3. Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	(682.883.007,84)
4. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	482.433.251,62
5. Hibah Masuk berupa Barang	Rp	(21.947.493.435,10)
6. Transfer Dana Desa (Transaksi LRA & tidak masuk LO)	Rp	148.862.768.000,00
7. Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering (Transaksi LO & tidak masuk LRA)	Rp	(8.213.082,82)
8. Pengurangan Pendapatan dari Pelunasan Piutang 2019 karena dipotong untuk Jasa Transfer	Rp	(409.900,00)
9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(405.715.314,69)
Jumlah	Rp	149.793.579.152,35



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Sedangkan Pendapatan LRA yang seluruh penerimaannya berupa Kas sebesar Rp1.624.631.028.789,38.

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Penerimaan Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas karena adanya SILPA Tahun Lalu sebesar Rp42.184.796.500,74, dan
2. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) sebesar Rp7.200.000,00 merupakan Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman atas Piutang *Revolving* (pada Dinas Pertanian).

5.2.3 Penerapan Basis Akrual Pada Beban, Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis Akrual Pada Beban, Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.570.270.990.460,45 sedangkan Beban, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.604.590.089.124,15. Sehingga terdapat selisih sebesar (Rp34.319.098.663,70) yang terdiri dari.

Tabel 189 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pegawai	636.133.907.404,00	636.133.907.404,00	0,00
2	Barang/Jasa (Khusus Persediaan)	79.536.183.378,50	81.274.908.670,79	(1.738.725.292,29)
3	Barang/Jasa (Khusus Jasa)	210.640.890.686,34	220.145.004.695,52	(9.504.114.009,18)
4	Pemeliharaan	7.494.951.909,80	8.290.991.533,80	(796.039.624,00)
5	Perjalanan Dinas	39.533.670.801,25	41.856.514.505,25	(2.322.843.704,00)
6	Hibah	87.702.988.960,00	94.602.887.792,55	(6.899.898.832,55)
7	Bantuan Sosial	10.749.680.534,00	10.749.680.534,00	0,00
8	Modal	140.058.487.669,00	0,00	140.058.487.669,00
9	Penyusutan	0,00	229.311.322.531,38	(229.311.322.531,38)
10	Transfer	329.519.614.874,56	180.321.315.575,56	149.198.299.299,00
11	Lain-lain	0,00	22.952.630.491,04	(22.952.630.491,04)
12	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	78.950.925.390,26	(78.950.925.390,26)
13	Luar Biasa/Tak Terduga	28.900.614.243,00	0,00	28.900.614.243,00
	Jumlah	1.570.270.990.460,45	1.604.590.089.124,15	(34.319.098.663,70)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1. Selisih Belanja Barang (Khusus Persediaan) dengan Beban Persediaan

Selisih Beban Persediaan/Belanja Barang (Khusus Persediaan) sebesar (Rp1.738.725.292,29) terdiri dari:

Tabel 190 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Bahan Pakai Habis	20.316.933.547,00	21.549.374.269,04	(1.232.440.722,04)
2	Bahan/Material	12.456.677.993,50	17.544.658.499,87	(5.087.980.506,37)
3	Penggantian Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	1.642.700.781,00	1.624.889.281,00	17.811.500,00
4	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	582.509.260,00	586.874.260,00	(4.365.000,00)
5	Cetak	5.524.382.416,00	6.245.237.122,03	(720.854.706,03)
6	Makanan dan Minuman	10.794.740.101,00	11.876.594.789,00	(1.081.854.688,00)
7	Pakaian Dinas dan Atributnya	1.108.453.250,00	1.108.453.250,00	0,00
8	Pakaian Kerja	1.320.960.162,00	1.813.375.194,85	(492.415.032,85)
9	Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.183.077.100,00	1.239.577.100,00	(56.500.000,00)
10	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.555.748.768,00	17.635.874.905,00	6.919.873.863,00
11	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah	79.536.183.378,50	81.274.908.670,79	(1.738.725.292,29)

1.1 Selisih Belanja dan Beban Bahan Pakai Habis

Selisih Beban/Belanja Bahan Pakai Habis sebesar (Rp1.232.440.722,04) dijelaskan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 191 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban Bahan Pakai Habis pada LO Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Persediaan Awal (Pengakuan LO)	Penggunaan Persediaan dari Hibah (Pengakuan LO)	Belanja Barang Jasa (Persediaan) menjadi Sisa Persediaan 2020	Belanja Barang Jasa (Persediaan) Dikapitalisasi	Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	Total Selisih
1	Alat tulis kantor	(235.089.608,10)	0,00	373.303.384,87	0,00	(12.915.000,00)	125.298.776,77
2	Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	(61.372.862,00)	0,00	20.944.613,00	0,00	(810.000,00)	(41.238.249,00)
3	Perangko, materai dan benda pos lainnya	(39.000,00)	0,00	0,00	0,00	(243.000,00)	(282.000,00)
4	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	(153.197.735,00)	(107.800,00)	175.463.166,00	11.748.000,00	(36.840.500,00)	(2.934.869,00)
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.216.000,00)	(86.216.000,00)
6	Pengisian tabung gas	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
7	Peralatan Penunjang Kesehatan	0,00	0,00	1.330.878.636,19	12.760.000,00	(2.568.387.017,00)	(1.224.748.380,81)
8	Dokumentasi/Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	(720.000,00)	(720.000,00)
	Jumlah	(449.699.205,10)	(107.800,00)	1.900.589.800,06	24.508.000,00	(2.707.731.517,00)	(1.232.440.722,04)

Pengurangan (penggunaan) persediaan awal sebesar Rp449.699.205,10 menambah beban dan tidak berpengaruh pada saldo belanja pada LRA-nya karena penggunaan ini bersifat non kas dan hasil belanja tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa Alat tulis kantor pada OPD:

1	Dinas Pendidikan	Rp	1.635.150,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	18.428.200,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan		
3	Penataan Ruang	Rp	10.437.650,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.247.750,00
	Dinas Kependudukan dan		
5	Pencatatan Sipil	Rp	155.267.892,10
6	Dinas Perikanan	Rp	149.000,00
7	Dinas Pertanian	Rp	2.706.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan		
8	dan Aset Daerah	Rp	36.343.450,00
	Badan Kepegawaian,		
	Pendidikan dan Pelatihan		
9	Daerah	Rp	1.531.266,00
10	Inspektorat Daerah	Rp	799.700,00
11	Sekretariat Daerah	Rp	4.543.550,00
	Jumlah	Rp	235.089.608,10

- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp61.372.862,00 pada OPD:

1	Dinas Pendidikan	Rp	4.338.675,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	693.000,00
3	Dinas Perhubungan	Rp	56.339.787,00
4	Dinas Pekerjaan Umum		1.400,00
	Jumlah	Rp	61.372.862,00

- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa perangkat, materi dan benda pos lainnya sebesar Rp39.000,00 pada Dinas Kesehatan.

- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp153.197.735,00 pada OPD berikut:

1	Dinas Pendidikan	Rp	1.536.645,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	6.681.090,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	144.980.000,00
	Jumlah	Rp	153.197.735,00

Penggunaan persediaan dari hibah masuk pada RSUD dr. Darsono sebesar Rp107.800,00 menambah saldo beban dan tidak menambah belanja pada LRA (bukan transaksi kas).

Penambahan sisa persediaan Tahun 2020 yang berasal dari pengadaan diakui pada belanja LRA sebesar Rp1.900.589.800,06 yang terdiri dari:

- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Alat tulis kantor sebesar Rp373.303.384,87 pada OPD:

1	Dinas Pendidikan	Rp	3.110.900,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	24.516.920,67



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

	Dinas Pekerjaan Umum dan		2.150.500,00
3	Penataan Ruang	Rp	
4	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.728.100,00
	Dinas Kependudukan dan		
5	Pencatatan Sipil	Rp	300.551.704,20
6	Dinas Perhubungan	Rp	7.204.040,00
	Badan Pengelolaan Keuangan		
7	dan Aset Daerah	Rp	28.504.960,00
	Badan Kepegawaian,		
	Pendidikan dan Pelatihan		
8	Daerah	Rp	526.460,00
9	Inspektorat Daerah	Rp	997.000,00
10	Sekretariat Daerah	Rp	4.012.800,00
	Jumlah	Rp	373.303.384,87
- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp20.944.613,00 pada OPD:			
1	Dinas Pendidikan	Rp	5.190.350,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	3.539.250,00
3	Dinas Perhubungan	Rp	12.215.013,00
	Jumlah	Rp	20.944.613,00
- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp175.463.166,00 pada OPD:			
1	Dinas Pendidikan	Rp	2.268.200,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	5.717.966,00
3	RSUD dr. Darsono	Rp	71.040.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup		96.437.000,00
	Jumlah	Rp	175.463.166,00
- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Peralatan Penunjang Kesehatan sebesar Rp1.330.878.636,19 pada OPD:			
1	Dinas Kesehatan	Rp	1.270.878.636,19
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO	Rp	60.000.000,00
	Jumlah	Rp	1.330.878.636,19
mengurangi Beban pada LO-nya, karena pada waktu pembelian sudah dicatat sebagai Beban Persediaan.			
Belanja Barang Jasa (Persediaan) Dikapitalisasi sebesar Rp24.508.000,00 diakui pada beban LO.			
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diakui sebagai Beban Bahan Pakai Habis pada LO sebesar Rp2.707.011.517,00.			



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.2 Selisih Belanja dan Beban Bahan/Material

Selisih Beban/Belanja Bahan/Material sebesar (Rp5.087.980.506,37) dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 192 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban Bahan/Material pada LO Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Persediaan Awal (Pengakuan LO)	Penggunaan Persediaan dari Hibah (Pengakuan LO)	Belanja Barang Jasa (Persediaan) menjadi Sisa Persediaan 2020	Belanja Barang Jasa (Persediaan) Dikapitalisasi	Reklas (Pengakuan pada Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit)	Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	Total Selisih
1	Bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.700.000,00)	(15.700.000,00)
2	Bahan obat-obatan	(7.699.860.283,41)	(6.288.660.321,40)	8.062.288.679,16	0,00	1.069.255.286,78	(254.070.330,00)	(5.111.046.968,87)
3	Bahan kimia	(24.824.800,00)	(40.000.000,00)	123.200.275,00	0,00	0,00	(175.090.650,00)	(116.715.175,00)
4	Bibit Ikan dan Pakan	(36.322.998,00)	0,00	23.847.846,00	0,00	0,00	0,00	(12.475.152,00)
5	Baku Perikanan	0,00	0,00	0,00	6.011.280,00	0,00	0,00	6.011.280,00
6	Bahan Makanan	(333.838,50)	0,00	194.978.868,00	0,00	0,00	(32.499.520,00)	162.145.509,50
7	Praktik/Peraga/Pelatihan/Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
	Jumlah	(7.761.341.919,91)	(6.328.660.321,40)	8.404.315.668,16	6.011.280,00	1.069.255.286,78	(477.560.500,00)	(5.087.980.506,37)

Pengurangan (Pengggunaan) persediaan awal menambah Beban dan tidak berpengaruh pada saldo belanja pada LRA sebesar Rp7.761.341.919,91, yang terdiri dari:

- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa bahan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.699.860.283,41, baik dari sisa persediaan pada Dinas Kesehatan sendiri maupun Obat-Obatan sisa persediaan Tahun 2019 dari KBPP.
- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa bahan kimia pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.824.800,00.
- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa Bibit Ikan dan Pakan pada Dinas Perikanan sebesar Rp36.322.998,00.
- Pengurangan (penggunaan) persediaan awal berupa Bahan Makanan pada Dinas Pangan sebesar Rp333.838,50.

Penggunaan persediaan dari hibah masuk dari sebesar Rp6.328.660.321,40 yang menambah saldo beban dan tidak menambah belanja pada LRA (bukan transaksi kas) terdiri dari:

- Penggunaan bahan obat-obatan dari hibah masuk di Dinas Kesehatan sebesar Rp5.317.159.523,40 dan RSUD sebesar Rp971.500.798,00.
- Penggunaan bahan kimia dari hibah masuk di RSUD sebesar Rp40.000.000,00.

Penambahan sisa persediaan Tahun 2020 yang berasal dari pengadaan diakui pada belanja LRA sebesar Rp8.404.315.668,16 yang terdiri dari:

- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Bahan obat-obatan sebesar Rp8.062.288.679,16 pada OPD berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1	Dinas Kesehatan	Rp	8.032.929.679,16
2	Dinas Pertanian	Rp	29.359.000,00
Jumlah		Rp	8.062.288.679,16

- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Bahan kimia sebesar Rp123.200.275,00 pada Dinas Kesehatan.
- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Bibit Ikan dan Pakan sebesar Rp23.847.846,00 pada Dinas Perikanan.
- Sisa persediaan Tahun 2020 dari pengadaan berupa Bahan Makanan sebesar Rp194.978.868,00 pada Dinas Pangan.

Belanja Barang Jasa (Persediaan) Dikapitalisasi sebesar Rp6.011.280,00 diakui pada beban LO.

Reklas pengakuan penggunaan bahan obat-obatan pengadaan Belanja bahan obat-obatan (Dinas Kesehatan) pada Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp1.069.255.286,78, mengurangi Beban Bahan/Material.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diakui sebagai Beban Persediaan Bahan/Material pada LO sebesar Rp477.560.500,00.

1.3 Selisih Belanja dan Beban Penggantian Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional

Selisih Belanja Penggantian Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional dengan Beban Penggantian Suku Cadang sebesar Rp17.811.500,00 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan:

- 1.3.1 Penggunaan persediaan awal yang menambah Beban pada LO-nya dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA-nya sebesar Rp7.463.500,00,
- 1.3.2 Belanja Barang Jasa (Persediaan) Dikapitalisasi sebesar Rp18.370.000,00 diakui pada beban LO,
- 1.3.3 Belanja Penggantian Suku Cadang (LRA) pada JKN diakui pada Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.905.000,00.

1.4 Selisih Belanja dan Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Selisih Belanja dan Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas sebesar (Rp4.365.000,00) merupakan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diakui sebagai Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas pada LO.

1.5 Selisih Belanja dan Beban Cetak

Selisih Belanja dan Beban Cetak sebesar (Rp720.854.706,03) dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Cetak dengan Beban Cetak karena:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 1.4.1 Penggunaan persediaan awal yang menambah Beban dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA sebesar Rp216.225.023,00,
- 1.4.2 Penggunaan persediaan dari hibah masuk dari Pemerintah Pusat pada OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp452.112.500,00 yang menambah Beban dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA,
- 1.4.3 Pengeluaran kas atas Belanja Cetak menjadi sisa persediaan akhir sebesar Rp101.456.716,97, sehingga tidak menjadi beban tahun ini.
- 1.4.4 Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Beban Cetak sebesar Rp153.973.900,00 yang diakui sebagai Beban Cetak pada LO.

1.6 Selisih Belanja Makanan dan Minuman dengan Beban Makanan dan Minuman

Selisih Belanja Makanan dan Minuman dengan Beban Makanan dan Minuman sebesar Rp1.081.854.688,00 yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Makanan dan Minuman pada LO.

1.7 Selisih Belanja Pakaian Kerja dan Beban Pakaian Kerja

Selisih Belanja Pakaian Kerja dan Beban Pakaian Kerja sebesar (Rp492.415.032,85) yang dijelaskan sebagai berikut :

- Sebesar Rp315.724.117,15 merupakan pengadaan tahun 2010 yang menjadi sisa persediaan akhir pada RSUD, sehingga pengakuan ada pada Belanja (LRA)
- Sebesar Rp808.139.150,00 merupakan penggunaan Belanja Tak Terduga (LRA) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Pakaian Kerja pada Laporan Operasional (LO).

1.8 Selisih Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu dengan Beban Pakaian Khusus dan hari-Hari Tertentu

Selisih Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu dengan Beban Pakaian Khusus dan hari-Hari Tertentu sebesar Rp56.500.000,00 yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu pada LO.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

1.9 Selisih Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Selisih Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp6.919.873.863,00 dijelaskan sebagai berikut :

- Penggunaan persediaan dari hibah masuk pada RSUD sebesar Rp33.663.980,00 yang diakui pada Beban (LO) tidak berpengaruh pada saldo belanja pada LRA.
- Pengadaan menjadi sisa persediaan Tahun 2010 sebesar Rp10.697.597.843,00 yang diakui pada Belanja (LRA)
- Dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp223.765.000,00 yang diakui pada Belanja (LRA)
- Penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) yang diakui sebagai Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (LO) sebesar Rp3.967.825.000,00.

2. Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa

Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa sebesar (Rp9.504.114.009,18) terdiri dari:

Tabel 193 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Beban/Belanja Jasa Kantor	76.919.128.255,74	87.196.074.336,74	(10.276.946.081,00)
2	Beban/Belanja Premi Asuransi	6.403.541.956,00	6.403.541.956,00	0,00
3	Beban/Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.109.149.667,00	1.109.149.667,00	0,00
4	Beban/Belanja Penggandaan	1.651.934.434,00	1.654.626.934,00	(2.692.500,00)
5	Beban/Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang / Parkir	469.105.867,00	469.105.867,00	0,00
6	Beban/Belanja Sewa Sarana Mobilitas	228.039.400,00	259.442.400,00	(31.403.000,00)
7	Beban/Belanja Sewa Alat Berat	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
8	Beban/Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	713.808.900,00	730.398.900,00	(16.590.000,00)
9	Beban/Belanja Jasa Konsultansi	1.540.919.500,00	1.540.919.500,00	0,00
10	Beban/Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
11	Beban/Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	697.911.400,00	697.911.400,00	0,00
12	Honorarium PNS	6.409.858.984,00	6.409.858.984,00	0,00
13	Honorarium Non PNS	6.256.715.000,00	6.308.065.000,00	(51.350.000,00)
14	Beban/Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit & Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	76.086.079.312,60	75.247.553.740,78	838.525.571,82
15	Beban/Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	577.228.056,00	577.228.056,00	0,00
16	Jasa Profesi/JasaTenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	4.388.098.750,00	4.388.098.750,00	0,00
17	Belanja/Beban Barang dan Jasa BOS	27.130.471.204,00	27.086.129.204,00	44.342.000,00
	Jumlah	210.640.890.686,34	220.145.004.695,52	(9.504.114.009,18)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.1 Belanja dan Beban Jasa Kantor

Selisih Belanja dan Beban Jasa Kantor sebesar (Rp10.276.946.081,00) dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 194 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor pada LRA dan Beban Jasa Kantor pada LO Tahun 2020
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pelunasan Utang Tahun 2019 (Pengakuan LRA)	Penambahan Utang Tahun 2020 (Pengakuan LO)	Beban Jasa Bank dari Pengurangan Piutang (Pengakuan LO)	Beban Jasa dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	Total Selisih
1	Beban/Belanja telepon	38.250.978,00	(9.153.488,00)	0,00	0,00	29.097.490,00
2	Beban/Belanja air	0,00	(7.965.110,00)	0,00	(2.100.000,00)	(10.065.110,00)
3	Beban/Belanja listrik	711.603.464,00	(39.786.061,00)	0,00	0,00	671.817.403,00
4	Beban/Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	0,00	0,00	(9.100.325,00)	(9.100.325,00)
5	Beban/Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00	(265.400,00)	0,00	(265.400,00)
6	Beban/Belanja Software	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
7	Beban/Belanja Pemasangan Iklan	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	(300.000,00)
8	Beban/Belanja Layanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	(1.091.554.868,00)	(1.091.554.868,00)
9	Beban/Belanja Jasa Medis/Paramedis	0,00	0,00	0,00	(3.462.696.796,00)	(3.462.696.796,00)
10	Beban/Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	(1.615.000,00)	(1.615.000,00)
11	Beban/Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	0,00	0,00	(170.000,00)	(170.000,00)
12	Beban/Belanja Jasa Teknis	0,00	0,00	0,00	(422.525.000,00)	(422.525.000,00)
13	Beban/Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	(122.855.975,00)	(122.855.975,00)
14	Beban/Belanja Jasa Profesi	0,00	0,00	0,00	(5.100.000,00)	(5.100.000,00)
15	Beban/Belanja Insentif Nakes Yang Menangani COVID-19	0,00	0,00	0,00	(5.841.612.500,00)	(5.841.612.500,00)
Jumlah		749.854.442,00	(56.904.659,00)	(265.400,00)	(10.969.630.464,00)	(10.276.946.081,00)

Terdapat realisasi Belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp749.854.442,00 yang digunakan untuk pembayaran Utang Belanja Jasa berupa Belanja Telepon sebesar Rp38.250.978,00, Belanja Listrik sebesar Rp711.603.464,00 yang mengurangi Beban pada LO-nya.

Pengakuan penambahan utang merupakan transaksi non kas (tidak berpengaruh pada saldo belanja LRA) dan hanya menambah Beban pada LO sebesar Rp56.904.659,00 yang terdiri dari Utang Belanja Telepon sebesar Rp9.153.488,00, Belanja Air sebesar Rp7.965.110,00 dan Belanja Listrik sebesar Rp39.786.061,00.

Pengeluaran untuk Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) atas pelunasan piutang 2019 yang dipotong langsung dari penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp265.400,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Jasa Kantor pada LO sebesar Rp10.969.630.464,00.

2.2 Belanja Penggandaan dan Beban Penggandaan

Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2020 sebesar Rp2.692.500,00 diakui sebagai Beban Penggandaan pada LO.

2.3 Selisih Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Beban Sewa Sarana Mobilitas

Selisih Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar (Rp31.403.000,00) yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Sewa Sarana Mobilitas pada LO.

2.4 Selisih Belanja Sewa Alat Berat dan Beban Sewa Alat Berat

Selisih Belanja Sewa Alat Berat dengan Beban Sewa Alat Berat sebesar (Rp8.000.000,00) yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Sewa Alat Berat pada LO.

2.5 Selisih Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Selisih Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar (Rp16.590.000,00) yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada LO.

2.6 Selisih Belanja dan Beban Honorarium Non PNS

Selisih Belanja dan Beban Honorarium Non PNS sebesar (Rp51.350.000,00) yang merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 yang diakui sebagai Beban Honorarium Non PNS pada LO.

2.7 Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit

Selisih Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp838.525.571,82 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara:

2.7.1 Penggunaan persediaan awal RSUD (yang menambah Beban pada LO dan tidak berpengaruh pada Belanja LRA) sebesar Rp6.828.919.222,95 yang terdiri dari penggunaan:

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1. Persediaan Alat Tulis Kantor | Rp | 78.573.701,00 |
| 2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampupijar, battery kering) | Rp | 40.713.431,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

3.	Persediaan Perangko, materai dan benda pos	Rp	174.000,00
4.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	44.068.176,00
5.	Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	5.676.826.750,15
6.	Persediaan Bahan kimia	Rp	872.911.734,30
7.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	19.836.220,00
8.	Persediaan Bahan Cetakan	Rp	85.724.644,00
9.	Persediaan Barang Lainnya..	Rp	10.090.566,50
Jumlah		Rp	6.828.919.222,95

2.7.2 Penggunaan Persediaan Obat-Obatan hibah masuk yang diterima oleh Dinas Kesehatan (dimutasi ke RSUD) sebesar Rp959.356.034,50. Transaksi tersebut menambah Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA.

2.7.3 Penggunaan Persediaan Obat-Obatan hibah masuk yang diterima oleh Dinas KBPP (dimutasi ke RSUD) sebesar Rp1.400.000,00. Transaksi tersebut menambah Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA.

2.7.4 Penambahan Utang Tahun 2020 yang menambah Beban pada LO dan tidak mempengaruhi Belanja LRA sebesar Rp3.656.626.896,40 yang terdiri dari:

1.	<i>Utang Pihak Ketiga :</i>	Rp	1.923.324.925,40
	Utang Obat	Rp	660.243.214,40
	Utang Gas Medis	Rp	250.457.032,00
	Utang BHP Farmasi	Rp	749.021.769,00
	Utang BHP Laboratorium	Rp	43.500.000,00
	Utang Mamin Pasien	Rp	8.115.756,00
	Utang Embalase	Rp	19.200.000,00
	Utang Darah	Rp	84.405.000,00
	Utang Alat Tulis Kantor	Rp.	9.845.000,00
	Utang Bahan Kebersihan dan Alat Kebersihan	Rp	20.143.200,00
	Utang Jasa Pihak Ketiga	Rp	67.651.980,00
	Utang Bahan Bakar Ambulance	Rp	1.056.904,00
	Utang Makan Minum Pegawai	Rp	99.440,00
	Utang Perlengkapan Pasien	Rp	8.153.130,00
	Utang Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	820.500,00
	Utang Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Rp	612.000,00
2.	<i>Jasa Yang Masih Harus Dibayar:</i>	Rp	1.733.301.971,00
	Biaya Jasa Langganan Telepon	Rp	2.293.491,00



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Biaya Jasa Kebersihan	Rp	97.670.774,00
Biaya Jasa Langganan Listrik	Rp	129.129.200,00
Biaya Jasa Langganan Air	Rp	250.190,00
Biaya Pelayanan	Rp	1.497.525.616,00
Biaya Jasa Langganan Internet	Rp	6.432.700,00

2.7.5 Pengeluaran untuk Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) atas pelunasan piutang 2019 yang dipotong langsung dari penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp144.500,00.

2.7.6 Terdapat realisasi Belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp45.781.333,00 menjadi Beban Dibayar Dimuka. Belanja tersebut digunakan untuk pembayaran Belanja Pelatihan dan Premi Asuransi.

2.7.7 Terdapat realisasi Belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp5.615.489.596,05 yang digunakan untuk pembayaran Utang Belanja 2019.

2.7.8 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD RSUD yang menjadi sisa persediaan akhir sebesar Rp6.616.094.904,59 dan tidak menjadi beban tahun ini terdiri dari:

1. <i>Persediaan Bahan Pakai Habis</i>	Rp	207.868.753,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	61.728.726,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampupijar, battery kering)	Rp	39.252.145,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	42.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	106.550.882,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	Rp	295.000,00
2. <i>Persediaan Bahan / Material</i>	Rp	6.307.703.774,59
Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	5.364.521.114,59
Persediaan Bahan kimia	Rp	924.618.340,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	18.564.320,00
3. <i>Persediaan Barang Lainnya</i>	Rp	100.522.377,00
Persediaan Bahan Cetakan	Rp	86.447.657,00
Persediaan Barang Lainnya	Rp	14.074.720,00

2.7.9 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD RSUD yang menjadi sisa persediaan akhir kedaluwarsa dan dihapus dari Aset Lancar senilai Rp7.606.392,03 sehingga mengurangi Beban Barang Jasa BLUD RSUD Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

2.8 Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS

Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp44.342.000,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang menjadi sisa persediaan Tahun 2020 diakui pada LRA dan tidak menjadi Beban pada LO, terdiri dari:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	19.831.600,00
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	2.617.000,00
3. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	9.221.600,00
4. Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	4.747.500,00
5. Persediaan Barang Lainnya..	Rp	7.924.300,00
Jumlah		Rp 44.342.000,00

3. Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dan Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebesar (Rp796.039.624,00). Selisih tersebut merupakan selisih pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena adanya kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp373.731.876,00 oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Diakui pada Belanja LRA dan tidak menambah Beban LO, sebesar Rp6.905.000,00 merupakan Belanja Penggantian Suku Cadang yang Bebannya diakui pada Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Dan sebesar Rp1.162.866.500,00 merupakan realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) yang diakui pada Beban Pemeliharaan LO.

4. Selisih Belanja Barang (Khusus Perjalanan Dinas) dan Beban Perjalanan Dinas

Selisih sebesar (Rp2.322.843.704,00) merupakan penggunaan Belanja Tak Terduga yang diakui sebagai Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Laporan Operasional (LO) dalam rangka penanganan bencana di Pacitan dan wabah Covid-19.

5. Selisih Belanja dan Beban Hibah

Selisih Belanja dengan Beban Hibah sebesar (Rp6.899.898.832,55) yang terdiri dari.

Tabel 195 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada LO Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Beban/Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	3.245.441.680,00	(3.245.441.680,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	773.160.780,55	(773.160.780,55)
3	Beban/Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.881.296.372,00	(2.881.296.372,00)
3	Beban/Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	86.682.222.000,00	86.682.222.000,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.020.766.960,00	1.020.766.960,00	0,00
	JUMLAH	87.702.988.960,00	94.602.887.792,55	(6.899.898.832,55)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Selisih tersebut merupakan pengakuan hibah keluar berupa Aset Tetap yang tidak dicatat dalam LRA sebagaimana berikut:

5.1 Selisih Beban Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp3.245.441.680,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

5.2 Selisih Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp773.160.780,55.

5.3 Selisih Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.881.296.372,00.

6. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp140.058.487.669,00 hanya terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja tersebut dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp131.983.563.802,63 selisihnya sebesar Rp8.074.923.866,37 tidak dikapitalisasi.

7. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar (Rp229.311.322.531,38) merupakan pengakuan beban bersifat non kas, sehingga tidak ada dalam LRA. Beban tersebut terdiri dari.

7.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp (228.775.738.913,45)
7.2	Beban Penyisihan Piutang	Rp (535.583.617,93)
	Jumlah	Rp (229.311.322.531,38)

8. Selisih Belanja dan Beban Transfer

Selisih Belanja Transfer dengan Beban Transfer sebesar Rp149.198.299.299,00 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Transfer dengan Beban Transfer karena adanya pengakuan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD yaitu pada Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp148.862.768.000,00, yang mengakibatkan penambahan saldo belanja pada LRA dan tidak menambah saldo Beban pada LO.

Tahun 2020 terdapat realisasi Belanja Transfer yang digunakan untuk pembayaran Utang Transfer tahun lalu yang mengurangi Beban pada LO-nya sebesar Rp1.358.182.740,00 dengan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp684.770.165,00 dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp673.412.575,00.

Adapun penambahan utang beban yang mengakibatkan nilai Beban LO lebih besar dari Belanja LRA-nya sebesar Rp1.022.651.441,00 telah dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - angka 2. Beban, dan angka 2.9 Beban Transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

9. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain hanya terdapat pada LO sebesar Rp22.952.630.491,04. Pengakuan beban Lain-lain bersifat non kas, sehingga tidak ada dalam LRA. Beban tersebut terdiri dari:

9.1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	Rp	223.348.970,33
9.2	Beban Lain-lain	Rp	22.729.281.520,71
	Jumlah	Rp	22.952.630.491,04

10. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hanya terdapat pada LO sebesar Rp78.950.925.390,26. Yang terdiri dari:

10.1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	82.229.346,61
10.2	Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	Rp	78.868.696.043,65
	Jumlah	Rp	78.950.925.390,26

10.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pengakuan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp82.229.346,61 tersebut merupakan defisit atas penghapusan persediaan *expired* pada RSUD.

10.2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pengakuan Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp78.868.696.043,65 merupakan penghapusan Aset Tetap sebesar nilai buku dan Aset Lainnya.

11. Selisih Belanja Tak terduga dan Beban Luar Biasa

Selisih sebesar Rp28.900.614.243,00 terjadi karena realisasi Belanja Tak Terduga tidak diakui sebagai Beban Luar Biasa pada LO. Dari Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp28.900.614.243,00 diakui sebagai.

-	Beban Persediaan	Rp	9.257.949.755,00
-	Beban Jasa	Rp	11.079.665.964,00
-	Beban Pemeliharaan	Rp	1.162.866.500,00
-	Beban Perjalanan Dinas	Rp	2.322.843.704,00
-	Beban Lain-lain	Rp	2.296.333.804,00
-	Persediaan (Neraca)	Rp	217.266.504,00
-	Aset Tetap (Neraca)	Rp	2.563.688.012,00
	Jumlah	Rp	28.900.614.243,00

5.2.4 Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan

Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 tidak ada transaksi.



VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu seluas 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 196 pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan
1	Donorojo	12	109,09
2	Punung	13	108,81
3	Pringkuku	13	132,93
4	Pacitan	25	77,11
5	Kebonagung	19	124,85
6	Arjosari	17	117,06
7	Nawangan	9	124,06
8	Bandar	8	117,34
9	Tegalombo	11	149,26
10	Tulakan	16	161,62
11	Ngadirojo	18	95,91
12	Sudimoro	10	71,86

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

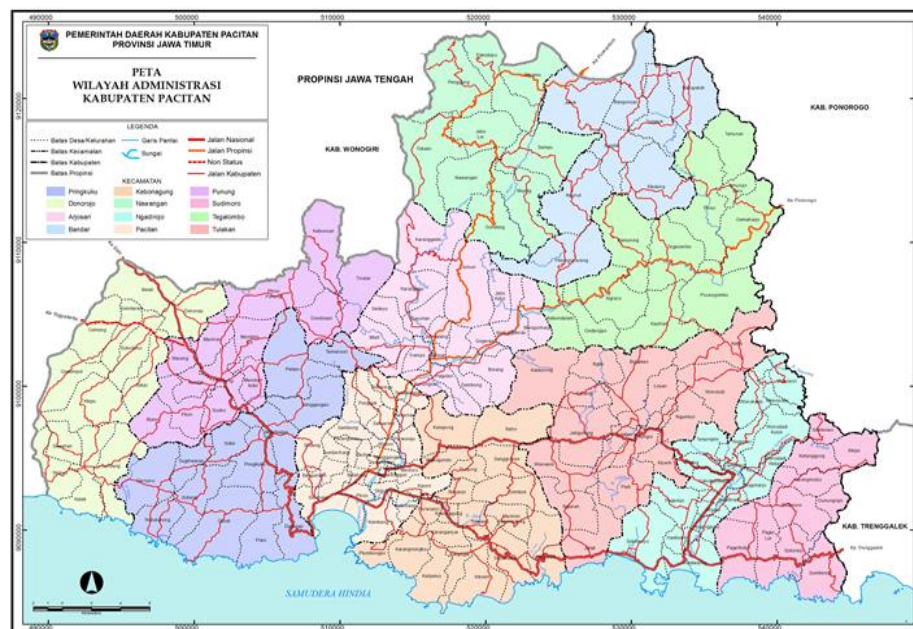
Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 07° 55’ - 08° 17’ Lintang Selatan 110° dan 55’ - 111° 25’ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Pacitan memiliki tujuh wilayah kecamatan yang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 70,1 km. Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kabupaten Pacitan masuk dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggiannya mencapai 1231 meter dari permukaan laut yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar adalah untuk pertanian, luasnya mencapai kurang lebih 9,38% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Gambar 6 Peta Administratif Kabupaten Pacitan



Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 2) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 3) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 4) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 5) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Grindulu, DAS Baksoko, DAS Lorog, DAS Pagotan, dan DAS Bawur. Luas DAS kurang lebih 1.500 km² dengan panjang kurang lebih 52 km. Berdasarkan keadaan alamnya yang sebagian besar berupa perbukitan, sumber air di Kabupaten Pacitan relatif sedikit. Sumber air terdapat di daerah-daerah dataran di sepanjang sungai yang mengalir arah Utara ke Selatan, dan di sepanjang pantai.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Iklim Kabupaten Pacitan adalah tropis tipe Monsoon dengan dua musim yaitu Musim Hujan (MH) berlangsung dari bulan Oktober - April dan Musim Kemarau (MK) dari bulan Mei - September. Pada musim hujan, curah hujan bulanan lebih dari 150 mm/bulan (151 – 511 mm/bln) sedangkan pada musim kemarau curah hujan adalah antara 33 – 90 mm/bln. Suhu udara berkisar antara 22,6°C – 32,1°C dengan suhu udara rata-rata adalah 28°C. Kelembaban udara tahunan berkisar antara 68%-96% dengan kelembaban rata-rata 77%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada Bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Tanah ladang : 20,42% atau 28.386,37 Ha
2. Pemukiman penduduk : 11,70% atau 16.254,76 Ha
3. Hutan : 2,99% atau 4.153,21 Ha
4. Sawah : 21,62% atau 30.045,55 Ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 43,28% atau 60.146,27 Ha

Sementara itu rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut.

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Kawasan Karst.
 - b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1) Kawasan sempadan pantai;
 - 2) Kawasan sempadan sungai;
 - 3) Kawasan sekitar mata air;
 - 4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
 - 1) Kawasan Cagar Alam;
 - 2) Kawasan Cagar Budaya.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi;
 - 2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - 3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 4) Kawasan rawan banjir.
- e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan ruang terbuka hijau;
 - 2) Kawasan terumbu karang.
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan maka wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pacitan dengan luas 13.033 ha (9,38%) dari luas wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi pertanian dengan pengairan menggunakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, dan tadah hujan (Tabel.T-II.2). Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi teknis berlokasi di Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, dan Ngadirojo. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi setengah teknis berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan pertanian yang menggunakan irigasi sederhana berlokasi di Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU berlokasi di Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan yang menggunakan sawah tadah hujan berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan mengenai lahan pertanian berkelanjutan dengan kriteria:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/atau
- c. Lahan tidak beririgasi.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan yang dilakukan pada:

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Tabel 197 Luas Kawasan Pertanian

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian					
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa /non PU	Tadah Hujan	Lain-nya
1	Donorojo	-	8	-	-	83	54
2	Punung	105	55	32	-	562	-
3	Pringkuku	-	57	95	11	319	-
4	Pacitan	94	243	190	15	664	-
5	Kebonagung	155	251	-	787	575	-
6	Arjosari	246	303	86	-	240	-
7	Tegalombo	137	187	165	-	728	-
8	Nawangan	223	294	315	-	848	251
9	Bandar	-	460	642	34	277	264
10	Tulakan	157	102	325	15	828	353
11	Ngadirojo	291	165	175	30	75	-
12	Sudimoro	-	97	140	15	210	-
TOTAL		1.408	2.222	2.165	907	5.409	922

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Kawasan peruntukan pertanian tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu peruntukan budidaya tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, dan biofarmaka; peruntukan budidaya peternakan; dan peruntukan budidaya perkebunan.

1) Kawasan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Biofarmaka

Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dikelompokkan menjadi kelompok palawija, kelompok hortikultura/sayuran, kelompok pertanian padi sawah, kelompok buah-buahan, dan kelompok biofarmaka. Kawasan pengembangan palawija berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan < 15%. Sedangkan kawasan pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan <15% dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya pertanian padi sawah berada di dataran datar sampai berombak, yang memiliki sumber air mencukupi. Kelompok buah-buahan dan biofarmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Biofarmaka adalah:

- a) Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo yang merupakan kawasan agropolitan. Kawasan ini diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak, sukun, jahe gajah dan janggolan (biofarmaka).
- b) Kecamatan Ngadirojo, Sudimoro diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo, durian, dukuh, pepaya, jeruk jambu biji, rambutan, sawo, nanas, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun.
- c) Kecamatan Pacitan diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo.
- d) Kecamatan Punung, Donorojo, Pringkuku diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- e) Kecamatan Kebonagung, Arjosari, Tulakan diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing.

2) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan menyebar pada seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan. Kawasan peruntukan peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan pengembangan, yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan kawasan pengembangan ternak sapi, kambing, dan domba.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan ternak kerbau adalah pada lahan dataran rendah, topografi datar 0-8%, dekat sumber air dan banyak sumber hijauan pakan ternak. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut terdapat pada beberapa desa di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Punung dan Kecamatan Pringkuku.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi, kambing, dan domba adalah di lahan kering, hawanya tidak terlalu panas, banyak sumber hijauan pakan ternak dan bukan daerah endemis *antrax*.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kawasan ini menempati lereng bergelombang hingga agak berbukit. Lokasi pengembangan kawasan perkebunan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Komoditi perkebunan yang ada dan sangat prospektif untuk dikembangkan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a) Tanaman semusim: missal kapas, dan
- b) Tanaman tahunan: seperti kelapa, panili, cengkeh, kopi, kakao.

Lokasi pengembangan kawasan perkebunan yaitu sebagai berikut:

- a) Komoditas Kapas, yaitu di Kecamatan Donorojo, Punung;
- b) Komoditas Kelapa, getah pinus, yaitu di Kecamatan Bandar, Ngadirojo ;
- c) Komoditas Kelapa, yaitu di Kecamatan Pacitan, Punung, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, Arjosari;
- d) Komoditas Cengkeh, yaitu di Kecamatan Kebonagung, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Bandar, Ngadirojo, Sudimoro;
- e) Komoditas Kopi, yaitu di Kecamatan Kebonagung, Nawangan, Bandar, Ngadirojo; dan
- f) Komoditas Kakao, yaitu di Kecamatan Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo.

2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya tambak dan kolam. Lokasi Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau terletak di pesisir pantai dan bukan ekosistem hutan bakau. Sedangkan lokasi Kawasan Budidaya Air Tawar terletak pada daerah yang mempunyai potensi air yang cukup untuk usaha budidaya, memiliki tekstur tanah halus, dan kualitas air baik. Kawasan peruntukan perikanan berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Arjosari, Pringkuku, Tegalombo, Nawangan dan Bandar. Potensi pengembangan budidaya perikanan tambak juga terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam kawasan sempadan pantai dan termasuk dalam kategori daerah rawan tsunami.

3. Kawasan Peruntukan Industri

Industri yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah industri yang mendukung kegiatan pertanian (terutama di kawasan agropolitan), pariwisata, perikanan, pertambangan dan industri rumah tangga. Lokasi yang



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

diperbolehkan untuk dibangun sebagai kawasan peruntukan industri adalah daerah yang memiliki kemiringan lereng sekitar 0-8% dari kecamatan-kecamatan berikut ini:

- 1) Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang dan batik tulis.
 - 2) Kecamatan Donorojo dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi batu aji/batu mulia, industri gula merah, dan pengolahan hasil tambang.
 - 3) Kecamatan Punung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi mainan anak yang terbuat dari kayu jati, dan pengolahan hasil tambang.
 - 4) Kecamatan Kebonagung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi keramik/gerabah seni dan industri gula merah.
 - 5) Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo dengan industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, batik tulis, dan industri pengolahan ikan.
 - 6) Kecamatan Nawangan dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertanian dan produksi sale pisang serta produksi anyaman bambu.
 - 7) Kecamatan Arjosari dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertaniandan pengolahan hasil tambang.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Pacitan merupakan kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Kawasan yang berpotensi wisata tersebut seperti obyek wisata pantai, goa, sejarah dan arkeologis, budaya dan obyek wisata pemandian.

Rencana perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan difokuskan pada penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai bagi pengembangan pariwisata di masing-masing kawasan wisata. Fokus kedua penguatan kapasitas masyarakat sebagai tuan rumah destinasi wisata dan pelestarian sumber daya wisata dan lingkungan daya tarik wisata.

2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Pacitan, fokus pada pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektronik (IT) ataupun non elektronik dan pengembangan citra kepariwisataan Pacitan sebagai destinasi wisata yang unik, aman, nyaman.

3) Pengembangan Industri Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada pengembangan kemitraan antar para pelaku industri wisata dalam rangka menunjang destinasi Pacitan.

4) Pengembangan Kelembagaan Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Pengembangan kelembagaan pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada pengembangan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Pacitan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah kawasan wisata alam. Kawasan wisata alam terdiri atas daya tarik wisata goa, wisata air, dan wisata pantai. Wisata goa yang menjadi andalan di Kabupaten Pacitan adalah Goa Gong dan Goa Tabuhan di Kecamatan Punung. Wisata air yang menjadi daya tarik di Kabupaten Pacitan adalah wisata pemandian air hangat “Tirto Husodo” di Kecamatan Arjosari. Wisata pantai yang menjadi ikon Kabupaten Pacitan adalah Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo, Pantai Srau dan Pantai Watukarung di Kecamatan Pringkuku, Pantai Buyutan di Kecamatan Donorojo, Pantai Taman di Kecamatan Ngadirojo, dan Pantai Pancer Door di Kecamatan Pacitan.

5. Kawasan Peruntukan Permukiman

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Pacitan memiliki kecenderungan berkembang secara linier, diantaranya permukiman di sepanjang jalur kolektor primer. Permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan merupakan permukiman yang sebagian besar kegiatannya bukan pertanian yaitu terletak di Kecamatan Pacitan. Selain itu juga diperkirakan adanya desa-desa yang akan tumbuh pesat akibat adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yaitu desa-desa di Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan Ngadirojo yang dilalui oleh JLS.

6. Potensi Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pacitan sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Tetaken, Labuh Laut, Ceprotan, Mantu Kucing, Baritan, Pethik Pari, Tangkepan, Entas-entas, Sutononggo, Adu Kelapa dan Kirab Pusaka Hari Jadi Kabupaten Pacitan. Seni Tradisional seperti Rontek, Kethek Ogleng, Wayang Beber, Jaranan Pegon, dan Senthewere.

Peninggalan budaya di Kabupaten Pacitan seperti Makam Setroketipo, Makam Kanjeng Jimat, Makam Buwono Keling, Makam Syeh Brubuh, Museum Geopark, dan Laboratorim Prasejarah di Kecamatan Punung.

Berkenaan dengan hal di atas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

6.1.4 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama empat tahun terakhir yang disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 198 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin 2014-2017

Usia (Tahun)	2014			2015			2016			2017		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0-4	18.487	17.568	36.055	18.140	19.292	35.432	18.949	17.954	36.903	18.986	17.982	36.968
5-9	19.214	18.155	37.369	19.041	17.985	37.026	19.510	18.430	37.940	19.548	28.457	38.005
10-14	21.351	20.099	41.450	21.136	19.898	41.034	21.800	20.490	42.290	21.843	20.522	42.365
0-14	59.052	55.822	114.874	58.317	57.175	113.492	60.259	56.874	117.133	60.377	56.961	117.338
%	22,02	19,84	20,91	21,69	20,13	20,79	22,60	26,74	24,43	22,35	20,11	21,20
15-19	20.111	18.003	38.114	20.036	17.887	37.923	20.272	18.223	38.495	20.312	18.251	38.563
20-24	17.051	17.357	34.408	17.066	17.299	34.365	17.153	17.521	34.674	17.183	17.548	34.731
25-29	16.003	16.865	32.868	15.873	16.689	32.562	16.315	17.263	33.578	16.345	17.288	33.633
30-34	15.416	16.777	32.193	15.172	16.488	31.660	15.745	17.109	32.854	15.775	17.135	32.910
35-39	18.837	20.829	39.666	18.646	20.702	39.348	19.207	21.131	40.338	19.245	21.164	40.409
40-44	21.173	22.390	43.563	21.028	22.233	43.261	21.441	22.681	44.122	21.484	22.723	44.207



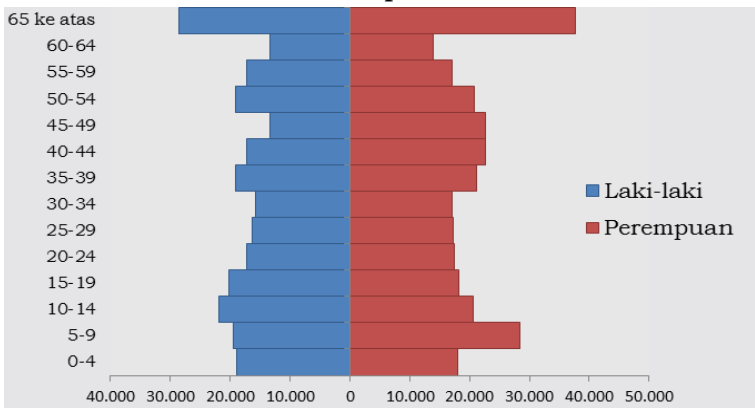
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Usia (Tahun)	2014			2015			2016			2017		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
45-49	21.268	22.547	43.815	21.387	22.664	44.051	21.263	22.542	43.805	21.309	22.585	43.894
50-54	19.058	21.145	40.203	19.329	21.602	40.931	15.973	20.829	39.802	19.016	20.873	39.889
55-59	17.548	17.696	35.244	17.960	18.339	36.299	17.228	17.107	34.335	17.271	17.143	34.414
60-64	13.746	14.291	28.055	14.356	14.954	24.310	13.250	13.897	27.147	13.285	13.928	27.213
15-64	180.211	187.900	368.129	180.853	188.857	364.710	177.847	118.303	366.150	181.225	188.638	369.863
%	67,20	66,80	67,00	67,26	66,48	66,80	66.70	55.62	76.39	67,07	66,61	66,84
65 ke atas	28.902	37.576	66.478	29.726	38.058	67.784	28.510	37.514	66.024	28.590	37.597	66.187
%	10,78	13,36	12,10	11,05	13,40	12,41	10.69	17.63	13.77	10,58	13,28	11,96
Jumlah	268.165	281.298	549.481	268.896	284.090	545.986	266.616	212.691	479.307	270.192	283.196	553.388

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan 2018, jumlah penduduk pertengahan Tahun 2014 mencapai 549.481 jiwa dan pada Tahun 2017 mencapai 553.388 jiwa atau mencatat rata-rata pertumbuhan penduduk Tahun 2016-2017 sekitar 0,20%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung turun, dari 67% dari total penduduk pada Tahun 2014 menjadi 66,84% pada Tahun 2017, sedangkan pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung meningkat dari 20,91% dari total penduduk pada Tahun 2014 menjadi sekitar 21,20% pada tahun 2017. Struktur penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 7 Struktur penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017
Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan penduduk tipe stasioner cenderung konstan atau tetap, sebagaimana terdapat di negara-negara maju. Jumlah penduduk paling tinggi terdapat pada kelompok umur 45-49 tahun yang merupakan usia produktif. Adapun distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada tabel T.II.6 sebagai berikut.

Tabel 199 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Donorojo	16.396	18.140	34.536
2	Punung	15.932	17.501	33.433
3	Pringkuku	14.274	15.715	29.989
4	Pacitan	39.258	41.349	80.607
5	Kebonagung	20.384	21.620	42.004
6	Arjosari	19.136	20.175	39.311
7	Nawangan	22.271	23.241	45.512
8	Bandar	21.393	21.687	43.080
9	Tegalombo	24.398	25.202	49.600
10	Tulakan	38.580	39.374	77.954



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

11	Ngadirojo	22.785	23.660	46.445
12	Sudimoro	15.385	15.532	30.917
Kab. Pacitan		270.192	283.196	553.388

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

Disisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

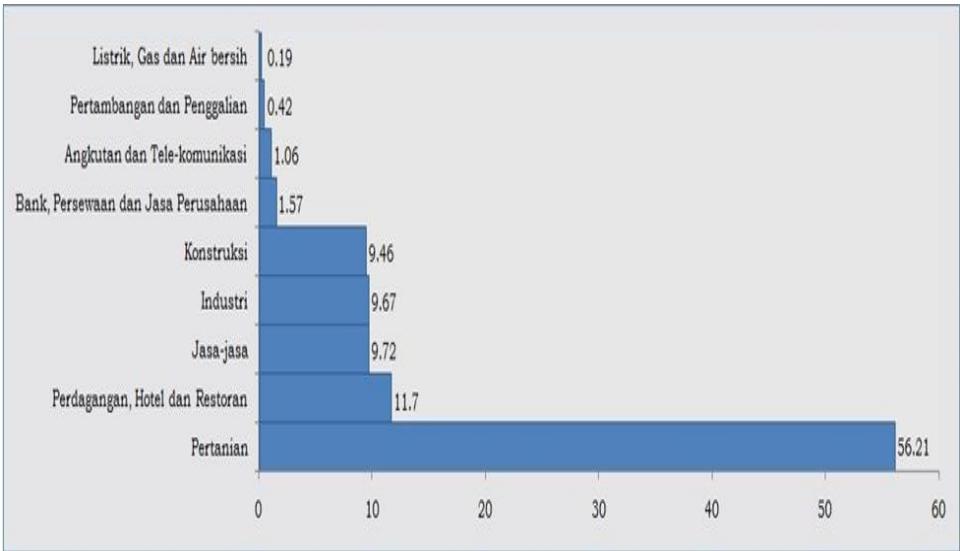
Tabel 200 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha	2014		2015		2016*		2017	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	228.860	66,28	201.770	57,69	n/a	n/a	196.345	56,21
Pertambangan dan Penggalian	1.561	0,45	4.389	1,25	n/a	n/a	1.476	0,42
Industri	30.112	8,72	45.490	13,01	n/a	n/a	33.781	9,67
Listrik, Gas dan Air bersih	419	0,12	421	0,12	n/a	n/a	677	0,19
Konstruksi	16.742	4,85	13.793	3,94	n/a	n/a	33.029	9,46
Perdagangan, Hotel dan Restoran	34.474	9,98	44.837	12,82	n/a	n/a	40.853	11,70
Angkutan dan Telekomunikasi	5.459	1,58	4.711	1,35	n/a	n/a	3.705	1,06
Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.255	0,94	2.871	0,82	n/a	n/a	5.473	1,57
Jasa-jasa	24.388	7,06	31.477	9,00	n/a	n/a	33.941	9,72
Jumlah	345.270	100	349.759	100	n/a	n/a	349.280	100

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-jasa), sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.

Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 201 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016*	2017	2018
1	Tidak/ Belum Sekolah, Tidak/ BelumTamat SD/ MI (%)	115.329 24,28	95.809 16,58	n/a n/a	144.627 24,84	141.351 23,90
2	Tamat SD/ MI (%)	174.421 36,72	44.395 7,68	n/a n/a	225.109 38,66	230.594 38,99
3	SLTP (SMP/ MTs) (%)	100.465 21,15	232.601 40,26	n/a n/a	112.714 19,36	114.942 19,44
4	SLTA (SMU/ SMK/ MA) (%)	64.059 13,49	110.015 19,04	n/a n/a	78.528 13,49	82.083 13,88
5	D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/PT) (%)	20.678 4,35	79.773 6,44	n/a n/a	21.297 3,66	22.420 3,79
Jumlah (%)		474.952 100	562.593 100	n/a n/a	582.275 100	591.390 100

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kedaerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi pemerintah daerah sebagai berikut.

- 1. Bupati Pacitan;
- 2. Sekretaris Daerah Pacitan;
- 3. Wakil Bupati Pacitan;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 6. Asisten Administrasi Umum;
- 7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
- 8. Bagian Hukum;
- 9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 10. Bagian Perekonomian;
- 11. Bagian Pembangunan;
- 12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 13. Bagian Umum;
- 14. Bagian Organisasi;
- 15. Bagian Hubungan Masyarakat;
- 15. Dinas Pendidikan;
- 16. Dinas Kesehatan;
- 17. Rumah Sakit UmumDaerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
- 18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 20. Dinas Sosial;
- 21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 22. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 24. Dinas Perhubungan;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

25. Dinas Lingkungan Hidup;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
28. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika;
33. Dinas Perpustakaan ;
34. Dinas Pangan;
35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
36. Dinas Pertanian;
37. Dinas Perikanan;
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Sekretariat Daerah;
40. Sekretariat DPRD;
41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
43. Inspektorat;
44. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
45. Badan Pendapatan Daerah;
46. Kecamatan Donorojo;
47. Kecamatan Punung;
48. Kecamatan Pringkuku;
49. Kecamatan Pacitan;
50. Kecamatan Kebonagung;
51. Kecamatan Arjosari;
52. Kecamatan Nawangan;
53. Kecamatan Bandar;
54. Kecamatan Tegalombo;
55. Kecamatan Tulakan;
56. Kecamatan Ngadirojo;
57. Kecamatan Sudimoro;
58. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
59. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
60. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- 1) Dua Sekretariat, yaitu:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
2. Satu Inspektorat:
 - a) Inspektorat
3. Enam Badan, yaitu:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d) Badan Pendapatan Daerah;
 - e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dua Puluh (20) Dinas, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - j) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - o) Dinas Perhubungan;
 - p) Dinas Lingkungan Hidup;
 - q) Dinas Pangan;
 - r) Dinas Perikanan;
 - s) Dinas Pertanian;
 - t) Dinas Perpustakaan.
5. Satu Lembaga Lain, yaitu:
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:
- a) Kecamatan Pacitan;
 - b) Kecamatan Kebonagung;
 - c) Kecamatan Pringkuku;
 - d) Kecamatan Punung;
 - e) Kecamatan Donorojo;
 - f) Kecamatan Tulakan;
 - g) Kecamatan Ngadirojo;
 - h) Kecamatan Sudimoro;
 - i) Kecamatan Arjosari;
 - j) Kecamatan Tegalombo;
 - k) Kecamatan Nawangan;
 - l) Kecamatan Bandar.
7. Satu RSUD
- a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1. Kerjasama Antar Daerah;
- 2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 3. Koordinasi Dengan Instansi *Vertikal* di Daerah;
- 4. Pembinaan Batas Wilayah;
- 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 adalah sengketa terkait kepegawaian, melalui perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Penggugat SARTANA, SPd dkk melawan Bupati Pacitan, dengan Nomor Perkara 87/G/2020/PTUN.Sby tanggal 4 Juni 2020 dengan obyek sengketa empat Keputusan Bupati Pacitan, sebagai berikut:

- 1) Nomor 188.45/668/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Sartana, S.Pd. dengan NIP 196806281994121001;
- 2) Nomor 188.45/669/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Drs. Setiyadi dengan NIP 196107201988111001;
- 3) Nomor 188.45/670/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Suwarno, S.Pd. dengan NIP 196205141988031006; dan
- 4) Nomor 188.45/671/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Drs. Endro Sukmo dengan NIP 196308291984031002.

Keputusan tersebut diatas merupakan Keputusan Bupati pacitan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan Bupati Pacitan pada tanggal 29 April 2019. Terhadap perkara tersebut prosesnya melalui 2 (dua) jalur yaitu secara Non litigasi dan secara litigasi / jalur pengadilan, yaitu:

6.3.1 Non Litigasi

- 1) Sartana, SPd dkk mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada Bupati Pacitan, dengan surat Nomor 0779/PK-SKB/ADV-B5/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, perihal Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pacitan;
- 2) Surat Permohonan Keberatan tersebut, Bupati sudah memberikan balasan melalui Surat Bupati Pacitan Nomor 888/318/408.54/2019 tanggal 23 Juli 2019, perihal Jawaban Permohonan Keberatan, dengan jawaban bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Bupati Pacitan;
- 3) Selanjutnya Sartana, SPd dkk mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada DPRD Kabupaten Pacitan, dan terhadap Permohonan Banding tersebut, DPRD Kabupaten Pacitan telah mengirimkan surat balasan dengan Nomor 170/262A/408.25/2020 tanggal 28 Pebruari 2010, perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi, dengan isi pokok jawaban bahwa permohonan banding administrasi atas nama Sartana, SPd dkk tidak dapat ditindaklanjuti. Sebagai penggugat adalah Joko Prabanto d.k.k. (pemegang sertifikat atas tanah).

6.3.2 Pengadilan Tata Usaha Negara

Sartana, SPd dkk mendaftarkan gugatannya ke PTUN dengan Nomor Perkara Nomor 93/ G/2019/ PTUN.Sby tanggal 15 Juli 2019 melawan Bupati Pacitan dengan obyek sengketa 4 Keputusan Bupati sebagai berikut:

- 1) Nomor 188.45/668/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Sartana, S.Pd. dengan NIP 196806281994121001;
- 2) Nomor 188.45/669/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Drs. Setiyadi dengan NIP 196107201988111001;
- 3) Nomor 188.45/670/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Suwarno, S.Pd. dengan NIP 196205141988031006; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

- 4) Nomor 188.45/671/KPTS/408.12/2019, yaitu Keputusan Bupati untuk atas nama Drs. Endro Sukmo dengan NIP 196308291984031002.

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan Bupati Pacitan pada tanggal 29 April 2019.

Terhadap perkara Nomor 93/ G/2019/ PTUN.Sby tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim memberikan Putusan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat belum melakukan upaya banding administrasi;

- 1) Kemudian Penggugat (Sartana SPd, dkk) melakukan upaya dengan mengirim surat permohonan keberatan kepada Bupati Pacitan dan selanjutnya mengirimkan surat permohonan banding administrasi kepada DPRD Kabupaten Pacitan, dengan hasil ditolak/tidak dapat ditindaklanjuti;
- 2) Selanjutnya Sartana SPd, dkk mengajukan gugatannya ke PTUN untuk yang kedua kalinya, dengan perkara Nomor 87/G/2020/PTUN.Sby pada tanggal 4 Juni 2020 dengan obyek sengketa yang sama, yaitu 4 Keputusan Bupati Pacitan sebagaimana tersebut di atas, untuk dicabut dan dilakukan pengangkatan kembali Penggugat sebagai PNS, dan memberikan gaji Penggugat selama diberhentikan;
- 3) Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Pacitan;
- 4) Terhadap perkara TUN tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan putusan Bupati Pacitan untuk mencabut Keputusan Bupati obyek sengketa dan mengangkat kembali PNS atas nama Sartana SPd dkk sesuai jabatannya seperti semula sebagai PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru;
- 5) Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Bupati Pacitan tidak mengajukan banding, sehingga untuk perkara TUN sekarang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

6.4 Catatan Penting Lainnya Terkait Pandemi Covid-19

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

6.1.1 Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/408.12/2020

6.1.2 Melakukan Percepatan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* dengan rincian sebagai berikut:

1) Penanganan Kesehatan

Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bidang kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.482.398.810,00 dan terealisasi sebesar Rp41.176.910.062,88 atau 59% yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Darsono, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, dan Kecamatan.

2) Penanganan Dampak Ekonomi

Untuk penanganan dampak ekonomialokasikan anggaran sebesar Rp67.250.204.273,00 dan terealisasi sebesar Rp62.345.058.456,36 atau 93% yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Kecil Menengah, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Sosial Safety Net*

Penanganan dampak sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.684.249.502,00 dan terealisasi sebesar Rp7.631.275.431,00 atau 99% yang dilaksanakan Dinas Sosial dan BPKAD sebagai PPKD.

Adapun rincian Kinerja Bidang Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial untuk pencegahan dan / atau Penanganan Covid-19 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 13**.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan meskipun ditengah situasi pandemi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi namun proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat melengkapi masukan yang akan dilaksanakan untuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

